



# RKPD TAHUN 2022

## PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

"PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, REFORMASI BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR"





WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### RKPD

### Pasal 2

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Daerah Tahun 2022; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Daerah sebagai penyusunan rancangan APBD Tahun 2022.

### Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2022 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. prioritas Pembangunan Daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi *corona virus disease* 2019.



- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - BAB VII : Penutup.
- (3) RKPD Tahun 2022 disusun dengan mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- (4) Rincian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### BAB IV PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah atau keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Juli 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1    Latar Belakang.....	I-1
1.2    Dasar Hukum .....	I-2
1.3    Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
1.4    Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5    Sistematika Rancangan RKPD .....	I-7
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1    Kondisi Umum Kondisi Daerah .....	II-1
2.2    Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-137
2.3    Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-160
<b>BAB III</b>	
<b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1.    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.2.    Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-5
<b>BAB IV</b>	
<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1    Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2    Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 .....	IV-13
<b>BAB V</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
5.1.    Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	V-1
5.2.    Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2022.....	V-24
5.3.    Inovasi Pemerintah Kota Balikpapan.....	V-265
<b>BAB VI</b>	
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1    Target Indikator Kinerja Utama .....	VI-1
6.2    Capaian Indikator Kinerja Utama .....	VI-3
6.3    Perbandingan Realisasi Terhadap Target IKU Tahun 2020 .....	VI-5
<b>BAB VII</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>VII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan .....	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) .....	II-5
Tabel 2.3	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan .....	II-5
Tabel 2.4	Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 .....	II-8
Tabel 2.5	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Di Kota Balikpapan .....	II-12
Tabel 2.6	Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2020 .....	II-15
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-19
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (miliar rupiah) .....	II-20
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Persen)..	II-21
Tabel 2.10	Ormas dan Paguyuban Kota Balikpapan 2021 .....	II-36
Tabel 2.11	Data Fasilitas Umum Olahraga Di Kota Balikpapan .....	II-37
Tabel 2.12	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-38
Tabel 2.13	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-39
Tabel 2.14	Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2020 .....	II-43
Tabel 2.15	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-45
Tabel 2.16	Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-46
Tabel 2.17	Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-47
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020 .....	II-48
Tabel 2.19	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020 .....	II-49
Tabel 2.20	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2020 .....	II-49
Tabel 2.21	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-50
Tabel 2.22	Sumber Air Baku Kota Balikpapan .....	II-51
Tabel 2.23	Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-51
Tabel 2.24	Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2015-2020 .....	II-52
Tabel 2.25	Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-53
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2017 - 2020 .....	II-54
Tabel 2.27	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2020 .....	II-54
Tabel 2.28	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-55
Tabel 2.29	Capaian Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan .....	II-56
Tabel 2.30	Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan .....	II-57
Tabel 2.31	Luas Kawasan Kumuh (Ha) .....	II-57
Tabel 2.32	Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan dan diselesaikan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2020 .....	II-58
Tabel 2.33	Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-59



Tabel 2.34	Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-60
Tabel 2.35	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-60
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020 .....	II-61
Tabel 2.37	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020.....	II-63
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2016 – 2020 .....	II-65
Tabel 2.39	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur .....	II-66
Tabel 2.40	Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Balikpapan .....	II-67
Tabel 2.41	Laporan Jenis Kasus Kekerasan terhadap Anak.....	II-68
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020.....	II-70
Tabel 2.43	Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritib, Embung Aji Raden dan ITK.....	II-71
Tabel 2.44	Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2017-2020.....	II-78
Tabel 2.45	Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2017 – 2020.....	II-78
Tabel 2.46	Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2020.....	II-79
Tabel 2.47	Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020 .....	II-80
Tabel 2.48	Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020.....	II-80
Tabel 2.49	Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-81
Tabel 2.50	Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-82
Tabel 2.51	Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2017 - 2020 .....	II-82
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-84
Tabel 2.53	Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-84
Tabel 2.54	Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan .....	II-85
Tabel 2.55	Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020.....	II-86
Tabel 2.56	Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-87
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020.....	II-89
Tabel 2.58	Strategi Implementasi <i>Smart Governance</i> .....	II-90
Tabel 2.59	Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi <i>Smart Branding</i> .....	II-91
Tabel 2.60	Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi <i>Smart Economy</i> .....	II-92
Tabel 2.61	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dalam Dimensi <i>Smart Living</i> .....	II-93
Tabel 2.62	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dalam Dimensi <i>Smart Society</i> .....	II-94
Tabel 2.63	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dalam Dimensi <i>Smart Environment</i> .....	II-95



Tabel 2.64	Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-96
Tabel 2.65	Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-96
Tabel 2.66	Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-96
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2016-2020 .....	II-97
Tabel 2.68	Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-98
Tabel 2.69	Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (juta rupiah) .....	II-98
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-100
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2017-2020 .....	II-101
Tabel 2.72	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2017 – 2020 .....	II-102
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020 .....	II-102
Tabel 2.74	Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan .....	II-103
Tabel 2.75	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi .....	II-104
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 .....	II-105
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2016-2020 .....	II-106
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2020 .....	II-107
Tabel 2.79	Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan .....	II-107
Tabel 2.80	Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's .....	II-109
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020 .....	II-110
Tabel 2.82	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB .....	II-111
Tabel 2.83	Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-111
Tabel 2.84	Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-111
Tabel 2.85	Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2017 – 2020 .....	II-112
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 – 2020 .....	II-113
Tabel 2.87	Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.88	Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-113
Tabel 2.89	Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-114
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2017 – 2020 .....	II-115
Tabel 2.91	Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-115
Tabel 2.92	Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-115
Tabel 2.93	Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020 .....	II-116
Tabel 2.94	Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.96	Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035 .....	II-118
Tabel 2.97	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-118
Tabel 2.98	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2020 ....	II-119
Tabel 2.99	Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggian Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-120
Tabel 2.100	Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-120
Tabel 2.101	Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan	

Tutupan Lahan.....	II-120
Tabel 2.102 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-121
Tabel 2.103 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	II-121
Tabel 2.104 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-122
Tabel 2.105 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-122
Tabel 2.106 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-123
Tabel 2.107 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020...II- 123	
Tabel 2.108 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMP Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-124
Tabel 2.109 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-126
Tabel 2.110 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan .....	II-127
Tabel 2.111 Capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2020 .....	II-137
Tabel 2.112 Capaian Kinerja Rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2020.....	II-139
Tabel 2.113 Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan Semester II Tahun 2020 .....	II-143
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2020 (Semester II).....	II-145
Tabel 2.115 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..	II-171
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005).....	III-6
Tabel 3.2 Target Pendapatan Tahun 2021 – 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019) .....	III-6
Tabel 3.3 Kontribusi Pendapatan Daerah 2018-2020 .....	III-7
Tabel 3.4 Kontribusi Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Tahun 2017-2020.....	III-7
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005) .....	III-8
Tabel 3.6 Target Belanja Tahun 2021 – 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019).....	III-9
Tabel 3.7 Alokasi Belanja Mandatory Tahun 2022 .....	III-9
Tabel 3.8 Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005).....	III-10
Tabel 3.9 Target Pembiayaan Tahun 2021 – 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019) .....	III-10
Tabel 4.1 Target Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	IV-6
Tabel 4.3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan.....	IV-8
Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur.....	IV-9
Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta Fokus Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	IV-10
Tabel 4.6 Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Per Perangkat Daerah ...	IV-12
Tabel 4.7 Permasalahan Strategis Pembangunan Kota Balikpapan .....	IV-13
Tabel 4.8 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan.....	IV-20





Tabel 4.9	Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 Dengan RPJMN 2020-2024.....	IV-21
Tabel 4.10	Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2022 .....	IV-72
Tabel 5.1	Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022.....	V-1
Tabel 5.2	Pagu Indikatif Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	V-24
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan .....	VI-1
Tabel 6.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.....	VI-3
Tabel 6.3	Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.....	VI-4
Tabel 6.4	Tabel Predikat Penilaian IKLH .....	VI-12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	I-2
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-4
Gambar 1.3	Luas Pola Ruang Kota Balikpapan berdasarkan RTRW 2012-2032 .....	I-6
Gambar 2.1	Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan .....	II-1
Gambar 2.2	Peta Posisi Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN .....	II-2
Gambar 2.3	Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan .....	II-3
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020.....	II-3
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 Periode 2021-2050.....	II-3
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050.....	II-4
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020.....	II-4
Gambar 2.8	Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020.....	II-4
Gambar 2.9	Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050.....	II-5
Gambar 2.10	Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050 .....	II-5
Gambar 2.11	Peta Kelerengan Kota Balikpapan .....	II-6
Gambar 2.12	Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan .....	II-7
Gambar 2.13	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan ...	II-13
Gambar 2.14	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara .....	II-14
Gambar 2.15	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur .....	II-14
Gambar 2.16	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan .....	II-14
Gambar 2.17	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat .....	II-14
Gambar 2.18	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah .....	II-14
Gambar 2.19	Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota .....	II-14
Gambar 2.20	Peta Sebaran Kawasan Titik Banjir di Kota Balikpapan .....	II-15
Gambar 2.21	Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050).....	II-16
Gambar 2.22	Peta Hasil Validasi Titik Rentan Bahaya Banjir. ....	II-16
Gambar 2.23	Peta Rawan Bencana Tanah Longsor .....	II-17
Gambar 2.24	Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan. (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050).....	II-17
Gambar 2.25	Peta Hasil Validasi Titik Rentan Bahaya Longsor.....	II-18
Gambar 2.26	Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan.....	II-18
Gambar 2.27	Peta hasil validasi titik rentan bahaya kekeringan. ....	II-18
Gambar 2.28	Peta Risiko Kekeringan Kota Balikpapan.....	II-19
Gambar 2.29	Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020.....	II-20
Gambar 2.30	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 (%) .....	II-22
Gambar 2.31	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020 (Persen) .....	II-22
Gambar 2.32	Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional .....	II-23



Gambar 2.33	Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional .....	II-23
Gambar 2.34	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-24
Gambar 2.35	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-24
Gambar 2.36	Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Balikpapan dan Kota-Kota Besar Nasional Tahun 2020 .....	II-24
Gambar 2.37	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-25
Gambar 2.38	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Balikpapan dan Kota-Kota Besar Nasional Tahun 2020 .....	II-25
Gambar 2.40	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-26
Gambar 2.39	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-26
Gambar 2.41	Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan .....	II-27
Gambar 2.42	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-28
Gambar 2.43	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-28
Gambar 2.44	Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2020 ...	II-29
Gambar 2.45	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-29
Gambar 2.46	RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020 .....	II-30
Gambar 2.47	RLS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2020 .....	II-30
Gambar 2.48	Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-31
Gambar 2.49	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-31
Gambar 2.50	HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020 .....	II-32
Gambar 2.51	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-33
Gambar 2.52	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020 .....	II-33
Gambar 2.53	Umur Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-34
Gambar 2.54	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2020 .....	II-35
Gambar 2.55	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 .....	II-35
Gambar 2.56	Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020 .....	II-38
Gambar 2.57	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020 .....	II-39
Gambar 2.58	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional di Kota Balikpapan tahun 2017-2020 .....	II-40
Gambar 2.59	Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan .....	II-41
Gambar 2.60	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kota Balikpapan tahun 2017-2020 .....	II-41
Gambar 2.61	Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2017-2020 .....	II-42
Gambar 2.63	Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-50
Gambar 2.63	Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 .....	II-52

Gambar 2.64	Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020.....	II-65
Gambar 2.65	Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak .....	II-68
Gambar 2.66	Indeks IKA, IKLH, ITH dan IKU Tahun 2016-2020 .....	II-75
Gambar 2.67	Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	II-75
Gambar 2.68	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-78
Gambar 2.69	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	II-80
Gambar 2.70	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 .....	II-100
Gambar 2.71	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan .....	II-110
Gambar 2.72	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribuan Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020.....	II-112
Gambar 2.73	Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020 .....	II-114
Gambar 3.1	Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 .....	III-1
Gambar 3.2	Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 .....	III-2
Gambar 3.3	Penyesuaian Target Indikator Makro Kalimantan Timur Tahun 2023.....	III-3
Gambar 3.4	Target Indikator Makro Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	III-5
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2022 .....	IV-1
Gambar 4.2	5 Misi Pembangunan Kepala Daerah terpilih .....	IV-1
Gambar 4.3	9 Program dan Sasaran Prioritas Kepala Daerah terpilih .....	IV-2
Gambar 4.4	Tujuh Prioritas Nasional .....	IV-4
Gambar 4.5	Tema RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ..	IV-5
Gambar 4.6	Fokus Pembangunan RKP Tahun 2022 .....	IV-5
Gambar 4.7	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022 .....	IV-6
Gambar 4.8	Rincian Capaian TPB Kota Balikpapan .....	IV-11
Gambar 4.9	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 ....	IV-15
Gambar 4.10	Program dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih ..	IV-15
Gambar 4.11	4 Prioritas Kota Balikpapan tahun 2022 .....	IV-16
Gambar 4.12	Penyebab, Permasalahan dan Langkah-langkah Penanganannya ..	IV-17
Gambar 4.13	Kawasan DAS Prioritas dan Rencana Keterpaduan Program DAS AMPAL .....	IV-17
Gambar 4.14	Ketersediaan Air Baku Serta Kebutuhannya Pada Tahun 2018-2021 Dan Proyeksinya Pada Tahun 2022-2026 .....	IV-18
Gambar 4.15	Ketersediaan Air Baku Di Kota Balikpapan .....	IV-18
Gambar 4.16	Isu dan Permasalahan di bidang Ekonomi Kreatif .....	IV-19
Gambar 4.17	Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM .....	IV-19
Gambar 4.18	Sub Sektor Prioritas Ekonomi di Kota Balikpapan.....	IV-19
Gambar 4.19	Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah Per Kecamatan .....	IV-19
Gambar 6.1	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 .....	VI-5
Gambar 6.2	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 .....	VI-6
Gambar 6.3	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup Tahun 2020 .....	VI-7
Gambar 6.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020.....	VI-7
Gambar 6.5	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020.....	VI-9



Gambar 6.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 .....	VI-9
Gambar 6.7	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 .....	VI-10
Gambar 6.8	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 .....	VI-11
Gambar 6.9	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 .....	VI-12
Gambar 6.10	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Livable City Index Tahun 2020 .....	VI-12
Gambar 6.11	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2020 .....	VI-13
Gambar 6.12	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini Ratio Tahun 2020.....	VI-14
Gambar 6.13	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2020 .....	VI-15
Gambar 6.14	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Tahun 2020 .....	VI-16
Gambar 6.15	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Tahun 2020 .....	VI-17
Gambar 6.16	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2020.....	VI-17
Gambar 6.17	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 .....	VI-18
Gambar 6.18	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2020.....	VI-18
Gambar 6.19	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Penilaian Kepatuhan Tahun 2020 .....	VI-19
Gambar 6.20	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 .....	VI-20

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan Akhir RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2022 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2022, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kota Balikpapan, RPJMD Kota Balikpapan dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.

Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

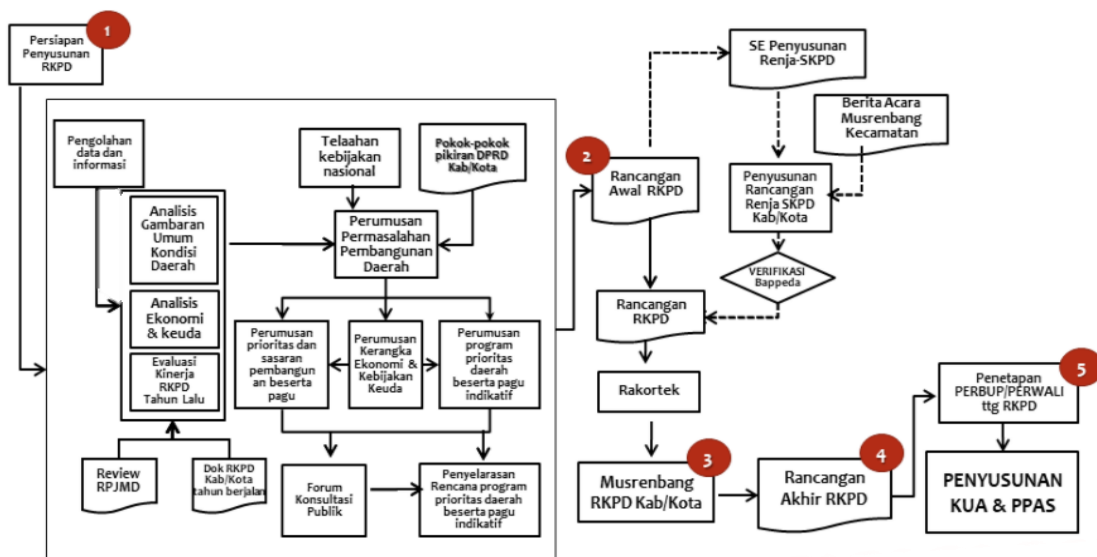
Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan



dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022**



## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;





Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu melihat keterkaitan RKPD Kota Balikpapan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023, RTRW Kota Balikpapan 2012-2032, serta dokumen perencanaan dari kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota Balikpapan. Berikut adalah penjabarannya secara lebih spesifik:

### **1.3.1. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022**

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan mengacu pada RKP Pusat Tahun 2022 sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan integrasi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP tahun 2022, terdapat 7 prioritas nasional yakni:

- a. memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- e. peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;
- f. pengentasan Kemiskinan; dan
- g. peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

### **1.3.2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Selain mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RKPD Kota Balikpapan juga harus mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat hierarki pemerintahan, dimana Kota Balikpapan terintegrasi dengan pembangunan dalam Provinsi Kalimantan Timur. Integrasi antara dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kota adalah wujud dari upaya untuk menciptakan keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah **REFORMASI STRUKTURAL DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH DALAM RANGKA MENYAMBUT IKN**. Adapun prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yaitu:

1. peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang mendukung Daya Saing SDM;
2. penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan dalam rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat;



3. peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor SDA Terbarukan dalam rangka penguatan Ekspor Komoditi Unggulan;
4. penguatan Konektivitas antar Daerah, Kawasan dan IKN; dan
5. percepatan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik.

### 1.3.3. RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Konsep penataan ruang di Kota Balikpapan berorientasi pada beberapa sektor yaitu industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya, dan perdagangan. Adapun implementasi dari pencapaian penataan ruang dilaksanakan melalui penguatan fungsi-fungsi pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar-kawasan, peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan kawasan budidaya, serta pengembangan kawasan strategis kota.

Peruntukan pola ruang di Kota Balikpapan didominasi oleh peruntukan kawasan lindung. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032 dimana luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 52,28% atau sekitar 26.316,28 Ha. Sedangkan untuk lahan untuk kawasan budidaya sebesar 47,41% atau sekitar 24.041,14 Ha. Khusus untuk kawasan budidaya, jika dijabarkan lebih detail, peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perumahan yaitu sebesar 10.779,86 Ha atau sekitar 21,42%. Lalu untuk kawasan industri yaitu seluas 4.736,99 Ha atau sekitar 9,41% dari total luas lahan. Selain itu peruntukan lainnya yang juga membutuhkan luas lahan cukup banyak adalah kawasan hutan lindung dengan proyeksi sebesar 14.781,46 Ha atau sekitar 29,37%.



**Gambar 1.3 Luas Pola Ruang Kota Balikpapan berdasarkan RTRW 2012-2032**

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Besarnya peruntukan untuk kawasan industri di Kota Balikpapan sesuai dengan arah kebijakan dari dua dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Balikpapan diarahkan mempunyai skala pelayanan tingkat nasional serta diarahkan untuk dapat menjadi wilayah maju dan mempunyai peran dominan terhadap perkembangan perekonomian Negara Indonesia. Beberapa kegiatan yang mempunyai skala pelayanan tingkat nasional adalah status Balikpapan yang merupakan produsen komoditi industri pengolahan minyak (1,3 juta ton) dalam

lingkup nasional. Produsen dan konsumen komoditi industri pengolahan non migas (852 ribu dan 679 ribu ton) dengan lingkup antar-pulau dan nasional. Dalam RTRW Provinsi disebutkan pula bahwa Kota Balikpapan diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Orde I, sehingga Balikpapan berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Nasional/Internasional.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan secara komprehensif pada tahun 2022 dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Balikpapan secara berkesinambungan.

### **1.4.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah:

- a. sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
- b. memberikan gambaran terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di Kota Balikpapan; dan
- c. sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

## **1.5 Sistematika Rancangan RKPD**

Sistematika penulisan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 terdiri dari:

- BAB I     Pendahuluan;
- BAB II    Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III   Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- BAB IV    Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V     Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI    Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- BAB VII   Penutup.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan.

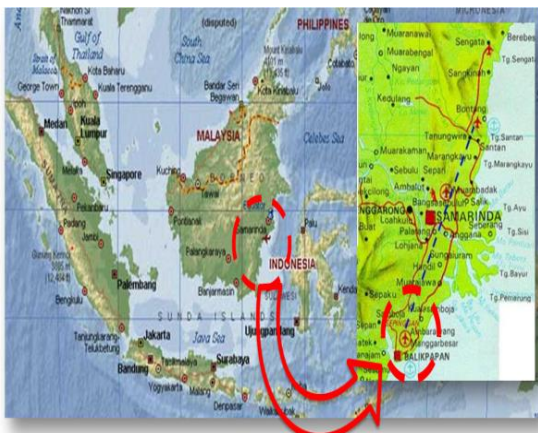
Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per hari. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggian, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai Pintu Gerbang IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

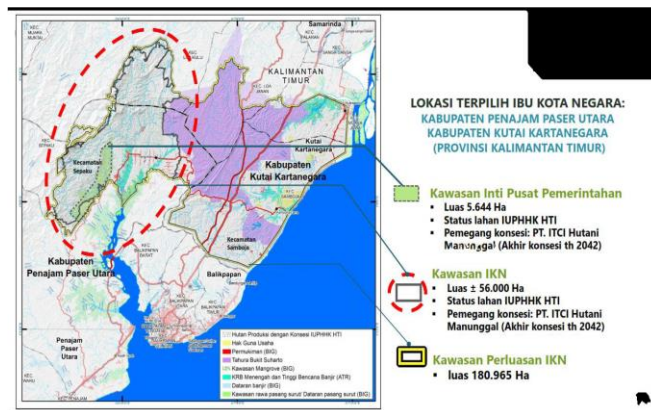


**Gambar 2.1** Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.



**Gambar 2.2** Peta Posisi Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN

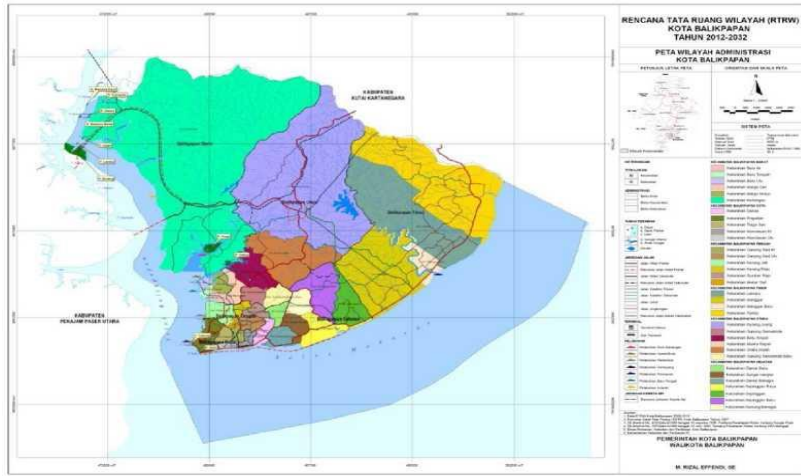
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan**

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
<b>Kecamatan Balikpapan Selatan</b>		<b>37,814</b>
1	Damai Baru	2,149
2	Damai Bahagia	3,708
3	Sepinggan Baru	10,618
4	Sungai Nangka	3,204
5	Sepinggan Raya	6,588
6	Gunung Bahagia	3,735
7	Sepinggan	7,812
<b>Kecamatan Balikpapan Kota</b>		<b>10,225</b>
1	Prapatan	3,141
2	Telaga Sari	2,538
3	Klandasan Ulu	0,89
4	Klandasan Ilir	1,435
5	Damai	2,221
<b>Kecamatan Balikpapan Timur</b>		<b>137,158</b>
1	Manggar	35,255
2	Manggar Baru	3,836
3	Lamaru	48,555
4	Teritip	49,512
<b>Kecamatan Balikpapan Tengah</b>		<b>11,074</b>
1	Gunung Sari Ilir	1,141
2	Gunung Sari Ulu	1,825
3	Mekar Sari	1,287
4	Karang Rejo	1,205
5	Sumber Rejo	2,205
6	Karang Jati	3,411
<b>Kecamatan Balikpapan Barat</b>		<b>174,952</b>
1	Baru Ilir	0,589
2	Margo Mulyo	1,845
3	Marga Sari	0,665
4	Baru Tengah	0,570
5	Baru Ulu	0,955
6	Kariangau	170,328
<b>Kecamatan Balikpapan Utara</b>		<b>132,107</b>
1	Gunung Samarinda	2,703
2	Muara Rapak	3,527

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
3	Batu Ampar	10,553
4	Karang Joang	93,035
5	Gunung Samarinda Baru	3,035
6	Graha Indah	19,254
<b>Total Luas</b>		<b>503,33</b>

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan



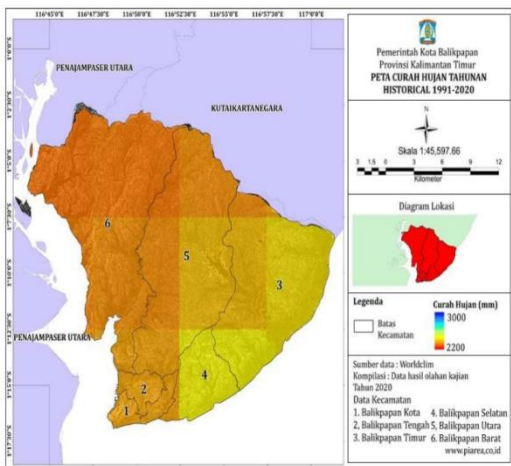
**Gambar 2.3 Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

### 2.1.1.1. Iklim

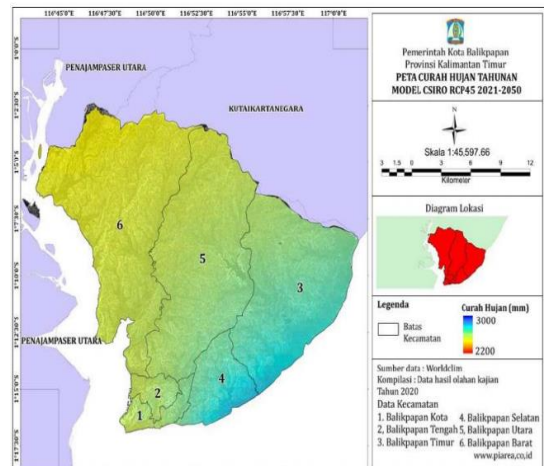
#### 1. Curah Hujan Kota Balikpapan

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang 2200 hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal 1991-2020 Kota Balikpapan dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan curah hujan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata. Sebaran curah hujan Kota Balikpapan meningkat dari rentang 2200-2400 mm, dimasa depan diproyeksi memiliki rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.



**Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020**

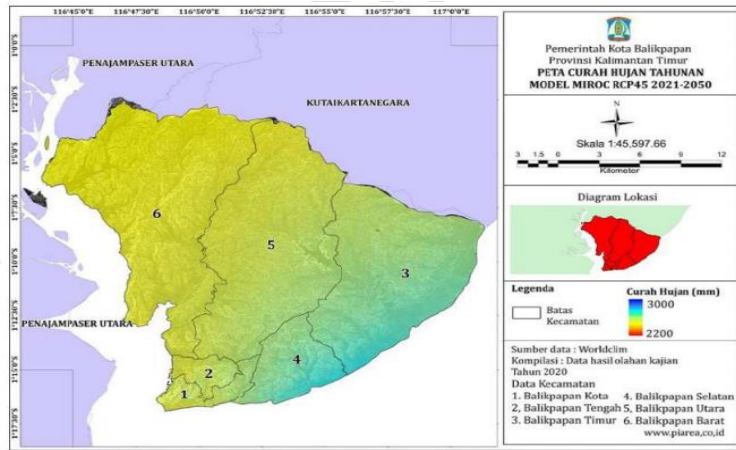
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



**Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 Periode 2021-2050**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

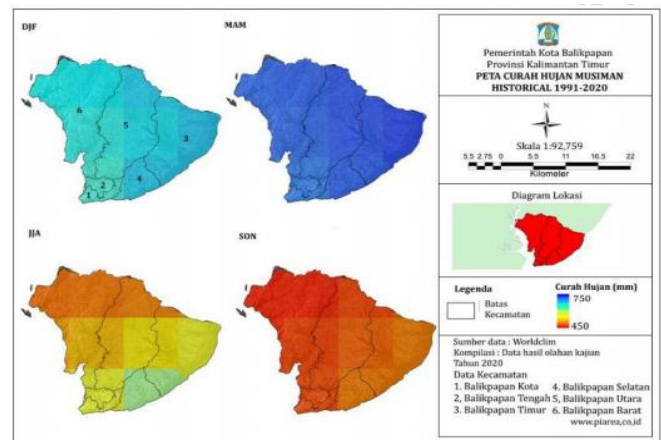




**Gambar 2.6** Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750 – 450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya. Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

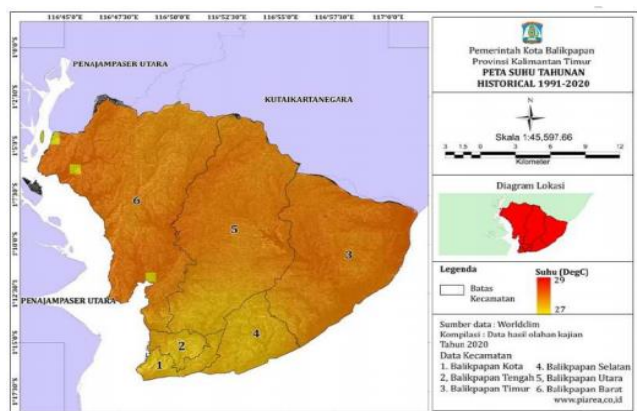


**Gambar 2.7** Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

## 2. Suhu Kota Balikpapan

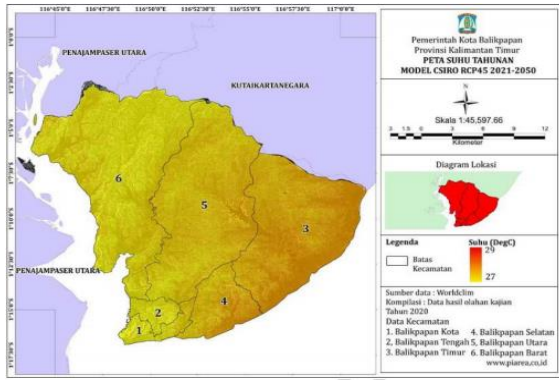
Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah (**Gambar 2.8**). Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebaran suhu



**Gambar 2.8** Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020

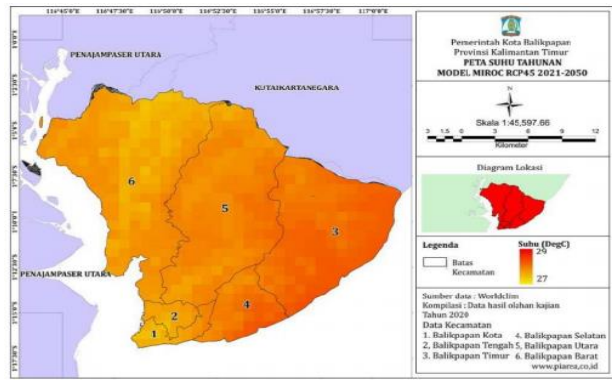
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

udara model CSIRO tahun 2021-2050 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991- 2020. Sebaran suhu udara model MIROC tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.



**Gambar 2.9** Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



**Gambar 2.10** Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

### 2.1.1.2. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

**Tabel 2.2** Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,86
2.	>10-20	17.260,00	34,29
3.	>20-100	26.090,57	51,85
<b>Jumlah</b>		<b>50.330,57</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

**Tabel 2.3** Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

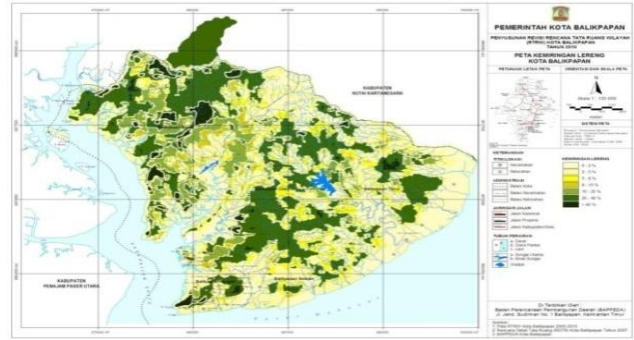
No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	14.01
2	> 2-15	3.325,00	6.61
3	> 15-40	21.305,57	42.33
4	> 40	18.650,00	37.05
<b>Jumlah</b>		<b>50.330,57</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Untuk mengetahui kondisi kelerengan Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi kelerengan Kota Balikpapan dalam bentuk peta kelerengan.

**a. Geologi**

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.



**Gambar 2.11 Peta Kelerengan Kota Balikpapan**

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

- Tanah pada *Group Aluvial*

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

- Tanah pada *Group Marin*

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Sumber.

- Tanah pada *Group Fluvio Marin*

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

1. Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.
2. Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

- Tanah pada *Group Volkan*

Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

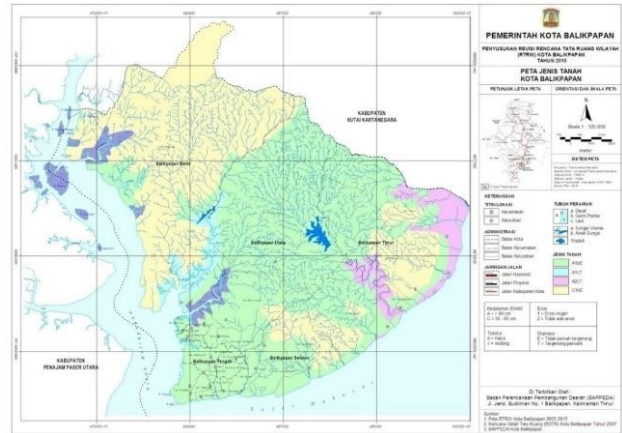
- Tanah pada *Group Tektonik/ Struktural*

Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
2. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.



3. Bentukannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
4. Bentukannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.
5. Bentukannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.



**Gambar 2.12 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan**  
 Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

**2.1.1.3. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032, rencana komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan budidaya seluas 50.746,76 ha. Jika dirinci lebih lanjut, peruntukan kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutang lindung, perluasan HLSW, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung. Total luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 19.194,08 ha atau 22,66% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun untuk kawasan budidaya peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perikanan. Total luas lahan untuk kawasan perikanan sebesar 16.663,55 ha atau sekitar 19,68% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan.

Salah satu peruntukan ruang pada kawasan perikanan adalah pengembangan kawasan minapolitan dengan luas sebesar 190,6 ha. Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan ditetapkan bahwa Kawasan Minapolitan Kota Balikpapan terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun pusat minapolitan Kota Balikpapan berada pada PPI/TPI Manggar dan pembagian kewasannya ada 3 yaitu:

1. Kawasan Wisata Pantai Segara Sari Manggar;
2. Perumahan Nelayan;
3. Kawasan Budidaya Tambak.

**Tabel 2.4 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032**

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
<b>I. KAWASAN LINDUNG</b>				
<b>A.</b>	<b>Kawasan Hutan Lindung</b>	<b>19,194.08</b>	<b>22.66</b>	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
<b>B.</b>	<b>Kawasan Perlindungan Bawah</b>	<b>920.25</b>	<b>1.09</b>	
1	Kawasan Resapan Air			
<b>C.</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>6,531.18</b>	<b>7.71</b>	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Pternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
<b>D.</b>	<b>Kawasan RTH Kota</b>	<b>529.78</b>	<b>0.63</b>	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
<b>E.</b>	<b>Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya</b>	<b>345.98</b>	<b>0.41</b>	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
<b>F.</b>	<b>Kawasan Jalur Migrasi Satwa</b>	<b>196.50</b>	<b>0.23</b>	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
<b>G.</b>	<b>Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut</b>	<b>6,222.30</b>	<b>7.35</b>	<b>Wil. Pesisir dan Laut</b>
1	Konservasi Pulau - Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
<b>TOTAL KAWASAN LINDUNG</b>		<b>33,940.07</b>	<b>40.08</b>	
<b>II. KAWASAN BUDIDAYA</b>				
<b>A.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>	<b>3,531.36</b>	<b>4.17</b>	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
<b>B.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>	<b>16,663.55</b>	<b>19.68</b>	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
<b>C.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perumahan</b>		<b>12.87</b>	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
<b>D.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa</b>	<b>2,523.58</b>	<b>2.98</b>	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
<b>E.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perkantoran</b>	<b>56.14</b>	<b>0.07</b>	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
<b>F.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>	<b>5,107.86</b>	<b>6.03</b>	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
<b>G.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>	<b>449.40</b>	<b>0.53</b>	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
<b>H.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan</b>	<b>264.47</b>	<b>0.31</b>	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
<b>I.</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum</b>	<b>10,821.83</b>	<b>12.78</b>	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
<b>J.</b>	<b>Kawasan Pendidikan</b>	<b>426.56</b>	<b>0.5</b>	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
<b>Total Kawasan Budidaya</b>		<b>50,746.76</b>	<b>59.92</b>	
<b>Total Keseluruhan Kawasan</b>		<b>84,686.84</b>	<b>100</b>	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

#### 2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan dilakukan melalui teknik kebijakan perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk menyinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Kota Baru Karang Joang;
2. Kawasan Industri Kariangau;
3. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
4. Kawasan Reklamasi Pantai; dan
5. Kawasan Kota Baru Teritip.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri atas:

1. Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat; dan
2. Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.



Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, tujuan dan kebijakan ruang di Kota Balikpapan adalah pengembangan pusat pelayanan. Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan, maka diusahakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, antara lain sebagai berikut:

a. Perikanan

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan menyimpan potensi sumberdaya yang terbarui (*renewable resources*), khususnya potensi sumber daya perikanan. Selain itu, Kawasan pesisir dan laut juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat, antara lain sebagai investasi yang memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja, serta sumber daya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan Balikpapan, tetapi juga di perairan Selat Makasar. Produk perikanan dan kelautan juga memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang terus meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur 2021-2041, kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP3K terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum, kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut, serta kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Lainnya yang Sesuai Dengan Peruntukan Kawasan. Kebijakan dan strategis rencana zonasi adalah sebagai berikut:

**1. Pengembangan Kawasan Konservasi**

Kawasan konservasi ini terdiri dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kawasan Konservasi Maritim. Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola berdasarkan rencana pengelolaan zonasi diantaranya, zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya yang menyesuaikan dengan pentukan kawasan, Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) ini salah satunya adalah KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara.

**2. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum**

Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi sub zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-2-P3KP) terdiri atas Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Adapun DLKr dan DLKp yang terdiri atas pelabuhan umum, Tersus dan STS (KPU-PL-DLK) meliputi Pelabuhan Balikpapan dan Teluk Balikpapan. KPU-PL-WKO di perairan terdiri atas PPI Manggar Baru, PPI Filial Klandasan dan PPI Kampung Baru Tengah. Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB) ada pada Blok East Kalimantan di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Blok Mahakam di perairan Teluk

Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Pada zona perikanan budaya dalam sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL) ada pada Teluk Balikpapan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur. Sedangkan pada zona perikanan tangkap dalam sub zona pelagis (KPU-PT0-P) meliputi Selat Makassar-Kota Balikpapan. Untuk zona bandar udara yaitu Bandar Udara Sepinggian yang terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan. Zona jasa/perdagangan terdiri atas Coastal Road berada pada Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota.

### **3. Pengembangan Kawasan Alur Laut**

Alokasi Ruang WP-3-K untuk kawasan Alur Laut terdiri atas migrasi biota yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB, pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut dengan AL-APK, dan alur pelayaran yang selanjutnya disebut dengan AL-AP. Kawasan migrasi biota terdiri dari kawasan Migrasi penyu yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MP dan kawasan Migrasi mamalia laut yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MM. Selanjutnya pipa/kabel bawah laut yang terdiri atas kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-KT dan pipa gas dan minyak yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-GM. Adapun alur pelayaran terdiri dari alur pelayaran dan perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PI, alur pelayaran dan perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PN, alur pelayaran dan perlintasan Regional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PR, dan alur pelayaran dan perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PK.

### **4. Pengembangan KSNT**

Di Kota Balikpapan tidak terdapat alokasi ruang WP-3-K untuk kawasan KSNT, alokasi ini berada di perairan Pulau Sambit dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-01 serta Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-02.

#### **b. Industri**

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/rumah tangga yang tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal. Selain itu, potensi kawasan industri Kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* dibidang *marine*, *supply base* dan sebagainya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
2. Subzona Kawasan Industri (KI); dan
3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri, dengan luas kurang lebih 294,47 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Kariangau), serta di Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang). Subzona Kawasan Industri (KI) merupakan zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, dengan luas kurang lebih 3740,46 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Sedangkan untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) dengan luas kurang lebih 660,74 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Raya) serta Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Teritip).

**Tabel 2.5 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Di Kota Balikpapan**

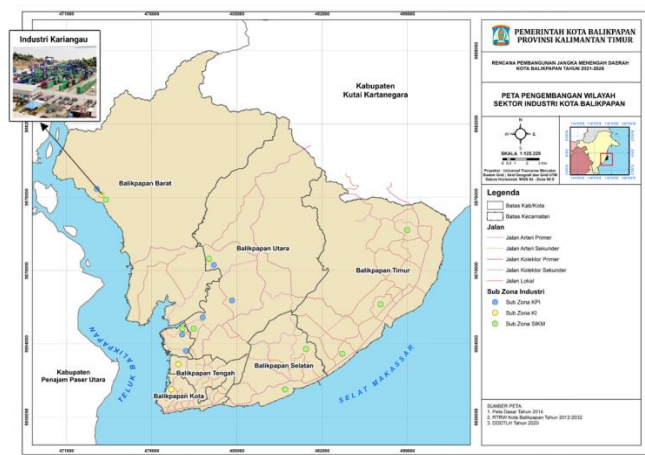
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP)	RDTR KOTA BALIKPAPAN; ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)
<b>BWP I</b> Balikpapan Barat	<b>67,09</b> a. subzona Baru Ilir (I.A) terdapat di Blok I.A.2; b. subzona Kariangau (I.D) terdapat di Blok I.D.3; dan c. subzona Margomulyo (I.E) terdapat di Blok I.E.2.	<b>3.337,76</b>  (Sub BWP Kariangau)	<b>300,04</b> a. sub BWP Kariangau (I.D) tersebar di Blok I.D.3. b. sub BWP Margomulyo (I.E) tersebar di blok I.E.5.
<b>BWP II</b> Balikpapan Utara	<b>235,92</b> a. sub BWP Batu Ampira (II.A) Blok II.A.1 b. sub BWP Graha Indah (II.B) Blok II.B.1. c. sub BWP Karang Joang (II.E) Blok II.E.6	---	<b>44,7</b> a. Sub BWP Karang Joang Blok II.E.6, b. sub BWP Muara Rapak (II.F) Blok II.F.1.
<b>BWP III</b> Balikpapan Tengah	---	<b>248,98</b>  Sub BWP Karang Jati (III.C), yaitu pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.	---
<b>BWP IV</b> Balikpapan Kota	---	<b>193,91</b>  sub BWP Prapatan (IV.D), meliputi Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3;	<b>0,82</b>  sub BWP Telaga Sari (IV.E), , Blok IV.E.2
<b>BWP V</b> Balikpapan Selatan	---	---	<b>34,89</b> a. Sub BWP Sepinggian (V.D), berada di Blok V.D.2; dan b. Sub BWP Sepinggian Raya (V.F), berada di Blok V.F.2.
<b>BWP VI</b> Balikpapan Timur			<b>287,47</b>



BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP)	RDTR KOTA BALIKPAPAN; ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)	SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)
	---	---	a. Sub BWP Manggar (VI.B), berada di Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan b. Sub Blok Manggar Baru (VI.C), berada di Blok VI.C.1. c. Sub Blok Teritip (VI.D), berada di Blok VI.D.1.
<b>Total Luas @Subzona</b>	<b>303,01</b>	<b>3.780,65</b>	<b>667,92</b>
<b>TOTAL LUAS ZONA KPI</b>	<b>4.751,58</b>		

Sumber: Ranperda RDTR Kota Balikpapan

Berikut adalah peta Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan:



**Gambar 2.13 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan**

Sumber: Ranperda RDTR Kota Balikpapan

c. Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka potensi bahan galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa dan batulempung. Lokasi keterdapat potensi mineral non logam terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan (Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut:

- 1) Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa perbukitan;
- 2) Jenis bahan galian batulempung meliputi Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru);
- 3) Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru).

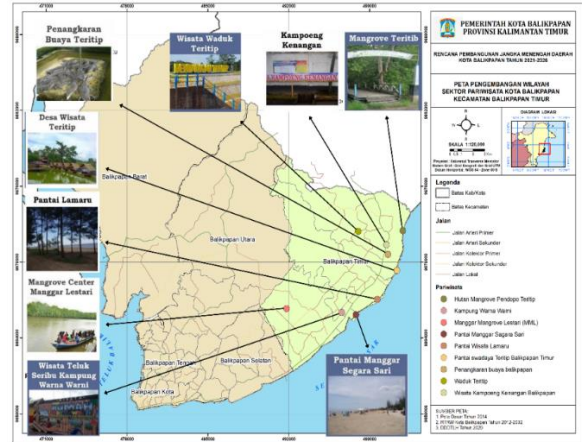
d. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi, mengingat topografi Kota Balikpapan yang didominasi oleh perbukitan dengan hutan yang cukup luas, menjadikan Kota Balikpapan sebagai tempat wisata hutan lindung dan kawasan cagar alam. Selain itu, Kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga

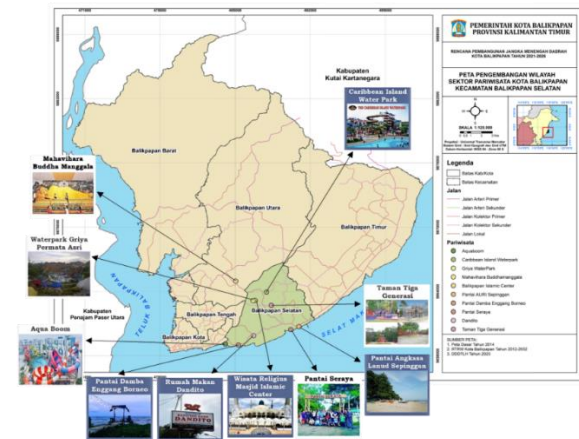
menjadi objek yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai dan wilayah lainnya sebagian besar merupakan wisata alam buatan dan peninggalan sejarah. Berikut destinasi wisata di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan:



**Gambar 2.14 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021



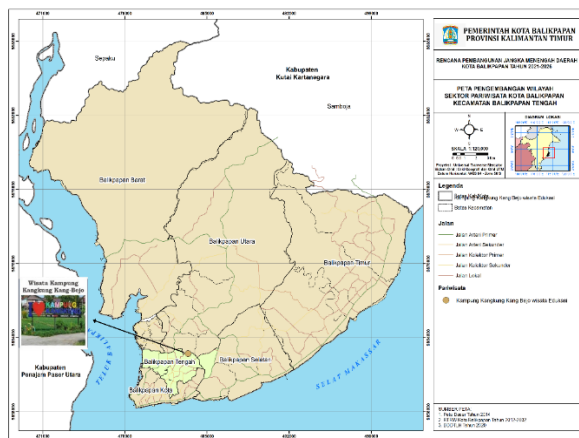
**Gambar 2.15 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021



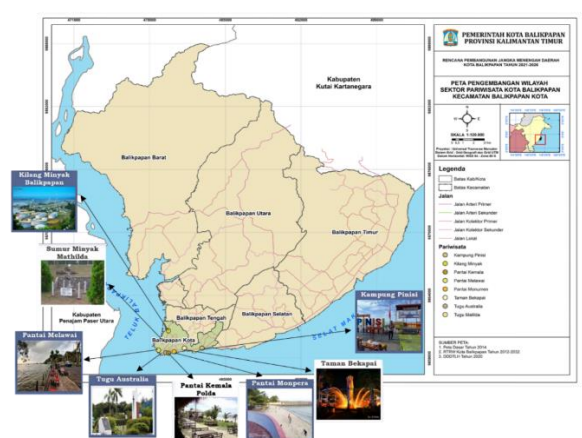
**Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021



**Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021



**Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021



**Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota**  
 Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

**2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana**

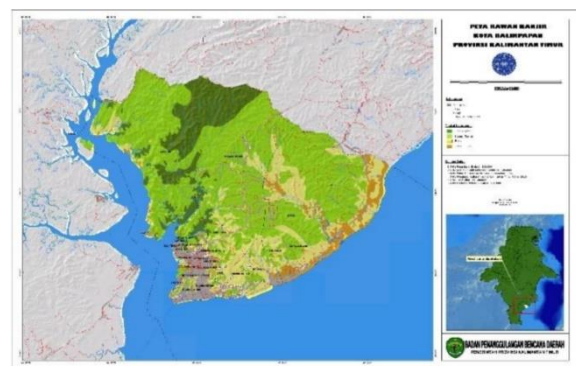
Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali. Adapun jumlah bencana yang terjadi di Kota Balikpapan sebagai berikut yaitu:

**Tabel 2.6 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2020**

No	Jenis Bencana	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran hutan & lahan	14	70	125	29
2	Kebakaran pemukiman/gedung	44	45	51	23
3	Banjir	89	13	24	83
4	Pergerakan tanah/longsor	70	46	29	38
5	Angin puting beliung	6	0	0	2
6	Gelombang pasang	0	0	0	1
7	Abrasi pantai	0	0	0	0
8	Orang tenggelam	25	24	19	10
9	Pohon tumbang	81	18	28	46
10	Semburan lumpur/gas	3	1	7	8
11	Penanganan gangguan hewan	84	72	194	151
<b>Total</b>		<b>416</b>	<b>289</b>	<b>477</b>	<b>391</b>

Sumber: BPBD Kota Balikpapan

Luas area terendam banjir yang terjadi pada tahun 2016 seluas 55,64 hektar, tahun 2017 seluas 21,5 hektar, tahun 2018 seluas 5,25 hektar dan tahun 2019 seluas 26,49 hektar. Banjir yang dimaksud adalah area yang terendam akibat larian air hujan dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 40 cm, dan banjir berakhir/surut dalam kurun waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir ini adalah tingginya curah hujan yang turun setiap tahun, yaitu rata-rata mencapai 232,8 mm. Adapun peta sebaran kawasan banjir di Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



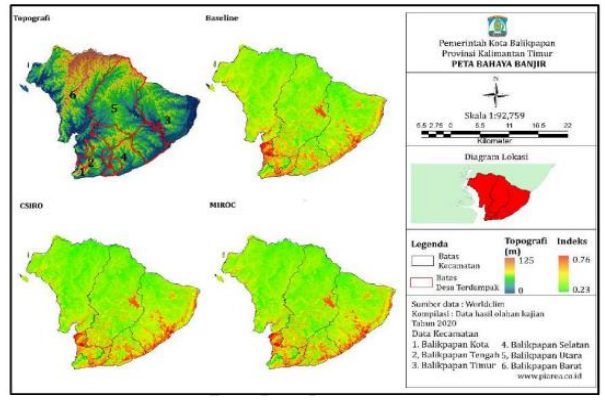
**Gambar 2.20 Peta Sebaran Kawasan Titik Banjir di Kota Balikpapan**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD

Peta diatas menunjukkan warna hijau tua berarti kawasan tidak rawan, warna hijau muda berarti kawasan kurang rawan, sedangkan warna kuning menunjukkan kawasan rawan dan warna oranye adalah kawasan sangat rawan.

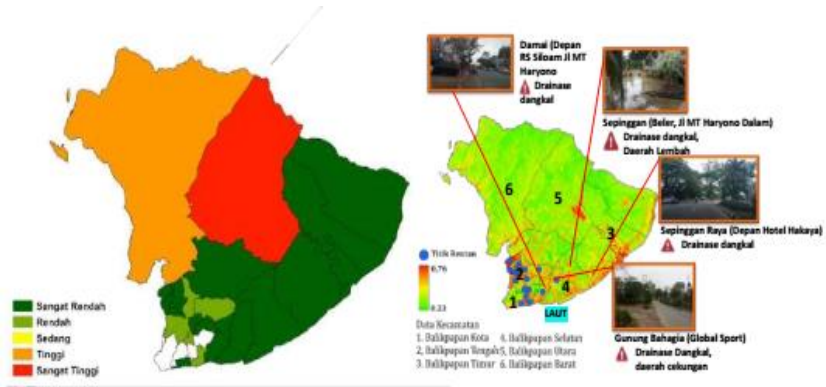


Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Kota Balikpapan memiliki nilai indeks bahaya banjir rendah kecuali di Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan daerah pesisir Balikpapan Timur. Indeks Bahaya tertinggi berada di wilayah pesisir Kota Balikpapan. Selanjutnya di masa depan, berdasarkan model CSIRO menunjukkan tidak terjadi perubahan. Pada model MIROC terjadi peningkatan potensi bahaya di seluruh wilayah Kota Balikpapan terutama wilayah utara Kota Balikpapan. Faktor yang meningkatkan bahaya banjir di masa depan dikarenakan intensitas curah hujan tinggi pada bulan tertentu, yaitu bulan Desember, Januari, Maret dan April.



**Gambar 2.21 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



**Gambar 2.22 Peta Hasil Validasi Titik Rentan Bahaya Banjir. Peta Sebelah Kiri merupakan Kejadian Historis Berdasarkan Data PODES 2018, Peta Sebelah Kanan Merupakan Data Hasil Validasi Lapangan**

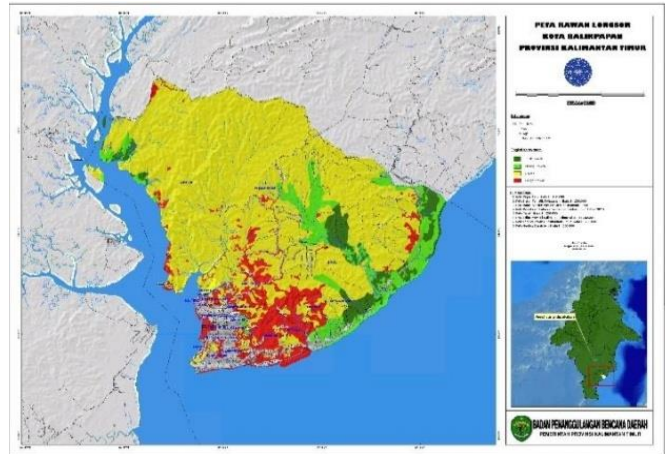
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Topografi Kota Balikpapan sekitar 85% merupakan daerah berbukit dan hanya sekitar 15% daerah datar yang sempit dan terletak di daerah sepanjang pantai. Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Diantara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena lapisan topsoilnya yang tipis dan batuanmnya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%. Apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi. Dengan kondisi ini wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor, Adapun peta sebaran rawan bencana tanah longsor dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar peta diatas menjelaskan bahwa warna hijau tua adalah sebaran tidak rawan, warna hijau muda adalah sebaran kurang rawan, warna kuning adalah sebaran rawan dan warna merah adalah sebaran sangat rawan.

Jika dilakukan pemetaan bahaya tanah longsor menggunakan simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor

berkisar 0,23 – 0,73. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Untuk wilayah lainnya, umumnya nilai bahaya tinggi berada pada wilayah dekat tebing-tebing sungai. Indeks bahaya rendah tersebar di wilayah utara Kota



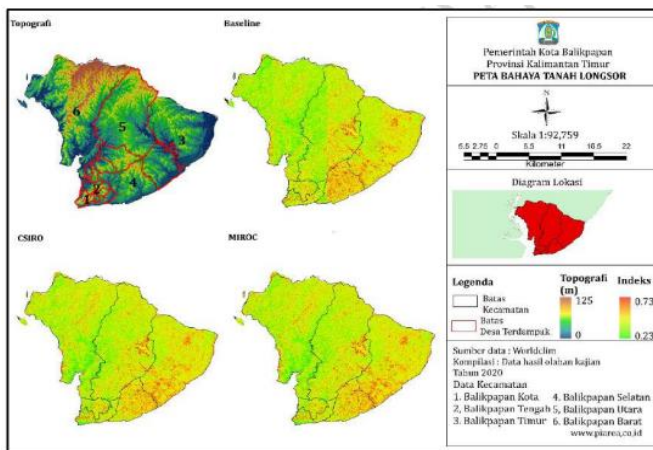
**Gambar 2.23 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Balikpapan, sementara indeks sedang tersebar di wilayah lereng-lereng perbukitan Kota Balikpapan.

Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di Kecamatan Balikpapan Kota, Selatan Kecamatan Balikpapan Utara, Selatan Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Selatan.

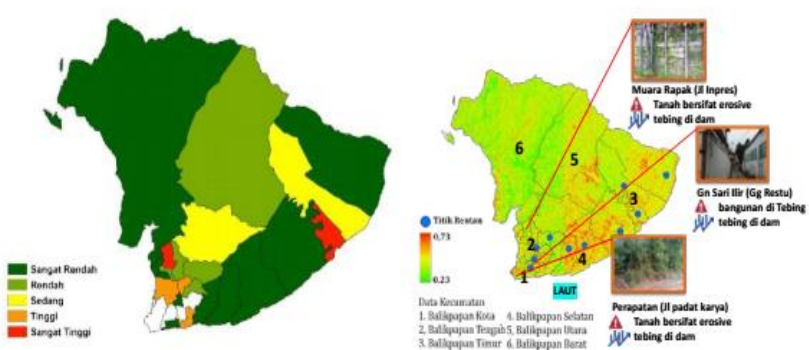
Pemetaan bahaya di masa depan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun terjadi peningkatan



**Gambar 2.24 Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan. (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)**

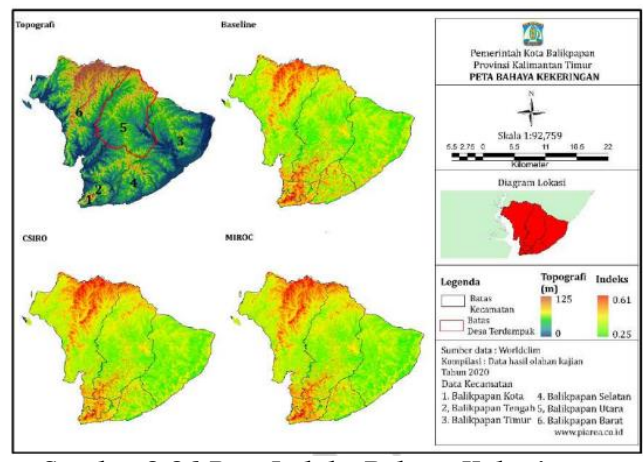
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota

luasan wilayah yang disebabkan oleh wilayah lainnya yang cenderung lebih basah dibandingkan kondisi *baseline*. Wilayah yang mengalami kondisi lebih basah atau terjadi peningkatan curah hujan pada akumulasi curah hujan bulanan pada musim hujan di masa mendatang antara lain Kecamatan Balikpapan Timur bagian utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan bagian utara. Perlu menjadi perhatian terkait pembukaan lahan perumahan di daerah rawan tanah longsor yang berpotensi mengalami bahaya tanah longsor dengan nilai indeks tinggi.



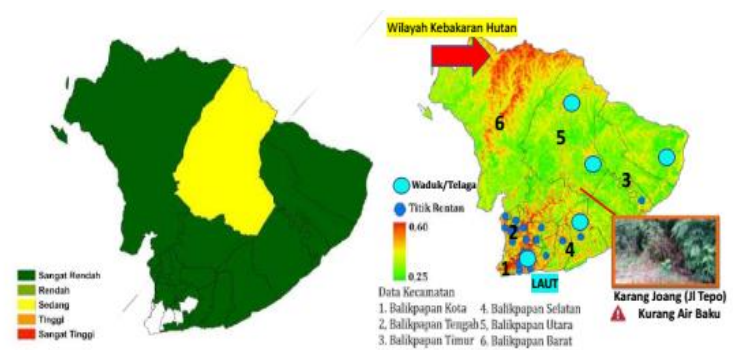
**Gambar 2.25 Peta Hasil Validasi Titik Rentan Bahaya Longsor. Peta Sebelah Kiri Merupakan Kejadian Historis Berdasarkan Data PODES 2018, Peta Sebelah Kanan Merupakan Data Hasil Validasi Lapang**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Nilai indeks bahaya kekeringan kategori sedang di Kota Balikpapan saat ini (historis), tersebar terutama di wilayah utara Kota Balikpapan yang merupakan kawasan ekologi kota, Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah sementara wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur memiliki nilai indeks rendah. Indeks kategori tinggi mengalami peningkatan luasan wilayah di masa depan jika menggunakan model CSIRO namun mengalami penurunan pada model MIROC. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suhu udara yang berimplikasi pada naiknya nilai evapotranspirasi sehingga kondisi neraca air menjadi defisit terutama pada bulan di musim kemarau (Juli, Agustus, dan September).



**Gambar 2.26 Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Kedua model menunjukkan, wilayah utara Kota Balikpapan umumnya memiliki indeks bahaya dengan kategori sedang. Perluasan wilayah berindeks tinggi dan sedang ini harus menjadi perhatian khusus Perangkat Daerah untuk menanggulangi kekeringan di Kota Balikpapan. Pengelolaan sumberdaya air oleh Dinas PU dan PDAM menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim dimasa mendatang dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku.

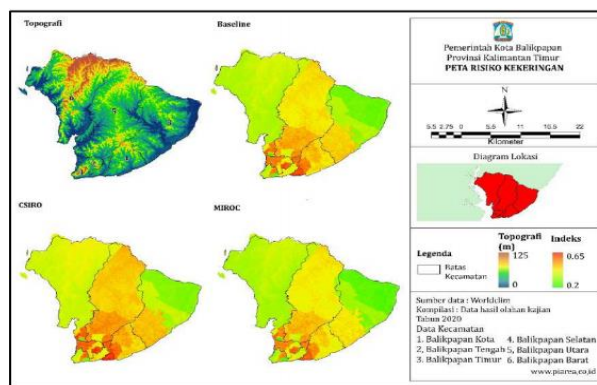


**Gambar 2.27 Peta hasil validasi titik rentan bahaya kekeringan. Peta sebelah kiri merupakan kejadian historis berdasarkan data PODES 2018, peta sebelah kanan merupakan data hasil validasi lapang**  
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



Berdasarkan DIKPLHD Kota Balikpapan, tingkat risiko kekeringan berada pada nilai 0,2-0,65 (rendah hingga tinggi). Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Kelurahan-kelurahan yang memiliki tingkat risiko tinggi antara lain Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Baru Tengah, dan Kelurahan Margo Mulyo. Kelurahan-kelurahan dapat menjadi pertimbangan kelurahan prioritas untuk pengurangan risiko bencana terkait iklim kekeringan. Secara umum faktor yang berkontribusi terhadap risiko tinggi yang ada di kelurahan-kelurahan tersebut diantaranya perubahan kondisi curah hujan musim kering dan kondisi biofisik diantaranya penggunaan lahan, dan ruang terbuka hijau.

Penilaian tingkat risiko di masa depan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat risiko di seluruh wilayah Kota Balikpapan yang ditunjukkan dengan sebaran spasial yang semakin menunjukkan warna merah. Sebaran spasial menunjukkan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan mengalami kenaikan tingkat risiko kekeringan tertinggi. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.



**Gambar 2.28 Peta Risiko Kekeringan Kota Balikpapan**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

**2.1.1.2. Aspek Demografi**

Jumlah penduduk seringkali terjadi perubahan baik berkurang maupun bertambah dengan jenis kelamin laki laki atau perempuan, hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kelahiran, kematian, sertanya adanya perpindahan penduduk baik yang datang maupun yang pergi ke luar wilayah, serta dari adanya jumlah penduduk pada dasarnya dapat digunakan sebagai estimasi jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Berikut merupakan table data dari jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020.

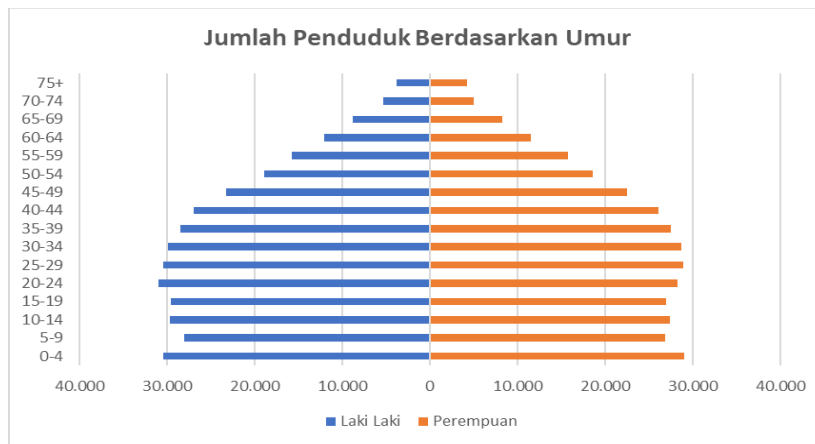
**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020**

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
0-4	30.494	29.059	59.553
5-9	28.050	26.797	54.847
10-14	29.740	27.401	57.141
15-19	29.547	26.938	56.485
20-24	30.980	28.243	59.223
25-29	30.428	28.963	59.391
30-34	29.895	28.659	58.554
35-39	28.552	27.546	56.098
40-44	26.946	26.034	52.980
45-49	23.315	22.450	45.765

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	
50-54	18.941	18.616	37.557
55-59	15.824	15.742	31.566
60-64	12.093	11.562	23.655
65-69	8.816	8.303	17.119
70-74	5.306	4.941	10.247
75+	3.875	4.262	8.137
<b>Jumlah</b>	<b>352.802</b>	<b>335.516</b>	<b>688.318</b>

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan umur dan jenis kelamin, didominasi oleh kelompok usia produktif dibandingkan dengan kelompok usia balita dan lansia, yaitu sebesar 88% dari jumlah total penduduk kota Balikpapan di tahun 2020, lalu pada jenis kelamin sendiri Kota Balikpapan didominasi oleh jenis kelamin laki laki dibandingkan dengan perempuan. Kemudian berdasarkan dari tabel data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin jika dilihat berdasarkan piramida penduduk adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.29 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020**

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kota Balikpapan mengalami penurunan, dari Rp 83.678,77 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 83.097,89 Miliar pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi kinerja 10 lapangan usaha yang mengalami penurunan, termasuk lapangan usaha dominan yakni Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan, hanya 7 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, termasuk salah satunya lapangan usaha dominan yaitu Konstruksi.

**Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (miliar rupiah)**

No	Sektor	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	693,06	745,96	780,09	750,32
2	Pertambangan dan Penggalian	35,26	35,53	35,93	35,33
3	Industri pengolahan	43.657,28	45.450,07	47.482,42	47.129,97

No	Sektor	2017	2018	2019*	2020**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66,17	69,50	76,03	81,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54,64	55,73	58,99	62,80
6	Konstruksi	8.943,48	9.510,13	10.281,79	10.685,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.155,72	6.561,79	6.946,74	6.907,78
8	Transportasi dan Pergudangan	5.978,04	6.277,04	6.308,75	5.551,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.108,89	1.240,28	1.343,77	1.201,37
10	Informasi dan Komunikasi	2.644,53	2.780,44	2.974,06	3.199,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.394,78	2.517,79	2.612,61	2.670,18
12	Real Estate	1.321,55	1.382,66	1.410,67	1.398,22
13	Jasa Perusahaan	198,59	207,53	214,75	206,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	894,68	940,40	1.000,21	940,66
15	Jasa Pendidikan	1.008,51	1.087,88	1.137,68	1.195,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385,00	409,28	431,70	537,25
17	Jasa Lainnya	491,88	535,10	582,57	543,36
<b>PDRB</b>		<b>76.032,08</b>	<b>79.807,11</b>	<b>83.678,77</b>	<b>83.097,89</b>

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,69 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Akan tetapi jika dibandingkan tahun 2018, angka ini mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena adanya perlambatan di sektor dominan seperti Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terutama didorong oleh penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi. LPE Kota Balikpapan pernah menyentuh angka 3,84% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 4,97%. Angka ini kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4,85. Hingga tahun 2020, LPE Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi -0,69% karena dampak pandemi Covid-19.

**Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Persen)**

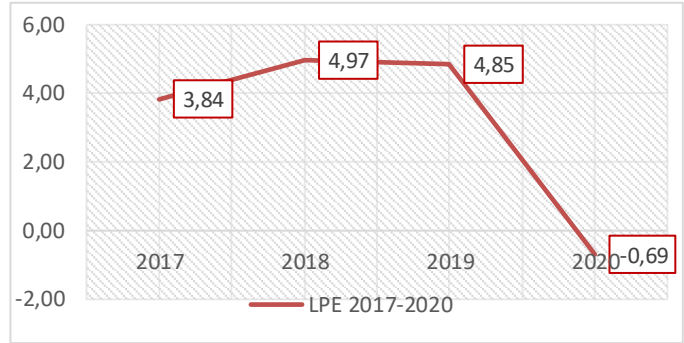
Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,13	7,63	4,58	-3,82
B. Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,76	1,14	-1,69
C. Industri Pengolahan	3,56	4,11	4,47	-0,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	5,03	9,40	7,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,09	1,99	5,87	6,44
F. Konstruksi	3,21	6,34	8,11	3,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25	6,60	5,87	-0,56
H. Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,00	0,51	-12,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,87	11,85	8,34	-10,60
J. Informasi dan Komunikasi	7,96	5,14	6,96	7,59



Kategori/Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
K. Jasa Keuangan	-0,19	5,14	3,77	2,20
L. Real Estate	4,79	4,62	2,03	-0,88
M,N. Jasa Perusahaan	3,05	4,50	3,48	-3,79
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-10,16	5,11	6,36	-5,95
P. Jasa Pendidikan	7,06	7,87	4,58	5,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,30	5,48	24,45
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,23	8,79	8,87	-6,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>3,84</b>	<b>4,97</b>	<b>4,85</b>	<b>-0,69</b>

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2021

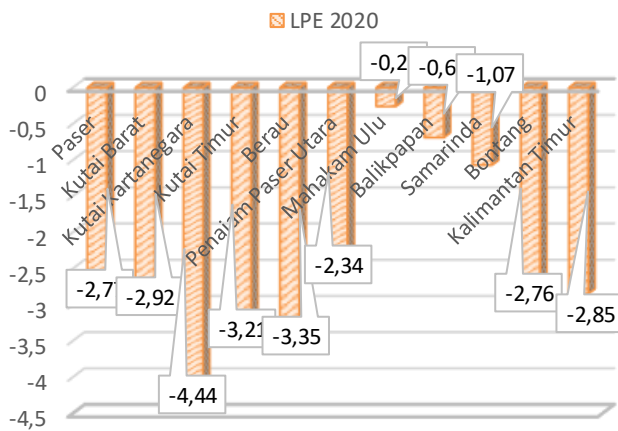
Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Kalimantan Timur yang juga mengalami kontraksi perekonomian, Balikpapan pada posisi 2 tertinggi setelah Kabupaten Mahakam Ulu. Posisi tertinggi adalah Mahakam Ulu dengan kontraksi sebesar -0,26%, sedangkan terendah adalah Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi sebesar -4,44%.



**Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020 (%)**

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Penurunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur ini sebagai indikasi bahwa kontraksi perekonomian juga terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan. Penurunan perekonomian Kota Balikpapan ini diakibatkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19, misalnya pada usaha perhotelan dan restoran. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa secara



**Gambar 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020 (Persen)**

Sumber: BPS, Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2021

disebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat di Kota Balikpapan selama pandemi covid-19 sehingga berdampak pada rendahnya tingkat okupansi hotel. Kondisi ini juga terjadi pada usaha restoran dan rumah makan, selama pandemi covid-19, rata-rata penurunan omzet sebesar 57,38%. Kondisi ini sebagai indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan bahkan akan

rata-rata usaha perhotelan menurunkan tarif sebesar 42,31% pada hotel bintang dan sebesar 19% pada non bintang. Penurunan tarif ini sebagai strategi usaha perhotelan untuk meningkatkan okupansi hotel yang semakin terpuruk. Rata-rata okupansi perhotelan selama pandemi 40,77% sedangkan di tahun 2019 mencapai 79%. Hal senada juga terjadi pada hotel non bintang yaitu sebesar 25,21% sedangkan di tahun 2019 mencapai 63%. Penurunan okupansi ini

mengalami kontraksi. Untuk itu, kedepan perlu upaya-upaya akseleratif agar perekonomian Balikpapan semakin membaik dan inklusif.

**b. Laju Inflasi**

Inflasi Kota Balikpapan mencatatkan angka sebesar 0,65% atau lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,78% dan nasional 1,68%.

Dari sisi *demand*, umumnya pencapaian inflasi yang rendah dan stabil tersebut disebabkan karena berkurangnya konsumsi masyarakat

during the pandemic Covid-19. Sedangkan dari sisi *supply*, terjaganya pasokan komoditas terutama bahan makanan turut menunjang kinerja inflasi.

Hal ini tentu tidak lepas dari peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Balikpapan dan satgas pangan dalam program pengendalian inflasi. Secara keseluruhan, Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2018-2020 mengalami kecenderungan penurunan. Kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi penyumbang terbesar inflasi Kota Balikpapan.

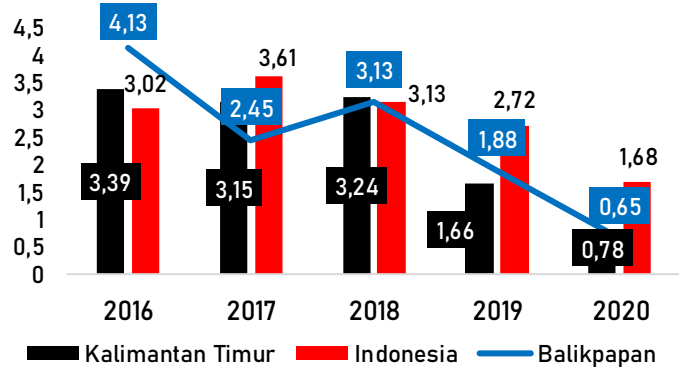
**c. Indeks Gini**

Pada tahun 2017 dan 2018, indeks gini Kota Balikpapan sebesar 0,32 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Selanjutnya pada tahun 2019, indeks gini mengalami penurunan menjadi 0,302. Namun, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,3111.

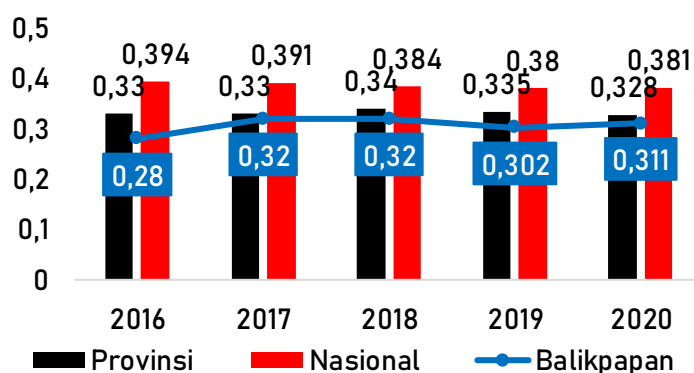
Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, indeks gini Kota Balikpapan masih berada dibawah indeks Provinsi dan Nasional. Seperti pada tahun 2020, indeks gini Provinsi sebesar 0,328 dan Nasional sebesar 0,381, dimana keduanya berada diatas angka indeks gini Kota Balikpapan.

**d. Angka Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2017 terdapat 2,82% atau sebanyak 17,86 ribu jiwa penduduk miskin dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

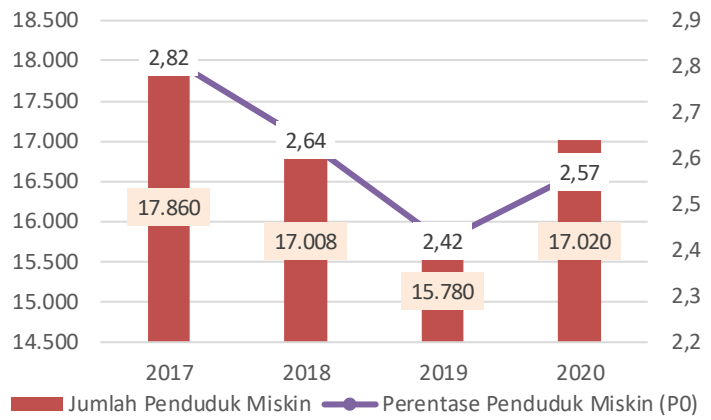


**Gambar 2.32 Perbandingan Inflasi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional**  
 Sumber: BPS, diolah



**Gambar 2.33 Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional**  
 Sumber: BPS, diolah

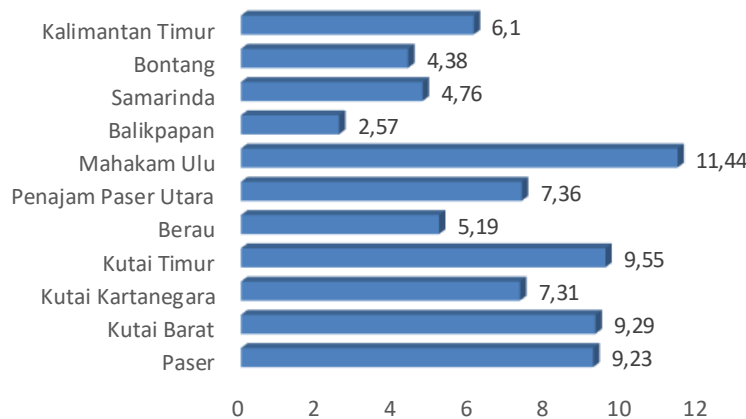
Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,15% menjadi 17,02 ribu jiwa. Jika dirata-rata pada tahun 2017-2020, persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan sebesar 2,61%. Untuk kedepan, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ini relatif lebih berat sebab kondisi perekonomian mengalami penurunan sebagai dampak pandemic Covid -19.



**Gambar 2.34 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Oleh karena itu, program program perlindungan sosial dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin tetap menjadi program prioritas untuk masyarakat miskin mampu bertahan ditengah pandemic Covid-19 dan pengentasan kemiskinan kedepan lebih

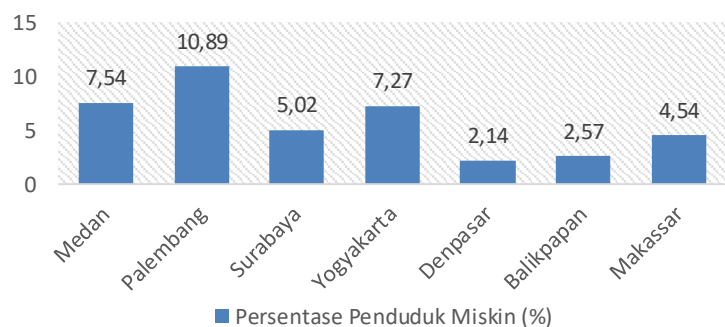


**Gambar 2.35 Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Bontang dan Kota Samarinda menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan cukup rendah setelah Kota Balikpapan masing-masing sebesar 4,38% dan 4,76%. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 11,44%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan Kota Balikpapan dalam menanggulangi kemiskinan sudah cukup berhasil meskipun termasuk daerah dengan jumlah penduduk tertinggi ke-3 di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan grafik perbandingan persentase kemiskinan, Kota Balikpapan menempati urutan kedua



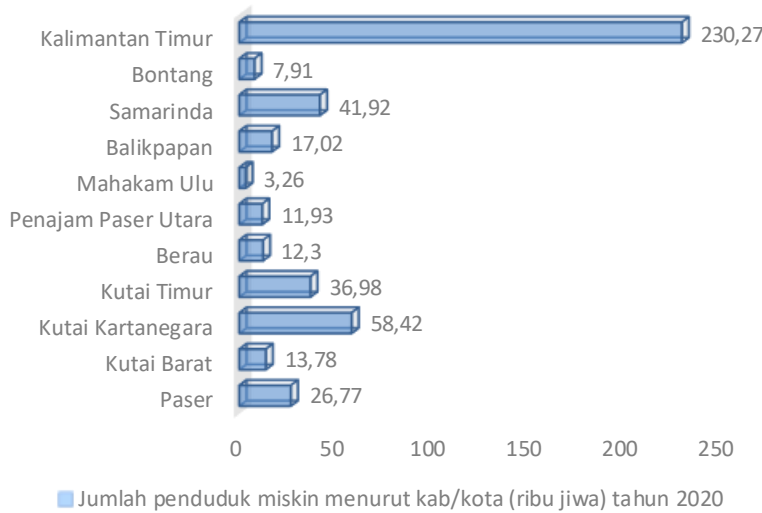
**Gambar 2.36 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Balikpapan dan Kota-Kota Besar Nasional Tahun 2020**

Sumber: Olahan Konsultan dari Berbagai Publikasi BPS



terendah dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,57% di atas dari Kota Denpasar yang memiliki persentase penduduk miskin 2,14%. Setelah Kota Balikpapan, terdapat Kota Makassar dan Kota Surabaya, dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki persentase penduduk miskin sebesar 4,54% dan 5,02%. Sedangkan, untuk Kota Yogyakarta, Medan, dan Palembang masing-masing memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,27%; 8,25%; dan 10,90%.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskinnya, Kota Balikpapan menempati urutan ke-5 tertinggi di bawah Kabupaten Paser dan diatas Kabupaten Kutai Barat.



**Gambar 2.37 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**  
 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

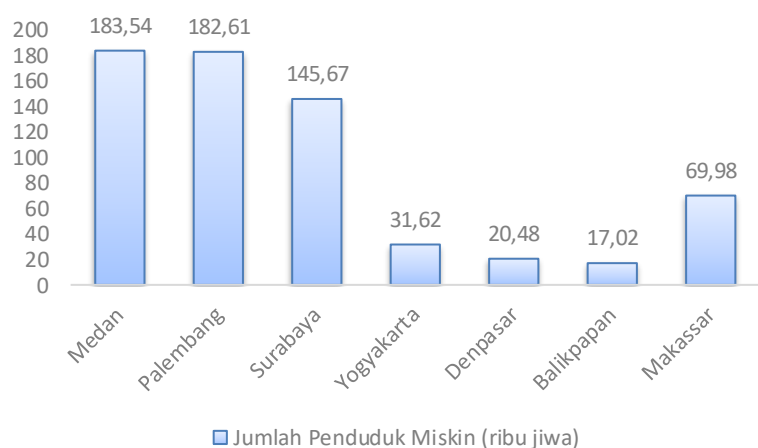
Adapun Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin paling kecil sebanyak 3,26 ribu jiwa, namun persentase penduduk miskinnya tertinggi dan dengan jumlah penduduk terkecil di Kalimantan Timur.

Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya

jumlah penduduk yang ada sekaligus menjadi yang tertinggi ke-2 di Kalimantan Timur.

Sama halnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota-Kota besar di Indonesia, Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk miskin yang paling kecil. Namun ini bukan menjadi rujukan utama dalam menentukan jumlah penduduk miskin, sebab harus diperbandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan/populasi.

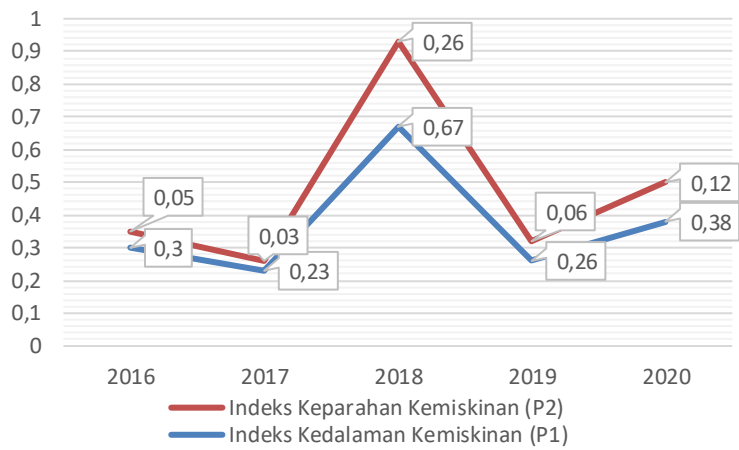
Jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan sebesar 17,02 ribu. Kemudian ada Kota Denpasar dengan 20,48 ribu penduduk miskin, Kota Yogyakarta dengan 31,62 ribu penduduk miskin, Kota Makassar dengan 69,98 ribu penduduk miskin, dan Kota Surabaya dengan 145,67 ribu penduduk miskin. Sedangkan, Kota Palembang dan Kota Medan masing-masing memiliki penduduk miskin sejumlah 182,61 ribu dan 183,54 ribu.



**Gambar 2.38 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Balikpapan dan Kota-Kota Besar Nasional Tahun 2020**  
 Sumber: Olahan Konsultan dari Berbagai Publikasi BPS

Indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berfungsi untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, jika angka indeks kemiskinannya semakin rendah maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

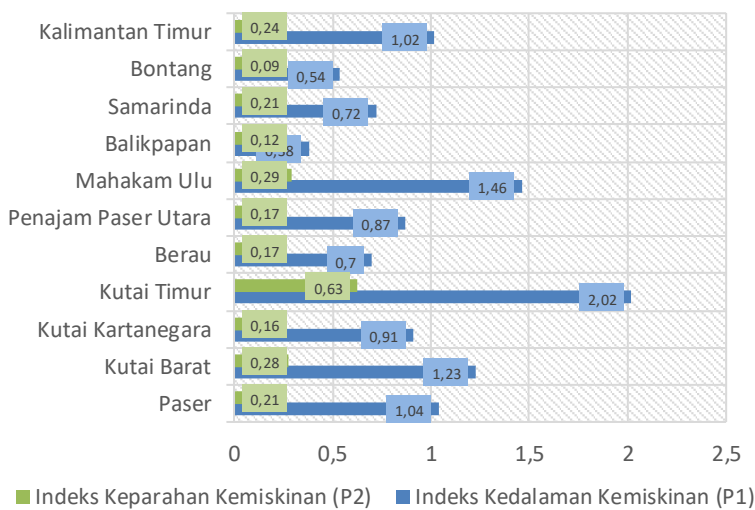
Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2016 nilai P1 sebesar 0,30, menurun di tahun 2017 menjadi 0,23, di tahun 2018 naik cukup tinggi di angka 0,67, menurun di tahun 2019 menjadi 0,26, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,38. Rata-rata nilai P1 selama 5 tahun terakhir adalah 0,37. Meningkatnya nilai P1 di tahun 2020 menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pola yang sama juga terlihat pada nilai P2, kenaikan nilai terjadi di tahun 2018 dan 2020. Sedangkan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 penurunan nilai P2 cukup tinggi dari tahun 2018 sebesar 0,20 menjadi 0,06. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 0,06 menjadi 0,12. Rata-rata nilai P2 dari tahun 2016-2020 sebesar 0,10, rendahnya nilai P2 di Kota Balikpapan menunjukkan rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



**Gambar 2.40 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Meningkatnya nilai P1 di tahun 2020 menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pola yang sama juga terlihat pada nilai P2, kenaikan nilai terjadi di tahun 2018 dan 2020. Sedangkan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 penurunan nilai P2 cukup tinggi dari tahun 2018 sebesar 0,20 menjadi 0,06. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 0,06 menjadi 0,12. Rata-rata nilai P2 dari tahun 2016-2020 sebesar 0,10, rendahnya nilai P2 di Kota Balikpapan menunjukkan rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



**Gambar 2.39 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

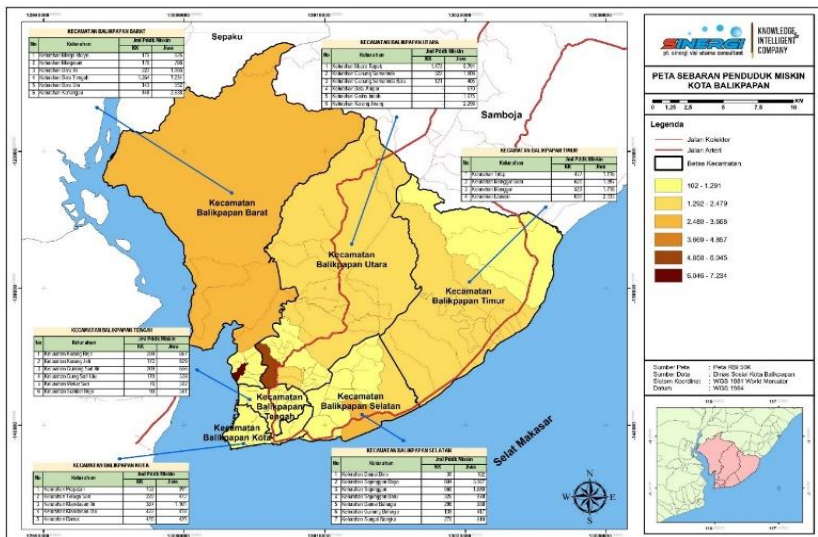
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Nilai P1 dan P2 Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain keduanya memiliki nilai terkecil dan dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur. Di atasnya ada Kota Bontang dan Samarinda dengan masing-masing nilai P1 sebesar 0,54 dan 0,09,

serta 0,72 dan 0,21 untuk nilai P2. Sementara itu Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah dengan nilai P1 dan P2 tertinggi yang menunjukkan tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan selama ini, beberapa karakteristik dan permasalahan kemiskinan di Kota Balikpapan, diantaranya adalah: (a) rata-rata pendidikan penduduk miskin Kota Balikpapan hanya tamatan SD/SLTP sebesar 69,66%; (b) dari sisi tempat kelahiran, sebagian besar penduduk miskin berasal dari luar Kota Balikpapan yaitu sebesar 55,27%; (c) pemberdayaan masyarakat miskin belum dilakukan secara tuntas; (d) Permasalahan data penduduk miskin, termasuk permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH); (d) penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terintegrasi; dan (e) belum optimalnya monitoring dan evaluasi pihak terkait terhadap bantuan yang telah disalurkan. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara konsisten dan terintegrasi dengan melibatkan segenap pemangku kemiskinan, apalagi tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini dan kedepan semakin berat. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin, di sisi lain adanya rencana Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) jika tidak diantisipasi secara bijak akan memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru seiring meningkatnya jumlah penduduk ke daerah ini.

Adapun sebaran jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan/ Kelurahan ditampilkan pada Gambar 2.41. Jumlah penduduk miskin tinggi terlihat pada warna yang lebih gelap dibandingkan daerah lainnya.



**Gambar 2.41 Peta Sebaran Penduduk Miskin Kota Balikpapan**  
 Sumber: Dokumen Evaluasi Program Kemiskinan Kota Balikpapan, 2020

**2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

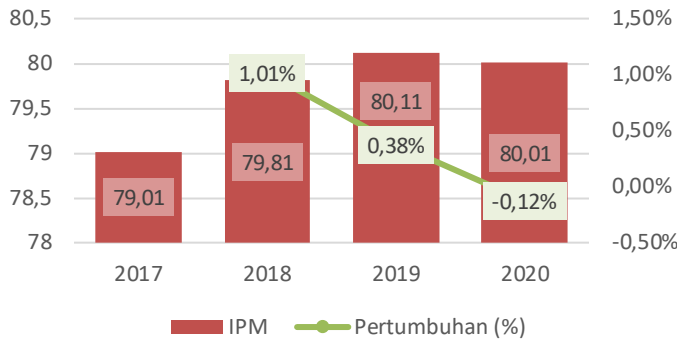
**a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara umum, pembangunan manusia Kota Balikpapan mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020, IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,10 persen, menjadi 80,01. Akan tetapi, hal ini tidak merubah status pembangunan manusia Kota Balikpapan yang berstatus “Sangat Tinggi”, bersama dengan 36 kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia.

IPM Kota Balikpapan menempati urutan ke-3 tertinggi di bawah Kota Samarinda dengan IPM sebesar 80,11 dan Kota Bontang sebesar 80,02 serta sudah di atas angka provinsi sebesar 76,24. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan IPM terendah



sebesar 67,09. Berdasarkan hal tersebut, tiga kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki

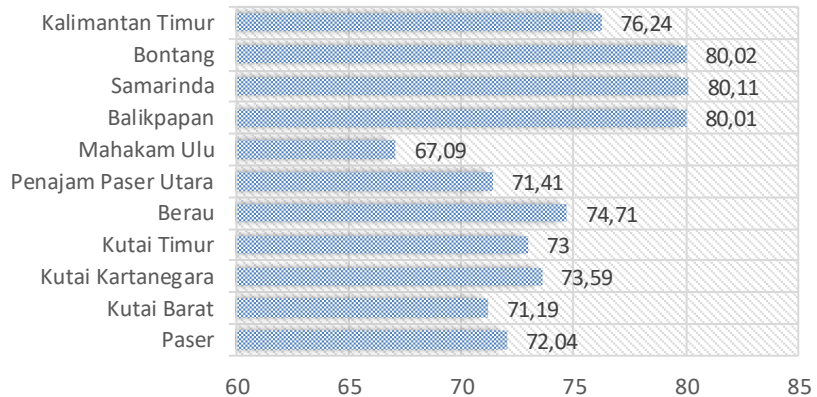


**Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM (%) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**  
 Sumber: BRS IPM Kota Balikpapan tahun 2020

kategori IPM tinggi, kemudian yang berada pada kategori menengah atas terdapat 6 Kabupaten. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah dengan kategori IPM menengah bawah. Sehingga jika dilihat nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori menengah atas.

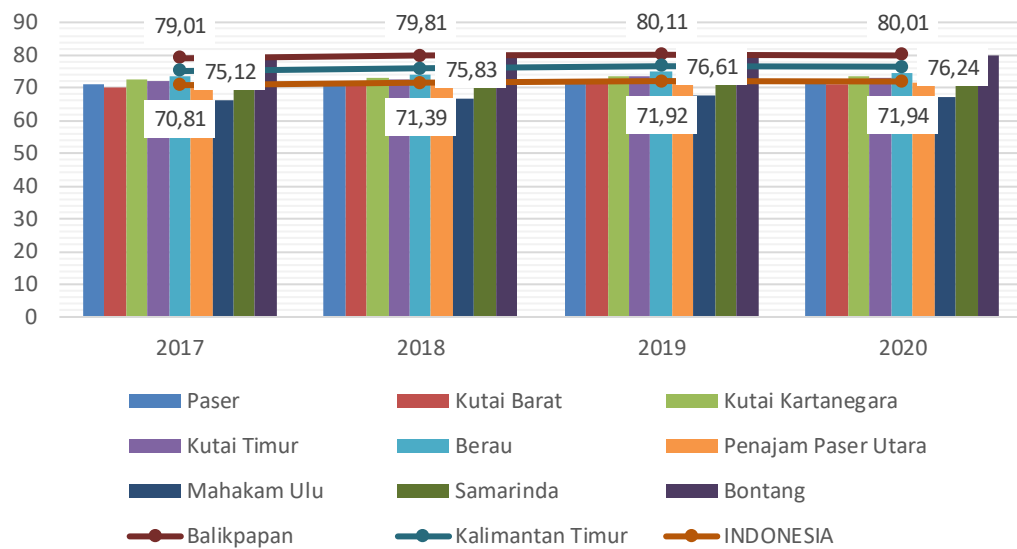
Berdasarkan skala pencapaian derajat pembangunan manusia, pada tahun 2020 ada tiga Kabupaten/Kota yang tahun ini memasuki kategori sangat tinggi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Selain itu, kabupaten/kota yang lainnya masuk kategori tinggi kecuali Kabupaten Mahakam Ulu yang masuk kategori sedang. Hal ini dikarenakan Mahakam Ulu adalah kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur relatif sudah baik. Beberapa Kabupaten/kota bahkan memiliki capaian IPM diatas angka IPM nasional.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, capaian IPM Kota Balikpapan juga melampaui capaian IPM Nasional. Pada tahun 2017 misalnya, capaian IPM Nasional sebesar 70,81 sedangkan IPM Kota Balikpapan sebesar 79,01. Kedua capaian IPM baik Kota Balikpapan dan Nasional



**Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**  
 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

meningkat secara konsisten hingga tahun 2019. Tercatat pada tahun 2019, IPM Kota Balikpapan sebesar 80,11 sedangkan IPM Nasional sebesar 76,61. Walaupun IPM Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 80,01, namun masih melampaui capaian IPM Nasional sebesar 71,94.



**Gambar 2.44 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2020**

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

**b. Rata-Rata Lama Sekolah**

Capaian rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 10,67 naik 0,01 poin pada tahun 2020 menjadi 10,68. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kota Balikpapan. Secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/ sederajat.



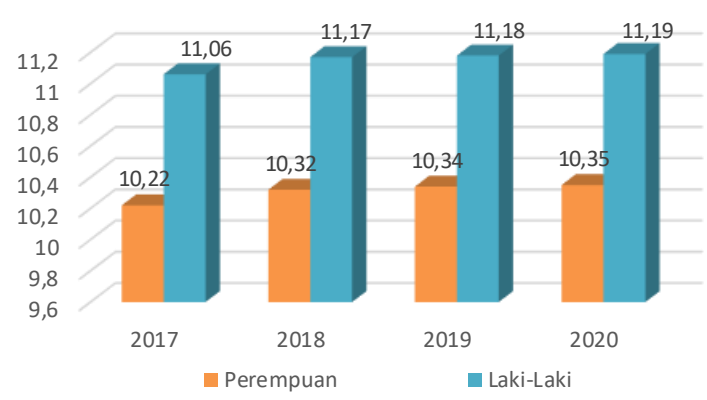
**Gambar 2.45 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

Berdasarkan gender, rata-rata lama sekolah laki-laki dan rata-rata lama sekolah perempuan mencapai angka masing-masing sebesar 11,19 tahun dan 10,35 tahun. Sejak tahun 2017, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih lama daripada rata-rata lama sekolah perempuan. Pada tahun 2020, rata-rata lama pendidikan laki-laki lebih lama 0,84 tahun (sekitar 10 sampai 11 bulan) dibandingkan rata-rata lama pendidikan perempuan. Diharapkan pada periode selanjutnya lama sekolah perempuan semakin ditingkatkan sehingga perbedaan dengan lama sekolah laki-laki semakin berkurang dan setara.

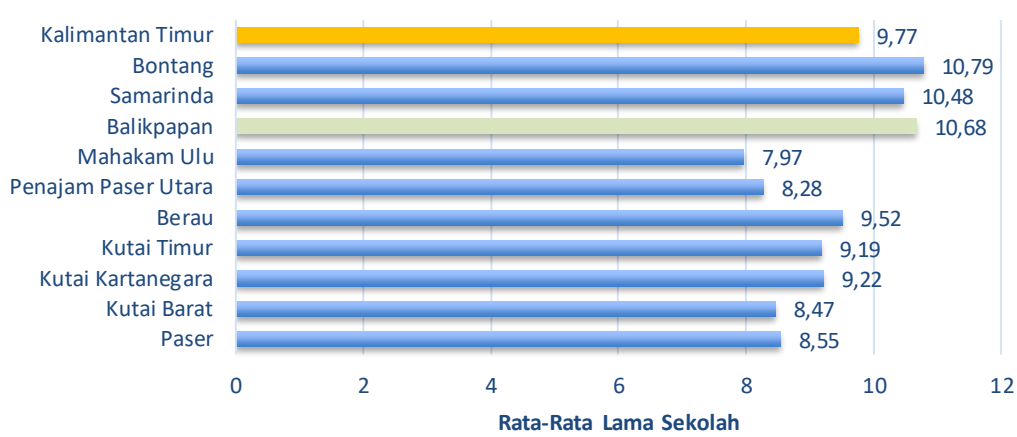
Bila dilihat keadaan pada setiap kabupaten/kota, posisi rata-rata lama sekolah tertinggi tetap diraih oleh tiga kota. Peringkat pertama dicapai oleh Kota Bontang dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas sebesar 10,79 tahun, posisi kedua Kota Balikpapan dengan rata-rata lama sekolah 10,68 tahun, dan urutan ketiga adalah Kota Samarinda dengan rata-rata lama sekolah 10,48 tahun.

Perbedaan rata-rata lama sekolah antara wilayah kota dan wilayah kabupaten cukup berarti. Seperti yang terlihat pada penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu, tercatat rata-rata lama sekolah daerah ini yang terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 7,97 tahun atau tertinggal sekitar tiga tahun dari penduduk di wilayah kota. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana di daerah kota lebih memadai dibandingkan dengan wilayah kabupaten, dan akses untuk mencapai tempat pendidikan juga lebih mudah.



**Gambar 2.46 RLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020



**Gambar 2.47 RLS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah antara lain ketersediaan layanan pendidikan formal, akses terhadap pendidikan formal, dan komitmen seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan. Hal ini tidak dapat dijalankan terpisah atau parsial, tetapi harus selalu bersama dan bersinergi. Saat permasalahan ketersediaan fasilitas pendidikan formal berhasil diatasi, namun akses terhadapnya masih belum dapat dijangkau oleh penduduk, hasilnya angka rata-rata lama sekolah juga masih rendah. Begitupun sebaliknya, oleh karenanya penting bagi penumbuhan komitmen bersama dalam ekosistem pendidikan. Artinya, permasalahan dalam bidang pendidikan bukan hanya terjadi karena satu pihak melainkan menjadi permasalahan multi pihak yang ada dalam ekosistem pendidikan.

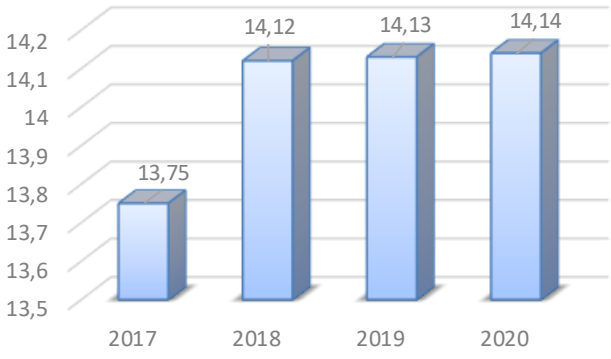
Capaian angka pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah 10,68 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Balikpapan menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini patut diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sebab dengan perkembangan teknologi dan semakin ketatnya persaingan kerja maka penyiapan sumber daya mumpuni mutlak diperlukan. Salah satu ruang untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut adalah pendidikan formal.



**c. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

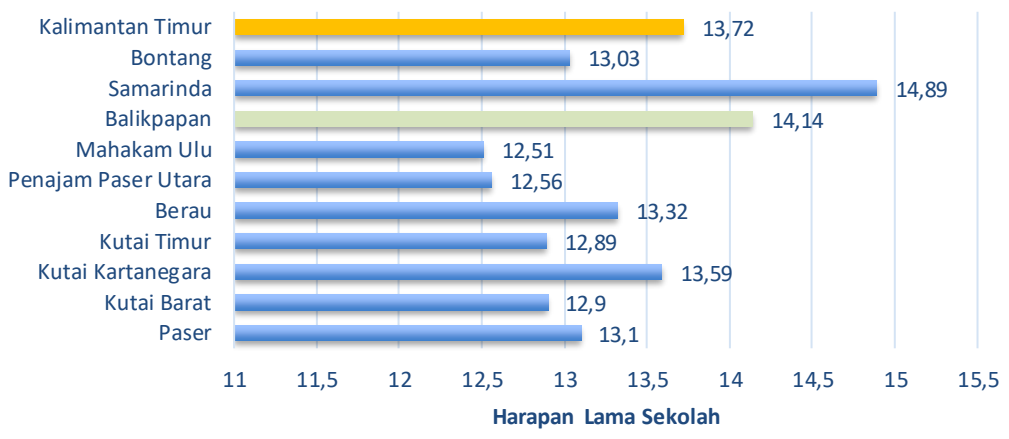
Angka harapan lama (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah ini memiliki kaitan erat dengan keinginan atau spirit keinginan belajar yang dimiliki oleh penduduk. Selain itu, angka harapan lama sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dalam berbagai jenjang.

Berdasarkan gambar capaian harapan lama sekolah Kota Balikpapan tahun 2017–2020, bahwa angka harapan sekolah penduduk Kota Balikpapan selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017–2020. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah penduduk Kota Balikpapan sebesar 13,75 tahun. Selanjutnya, naik menjadi 14,12 tahun pada tahun 2018; 14,13 tahun pada tahun 2019; dan 14,14 tahun pada tahun 2020. Melihat angka harapan lama sekolah penduduk Kota Balikpapan sejak tahun 2017–2020 selalu diatas 12 tahun. Artinya, terdapat keinginan kuat anak-anak di Kota Balikpapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di tingkat D3/S1.



**Gambar 2.48 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020



**Gambar 2.49 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

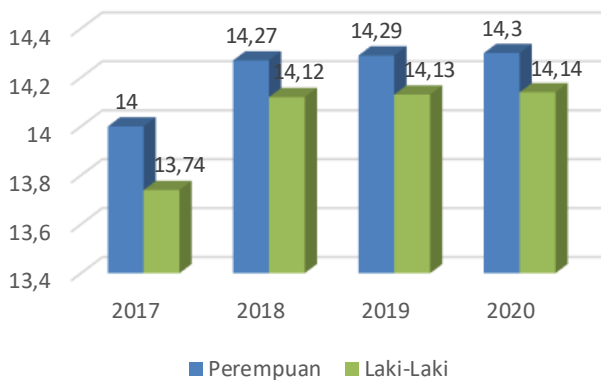
Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka, 2020

Berdasarkan gambar perbandingan capaian angka harapan lama sekolah, bahwa rata-rata angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 12,51–14,89 tahun. Angka harapan lama sekolah setiap kabupaten/Kota tahun 2020 berturut-turut yaitu posisi pertama Kota Samarinda (14,89 tahun), kemudian Kota Balikpapan (14,14 tahun), urutan ketiga ditempati Kabupaten Kutai Kartanegara (13,59 tahun), posisi keempat Kabupaten Berau (13,32 tahun), selanjutnya Kabupaten Paser (13,10 tahun), urutan ke enam Kota Bontang (13,03 tahun), posisi ketujuh Kabupaten Kutai Barat (12,90 tahun), kedelapan adalah Kabupaten Kutai Timur (12,89 tahun), posisi ke sembilan Kabupaten Penajam Paser Utara (12,56 tahun), dan terakhir

yang menempati urutan ke sepuluh adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan angka harapan lama sekolah 12,51 tahun, hanya selisih 0,05 tahun dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saat mengaitkan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, terdapat perbedaan kurang lebih 4 tahun antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Balikpapan adalah 10,68 tahun sedangkan harapan lama sekolah sebesar 14,14 tahun. Hal ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan berbagai kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia ke depan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara



**Gambar 2.50 HLS Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

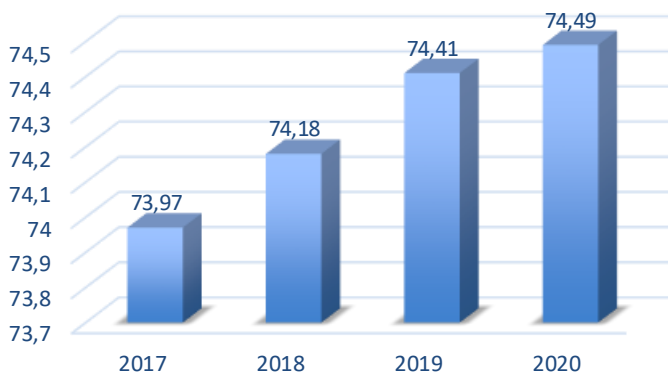
langsung, ketika target ini dicapai maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

Jika dilihat berdasar gender, harapan lama sekolah perempuan adalah 14,30 tahun dan laki-laki adalah 14,14 tahun. Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan lama sekolah sebesar 14 tahun.

**d. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak tahun 2017. Semakin meningkatnya AHH di Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Balikpapan semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi capaian AHH Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya.



**Gambar 2.51 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

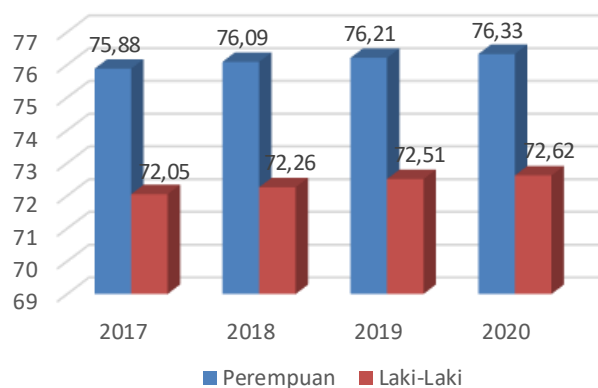
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

Pada tahun 2017 AHH Kota Balikpapan sebesar 73,97. Angka ini meningkat sedikit menjadi 74,18 pada tahun 2018. Hingga tahun 2020 AHH Kota Balikpapan mencapai 74,49. Hal ini menunjukkan bahwa harapan bayi yang baru lahir pada tahun 2020 dapat bertahan hidup hingga usia 74,49 tahun.

Seseorang yang dapat menikmati umur panjang selain dari upaya dari pribadi yang bersangkutan, juga diukur dari seberapa jauh upaya masyarakat atau pemerintah dengan penggunaan sumber daya yang tersedia mampu untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya masyarakat perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa berperilaku hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan sehat.

Berdasarkan gender, angka AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan AHH laki-laki. Hal ini dikarenakan faktor biologis dan tingkah laku dari setiap gender. Secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena pekerjaan berat, stres dan kebiasaan merokok.

Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum AHH laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Adapun untuk nilai minimum AHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka ini mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh UNDP. Pada tahun 2020, angka AHH laki-laki adalah 72,62 dan AHH



**Gambar 2.52 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Balikpapan Menurut Gender Tahun 2017-2020**

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

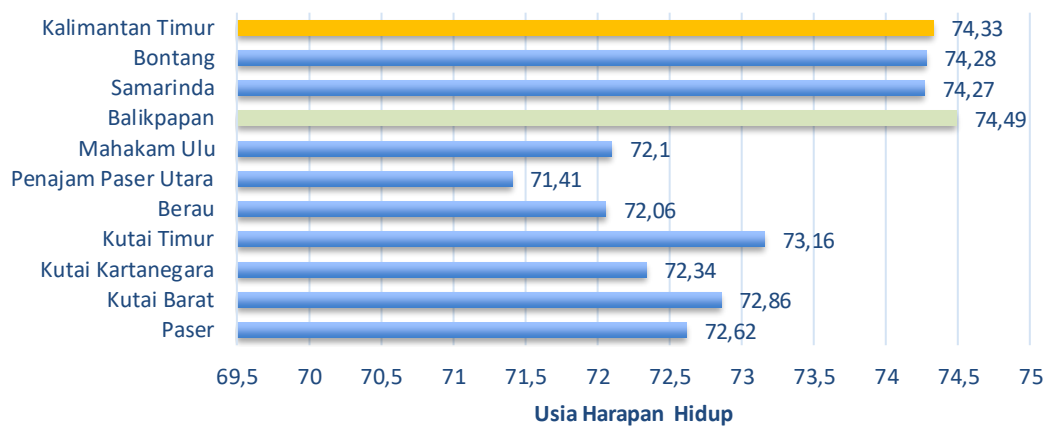
perempuan adalah sebesar 76,33. Sejak tahun 2017, nilai AHH perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan.

Pada tahun 2017 AHH laki-laki sebesar 72,05 sedangkan perempuan 75,88. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu AHH laki-laki meningkat menjadi 72,26 dan AHH perempuan menjadi 76,09. Hingga tahun 2020, AHH laki-laki berada diangka 72,62 sedangkan AHH perempuan meningkat menjadi 76,33. Peningkatan secara konsisten tiap tahunnya

mengindikasikan bahwa sistem dan kebijakan kesehatan yang selama ini diterapkan memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, selisih AHH perempuan dan laki-laki di Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi berkurang atau bahkan tidak muncul di Kota Balikpapan.

Angka harapan hidup saat lahir adalah salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. AHH Kota Balikpapan masih lebih tinggi dari AHH provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 0,16 poin. Tingginya AHH Kota Balikpapan disebabkan fasilitas kesehatan dan persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sudah semakin baik.



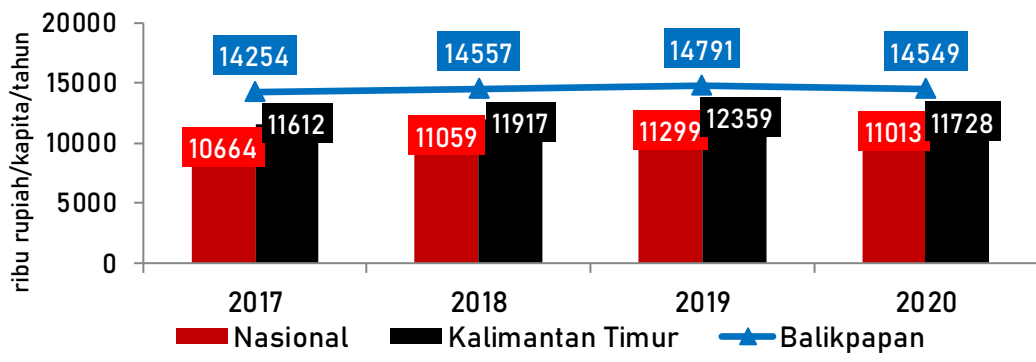
**Gambar 2.53 Umur Harapan Hidup (Tahun) se-Kalimantan Timur Tahun 2020**  
 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan, 2020

Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan pada tahun 2020 mencapai 74,49 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,08 bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 74,41 tahun.

**e. Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran per kapita Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yaitu sebesar Rp 14,254 juta/kapita/tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 14,791 juta/kapita/tahun pada 2019. Pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi sebesar Rp 14549 juta/kapita/tahun. Walaupun mengalami penurunan, pengeluaran perkapita Kota Balikpapan masih berada diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Seperti pada tahun 2020 pendapatan perkapita Provinsi sebesar Rp 11,728 juta/kapita/tahun dan Nasional sebesar Rp 11,013 juta/kapita/tahun.

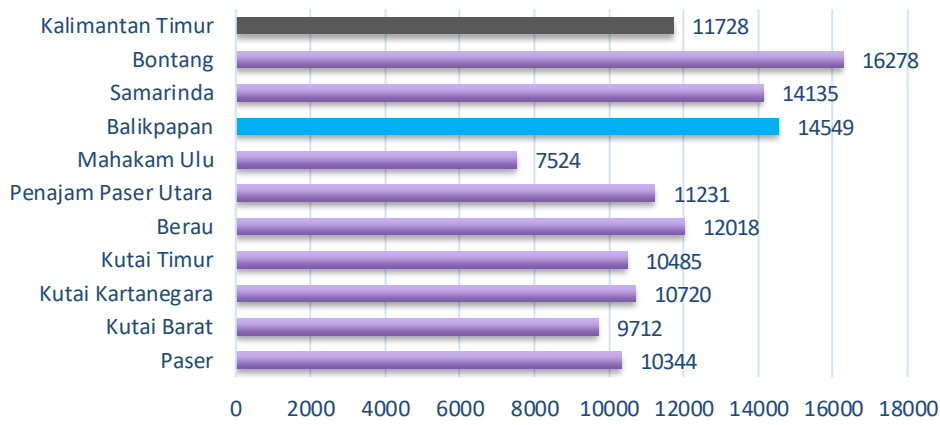




**Gambar 2.54 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2020**  
 Sumber: BPS diolah

Hal ini berarti, rata-rata pengeluaran penduduk di Kota Balikpapan selama setahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan juga di Indonesia.

Pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, pengeluaran per kapita Kota Balikpapan berada di peringkat kedua setelah Kota Bontang dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 16,278 juta/kapita/tahun. Sedangkan, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar Rp 7,524 juta/kapita/tahun.



**Gambar 2.55 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**  
 Sumber: BPS diolah

**f. Seni Budaya dan Olahraga**

Balikpapan adalah suatu kota yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnik yang merupakan cerminan dari Indonesia yang majemuk. Secara garis besar ada lima budaya dasar suku bangsa asal Kalimantan yang disebut Rumpun Kalimantan, empat di antaranya terdapat di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan yaitu: Banjar, Kutai, Dayak, Paser. Kemudian karena kemajuan kota Balikpapan sehingga banyak pendatang yaitu antara lain dari Jawa, Sulawesi, Madura. Berdasarkan asalnya, pendatang berasal dari pulau-pulau di sekitar seperti Jawa, Madura dan Sulawesi. Jumlah pendatang paling banyak berasal dari Jawa yakni sebanyak 30%, kemudian diikuti dengan Banjar dan Bugis masing-masing sebanyak 20%, Toraja sebanyak 11%, Madura sebanyak 8%, Buton sebanyak 7% dan Betawi sebanyak 4%. Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan

telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tercatat setidaknya 47 kelompok etnis/paguyuban yang ada di Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan menjadi salah satu kota yang tidak pernah terjadi konflik dan aman dari kerusuhan suku, agama dan ras.

**Tabel 2.10 Ormas dan Paguyuban Kota Balikpapan 2021**

NO	ORMAS DAN PAGUYUBAN
1	Paguyuban Keluarga Besar Ngawi (PKBN)
2	Kerukunan Warga Sukoharjo Solo (KWSS ) Balikpapan
3	Kerukunan Keluarga Buton (KKB)
4	Paguyuban Warga Ponorogo
5	Paguyuban Warga Asal Tulung Agung (PAWATA-BAKTI)
6	Paguyuban Keluarga Blitar (PKB) Balikpapan
7	Paguyuban Sedulur Agung Madiun
8	Paguyuban Keluarga Ngapak Banyumasan (PANGABAN)
9	Kerukunan Keluarga Wasilomata Buton (KKWB)
10	Saroha
11	Kerukunan Warga Dayak Dusun Ma'anyan (DUSMA)
12	Ikatan Keluarga Maluku Tenggara (IKAMALRA)
13	Kerukunan Keluarga Sasak Lombok NTB (KKSL-NTB)
14	Paguyuban Rantau Jawa Barat Balikpapan (PRJJB)
15	Paguyuban Keluarga Besar Surabaya (PKBS)
16	Pasungkudan Ne Tonsea (PNT)
17	Himpunan Keluarga Besar Bulukumba (HKBB)
18	Lembaga Adat Paser Balikpapan (LAPB)
19	Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
20	Forum Komunikasi Keluarga Jawa Timur (FKKJT)
21	Dp. Badan Silaturahmi Masyarakat Madura (BASMARA)
22	Dpd. Penggawa Adat Dayak Borneo Kota Balikpapan
23	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat
24	Paguyuban Warga Boyolali
25	Ikatan Keluarga Madura (IKAMA)
26	Paguyuban Menak Sopal Trenggalek (PMS)
27	Ikatan Kerukunan Keluarga Muna (IKKM) Balikpapan
28	Persekutuan Dayak Bahau "Beraan Pare" Balikpapan
29	Himpunan Keluarga Maluku Utara "Moloko Kie Raha"
30	Paguyuban Joyoboyo Kediri Balikpapan
31	Ikatan Keluarga Manggarai (IKM)
32	Kerukunan Keluarga Maluku Balikpapan (KKMB)
33	Keluarga Besar Arema Balikpapan
34	Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan
35	Lembaga Adat Paser Balikpapan (LAPB)
36	Pc.Pemuda Katolik Kota Balikpapan
37	Kerukunan Paguyuban Warga Lamongan Ronggo Hadi
38	Kerukunan Keluarga Luwu Palopo
39	Persekutuan Sangir Talaut (PST)
40	Paguyuban Seni Reog Singo Joyo Jati Kota Balikpapan
41	Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT)
42	Paguyuban Keluarga Ngayogyakarta Hadiningrat (PAKARYANING YOGYA)
43	Paguyuban Arema Balikpapan
44	Kerukunan Keluarga Minahasa Selatan ( KKMS )
45	Ikatan Masyarakat Asal Mandailing Kota Balikpapan (IMAM)
46	Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo ( KKIG )

NO	ORMAS DAN PAGUYUBAN
47	Kerukunan Keluarga Turatea (KKT) Jeneponto

Sumber: Kesbangpol, diolah 2021

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial masyarakat sedangkan jumlah klub olahraga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. berikut daftar data Fasilitas Umum Olahraga di Kota Balikpapan:

**Tabel 2.11 Data Fasilitas Umum Olahraga Di Kota Balikpapan**

NO	NAMA	ALAMAT
1	Lapangan Tembak Raider	Jl. Mulawarman Kelurahan Manggar Balikpapan Timur
2	Gelora Patra Pertamina	Jl. Jendral Sudirman, Prapatan - Balikpapan
3	Gedung havindo	Jl. MT. Haryono, Damai - Balikpapan
4	Balikpapan Tennis Stadium	Jl. Syarifuddin Yoes, Gunung Bahagia - Balikpapan
5	Pertamina Balikpapan Golf Club	Jl. Jendral Sudirman, Gn. Bahagia-Balikpapan
6	Waduk Manggar (Venues Dayung)	Jl. Mulawarman Kelurahan Lamaru - Manggar Balikpapan Timur
7	Gedung Olahraga Squash	Jl. Syarifuddin Yoes, Sepinggan - Balikpapan
8	Gedung Sepakbola Sudirman	Jl. Tanjung Pura, Prapatan-Balikpapan
9	PT. Inti Pratama (Lapangan Golf)	Jl. Soekarno Hataa KM. 5,5 RT.21 Balikpapan
10	PT. Sinar Mas Wisesa ( Bola Tennis)	Jl. MT. Haryono, Komperta Balikpapan Baru Rt. 15
11	CV. Wahana Griya Perdana (Bola Tennis)	Jl. Mulawarman No.51 Rt. 15 Balikpapan
12	Meteor 96 Sport	Jl. Ruhui Rahayu No, 75 Balikpapan
13	Balikpapan Sport Center	Jl. MT. Haryono No. 17 Balikpapan
14	Planet Futsal PT. Kaltim Jaya Raga	Jl. Syarifuddin Yoes, Balikpapan
15	Stadion Persiba	Jl. Minas Kompleks Pertamina Parikesit
16	CV. Wahana Griya Perdana (Renang)	Jl. Mulawarman No. 51 Rt. 15
17	PT. Sinas mas Wisesa (Renang)	Jl. MT. Haryono, Kompleks Balikpapan Baru
18	Kolam Renang Benua Patra	Jl. Jendral Sudirman Kompleks Pertamina

Sumber: <https://kaltimprov.go.id/>, diolah

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### a. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Adapun kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan merupakan Pemerintah Provinsi. Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya peningkatan SDM. Kota Balikpapan, pada tahun 2020, tercatat telah memiliki 209 Sekolah Dasar, 88 Sekolah Menengah Pertama, 32 Sekolah Menengah Atas, 33 Sekolah Menengah Kejuruan, dan 4 Sekolah Luar Biasa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

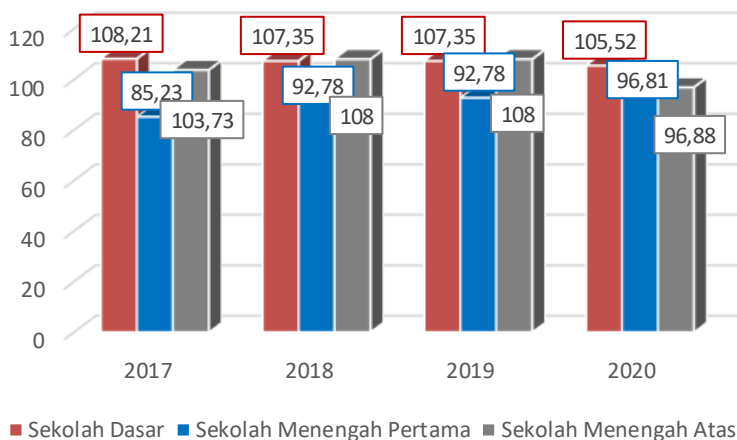
**Tabel 2.12 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2020**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>			
Negeri	136	53780	2820
Swasta	49	12340	786
MI	24	5405	310
<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>			
Negeri	23	20997	833
Swasta	51	24746	903
MTs	14	2389	203
<b>Sekolah Menengah Atas (SMA)</b>			
Negeri/Swasta	25	11390	595
MA	7	1129	125
<b>Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</b>			
Negeri/Swasta	33	16370	881
<b>Sekolah Luar Biasa (SLB)</b>			
SLB	4	634	75

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2021

### Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka partisipasi kasar tingkat SD, SMP maupun SMA Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Dimana capaian APK dari ketiga tingkat pendidikan mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan stagnan pada tahun



**Gambar 2.56 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020**

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

pada tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian APK tingkat SD sebesar 108,21 meningkat ditahun 2018 menjadi 107,35 dan angka ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian APK tingkat SMA sebesar 103,73 meningkat di tahun 2018 menjadi 108 dan angka ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian APK tingkat SD dan SMA mengalami penurunan menjadi 105,52 untuk SD dan 96,88 untuk SMA. Hanya capaian APK tingkat SMP yang mengalami peningkatan menjadi 96,81.

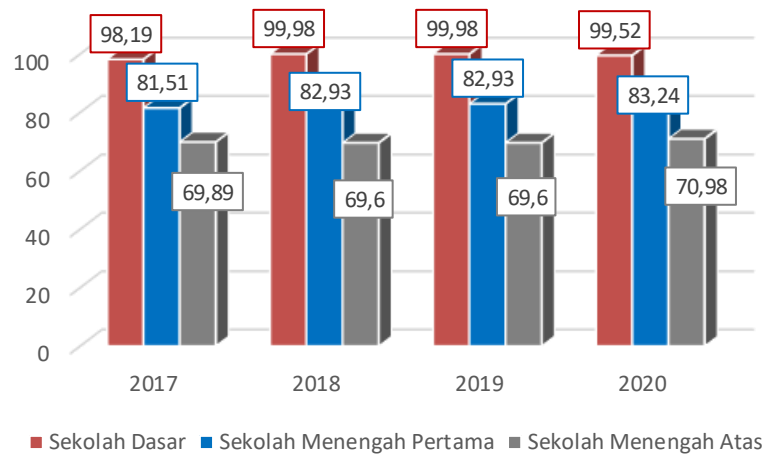
### Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk



kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



**Gambar 2.57 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020**

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021

Capaian angka partisipasi murni tingkat SD, SMP maupun SMA Kota Balikpapan menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Dimana capaian APM tingkat pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan stagnan pada tahun 2019. Sedangkan, capaian APM tingkat SMA mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan stagnan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian APM tingkat SD sebesar 98,19 meningkat di tahun 2018 menjadi 99,98 dan angka ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian APM tingkat SMP sebesar 81,51 meningkat di tahun 2018 menjadi 82,93 dan angka ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, capaian APM tingkat SMA sebesar 69,89 mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 69,6 dan angka ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, capaian APM tingkat SMP dan SMA mengalami peningkatan menjadi 83,24 untuk SD dan 70,98 untuk SMA. Hanya capaian APK tingkat SMP yang mengalami penurunan menjadi 83,24.

APM SD lebih dipengaruhi oleh usia siswa baru yang mendaftar masih berusia dibawah 7 tahun dan jumlah siswa yang usianya di atas 12 tahun, sehingga mempengaruhi ketercapaian APM SD. Belum tercapainya APM SMP dikarenakan masih terdapat siswa yang berusia di bawah 13 tahun dan siswa berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/Sederajat.

## 2. Kesehatan

Salah satu aspek penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

**Tabel 2.13 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2020**

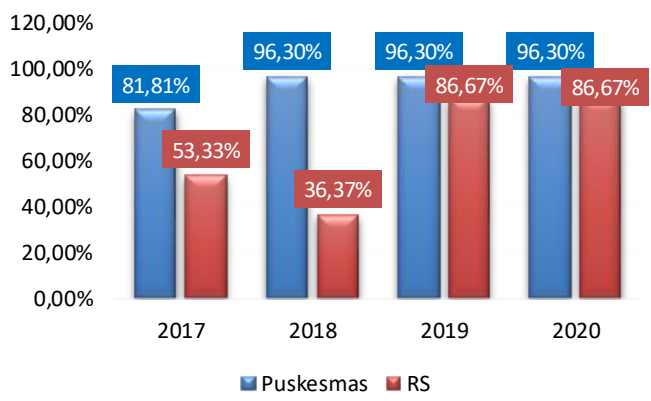
Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Kecamatan Balikpapan Timur	Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Barat	Total
Rumah Sakit	6	4	0	1	2	0	13

Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Kota	Kecamatan Balikpapan Timur	Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Barat	Total
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	1	1	2
Poliklinik	16	12	1	9	5	2	45
Puskesmas	2	4	4	5	6	6	27
Puskesmas Pembantu	2	0	3	6	0	2	13
Apotek	41	15	14	28	22	8	128

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka, 2021

Dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Balikpapan telah tersedia layanan kesehatan mulai tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit. Meskipun begitu, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2020, di Kota Balikpapan terdapat 13 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, dan 45 poliklinik yang ditunjang dengan 27 puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan.

Selain dilihat dari kuantitasnya, penting juga untuk melihat kualitas sarana kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sarana kesehatan adalah persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi nasional. Dilihat berdasarkan persentasenya, jumlah rumah sakit dan puskesmas yang telah terakreditasi nasional terus mengalami grafik peningkatan setiap tahunnya, bahkan peningkatan persentasenya cukup signifikan.



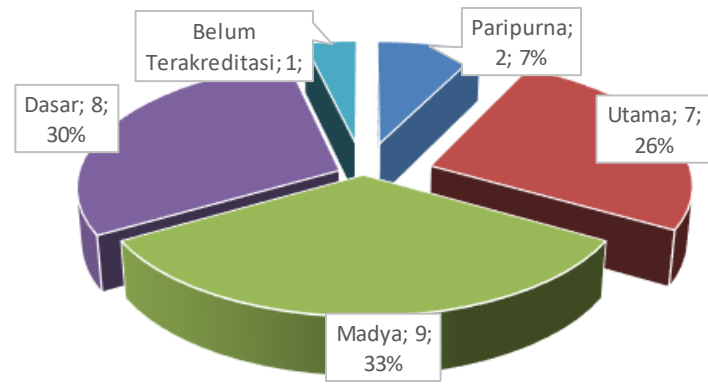
**Gambar 2.58 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional di Kota Balikpapan tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

terakreditasi mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 96,30% dan 86,67%. Hingga tahun 2020, angka ini masih sama dengan tahun 2020

Secara keseluruhan, grafik peningkatan ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kualitas sarana layanan kesehatan yang berkorelasi baik dengan hasil penilaian akreditasi. Akan tetapi memang masih perlu diupayakan setiap sarana layanan kesehatan tersebut memiliki nilai akreditasi yang juga meningkat setiap tahunnya.

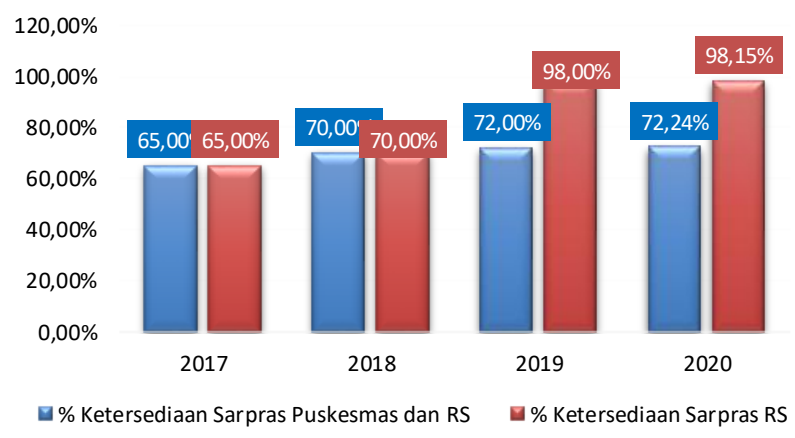
Jika dijabarkan menurut tingkatan akreditasinya, predikat akreditasi tertinggi hingga terendah adalah paripurna, utama, madya, dan dasar. Adapun tingkatan akreditasi di Kota Balikpapan didominasi oleh puskesmas dengan tingkat akreditasi madya yaitu sebanyak 9 puskesmas atau sekitar 33%. Lalu diikuti oleh tingkat akreditasi dasar yaitu sebanyak 30%. Sedangkan puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna hanya berjumlah dua puskesmas atau sekitar 7%. Untuk tingkat utama sebanyak 7 puskesmas atau sekitar 26%.



**Gambar 2.59 Persentase Akreditasi Puskesmas Kota Balikpapan**  
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

Adapun jika dilihat berdasarkan sarana dan prasarananya, indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional untuk puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, untuk rumah sakit. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit di Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

Pada tahun 2017, baik rumah sakit maupun puskesmas memiliki persentase ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 65%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 70% baik untuk rumah sakit maupun puskesmas. Hingga tahun 2020, persentase untuk rumah sakit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase dari puskesmas. Untuk rumah sakit persentase ketersediaannya mencapai 98,15% sedangkan untuk puskesmas masih di angka 72,24%.



**Gambar 2.60 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Di Kota Balikpapan tahun 2017-2020**  
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2020

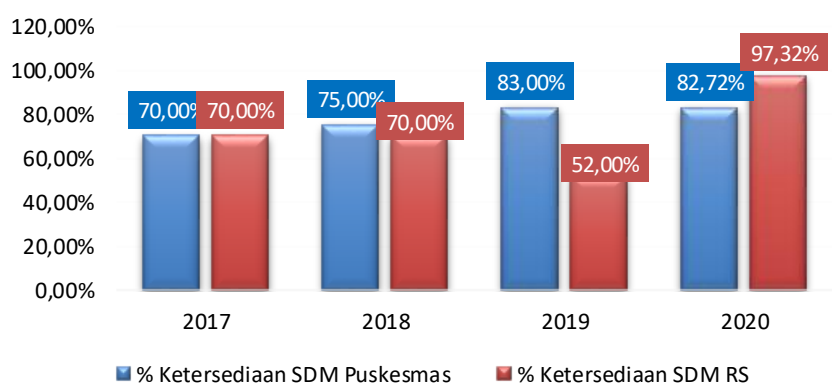
Walaupun secara grafik kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan. Salah satunya kendalanya adalah masih

kurangnya upaya untuk menyesuaikan standar dan kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan regulasi terbaru. Beberapa Sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan belum sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Biasanya yang terjadi di Puskesmas adalah masih bergabung ruang perawatan dengan ruang administrasi, sehingga belum memenuhi standar akreditasi. Permasalahan lainnya adalah alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih belum memadai, Persentase ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) masih dibawah 60% di setiap puskesmas. Terkait dengan jangkauan operasional juga masih belum memadai untuk melayani seluruh wilayah di Kota Balikpapan. Kendaraan operasional untuk petugas di fasilitas kesehatan belum terpenuhi secara maksimal, misalnya kendaraan dinas operasional petugas. Hal ini menyulitkan ketika memberikan pelayanan kesehatan di lapangan.

Selain itu, masih belum optimalnya kualitas sarana layanan kesehatan juga terlihat dari masih rendahnya penerapan teknologi untuk memudahkan pelayanan dan pengelolaan urusan kesehatan. Salah satu penghambatnya adalah keterbatasan pemenuhan fasilitas pendukung fasilitas kesehatan seperti kapasitas listrik dan jaringan internet menyulitkan beberapa fasilitas kesehatan ketika menggunakan beberapa aplikasi seperti pengisian di aplikasi *Rainboot* 4.0 untuk penyusunan perencanaan kebutuhan kesehatan.

Di samping keterbatasan fasilitas dasar yang disebutkan diatas, kendala lainnya adalah masih kurangnya fasilitas infrastruktur jaringan untuk penerapan teknologi seperti ketersediaan database kesehatan, server, dan lain-lain. Terkait SDM juga menjadi salah satu yang menjadi hambatan. Keterbatasan pengetahuan petugas dalam penggunaan aplikasi teknologi yang menyebabkan pemanfaatan IT menjadi tidak merata di beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Ketiga hal ini menjadi kendala terbesar bagi Dinas Kesehatan untuk menerapkan sistem kesehatan yang berbasis teknologi.

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM kesehatan. Untuk melihat tingkat ketersediaan SDM tenaga kesehatan di puskesmas mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun



**Gambar 2.61 Persentase Ketersediaan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Balikpapan tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2020

2014 tentang Puskesmas. Sumber Daya Manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Pada tahun 2017, realisasi ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit



sebesar 70%. Realisasi tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami stagnansi pada tahun 2018, namun pada puskesmas mengalami peningkatan menjadi 75%. Pada tahun 2019, realisasi tenaga kesehatan pada puskesmas terus mengalami peningkatan menjadi 83%, namun mengalami penurunan menjadi 82,72% pada tahun 2020.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 52% dan mengalami peningkatan menjadi 97,32% pada tahun 2020.

Adapun untuk SDM Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja.

Secara keseluruhan dilihat berdasarkan tenaga kesehatannya, Kota Balikpapan memiliki jumlah yang sudah cukup baik akan tetapi memang perlu untuk ditingkatkan khususnya untuk SDM kesehatan di rumah sakit. Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah jumlah SDM untuk puskesmas masih belum ideal karena terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa standar SDM untuk Puskesmas kawasan perkotaan non rawat inap persyaratan SDMnya bahwa jumlah minimal perawat 5 orang dan bidan 4 orang. Masih terdapat beberapa puskesmas hanya memiliki 2 bidan. Selain itu belum semua puskesmas memiliki apoteker. Tercatat baru 15 puskesmas yang memiliki apoteker. Persyaratan lainnya dari kementerian kesehatan adalah harus ada 2 tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) setiap puskesmas. Kondisi saat ini hampir puskesmas belum memiliki promkes. Puskesmas di Balikpapan juga belum ada yang memiliki tenaga kesehatan lingkungan.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer ini mengakibatkan petugas melakukan rangkap jabatan yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja mereka. Selain itu, adanya rencana pembangunan Rumah Sakit di wilayah timur Kota Balikpapan masih perlu dikaji lagi terkait dengan pemenuhan SDM nya. Hal ini mengingat kondisi saat ini Kota Balikpapan masih kekurangan SDM tenaga kesehatan.

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menysasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil.

**Tabel 2.14 Angka Kematian Ibu Tahun 2017-2020**

Tahun	AKI/100.000 KH
2017	78/100.000 KH
2018	72/100.000 KH
2019	64/100.000 KH
2020	73,43/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

Pemeriksaan ibu hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran.

Angka Kematian Ibu tahun 2020 sebesar 73,43 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 78 per 100.000 KH. Capaian pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan berhasil menekan angka kematian ibu hamil setiap tahunnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak semakin meningkat dan kesadaran ibu dalam pemeriksaan kehamilan juga meningkat.

Angka kematian ibu memang telah mengalami penurunan, namun upaya penanganan terkait kesehatan ibu hamil belum sepenuhnya bebas dari kendala dan permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan dan informasi terkait penanganan kondisi darurat terhadap ibu hamil yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah Ibu hamil belum semua mendapatkan ANC (*Antenatal Care*) terpadu. Kualitas dari ANC juga belum sesuai dengan standar sehingga informasi dan pengetahuan di dalamnya masih perlu ditingkatkan. Terkadang ibu hamil baru datang saat usia kandungan 6 bulan ke fasilitas kesehatan.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, Pelayanan *Antenatal Care* ini menjadi salah satu pelayanan yang wajib dipenuhi oleh daerah kepada ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan juga wajib memberikan vaksin tetanus, tablet penambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).

Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya upaya penanganan medis terhadap ibu hamil. Penanganan medis yang cepat dan tepat terkendala oleh mekanisme rujukan karena alur birokrasi yang panjang sehingga sering terlambat dalam hal waktu penanganan terhadap ibu hamil. Kemudian masih terdapat juga ditemukan kehamilan pada usia risiko tinggi, pada anak-anak dan usia yang sudah risiko tinggi, sehingga ini yang bisa menimbulkan kematian ibu. Penyiapan komponen darah juga masih belum optimal, hal ini terkadang menyulitkan tenaga medis untuk memberikan penanganan medis terhadap ibu hamil. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Kesehatan perlu untuk melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan seperti IDI untuk melakukan monitoring ke tempat-tempat praktik.

Selain kesehatan ibu, aspek lainnya yang diperhitungkan derajat kesehatan anak yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Realisasi capaian AKB di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7/1.000 KH. Sedangkan untuk AKBA masih mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2018, angka ini mengalami peningkatan menjadi 8/1.000 KH. Lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7/1.000 KH, hingga tahun 2020 masih berada pada angka yang sama.

Indikator ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 3 sasaran 2 terkait dengan upaya menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12/1.000 KH. Realisasi AKB Kota Balikpapan jika dikaitkan dengan SDGs sudah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi untuk mengoptimalkan penurunan AKB, perlu untuk memperhatikan sasaran lainnya yaitu pemenuhan persentase imunisasi dasar lengkap sebanyak 80%.

**Tabel 2.15 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKBA)	6/1.000 KH	8/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

Masih naik turunnya kedua indikator diatas diakibatkan oleh masih adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah kelengkapan peralatan medis yang terbatas menyulitkan tenaga kesehatan ketika akan melakukan pertolongan medis terhadap bayi yang mengalami gangguan kesehatan. Masih minimnya kelengkapan tersebut ditambah dengan kapasitas SDM tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya baik dalam hal penanganan persalinan. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga terkait penanganan kondisi darurat, salah satu penyebabnya adalah penyusunan buku kesehatan ibu dan anak tidak terisi dengan lengkap. Pemberian edukasi secara rutin juga belum dilaksanakan dengan baik. Pemberian edukasi ini seharusnya dapat dioptimalkan melalui sosialisasi melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku KIA yang ada saat ini belum lengkap sesuai dengan regulasi terbaru.

Jika mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, Buku KIA wajib memuat pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. Selain itu setiap bayi (usia maksimal 28 hari) wajib mendapatkan vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B, serta penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Pada aspek ini, penilaian terhadap kesehatan masyarakat dinilai dari tingkat penanganan terhadap penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Beberapa jenis penyakit yang rawan menjangkiti masyarakat seperti *tuberculosis*, demam berdarah (DBD), HIV dan AIDS, serta angka gizi buruk.

Untuk mengukur tingkat penanganan terhadap penyakit HIV dan AIDS indikator yang digunakan adalah prevalensi HIV dan AIDS. Dilihat berdasarkan data dari tahun 2017 hingga tahun 2019, angka prevalensi HIV dan AIDS di Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 angka prevalensinya mengalami peningkatan menjadi 2,26. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 0,43. Tingginya angka peningkatan pada tahun 2019 disebabkan oleh rendahnya deteksi kasus penemuan pada HIV. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemantauan pemantauan terhadap pasien-pasien HIV. Tercatat baru dua puskesmas yang melakukan

pemantauan terhadap pasien HIV. Jika mengacu pada SPM bidang kesehatan terkait pelayanan kesehatan bagi orang berisiko HIV, pelayanan kesehatan berupa deteksi HIV diberikan kepada kelompok yang rentan seperti ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pengguna NAPZA suntik, warga binaan pemasyarakatan, dan penaja seks. Adapun skrining dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

Adapun untuk penyakit Demam Berdarah (DBD) persentasenya cenderung mengalami fluktuasi angka. Sempat mengalami menyentuh angka 78,3/100.000 pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 240,65/100.000, hingga pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan menjadi 112,46/100.000.

Hal yang sama juga terjadi pada penanganan penyakit *tuberculosis* (TBC) yang mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 dan 2018, prevalensi TBC adalah 199,5/100.000. angka ini mengalami lonjakan yang signifikan menjadi 272,29/100.000 penduduk pada tahun 2019. Hingga terjadi penurunan angka pada tahun 2020 menjadi 123,90/100.000 penduduk. Fluktuasi angka ini disebabkan karena tingginya *undetected case* di kelompok berisiko, ketidakpatuhan berobat, *missing case* di Rumah Sakit dan Klinik, serta net nya TBMDR. Perlunya untuk meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko individu kontak. Selain itu, penyebab lainnya adalah belum optimalnya penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Tuberculosis Terpadu (SITT) karena masih terbatas pada rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan pada klinik dan praktik-praktik dokter belum maksimal penggunaannya.

Adapun untuk prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan grafik yang belum optimal karena mengalami kenaikan di tahun 2019. Pada tahun 2017 indikator masih di angka 2,53%. Sempat terjadi penurunan menjadi 2,22% di tahun 2018, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 2,7% pada tahun 2019. Hingga akhirnya angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 2,20% pada tahun 2020.

Upaya penanganan kesehatan masyarakat ini sudah diupayakan penanganannya dengan meningkatkan program kelurahan siaga aktif dan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Cakupan kelurahan siaga aktif adalah cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Capaian indikator ini tiap tahunnya konsisten berada diangka 100%.

**Tabel 2.16 Angka Penderita Penyakit HIV dan AIDS, Demam Berdarah, dan TBC di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Prevalensi HIV dan AIDS	0,05	0,05	2,26	0,43



Indikator	2017	2018	2019	2020
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	240,65/100.000 penduduk	112,46/ 100.000 penduduk
Prevalensi TBC	199,5/100.000 penduduk	199,50/100.000 penduduk	272,29/100.000 penduduk	123,90/100.000 penduduk
Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang	2,53%	2,22 %	2,7%	2,20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

Adapun cakupan UKBM aktif adalah Jumlah seluruh posyandu, polindes dan desa siaga aktif yang digunakan oleh masyarakat. Capaian indikator ini mengalami peningkatan walaupun peningkatannya baru terjadi di tahun 2017 yaitu dari 50% menjadi 50,74%. Hingga tahun 2020, capaian indikator ini adalah 80%. Belum Optimalnya realisasi keaktifan UKBM ini dapat menjadi salah satu penyebab terkait masih rendahnya pemantauan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan UKBM (Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat seperti posyandu, polindes, dan desa siaga). Persentase Cakupan UKBM yang aktif pada tahun 2019 masih di angka 75%. Berdasarkan data saat ini, jumlah posyandu yang aktif sebanyak 711 posyandu dan 119 Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

**Tabel 2.17 Cakupan Kelurahan Siaga dan UKBM Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%
Cakupan UKBM Aktif	50,74%	60%	75%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2021

Penyebab lainnya yang juga kerap dihadapi adalah perilaku hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung untuk mencegah penyakit. Perilaku masyarakat dalam menjalankan pola hidup sehat masih kurang. Untuk kasus PTM, permasalahannya adalah faktor perilaku dari masyarakat yang belum sepenuhnya berperilaku hidup sehat seperti dari diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas. Selain itu terkait sanitasi juga masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun.

Upaya penanganan penyakit ini juga kerap kali dihadapkan oleh rendahnya kesadaran terhadap konsumsi obat. Penggunaan obat secara rasional masih rendah yang disebabkan karena kepercayaan tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih kurang. Khususnya terhadap obat generik yang dianggap kurang bagus. Selain sosialisasi yang belum optimal terkait dengan produk obat produk dalam negeri juga menjadi penyebab lainnya. Proses perencanaan obat juga masih mengalami beberapa kendala seperti Sistem Rencana Kebutuhan Obat (RKO) masih belum mewakili kebutuhan obat di fasilitas kesehatan karena belum semua fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait mengisi daftar kebutuhan obat, pedoman perencanaan obat belum mengakomodir kesesuaian kebutuhan obat, kurang sinkronnya antara kebutuhan dan perencanaan obat berdampak ketidaksesuaian harga obat yang beredar di masyarakat, dan penyediaan obat secara mandiri oleh bidang kesehatan terhambat oleh ketersediaan bahan baku masih

banyak kendala. Upaya pemenuhan obat ini juga terkendala oleh adanya regulasi impor bahan baku obat yang menyulitkan.

### 3. Sosial

Bidang sosial menjadi salah satu aspek yang memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan. Berikut capaian kinerja urusan sosial:

**Tabel 2.18 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020**

NO	Program / Kegiatan	Tingkat Capaian SPM / Realisasi Program (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	100	99,83	93,68	93,33	63
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	76,59	89,15	98,72	88
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	46,49	90,72	98,12	83,24	90
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	49	54,74	93,96	58,06	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	37,25	84,37	85,14	67,84	100
6	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	N/A	84,37	85,14	68,00	86,66
7	Persentase PMKS yang Menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	N/A	84,07	120,65	74,26	75,33
8	Persentase PSKS yang telah dibina	N/A	61,06	85,12	78,60	23,92
9	Persentase PMKS Miskin yang Terlayani	N/A	23,65	100	49	165,42
10	Persentase PMKS Miskin penerima Bantuan Sosial Pangan yang terlayani	N/A	90,00	41,63	83,72	121,90
11	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	N/A	56,68	107,75	146,46	154,20
12	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Logistik bagi Korban Bencana	N/A	31,25	33,75	33,47	12,75

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2021

Bidang sosial menjadi salah satu aspek yang memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan, salah satunya dalam hal rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga 2020, dimana capaian indikator ini menyentuh angka 100% pada tahun 2016, namun pada tahun 2020 angka ini hanya sebesar 63%. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar mengalami capaian yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, capaian indikator ini mencapai 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 76,59%. Pada tahun 2018 hingga 2019, pelayanan indikator ini mengalami peningkatan hingga mencapai 98,72% pada tahun 2019. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 88%. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk lansia terlantar juga mengalami capaian yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, capaiannya hanya sebesar 26,49%, angka ini terus meningkat hingga mencapai 98,12% pada tahun 2018. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 83,24% pada tahun 2019, angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 90%. Untuk capaian pelayanan rehabilitasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis pada tahun 2016 hanya sebesar 49%, hingga pada tahun 2020, angka ini mencapai 100%.

Selain itu, pelayanan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana dalam bentuk: (a) penampungan sementara; (b) bantuan Pangan; (c) sandang; (d) air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 86,66%. Pada indikator berikutnya cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 dengan 120,65% yang menerima bantuan. Selanjutnya, pada capaian tahun 2020 persentase PMKS yang menerima bantuan sosial sebesar 75,33%.

Upaya pemenuhan kebutuhan sosial di Kota Balikpapan memang masih pada tahap pengembangan dan peningkatan institusi sosial yang ada. Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas untuk mendistribusikan dan memastikan logistik serta penanganan sosial tentu membutuhkan bantuan dari pihak lainnya. Salah satunya adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Perkembangan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami perkembangan yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 34 orang.

Jumlah lembaga/organisasi sosial mengalami peningkatan dari 32 lembaga pada tahun 2017, menjadi 37 lembaga pada tahun 2018, namun hingga tahun 2020 angka ini tidak mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi pada yayasan sosial. Jumlahnya mengalami penurunan cukup signifikan yang mana pada tahun 2020 tercatat hanya 8 yayasan sosial.

**Tabel 2.19 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	6	6	6	6	6
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	34	34	34	34	34
3	Taruna Siaga Bencana	95	95	95	95	84
4	Karang Taruna	34	34	34	34	34
5	Lembaga/Organisasi Sosial	32	32	37	37	37
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-	-	-	-
7	Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)	20	20	20	20	20
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	30	30	35	35	35
9	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)	2	2	2	2	2
10	Yayasan Sosial	19	19	8	8	8
11	Lembaga Sumbangan Sosial	10	10	10	15	15
12	CSR Perusahaan Lingkungan	-	-	-	-	-

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021

#### 4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,18 km sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan. Berdasarkan survei kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan oleh DPU Kota Balikpapan tahun 2020 bahwa persentase tertinggi kualitas jalan Kota Balikpapan terdapat pada kualitas baik sebesar 72,89%.

**Tabel 2.20 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2020**

Kualitas	2016		2017		2018		2019		2020	
	km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	396,58	79,13	95,39	19,04	288,95	57,65	268,99	53,67	365,31	72,89

Kualitas	2016		2017		2018		2019		2020	
	km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sedang	85,93	17,15	295,56	58,97	133,24	26,58	150,13	29,96	96,59	19,27
Rusak	18,66	3,72	58,60	11,69	30,55	6,10	54,44	10,86	38,91	7,76
Rusak Berat	-	0,00	51,63	10,30	48,44	9,66	27,61	5,51	0,38	0,08
Jumlah	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00	501,18	100,00

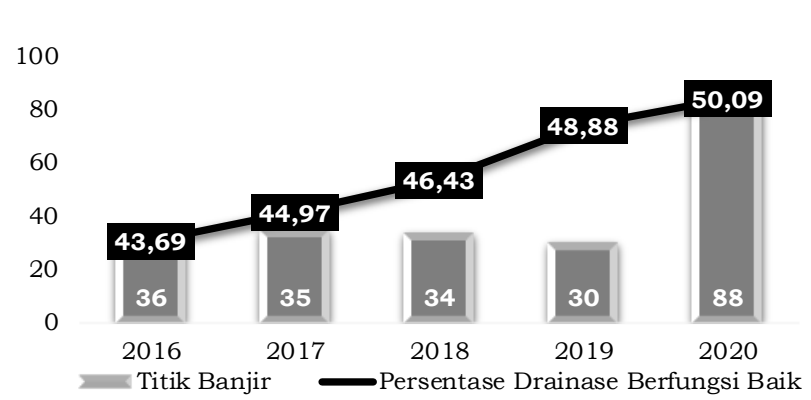
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2020

Adanya perkembangan infrastruktur yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki pengaruh terhadap indeks aksesibilitas kawasan perkotaan. Capaian realisasi indeks aksesibilitas menunjukkan adanya fluktuasi capaian aksesibilitas setiap tahunnya. Pada tahun 2017, indeks aksesibilitas kawasan perkotaan di Kota Balikpapan sebesar 1,41. Indeks ini mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 1,427, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 – 2020 menjadi masing-masing sebesar 1,430 dan 1,475.

**Tabel 2.21 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Tahun	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
2016	-
2017	1,45
2018	1,427
2019	1,430
2020	1,475

Sumber: Dinas PU, 2020



**Gambar 2.62 Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sumber: TPA Manggar Kota Balikpapan 2020

Kondisi drainase menunjukkan adanya peningkatan pemeliharaan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Pada tahun 2017, persentase indikator ini masih diangka 44,97%. Kemudian meningkat menjadi 46,43% di tahun 2018. Hingga tahun 2020 indikator ini mengalami peningkatan mencapai 50,09%.

Peningkatan kualitas drainase ini berkorelasi lurus dengan menurunnya titik banjir di Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir Kota Balikpapan pada tahun 2019 adalah sebanyak 30 titik banjir. Hal tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2018 yang titik banjirnya sebanyak 34 titik. Beberapa kendala yang dihadapi dalam permasalahan banjir adalah belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran drainase sehingga kegiatan belum terlaksana 100%. Namun pada tahun 2020, titik banjir di Kota Balikpapan mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

Terkait dengan pengelolaan drainase, di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di



Selain drainase, penting juga untuk melihat kondisi irigasi sebagai salah satu infrastruktur dasar untuk masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen.

Salah satu permasalahan dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku saat ini terdiri air permukaan yang sebagian besar disediakan oleh Waduk Manggar. Kekurangan sumber air baku pada tahun 2020 adalah sebesar 628 liter/detik dari kebutuhan total 2.198 liter/detik. Adapun sumber air baku lainnya berasal dari sungai-sungai kecil dan beberapa sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

**Tabel 2.22 Sumber Air Baku Kota Balikpapan**

No	Sumber Air Baku	2016 (Lt/dtk)	2017 (Lt/dtk)	2018 (Lt/dtk)	2019 (Lt/dtk)	2020 (Lt/dtk)
1	Waduk Manggar	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Sungai Selok Api	20	20	20	-	-
3	Sungai Jembatan Besi	20	20	20	-	-
4	Sumur Dalam	225	225	225	225	250
5	Waduk Teritip	-	-	250	-	220
6	Embung Aji Raden	-	-	-	150	-
7	SWRO	-	-	-	50	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.615</b>	<b>1.525</b>	<b>1.570</b>

Sumber: PDAM Kota Balikpapan

Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga bulan November tahun 2020 cakupan pelayanan PDAM Kota Balikpapan telah mencapai 81,37 %. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	762.492	769.919	644.315	667.188	697.079
2	Jumlah pelanggan (SR)	95.781	98.111	100.199	103.144	108.161
3	Cakupan pelayanan (%)	76,5	76,56	79,05	79,6	81,37
4	Kapasitas produksi (l/det)	1.147,20	1.215	1.276	1.305	1.408
5	Panjang perpipaan (m)	1.308.767	1.335.998	1.359.110	1.375.944	1.375.944
6	Persentase Kehilangan Air (%)	30,46	34,36	33,23	31,55	30,4

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2020

Sementara itu, untuk pengelolaan air limbah, Kota Balikpapan terus upaya untuk menyediakan fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju Universal Access Tahun 2019. Sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 2.076

Sambungan Rumah (SR). Hal ini mengalami peningkatan dari 1.308 Sambungan Rumah setelah dilaksanakan pengembangan jaringan yang bersumber dari pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018. Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2019 sebanyak 53 unit atau 2.603 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Untuk meningkatkan layanan air limbah di Kota Balikpapan khususnya untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK.

**Tabel 2.24 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2015-2020**

No	Tahun	Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah		
		Sambungan Rumah (SR) IPAL Terpusat	IPAL Komunal (Unit)	Tangki Septik yang sesuai dengan SNI
1	2016	500	2	-
2	2017	-	5	-
3	2018	-	10	450
4	2019	-	7	-
5	2020	-	-	42
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>24</b>	<b>492</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2019

Terkait dengan persampahan, Volume sampah Kota Balikpapan masuk ke TPA Sampah Manggar pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 8,8 ton apabila dibandingkan dengan tahun 2018.



**Gambar 2.63 Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sumber: TPA Manggar Kota Balikpapan 2020

Hal tersebut dipengaruhi oleh proyek strategis pertama yaitu Refinery Development Master Plan (RDMP) tetapi Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan atau menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA, salah satu cara yang dilakukan yaitu menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. Hingga pada tahun 2020, volume sampah yang masuk mengalami penurunan sebesar 48,54 ton.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan khususnya untuk sub sektor persampahan, terdapat beberapa sarana dan prasarana Persampahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah menurun baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 728 dengan rincian 723 dalam kondisi baik dan 5 dalam kondisi rusak. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dimana jumlahnya hanya sebanyak 601. Hingga tahun 2020 jumlah sarana dan prasarana persampahan sebanyak 576 dengan rincian 218 dalam

kondisi baik dan 358 dalam kondisi rusak. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi sarana dan prasarana yang memiliki jumlah kerusakan terbanyak yaitu 291 TPS. Terkait dengan sarana dan prasarana persampahan, berikut adalah tabel uraiannya:

**Tabel 2.25 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

No	Infrastruktur	2016		2017		2018		2019		2020	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Truk	48	5	54	5	54	5	54	6	71	8
2	TPS	566		410		410		410		73	291
3	TPS 3R	3		6		3	3	3	3	4	3
4	Bank Sampah	105		125		69	56	69	56	69	56
5	MRF	1		1		1		1		1	
<b>Jumlah</b>		<b>723</b>	<b>5</b>	<b>596</b>	<b>5</b>	<b>537</b>	<b>64</b>	<b>537</b>	<b>65</b>	<b>218</b>	<b>358</b>

Sumber: DLH Kota Balikpapan 2020

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak sampah ini, pemerintah Kota Balikpapan melakukan beberapa kegiatan seperti optimalisasi peningkatan pelayanan persampahan sebesar 99%. Optimalisasi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah produksi sampah khususnya bagi rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Kegiatan lainnya yang perlu digalakkan adalah pelaksanaan *Pilot Project* Pemilahan Sampah di sumber, di Kelurahan Gunung Bahagia. Rencana ini diharapkan dalam ditularkan ke beberapa titik-titik potensi di kelurahan, sehingga masifikasi pemilahan sampah dapat dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya adalah peningkatan pembentukan bank sampah (salah satunya terdapat bank sampah induk), TPS 3R. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, terjadi penurunan jumlah dan kualitas beberapa sarana prasarana persampahan sehingga menghambat upaya pengelolaan sampah secara komprehensif. TPA Manggar juga akan diperluas agar penampungan sampah juga akan semakin meningkat. Pengoperasian *Materail Recovery Facility* (MRF) dan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) juga diharapkan dapat membantu percepatan pengelolaan sampah secara terpadu. TPA Manggar adalah fasilitas milik Pemerintah Kota Balikpapan yang berdiri di atas lahan seluas 49,89 hektar di jalan Proklamasi RT. Upaya lainnya setelah mengoptimalkan pengelolaan sampah, pemerintah akan melaksanakan kerjasama dengan PT.Pupuk Indonesia dalam hal pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik.

Terkait penataan ruang di Kota Balikpapan diperlukan dokumen perencanaan yang baik dan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun demikian, hingga tahun 2020 proses penyusunan peraturan daerah terkait RTRW, RDTR, Insentif dan Disinsentif masih belum selesai dan terus berproses. Ditargetkan penyusunan ketiga perda ini akan selesai pada tahun 2021. Selain proses penyelesaian perda di atas, perlu juga adanya pembaruan data terhadap peta yang mengikuti perkembangan Kota Balikpapan. Salah satu kendala yang menghambat pembaharuan peta tata ruang di Kota Balikpapan adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga proses updating peta tersebut dilakukan secara berkala atau bertahap. Dalam hal penyediaan dokumen petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan jumlahnya masih kurang. Pada tahun 2020 jumlah dokumen sebanyak 6.248 dokumen.

**Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2017 – 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
Perda tata ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif dan Disinsentif)	Dokumen	0	-	0	2
Persentase penerbitan pemanfaatan ruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58
Persentase rencana tata ruang yang disusun	%	40	45	88	100
Jumlah rencana rinci tata ruang/kota	Dokumen	0	0	0	2
Jumlah kesediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	1.809	3.538	4.999	6.248
Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	%	98,1	98,24	98,4	98,58

Sumber: DPPR Tahun 2021

## 5. Perumahan dan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk hal ini, hingga tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan hasil identifikasi awal tidak terdapat permukiman yang signifikan berada di atas kawasan rawan bencana. Untuk menindaklanjuti akan dilaksanakan identifikasi yang lebih detail pada tahun 2021 terhadap permukiman yang berada di kawasan rawan bencana serta yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Balikpapan.

Fungsi strategis yang dilaksanakan dari urusan perumahan dan permukiman adalah mengurangi luasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 5.580 Unit. Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2016-2020 adalah sebanyak 948 unit yang terdiri dari 435 unit dari pembiayaan APBN Pusat, 110 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 388 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan.

**Tabel 2.27 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2020**

Tahun	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota	Jumlah
2016	-	15	0	<b>15</b>
2017	200	0	105	<b>305</b>
2018	0	0	97	<b>97</b>
2019	235	50	77	<b>362</b>
2020	0	60	109	<b>169</b>
<b>Jumlah</b>	<b>435</b>	<b>125</b>	<b>388</b>	<b>948</b>

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan 2021

Masalah yang kerap dihadapi terkait peningkatan kualitas RTLH adalah kian meningkatnya jumlah populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan ketersediaan



lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat.

Setidaknya masih terdapat 5.580 rumah tidak layak huni berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh. Peningkatan kualitas sanitasinya yang seharusnya dilakukan terkendala oleh sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Tidak adanya fasilitas IPAL menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kualitas sanitasi masyarakat.

Upaya untuk menangani permasalahan belum sepenuhnya optimal. Beberapa rumah tidak layak huni tidak dapat diintervensi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman karena tidak masuk dalam kriteria RTLH. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kepemilikan tanah. Apabila sebuah rumah sudah dalam status tidak layak huni, akan tetapi status kepemilikan lahannya belum ada, maka tidak termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki.

Berikut *baseline* data jumlah rumah tidak layak huni Kota Balikpapan Tahun 2020 sesuai dengan laporan pendataan RTLH 2021 yang disusun oleh Disperkim yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.28 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2020**

No	Kecamatan	2020	
		Jumlah RTLH (unit)	Persentase (%)
1	Balikpapan Barat	1263	22,63%
2	Balikpapan Kota	419	7,51%
3	Balikpapan Selatan	798	14,30%
4	Balikpapan Tengah	704	12,62%
5	Balikpapan Timur	856	15,34%
6	Balikpapan Utara	1540	27,60%
<b>Total</b>		<b>5580</b>	<b>100%</b>

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan 2021

Indikator lain yang digunakan untuk melihat sejauh mana angka penurunan rumah tidak layak huni adalah *backlog* perumahan. *Backlog* Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. *Backlog* rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Di Kota Balikpapan sendiri terdapat dua indikator terkait dengan *backlog* perumahan yaitu menurunnya *backlog* perumahan dan persentase penurunan *backlog* perumahan. Untuk indikator menurunnya *backlog* perumahan, pada tahun 2015 berdasarkan dokumen RP4D 2014, diperoleh *baseline* angka *backlog* sebesar 107.717 unit rumah dengan persentase 89%, namun di tahun 2016 terjadi penurunan angka yang cukup signifikan menjadi 33.849 unit rumah dengan persentase penurunan *backlog* sebesar 22%. Lalu di tahun 2017 dan 2018 terjadi sedikit kenaikan angka *backlog* menjadi 49.806 unit rumah dengan persentase penurunan *backlog* sebesar 35%. Hal ini terjadi dikarenakan data *backlog* (dalam hal ini analisa terhadap *backlog* kepemilikan) sangat

dipengaruhi oleh data jumlah penduduk (dalam hal ini jumlah KK), jumlah ketersediaan rumah itu sendiri (terutama dari bisnis properti) dan tingkat ekonomi (kemampuan daya beli masyarakat). Angka *backlog* di tahun 2017 dan 2018 dianggap masih sama karena pada tahun 2018 belum dilakukan *updating* dokumen RP3KP, yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2019. Dari hasil perhitungan angka *backlog* tahun 2019 dan berdasarkan analisis dari dokumen RP3 2019, diperoleh kenaikan angka *backlog* yang cukup tinggi dari 49.806 menjadi 87.782 unit rumah. Angka ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 92.556 unit.

Akan tetapi secara persentase capaian kinerja tidak mengalami penurunan, namun sebaliknya mengalami peningkatan menjadi 45,7% sama seperti halnya yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti, kenaikan jumlah *backlog* di tahun 2020 sangat dipengaruhi adanya urbanisasi yang tinggi di Kota Balikpapan. Angka ini sampai dengan tahun 2021 diperkirakan belum akan mengalami penurunan, namun bisa menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena di tahun 2020 ini terjadi penurunan sektor ekonomi dan perdagangan akibat wabah covid-19.

Meningkatnya *backlog* perumahan dipengaruhi oleh semakin banyaknya penduduk Kota Balikpapan. Tidak dapat dipungkiri isu pemindahan Ibu Kota Negara telah membuat banyak orang memilih Kota Balikpapan sebagai tempat tinggal. Angka urbanisasi misalnya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

Pertumbuhan ini menyebabkan kebutuhan akan rumah juga akan meningkat sehingga perlu penataan yang baik. Hal ini terkadang menyebabkan infrastruktur menjadi tidak tertata dengan baik karena terbatasnya anggaran yang ada untuk melakukan penataan. Keterbatasan ini yang menjadi penyebab munculnya banyak rumah yang tidak layak huni karena kurangnya penataan dan fasilitas yang sesuai standar. Saat ini lahan yang tersedia masih cukup untuk dikembangkan menjadi perumahan oleh pengembang, akan tetapi proyek pembangunan IKN berpotensi menyerap banyak lahan sehingga pembangunan perumahan untuk jangka panjang akan terdampak oleh proyek tersebut.

**Tabel 2.29 Capaian Penurunan *Backlog* Perumahan**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Menurunnya <i>Backlog</i> Perumahan	Unit Rumah	49.806	49.806	87.782	92.556
Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	%	35	35	43	45,7

Sumber: Disperkim Kota Balikpapan 2020

Berdasarkan laporan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan Tahun 2019 bahwa *backlog* hunian di Kota Balikpapan sebesar 24.931 unit dengan rata-rata per Kelurahan 733 Unit. Persebaran *backlog* perumahan terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu mencapai 5.729 unit rumah atau sebesar 24%. Penurunan *backlog* perumahan sendiri mendukung tujuan 11 sasaran 1 pada SDGs yaitu terkait menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Sedangkan untuk bidang permukiman, sesuai dengan Keputusan Walikota Walikota Balikpapan Nomor 188.45 – 285/2019 tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Balikpapan Tahun 2018 bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan berkurang menjadi 58,58 Ha. Sedangkan berdasarkan hasil peninjauan ulang Tahun 2020, luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.

**Tabel 2.30 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan**

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)				
	Kecamatan	Kelurahan	2015	2017*	2018**	2019***	2020***
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	27,88	36,98	27,28	0	0
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	17,73	16,27	7,03	0	0
		Baru Tengah	22,51	32,26	0	0	0
		Margomulyo	40,89	15,65	0	0	0
		Margasari	22,06	19,02	0	0	0
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggana Raya	37,38	15,42	6,3	0	0
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	12,52	4,53	10,67	0	0
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	4,52	3,53	4,52	0	0
		Damai	9,36	11,32	0,4	0	0
		Telagasari	8,66	8,73	0	0	0
6.	Balikpapan Timur	Manggar	28,05	21,17	0	0	0
		Manggar Baru	50,64	29,75	2,45	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>282,20</b>	<b>224,86</b>	<b>58,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: SK Walikota Nomor 188.45 – 336/2018

Selain melaksanakan pengurangan rumah tidak layak huni, dalam urusan ini juga berfungsi untuk menurunkan luasan kawasan kumuh. Untuk mengukur tujuan ini indikator yang digunakan adalah penurunan luasan kawasan kumuh. Adapun acuan dalam menentukan kawasan kumuh disesuaikan dengan Keputusan Walikota tentang Kawasan Kumuh. Pada tahun 2016 total luas kawasan kumuh adalah 282 Ha. Total luas ini sempat mengalami penurunan menjadi 257 Ha di tahun 2017. Akan tetapi kembali meningkat menjadi 272 Ha pada tahun 2018. Pada tahun 2019 total luas kawasan kumuh kembali menurun menjadi 267 Ha dan menjadi 153,3 Ha pada tahun 2020.

**Tabel 2.31 Luas Kawasan Kumuh (Ha)**

Tahun	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
2016	282
2017	257
2018	272
2019	267
2020	153,3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021

## 6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga

keamanan lingkungannya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kejahatan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.32 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan dan diselesaikan di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya, 2020**

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	2017	2018	2019	2020
1	Politik	-	-	-	-
2	Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-
3	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-
4	Kebakaran	12	9	5	2
5	Pembakaran	-	-	-	-
6	Memberi Suap	-	-	-	-
7	Mata Uang	-	1	-	-
8	Pemalsuan Surat	3	3	3	1
9	Perzinahan	9	8	8	2
10	Perkosaan	-	-	-	-
11	Melanggar Kesopanan/Cabul	34	36	36	24
12	Perjudian	27	17	7	5
13	Penculikan	-	-	-	-
14	Pembunuhan	5	7	2	2
15	Penganiayaan Berat	122	109	58	46
16	Penganiayaan Ringan	47	34	25	6
17	Pencurian dengan Pemberatan	224	255	114	108
18	Pencurian Biasa	87	92	50	53
19	Pencurian dengan Kekerasan	48	42	22	17
20	Pemerasan	4	-	-	-
21	Penggelapan	53	48	39	36
22	Penipuan	65	56	35	20
23	Perusakan	14	15	6	4
24	Penadahan	-	-	-	-
25	Ekonomi	-	-	-	-
26	Curanmor R2	271	141	100	81
27	Curanmor R4	12	8	6	3
28	Kejahatan Langgar Sopan	-	-	-	-
29	Lain-Lain	693	634	183	102
<b>Total</b>		<b>1730</b>	<b>1515</b>	<b>699</b>	<b>512</b>

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka, 2020

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kriminalitas saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 18%. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 20% pada tahun 2018. Barulah pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 18,5%, hingga mencapai 18% pada tahun 2020.

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 63,21%. Angka ini hanya mengalami peningkatan menjadi 64,01% pada tahun 2020. Sedangkan untuk indikator rasio petugas linmas juga masih belum menunjukkan perkembangan yang maksimal. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini sebesar 2,43%. Lalu meningkat menjadi 4% pada tahun 2018. Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2019 menjadi 3,5%. Hingga pada tahun 2020, terjadi peningkatan rasio petugas linmas menjadi 4,50%.



Masih belum optimalnya upaya penurunan angka kriminalitas dan penguatan poskamling dan petugas linmas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya jumlah petugas linmas sehingga mempengaruhi fungsi linmas. Rasio petugas linmas menurun pada tahun 2019 menjadi 3,5. Sedangkan realisasi tahun 2017 dan 2018 adalah 4. Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 40 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada.

Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

**Tabel 2.33 Angka Kriminalitas dan Perlindungan Masyarakat di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Penurunan angka kriminalitas	18%	20%	18,50%	18%
Persentase poskamling aktif	63,41%	63,61%	63,81%	64,01%
Rasio Petugas Linmas	4%	4%	3,50%	4,50%

Sumber: Dinas Ketenteraman dan Ketertiban, 2020

Kurangnya upaya peningkatan perlindungan masyarakat ini terlihat dari belum optimalnya dua indikator yaitu Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Untuk indikator pertama yaitu cakupan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, realisasi indikator ini sebesar 65,38. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 64,1, sedangkan tahun 2018 dan 2019 juga mengalami penurunan menjadi 62,82 dan 61,54, hingga tahun 2020, realisasi indikator ini kembali menurun menjadi 60,26. Hal ini menunjukkan indikasi penurunan tingkat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, karena perbandingan jumlah personil Satpol PP yang lebih sedikit dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Kota.

Sedangkan indikator selanjutnya yaitu Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mengukur tingkat keaktifan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Poskamling. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan penguatan poskamling masih terkendala dari keterbatasan jumlah SDM yang ada. Hal ini berpengaruh terjadinya stagnasi pada realisasi indikator cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Realisasi indikator ini sebesar 5,26 dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan mengalami peningkatan menjadi 6,57 pada tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan indikasi aktifnya personil Linmas dan masyarakat berpartisipasi membentuk Satgas-satgas penanggulangan Covid-19.

**Tabel 2.34 Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	64,1	62,82	61,54	60,26
Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	5,26	5,26	5,26	6,57

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2021

Untuk indikator cakupan penegakan perda dan perkara menghitung penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi dalam 1 (satu) tahun baik yang diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi, penyelesaian secara yustisi dilakukan melalui pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) sedang penyelesaian secara non yustisi melalui penandatanganan surat pernyataan dan tidak disidangkan. Jika dilihat dari datanya, terjadi tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, cakupan penegakan perda dan perwali berada pada angka 78,43%, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga menyentuh 85,11% pada tahun 2020.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk penegakan perda dan perwali ini diantaranya belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi. Penegakan aturan daerah menjadi lebih terbatas pada penegakan perwali tentang covid. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana varian penegakan perdanya jauh lebih banyak. Saat kondisi pandemi difokuskan pada dua aturan yaitu perda ketertiban umum dan perwali penegakan hukum terkait covid. Perilaku masyarakat dalam menaati aturan juga masih rendah. Satpol PP masih kesulitan dalam upayanya menegakkan perda terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan mengenai anak jalanan, pengemis, dan-lain-lain. Tingkat kehadiran masyarakat yang melanggar perda saat sidang juga cukup rendah. Hal ini juga disebabkan karena sidang hanya dilakukan 1 kali sebulan sehingga masyarakat terkadang tidak datang. Perlu penambahan frekuensi persidangan agar tingkat kehadiran masyarakat pun menjadi lebih tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai perannya dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan perundangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Kota Balikpapan dalam kondisi kondusif, berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban akibat pelanggaran Peraturan Daerah sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan indeks persentase Cakupan Penegakan Perda dan Perkada serta Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan sebagaimana tabel di Bawah berikut.

**Tabel 2.35 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	80	81,63	83,33	85,11
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	85,6	86,6	87,7	88,8

Sumber: Satpol PP Kota Balikpapan, 2021

Secara keseluruhan upaya penguatan perlindungan masyarakat dan penegakan aturan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di Satpol PP. Sarana dan Prasarana Dinas Ketenteraman masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, misalnya terkait dengan luasan kantor. Hal ini berpengaruh pada ruangan dan fasilitas di kantor yang kurang baik. Misalnya ruang kerja, ruang pos jaga, ruang rapat, ruang layanan pengaduan, serta tempat penyimpanan barang dan gudang tidak ada, sekretariat PPNS ada tapi tidak maksimal, layanan pengaduan dan pemeriksaan juga kurang optimal.

Keterbatasan jumlah SDM juga menjadi kendala lainnya. Jumlah personil operasional saat ini berjumlah 142 pegawai sedang jumlah penduduk Kota Balikpapan ±700.000 jiwa. Dengan jumlah pegawai tersebut juga kurang ideal dibandingkan dengan luas wilayah Kota Balikpapan yaitu ± 503,3 km<sup>2</sup>. Idealnya Satpol PP Kota Balikpapan memiliki 350 personel. Disamping itu, masih terdapat beberapa pegawai yang belum diangkat pada posisi jabatan fungsional.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga berkaitan dengan mitigasi bencana daerah. Upaya mitigasi ini diwujudkan untuk memastikan bahwa keselamatan masyarakat terjamin dari jenis bencana apapun. Adapun kewenangan terkait bencana ini menjadi tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD memiliki empat indikator kinerja yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian tahun 2016-2020 pada tabel berikut.

**Tabel 2.36 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Realisasi SPM (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	N/A	92,92	99	80
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70	75	81	83,16
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	80	95,42
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	80	95,42

Sumber : BPBD Kota Balikpapan, 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam waktu tanggap serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran disebabkan karena terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah Kariangau dan Teritip. Berdasarkan dari RSPK (Rencana Sistem Proteksi Kebakaran) terkait dengan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), Standar proteksi wilayah adalah 2,5 km dengan UPT pemadam kebakaran, dan jarak antar UPT tidak boleh lebih dari 5 km. Hal ini dipersulit dengan kondisi geografis wilayah yang sebagian besar perbukitan dan jalanan yang sempit.

Masih belum optimalnya upaya penanganan kebakaran ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran. Mobil operasional pemadam kebakaran yang ada saat ini masih belum sesuai dengan standar nasional. Mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa 1 unit Mobil damkar melayani 10.000 jiwa. Kota Balikpapan dengan penduduk sebanyak 667.188 akan tetapi kendaraan operasionalnya hanya 23 unit atau masih sekitar 35% dari ketentuan ideal. Kota Balikpapan idealnya memiliki 67 unit pemadam. Selain itu, mobil operasional untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit serta gedung-gedung tinggi juga masih belum optimal. Selama ini, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sempit sudah terdapat mobil jeep, akan tetapi mobil tersebut belum mampu menjangkau gang-gang sempit.

Lalu terkait dengan tingkat tanggap waktu yang masih fluktuatif capaiannya, berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dilakukan penyebabnya adalah masih kurangnya respon petugas di lapangan ketika terjadi kebakaran. Penyebab lainnya karena belum ada perhitungan valid terkait waktu respon dari kantor hingga ke lokasi kebakaran. Waktu dihitung hanya berdasarkan asumsi masyarakat. Disisi lain, masih rendahnya capaian tingkat tanggap waktu tersebut terjadi karena laporan masyarakat ketika terjadi kebakaran masih lambat. Belum optimalnya pengembangan aplikasi pelaporan berbasis digital juga menyebabkan respon waktu terhadap bencana kebakaran masih kurang baik.

Untuk menangani permasalahan bencana kebakaran ini, beberapa hal yang perlu dibenahi adalah meningkatkan kualitas SDM. Masih kurangnya pelatihan maupun simulasi untuk petugas di lapangan maupun kepada masyarakat. Salah satu hambatan di lapangan ketika masyarakat belum mengetahui SOP penanganan kebakaran sehingga menyulitkan petugas di lapangan. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota, pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana mencakup aspek penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran, penguatan kelembagaan, pembinaan personil, dan pelatihan teknis.

**b. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2019 yang belum ditempatkan ada sebanyak 3.999 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, 2.127 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 1.872 orang yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini turun dari tahun 2019, dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tercatat sebanyak 5.141 orang, yang terdiri dari 3.049 orang laki-laki dan 2.092 orang perempuan. Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SMA, sebanyak 54,56 %, atau sebanyak 2.805 orang. Urutan nomor dua



pengusaha terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 24,04 %, atau sebanyak 1.236 orang. Kedua kelompok ini mendominasi jumlah pencari kerja terdaftar dengan proporsi 78,6 %, atau lebih dari tiga perempat dari jumlah pencari kerja terdaftar.

**Tabel 2.37 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kota Balikpapan Tahun 2020**

Pendidikan	Sisa Tahun 2019		Terdaftar		Belum Ditempatkan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
SD	64	0	81	3	97	1
SMP	124	17	75	6	133	12
SMA	1851	954	1852	698	1167	831
Diploma	280	500	191	149	141	387
S1	663	573	622	623	538	605
S2	67	48	5	7	51	36
<b>Jumlah/Total</b>	<b>3049</b>	<b>2092</b>	<b>2826</b>	<b>1486</b>	<b>2127</b>	<b>1872</b>

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka, 2020

Dengan kondisi pencari kerja yang terus meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga meningkat. Pada tahun 2017, TPAK Kota Balikpapan sebesar 63,38%. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 64,33%. Hingga tahun 2019, TPAK Kota Balikpapan sebesar 65,14%. Pada tahun yang sama, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan yang semula 10,39% pada tahun 2017, menjadi 7,29% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, TPAK Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 2,24% menjadi 62,9%. Sama halnya dengan TPT Kota Balikpapan yang juga mengalami kenaikan menjadi 9,00% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Balikpapan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan, kapasitas dan ketrampilan SDM mengakibatkan banyak pencari kerja tidak tertampung. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Peningkatan Angka Partisipasi Kerja ini mendukung tujuan 8 sasaran 3 pada SDGs yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja terkait dengan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Namun angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 57,80% pada tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19. Adapun perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dibagi dengan jumlah pencari kerja yang menjadi target pelatihan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelatihan kerja masih memiliki beberapa kendala yaitu jenis pelatihan yang biasanya dilaksanakan belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan industri dalam mencari tenaga kerja. Selain itu, terbatasnya pelatihan kejuruan pada LPK yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Balikpapan serta masih kurangnya kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dalam melaksanakan pelatihan kompetensi kejuruan mengakibatkan pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan melalui program magang yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang oleh perusahaan terus menunjukkan peningkatan, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Program ini mendukung tujuan 8 sasaran 5 SDGs yaitu Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Diharapkan nantinya calon tenaga kerja yang mengikuti program magang sudah memenuhi standar kompetensi kerja. Belum optimalnya fungsi dari forum komunikasi terkait program magang juga menjadi permasalahan yang mana forum ini idealnya menjadi wadah bagi calon tenaga kerja, pemerintah, dan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program magang. Akan tetapi pelaksanaan forum ini belum sepenuhnya berjalan karena kurangnya koordinasi.

Permasalahan tenaga kerja di Kota Balikpapan juga menyangkut ketersediaan dokumen perencanaan maupun regulasi yang menaunginya. Belum tersusunnya masterplan ketenagakerjaan baik skala makro ataupun mikro sangat menyulitkan Dinas Ketenagakerjaan dalam menentukan kebutuhan akan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Rencana pengembangan ketenagakerjaan dalam dokumen masterplan ketenagakerjaan nantinya juga perlu mempertimbangkan dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama tahun 2016-2020 cenderung meningkat meskipun di tahun 2018 sempat menurun. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga ketidakpahaman atau ketidakpatuhan pengusaha/pelaku usaha terhadap ketentuan normatif sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain itu, tidak semua perusahaan menjalankan operasional bisnisnya di Kota Balikpapan, sehingga ketika dilakukan pembinaan ke lapangan atau pemanggilan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau fasilitasi permasalahan ketenagakerjaan lainnya menjadi terhambat karena perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di Balikpapan. Pada masa pandemi Covid-19, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial. Hal ini membutuhkan upaya penanganan dengan aturan yang lebih kompleks

karena merupakan kasus baru yang jarang terjadi. Kurangnya SDM pengawas ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan.

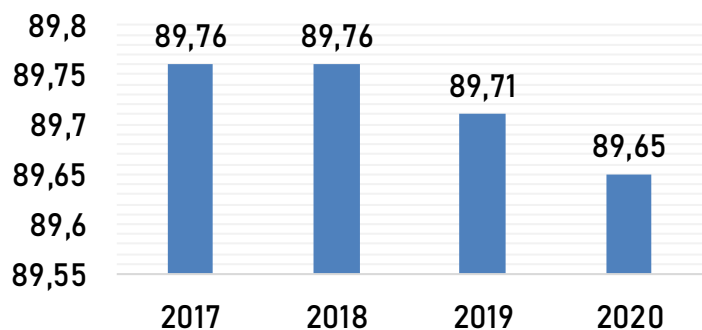
**Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,73	10,39	9,52	7,29	9,00
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,28	63,38	64,3	64,7	62,9
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	%	72,40	74,80	334,20	122,70	57,80
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	%	27,40	158	190,48	443,64	129,60
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	%	20	0	0	541,66	0
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	6,08	28,76	19,27	3,98	62,47
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	%	52,99	70,42	66,19	79,36	96,58

Sumber: BPS Kota Balikpapan dan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021

## 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Salah satu rujukan dalam menilai kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks pembangunan gender adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.



**Gambar 2.64 Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berdasarkan grafik capaian indeks pembangunan gender Kota Balikpapan, IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, IPG Kota Balikpapan berada pada angka 89,76, dimana angka ini sama dengan IPG pada tahun 2017. Pada tahun 2019, IPG Kota Balikpapan menyentuh angka 89,71 dan terus mengalami penurunan menjadi 89,65 pada tahun 2020. IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada dua komposit yaitu: AHH dan pengeluaran per kapita perempuan.

Beberapa hal yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Kota Balikpapan, yaitu: 1. Hak sipil kebebasan, sejauh mana anak mendapat akta Kelahiran 2. Pengasuhan keluarga, tingkat pemahaman orang tua terhadap pengasuhan anak 3. Klaster kesehatan dasar, angka kematian ibu bayi, stunting, pemenuhan air bersih 4. Klaster pendidikan,

sejauh mana tingkat putus sekolah 5. Perlindungan khusus, berupa penanganan korban kekerasan, bencana, dan lain-lain.

Pada tahun 2020 terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPG laki-laki yaitu 11,17 % dan perempuan 10,65%. Sedangkan HLS perempuan 14,3% dan laki-laki 14,14%. Dimensi kesehatan, yaitu perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) yang berdasarkan pada angka kesakitan. Pada tahun 2020 UHH laki-laki yaitu 72,62%, sedangkan perempuan yaitu 76,33%. Dimensi ekonomi yaitu pendapatan perkapita masyarakat Kota Balikpapan. Pengeluaran per kapita laki-laki pada tahun 2019 yaitu 22.451.000/tahun dan pengeluaran per kapita perempuan yaitu 14.557.000/tahun. Menurut BPS, terjadi penurunan dimensi ekonomi, oleh karena itu perlu adanya intervensi program penanggulangan kemiskinan agar bisa mendongkrak IPG yang lebih signifikan.

**Tabel 2.39 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Provinsi/Kabupaten	IPG			
		2017	2018	2019	2020
1	Kalimantan Timur	85,61	85,63	85,98	85,70
2	Kota Balikpapan	89,76	89,76	89,71	89,65

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2019

IPG di Kota Balikpapan memiliki angka yang melampaui capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017 dan 2018, IPG Kota Balikpapan sebesar 89,76. IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 89,71 dan menjadi 89,65 pada tahun 2020. Pelaksanaan pembangunan gender di Kota Balikpapan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap proses perencanaan kebijakan, program, hingga kegiatan harus mempertimbangkan terkait pengarusutamaan gender. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu hal yang perlu didorong dalam peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) di Kota Balikpapan adalah melakukan evaluasi terhadap capaian nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan. Belum adanya kajian evaluasi terhadap capaian IPG di Kota Balikpapan mengingat capaian IPG bukan merupakan kinerja DP3AKB saja, namun merupakan kerja bersama semua perangkat daerah yang membidangi pembangunan manusia, terkait indikator seperti Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Usia Harapan Hidup (Dinas Kesehatan) dan pendapatan perkapita (Dinas Sosial) dan peran Dinas yang lain seperti ; (Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda Litbang, Disperkim dan DPU).

Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan lintas sektoral dalam pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Balikpapan. Untuk mengatasi permasalahan lintas sektoral tersebut, perlu adanya seminar kecil dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan indikator yang ada pada IPG bahwa diperlukannya data dengan RLS, HLS, UHH, dan pendapatan per kapita. Selain itu, strategi yang dilakukan



selain melakukan rapat koordinasi dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan perempuan adalah adanya seksi perlindungan perempuan anak di level RT. Di Kota Balikpapan sudah ada 95 seksi perlindungan yang tersebar di Kota Balikpapan.

Pada tahun 2020, permasalahan penyelenggaraan tatap muka juga mengalami kendala akibat adanya pandemi Covid-19. Masyarakat banyak yang tidak bisa melakukan *zoom meeting*. Hal ini selain karena faktor penguasaan teknologi juga terkait dengan masalah pendanaan paket data. Kebijakan penganggaran paket data untuk masyarakat yang diikutsertakan dalam *zoom meeting* harus lebih diperhatikan lagi agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan lancar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak memiliki data IPG secara detail yang mana data harus dipilah. Kelemahan data terpilah menyebabkan IPG belum bisa mencapai nilai yang lebih tinggi.

Capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan mengalami laju yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2019, dengan persentase penyelesaian sebesar 84,29% pada tahun 2017 menjadi 62,16% pada tahun 2019. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,86%. Target akhir pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Balikpapan adalah sebesar 75,01%. Artinya, merujuk capaian terakhir pada tahun 2020, target tersebut masih belum berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

**Tabel 2.40 Jumlah Kasus Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Balikpapan**

No	Tahun	Jumlah Korban	Penanganan Selesai	Proses	% Penyelesaian
1	2017	140	118	22	84,29
2	2018	69	54	15	78,26
3	2019	74	46	28	62,16
4	2020	70	51	19	72,86

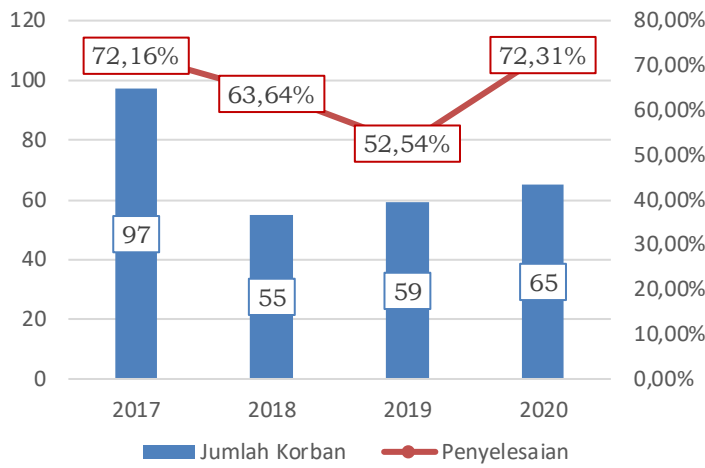
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020

Pada tahun 2019, untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 62,92, sedangkan penanganan korban kekerasan terhadap anak tahun 2020 menjadi 50,16. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi justru meningkat, karena pengawasan orang tua yang sangat minim. Anak lebih sering menggunakan smart phone, sehingga pergaulan anak melalui sosial media mengalami penyimpangan.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kendala utama dalam menangani kasus ini adalah pembagian tugas pokok dan fungsi antar dinas. Kasus korban kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kasus kekerasan perempuan anak dan perempuan dewasa. Kasus perempuan dewasa (KDRT) diperoleh berdasarkan aduan, kemudian pihak-pihak terkait melakukan mediasi, sehingga penyelesaian untuk permasalahan KDRT tinggi. Sedangkan

untuk kasus penanganan korban anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian harus di selesaikan di tingkat pengadilan.

Permasalahannya adalah jika sudah berurusan dengan aparat, maka tidak bisa cepat selesai, karena harus ada alat bukti minimal dua alat bukti. Kasus kekerasan seksual di Kota Balikpapan sebanyak 42 dari 59 kasus. Penanganannya relatif panjang karena memerlukan pembuktian yang cukup rumit. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,



**Gambar 2.65 Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menangani korban kekerasan anak dan perempuan sangat tergantung dengan penegak hukum. Penyelesaian kasus korban kekerasan anak dan perempuan bisa selesai kurang lebih 1-3 tahun. Dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak dan perempuan dipengaruhi oleh 5 klaster, yaitu klaster 1-4 berupa pencegahan melalui sosialisasi dan klaster 5.

Berdasarkan grafik capaian persentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak, sejak tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan dari 72,16% menjadi 52,54%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 72,31%. Adapun capaian tersebut sudah mencapai target akhir RPJMD Kota Balikpapan pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,15%.

Adapun jumlah kasus yang terjadi di Kota Balikpapan sebanyak 65 kasus pada tahun 2020. Angka ini sebenarnya telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini bisa dilihat dua sisi, yang pertama adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekerasan anak semakin baik ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus. Disisi lain peningkatan ini juga mengindikasikan kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi di masyarakat.

**Tabel 2.41 Laporan Jenis Kasus Kekerasan terhadap Anak**

No.	Kategori Kasus	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	KDRT	39	13	-	14
2	Kekerasan Seksual	35	30	46	31
3	Penelantaran	15	1	1	0
4	Kekerasan Fisik	24	21	34	10
5	Kekerasan Psikis	34	13	5	9
6	Eksplorasi	0	0	2	0
7	Perdagangan Orang (TPPO)	0	1	0	0
8	Lainnya	53	1	3	2
Jumlah		200	80	91	66

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020

Sedangkan untuk mengukur capaian perlindungan anak digunakan indikator Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah indikator yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya 13 (tiga belas) hak-hak anak

untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Balikpapan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2018 telah mencapai tingkat madya dan untuk tahun 2019 Kota Balikpapan strata kota layak layak anak meningkat satu level yaitu di tingkat nindya.

Selanjutnya terkait dengan **Kota Layak Anak**, Kota Layak Anak sekarang tahap Nindya dari target Madya pada tahun 2021. Ada skor sampai 1.000 untuk sekian indikator. Balikpapan baru mencapai angka Nindya dengan skor 700-800 dan setiap indikator ada persentasenya. Setiap indikator dinilai dan diakumulasikan hingga mencapai angka layak untuk mendapatkan Nindya.

Setiap indikator yang tertuang pada Kota Balikpapan Layak Anak merupakan penilaian sejauh mana peran masyarakat, dunia usaha dan media masa dalam mewujudkan Balikpapan Layak Anak. Permasalahannya adalah masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum melibatkan masyarakat dan media masa. Hal ini merupakan masalah komitmen gugus tugas Kota Layak Anak dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan media masa. Masalah dunia usaha bisa dibuktikan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Belum optimalnya Kota Balikpapan sebagai kota layak anak karena belum adanya dukungan komitmen dari berbagai pihak. Sehingga permasalahan ini hanya berfokus pada skor kota layak anaknya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa indikator kota layak anak sangat memerlukan dukungan pendanaan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Contoh sekolah ramah anak, indikator tersebut memerlukan biaya yang banyak, Puskesmas ramah anak juga memiliki indikator, seperti adanya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan sub urusan peningkatan kualitas hidup anak.

### **3. Pertanahan**

Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan dan kinerja pengadaan lahan untuk pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku (pembangunan waduk Teritip dan embung Aji Raden) serta pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum (pembangunan Institut Teknologi Kalimantan).

Untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang baik meskipun di tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 persentase tanah yang memiliki IMTN di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 88% pada tahun 2019 menjadi 76,95%.

Capaian indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selanjutnya adalah persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan, pada indikator kinerja ini dalam kurun waktu 5 tahun memiliki rata-rata capaian sebesar 71,39%, dengan rincian persentase penanganan sengketa sebagaimana terlihat pada tabel 2.47.

Angka persentase periode 2016-2020 berfluktuasi tergantung dari banyaknya jumlah pengaduan yang masuk terhadap jumlah pengaduan yang difasilitasi. Adapun penanganan kasus/sengketa pertanahan yang difasilitasi mayoritas disebabkan masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Perangkat Daerah teknis terkait Pemerintah Kota perlu lebih ditingkatkan. Adapun isu peruntukan lahan ini memiliki keterkaitan dengan tujuan pertama pada sasaran ketiga SDGs yang mencanangkan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terkait dengan kepemilikan dan kontrol atas tanah. Kurangnya pengawasan terhadap peruntukan lahan dapat berakibat pada berkurangnya akses bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah

**Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase tanah yang memiliki IMTN	%	43	79	88	76,95
Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan	%	82,86	57	74	85
Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar	25,28	30,26	8,07	0

Sumber: DPPR Tahun 2020

Untuk kinerja pengadaan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku, kegiatan prioritas Kota Balikpapan yaitu pembangunan waduk Teritip di kelurahan Teritip dan pembangunan Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru. Untuk waduk Teritip yang memiliki luas sesuai Penetapan lokasi 330 Ha, walaupun waduk telah terbangun dan telah operasional, masih ada sisa lahan yang belum bebas sekitar 35 Ha untuk area spill way dan sebagian area genangan. Adapun kendala yang dihadapi adalah permasalahan tumpang tindih lahan dan perbedaan luasan antara sertipikat dengan hasil ukur fisik dilapangan sehingga sampai saat ini belum dapat dilakukan proses konsinyasi.

Untuk pembangunan Embung Aji Raden, dari Kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi Tahun 2020 seluas 150,34 Ha, sampai dengan Tahun 2019 telah dibebaskan seluas 8,23 Ha yang telah digunakan untuk pembangunan tubuh bendung, spill way, intake dan sistem perpipaan intake. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota mengupayakan pembebasan lahan untuk sebagian area genangan seluas 21,3 Ha. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembebasan lahan pembangunan Embung Aji Raden ini adalah banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan, rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, adanya penambahan luasan pada penetapan lokasi Tahun 2020 menyesuaikan revisi dokumen perencanaan serta keterbatasan anggaran APBD Kota, dimana dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 181 Miliar untuk pembebasan sisa lahan seluas 120,81 Ha. Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan berupaya agar pembiayaannya juga dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), hingga tahun 2019, dari total kebutuhan lahan sesuai penetapan lokasi seluas 310 Ha telah dibebaskan



seluas 142,93 Ha. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya keberatan oleh beberapa pemilik tanah yang masuk dalam penetapan lokasi dan diperlukan revisi penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan Masterplan yang disusun oleh tim ITK. Untuk proses pembebasan lahan selanjutnya, pemerintah Kota fokus pada bidang tanah yang diperuntukkan sebagai akses utama dan pintu gerbang melalui jalan Soekarno Hatta KM 14.

**Tabel 2.43 Kebutuhan Lahan Pembangunan Waduk Teritip, Embung Aji Raden dan ITK**

Lokasi	Total Kebutuhan Lahan sesuai Penetapan lokasi (Ha)	Telah dibebaskan (Ha)	Belum dibebaskan (Ha)
Waduk Teritip	330	294,39	35,61
Embung Aji Raden	150,34	8,23 (on progress 2021: 21,3)	120,81
Institut Teknologi kalimantan	310	142,93	167,07

Sumber : DPPR, 2021

#### 4. Lingkungan Hidup

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas 3 parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Adapun klasifikasi IKLH adalah Sangat Baik  $IKLH > 80$ ; Baik  $70 < IKLH \leq 80$ ; Cukup baik  $60 < IKLH \leq 70$ ; Kurang baik  $50 < IKLH \leq 60$ ; Sangat kurang baik  $40 < IKLH \leq 50$  dan Waspada  $30 < IKLH \leq 40$ . IKLH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi capaian mulai tahun 2016 hingga mencapai angka 63,52 pada tahun 2020. Pada tahun 2018, terjadi penurunan nilai IKLH yaitu 59,58 karena berkurangnya indeks Kualitas Udara dari 97,9 di tahun 2017 menjadi 84,9 yang dipicu oleh meningkatnya kadar NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> di udara. Rata rata capaian IKLH kota Balikpapan periode 2016-2020 ada pada klasifikasi cukup baik.

Untuk parameter Indeks Kualitas Air (IKA) terjadi fluktuasi capaian dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Capaian IKA Kota Balikpapan sempat meningkat signifikan menjadi 49,5 di tahun 2018, akan tetapi kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 47,9. Hingga tahun 2020 IKA Kota Balikpapan berada diangka 40,9. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah penambahan jumlah penduduk yang mana berdampak pada bertambah besarnya limbah domestik.

Volume air limbah domestik yang dihasilkan berpotensi menambah beban pencemaran air permukaan yang disebabkan belum terkelolanya air limbah secara komunal. Selain itu masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada DAS Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Kladasan Kecil menunjukkan bahwa beban TSS yang tertinggi dari kegiatan pabrik tahu sebesar 131.985,6 gr/hari, beban pencemar organik BOD sebesar 42.579,3 gr/hari dan beban COD dari pabrik tahu sebesar 70.851,8 gr/hari. Kenyataan ini

menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara langsung mencemari sungai Klandasan Kecil. Di sepanjang dua sungai menunjukkan bahwa masih banyak usaha yang tidak mengendalikan air limbahnya dengan baik. Kenyataan ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut yang dari beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah.

Permasalahan berikutnya adalah penanganan limbah cair juga masih belum optimal sehingga berdampak banyak terhadap pencemaran air. Berdasarkan Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar pada DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II pada tahun 2016 disimpulkan bahwa sumber pencemar yang berkontribusi paling besar terhadap pencemaran adalah limbah cair domestik dimana beban dari kegiatan domestik mencapai 3340,04 kg BOD/hari, 6405,01 kg COD/hari dan 1430,71 Kg TSS/hari sementara kegiatan lain 5,85 kg BOD/hari, 12,89 kg COD/hari dan 6,12 Kg TSS/hari. Aktivitas rumah tangga juga berkontribusi banyak terhadap limbah cair. Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga adalah aktivitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK), sebagian besar mempunyai tangki septik yang mengolah air limbah dari black water (toilet), sedangkan dari *grey water* (non toilet berupa aktivitas mandi, mencuci, memasak) belum dilakukan pengolahan dan dibuang langsung ke saluran penerima.

Secara keseluruhan, pencemaran air di Kota Balikpapan didominasi oleh pencemaran akibat air limbah domestik dan non domestik, serta limpasan air hujan yang membawa kikisan tanah. Selain itu meningkatnya pencemaran air, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di tengah kota, yaitu DAS Klandasan Besar dan DAS Klandasan Kecil, disebabkan pula oleh semakin padatnya penduduk dan tingginya pertumbuhan kegiatan komersil di sekitarnya. Meskipun berada di tengah Kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Banyaknya kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha skala kecil terhadap kewajiban untuk mengelola air limbah kegiatan/usahanya. Selain itu, biaya untuk mengolah air limbah dianggap relatif besar oleh sebagian pelaku usaha.

Indeks selanjutnya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Capaian realisasi IKU Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017 angkanya berada di 97,9, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 84,93. Capaian realisasi ini kembali meningkat menjadi 88,42 di tahun 2019, hingga tahun 2020 realisasi IKU kembali meningkat menjadi 88,92.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencemaran udara salah satunya adalah sektor industri. Pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa relatif cepat.

Kota Balikpapan sendiri masuk dalam kategori kota yang tingkat pertumbuhan dan pembangunannya relatif cepat. Selain itu penambahan penduduk dan industri menghasilkan gas rumah kaca yang lama kelamaan akan merusak ozon dan meningkatkan suhu serta anomali cuaca. Curah hujan yang ekstrem serta peningkatan suhu mengakibatkan munculnya bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor.

Besarnya produksi gas emisi juga berpengaruh terhadap pencemaran udara. Penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2010, atau menempati 69,30% dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85% terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Besarnya Emisi dari Pertamina RU V ini menyebabkan sektor Energi dan Transportasi menjadi sangat dominan di antara dua sektor penyumbang emisi yang lain di Kota Balikpapan.

Faktor lainnya adalah meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 616.626 kendaraan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,71%. Pada tahun 2010, bidang Transportasi menyumbang 347.136 ton CO<sub>2</sub>e atau 11,74% dari total emisi kota pada tahun yang sama. Lalu pada tahun 2020 dengan proyeksi BAU menyumbang sebesar 1.214.975 ton CO<sub>2</sub>e atau dengan persentase sebesar 20,77% terhadap total emisi kota.

Indeks selanjutnya adalah Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). ITH adalah suatu nilai yang digunakan untuk menghitung tutupan lahan/ hutan dibandingkan dengan Luas Wilayah. ITH Kota Balikpapan sendiri menunjukkan grafik peningkatan pada periode tahun 2016-2020. Angka ITH sempat mengalami stagnasi dari tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar 48,12. Barulah pada tahun 2018 angka ITH mengalami kenaikan menjadi 48,15. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 angkanya terus mengalami peningkatan mencapai 55,4.

Salah satu dampak dari belum optimalnya penanganan pengupasan lahan adalah terjadinya perubahan iklim. Pengupasan lahan secara langsung mengakibatkan berkurangnya vegetasi tanaman setempat yang sebelumnya berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan tempat peresapan air ke tanah, dengan berkurangnya vegetasi maka gas CO<sub>2</sub> menjadi tidak terserap serta tanah menjadi mudah terkena erosi saat hujan lebat. Hal tersebut mengakibatkan munculnya dampak lingkungan seperti terjadinya peningkatan suhu udara, sedimentasi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik lokasi. Pada tahun 2019, jumlah kegiatan yang melakukan pengupasan lahan menurun 60,77% dari jumlah pengupasan lahan pada tahun 2018. Namun, luasan yang dilakukan pengupasan lahannya seluas 1.943.125 m<sup>2</sup>.

Tingginya angka pengupasan lahan ini disebabkan oleh pelaku usaha dan masyarakat perseorangan yang tidak mempertimbangkan aspek pembangunan atau aturan yang sesuai. Pelaku usaha lebih memilih Pembukaan dan pengupasan lahan dilakukan sekaligus, dibandingkan secara bertahap. Masalah lainnya adalah masih terjadinya kerusakan mangrove. Kerusakan mangrove terjadi akibat dari beralih fungsinya lahan melalui pembukaan lahan. Hal ini dapat dilihat dari cenderung menurunnya lahan untuk peruntukan tertentu yang berdampak pula pada berkurangnya areal mangrove. Keadaan ini diperkuat dengan hasil studi komprehensif kondisi eksisting dan *monitoring* lingkungan pesisir Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2016, dimana dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah terjadi berkurangnya areal mangrove seluas 95,06 ha. Dari besaran luasan ini terdiri dari 85 ha berada di area yang sesuai dengan RTRW yang ditetapkan sebagai area mangrove, sedangkan sisanya merupakan areal di luar ketentuan RTRW. Masalah kerusakan mangrove lain yang mendapat perhatian publik secara besar, adalah saat terjadinya tumpahan minyak (*oil spill*) pada tanggal 30 Maret 2019 di teluk Balikpapan.

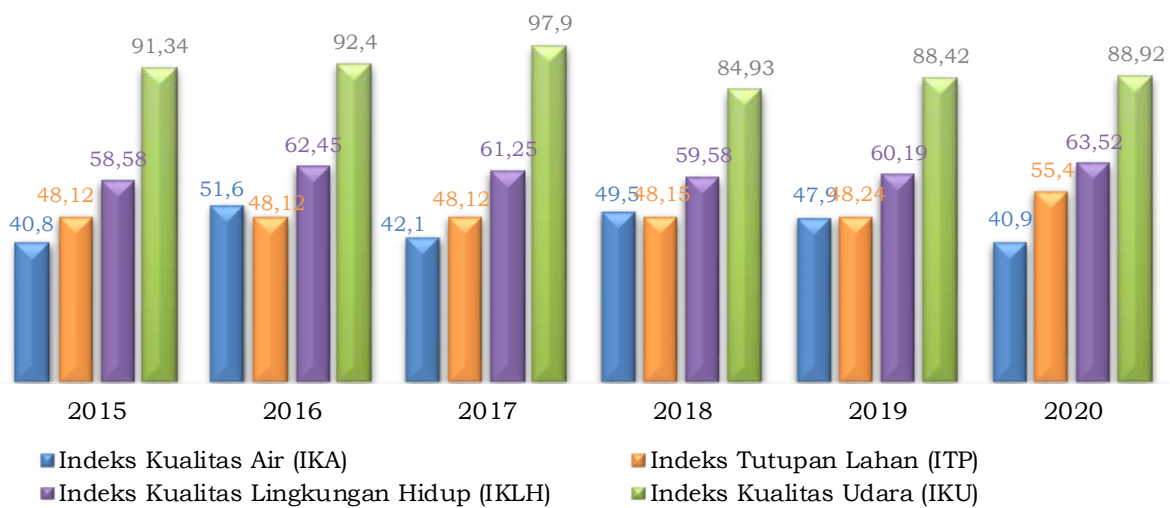
Bencana ini terjadi akibat kebocoran (patahnya) pipa distribusi minyak mentah bawah laut berdiameter 20 inci yang berlokasi di Terminal Lawe-Lawe ke Terminal Balikpapan milik PT. Pertamina RU V Balikpapan. Lokasi patah pipa terletak pada koordinat S 01°14'42.1" dan 116°47'16.2" sekitar 500 meter dari Terminal Lawe-Lawe ke arah Penajam. Sebaran tumpahan minyak mentah tersebut berdampak terhadap ekosistem dan biota laut di Teluk Balikpapan. Dari hasil survei lapangan ditemukan real mangrove yang rusak akibat dari tumpahan minyak adalah seluas 29,52 Ha. Selain sedikitnya lahan peruntukan untuk mangrove, masalah lain yang muncul dari berkurangnya tutupan lahan ini adalah terjadinya bencana tanah longsor. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi tanah longsor di Kota Balikpapan sebanyak 63 kali yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Sementara itu di tahun 2016 terjadi tanah longsor sebanyak 24 kali, hal ini menunjukkan peningkatan tanah longsor yang terjadi di Kota Balikpapan. Hampir 85% wilayah Kota Balikpapan konturnya berbukit dan 15% relatif datar yang berada di sepanjang pesisir pantai. Adapun kontur yang berbukit memiliki tingkat kelerengan sebesar 15% sampai dengan 40% termasuk klasifikasi kelerengan curam dengan luas 39.955,57 m<sup>2</sup>, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan rawan terjadinya longsor.

Pemanfaatan lahan di kontur berbukit didominasi oleh pembangunan rumah swadaya dan perumahan formal oleh pengembang. Hal ini menyebabkan kondisi lahan akan terbuka dan memerlukan drainase untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak meresap ke tanah. Drainase yang ada belum sepenuhnya mengalir ke drainase kota, sehingga masih banyak aliran air yang masuk ke tanah karena tidak dilengkapi dengan drainase yang memenuhi standar untuk mengalir ke drainase kota. Aktivitas pembangunan perumahan juga turut menambah kerusakan ini. Pelaku usaha/kegiatan pembangunan perumahan dalam melakukan kegiatan konstruksi kurang memperhatikan



kondisi lahan yang berbukit yang terakomodir dalam dokumen kajian lingkungan, namun masih banyak yang belum menerapkannya.

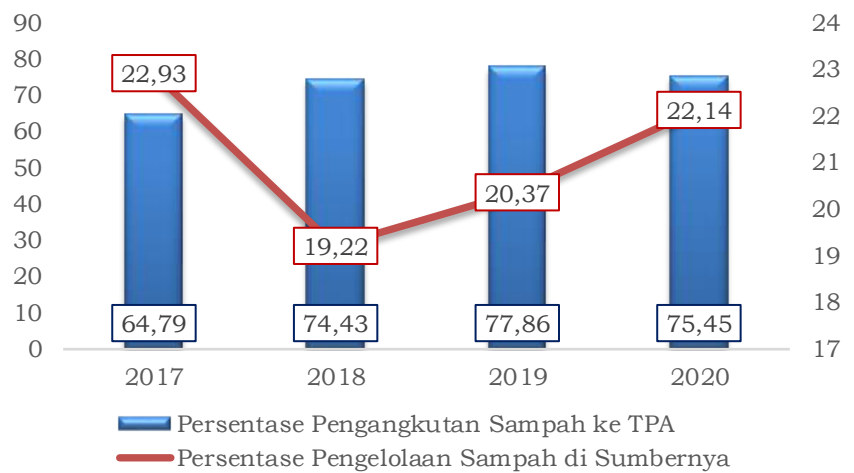
Adapun upaya terkait pembebasan hutan lindung dan hutan kota juga masih belum sepenuhnya terlaksana. Hutan lindung manggar dari 5.999 ha masih terdapat 1.000 ha yang belum dibebaskan sehingga banyak aktivitas masyarakat yang dapat mengancam kelestarian hutan lindung. Kemudian 20 hutan kota baru 5 yang menjadi milik pemerintah kota, sementara itu tanaman yang ada belum tertata masih hutan belukar yang mana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dengan penataan kawasan dan tanaman yang baik.



**Gambar 2.66 Indeks IKA, IKLH, ITH dan IKU Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2020

Permasalahan lainnya terkait urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Untuk mengukur capaian kinerja penanganan permasalahan sampah digunakan dua indikator yaitu Persentase pengangkutan sampah ke TPA dan Persentase pengelolaan sampah di sumbernya. Untuk



**Gambar 2.67 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

persentase pengangkutan sampah ke TPA persentasenya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengelolaan sampah. Capaian realisasi untuk pengangkutan sampah pada tahun 2016 adalah 63,02%. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 menjadi 77,86%. Namun pada tahun 2020, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 75,45%.

Permasalahan pengelolaan sampah disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Pemilahan dan pengolahan sampah di sumber belum mencapai hasil yang diharapkan. Indikasi dari belum berhasilnya pemilahan dan pengolahan sampah adalah masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif. Khusus untuk masyarakat di wilayah pesisir dan sungai masih menjadi wilayah yang kurang dalam mengelola sampahnya. Diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan melalui kegiatan permukiman sepanjang daerah aliran sungai sebanyak 411,32 ton/hari. Kota Balikpapan sendiri diperkirakan menghasilkan sampah sebesar 488,25 ton/hari. Berdasarkan hasil *sampling* sampah dari aliran air Sungai Pandan Sari, diperkirakan berat sampah sebesar 182,88 ton dengan komposisi sampah organik sebesar 63,03%, plastik 34,03 %, sampah inert lainnya (konstruksi bangunan, bebatuan, dsb. Sampah jenis ini tidak dapat didaur ulang, namun bisa digunakan ulang) 2,19%, kaca 0,22% dan logam 0,57%.

Berdasarkan hasil *sampling* tersebut dinilai berpotensi menjadi timbunan sampah di laut. Kecenderungan yang terjadi, Permukiman penduduk daerah pesisir terutama di Kecamatan Balikpapan Timur, Selatan, Kota dan Barat yang terbuat dari kayu dan terapung di atas air mengakibatkan rentan terjadi kebakaran, sehingga di beberapa daerah dibuat ruang kosong diantara rumah penduduk sebagai partisi dan sumber air jika terjadi kebakaran. Akibatnya ruang kosong tersebut selain sebagai jalur api juga digunakan untuk membuang sampah terutama sampah kecil seperti bungkus plastik, kantong plastik dan lain-lain.

Program pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah dengan konsep 3R telah dilaksanakan di kelurahan Gunung Bahagia sejak tahun 2014 sebagai pilot project yang didukung dengan fasilitas seperti MRF, ITF, halte sampah, pengangkutan sampah terjadwal dan sosialisasi serta pembinaan. Namun demikian hingga tahun 2019 program tersebut masih belum optimal untuk mewujudkan *zero waste to landfill* yang terlihat dari data MRF dan ITF yang berfluktuatif dan belum mencapai kapasitas maksimal. ITF hanya sebesar 25,98% - 31,31% yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos, sisanya residu yang dikirim ke TPAS Manggar. Sementara itu, sampah MRF di tahun 2019 menurun sebesar 51,14 dari tahun 2018.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat dari sampah yang didaur ulang, sehingga perekonomian masyarakat dapat berputar. Selain PDU, program lainnya yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ketersediaan bank sampah saat ini masih belum cukup ideal.

Terdapat 126 bank sampah di Kota Balikpapan yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 107 unit berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020. Selain jumlah, sebaran bank sampah juga dirasa kurang merata untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Jumlah bank sampah di Balikpapan Timur sebanyak 39 unit, Balikpapan Utara 15 unit, Balikpapan Selatan 27 unit, Balikpapan Kota 19 unit, Balikpapan Tengah 12 unit, dan Balikpapan Barat 14 unit.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya jumlah sampah. Pertumbuhan penduduk di Balikpapan mempengaruhi bertambahnya volume limbah, termasuk jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk pengendalian terhadap limbah B3 yang dihasilkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan pengawasan terhadap pemegang izin usaha. Namun, untuk limbah B3 skala rumah tangga yang mempunyai potensi cukup besar terhadap pencemaran lingkungan belum ada pengelolaan yang memadai.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, demikian juga dengan sampah yang termasuk dalam kategori sampah B3 yang dihasilkan. Saat ini, tempat pemilahan/pewadahan untuk sampah B3 di Kota Balikpapan belum tersedia, data persentase sampah B3 juga belum terdata dengan baik. Pengelolaan di TPA pun belum maksimal yakni masih tercampur dengan limbah domestik rumah tangga. aktivitas rumah tangga memang mengindikasikan banyak menghasilkan sampah B3. Pilihan produk rumah tangga untuk kemudahan aktivitas sehari-hari dan umumnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan menambah produksi sampah domestik non berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari rumah tangga. Hasil kajian sarana dan prasarana limbah B3 diketahui bahwa rata-rata sampah rumah tangga yang dihasilkan sebanyak 0,0188 per orang/hari. Sampah B3 berpotensi meningkat dan apabila tidak ada penanganan khusus, sehingga akan menimbulkan bahaya yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, seperti sampah atau limbah B3 dari elektronik yang mengandung Timbal, Merkuri, Arsenik, Kadmium yang dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh, karsinogenik.

Pengelolaan sampah B3 rumah tangga ini juga masih terhambat karena belum adanya regulasi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun belum secara jelas mengatur pengelolaan sampah B3 untuk skala rumah tangga. Hal ini tentu berpengaruh pada kesulitan bagi *stakeholder* untuk merumuskan peraturan teknis di daerah.

## **5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**

Salah satu urusan strategis yang menjadi urusan daerah adalah terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan ini diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan

hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Pada tahun 2020, jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 236.293 KK, atau 100 persen seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

**Tabel 2.44 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2017-2020**

No	Kecamatan	% Keluarga Yang Memiliki KK			
		2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	100%	100%	100%	100%
2	Balikpapan Barat	100%	100%	100%	100%
3	Balikpapan Utara	100%	100%	100%	100%
4	Balikpapan Tengah	100%	100%	100%	100%
5	Balikpapan Selatan	100%	100%	100%	100%
6	Balikpapan Kota	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

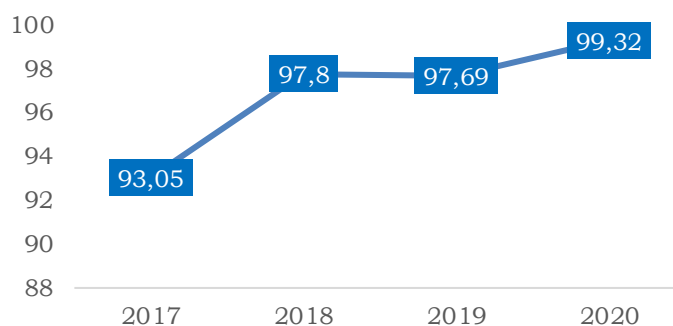
Sedangkan indikator lainnya adalah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terjadi peningkatan jumlah penduduk wajib KTP dari 451.111 pada tahun 2017 menjadi 487.392 pada tahun 2020.

**Tabel 2.45 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2017 - 2020**

No	Kecamatan	Jml Penddk Wajib KTP				Jml Pddk yang Memiliki KTP-el			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	52.771	57.353	59.487	61.121	39.569	54.620	57.668	60.140
2	Balikpapan Barat	63.936	67.116	67.544	67.141	57.035	65.084	65.578	67.136
3	Balikpapan Utara	104.446	110.818	114.713	117.508	117.751	107.388	111.442	116.034
4	Balikpapan Tengah	76.028	77.701	78.187	77.175	60.927	75.986	76.124	77.145
5	Balikpapan Selatan	92.653	97.964	100.744	101.963	87.307	93.503	97.524	101.148
6	Balikpapan Kota	61.277	62.166	63.366	62.484	54.065	60.723	61.557	62.479
<b>TOTAL</b>		<b>451.111</b>	<b>473.118</b>	<b>484.041</b>	<b>487.392</b>	<b>365.646</b>	<b>416.654</b>	<b>457.304</b>	<b>469.893</b>

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

Jika merujuk pada data historis kepemilikan KTP Elektronik, grafiknya menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Pada tahun 2017 persentase kepemilikan E-KTP sebesar 93,05%. Hingga tahun 2020 realisasi kepemilikan E-KTP menjadi sebesar 99,32%.



**Gambar 2.68 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih naik turunnya cakupan kepemilikan E-KTP disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi ketika pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya adalah belum

optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan. Terdapat perubahan aturan terkait kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Pencatatan Sipil, sehingga pembuatan KTP Elektronik tidak perlu surat pengantar dari RT/RW. Lalu aturan lainnya misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Sehingga terkadang membuat pelaksanaannya yang seharusnya menjadi lebih mudah menjadi terhambat karena belum pahamnya masyarakat terkait aturan baru tersebut.

Disamping itu, dalam merespon kondisi pandemi covid-19 yang terjadi, pemerintah juga melakukan perubahan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan signifikan terkait dengan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jika sebelumnya dilakukan melalui tatap muka, saat ini pelayanan dilakukan secara daring/online. Masyarakat yang belum terbiasa melakukan pelayanan secara daring mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan pelayanan yang disebabkan belum memahami prosedur. Hambatan lainnya adalah terbatasnya gadget yang digunakan masyarakat untuk menggunakan layanan online tersebut.

Adapun dalam hal kepemilikan akta kelahiran, berdasarkan laporan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 9,91%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak dalam rangka pemenuhan hak sipil mereka dan untuk kemudahan dalam segala urusan terutama pendidikan, kesehatan dan sosial

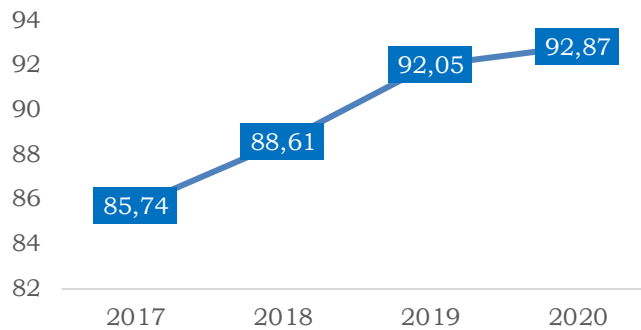
**Tabel 2.46 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2020**

No	Kecamatan	Jml Penduduk Usia 0 – 18 Tahun				Jml Penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran s/d tahun			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Balikpapan Timur	25.704	26.228	27.065	31.257	21.527	22.451	24.487	28.387
2	Balikpapan Barat	30.345	28.593	28.791	31.853	26.192	26.477	28.171	30.359
3	Balikpapan Utara	47.933	49.546	50.804	56.885	41.288	42.502	46.678	53.591
4	Balikpapan Tengah	32.103	31.396	30.778	33.151	28.129	27.917	29.454	31.636
5	Balikpapan Selatan	42.028	43.456	43.984	48.985	35.330	35.938	38.300	44.300
6	Balikpapan Kota	24.737	24.977	24.030	26.043	21.439	21.311	21.997	24.172
<b>Jumlah</b>		<b>202.850</b>	<b>204.196</b>	<b>205.452</b>	<b>228.174</b>	<b>173.905</b>	<b>176.596</b>	<b>189.087</b>	<b>212.445</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2020

Jika merujuk pada data historis dari tahun 2017 hingga tahun 2020, cakupan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2017 cakupan kepemilikan akta kelahiran masih berada diangka 85,74%. Lalu meningkat menjadi 88,61% pada tahun 2018. Hingga tahun 2020 angkanya sudah mencapai 92,87%. Realisasi tahun 2020 ini sudah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2021 yaitu 90%.

Selain penerbitan akta kelahiran dan KTP Elektronik, indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah penerbitan akta kematian dan kartu identitas anak. Untuk penerbitan akta kematian menunjukkan grafik fluktuatif. Pada tahun 2017 angka masih sebesar



**Gambar 2.69 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

95,11%. Angka ini kemudian meningkat signifikan menjadi 99,31% di tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 97,04%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 88,90%. Hal ini terjadi disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian dalam pengurusan surat-surat penting lainnya terkait dengan urusan kepegawaian, perwarisan dan perbankan. Sedangkan untuk cakupan kepemilikan kartu identitas anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar 32,71%, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 63,22% pada tahun 2020. Terkait dengan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah, hal ini disebabkan karena program KIA baru diluncurkan pada tahun 2016. Dan Kota Balikpapan mulai melaksanakan program pencetakan KIA pada tahun 2018 melalui inovasi 3 in 1 dan pencetakan massal bagi siswa SD pada tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 2.47 Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak di Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	95,11%	99,31%	97,04%	88,90%
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	32,71%	56,13%	63,22%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

**Tabel 2.48 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020**

No	Nama Lembaga	Jumlah	
		Kecamatan	Kelurahan (lembaga)
1	LPM	6	34
2	PKK	6	34
3	Karang Taruna	6	34
4	LKM	6	34

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan jasa maupun dana selama kurun waktu 2016 – 2020, sebagaimana tabel dibawah ini berikut ini

**Tabel 2.49 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Dana Swadaya Masyarakat
1	2016	Rp 93.971.882.000
2	2017	Rp 88.615.487.049
3	2018	Rp 93.338.387.000
4	2019	Rp100.738.092.285
5	2020	Rp 83.875.636.859
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 460.539.485.193</b>

Sumber:Bagian Pemerintahan Setda. Kota Balikpapan,2020 \*) dari 27 kelurahan.

## 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia yang dominan adalah pada usia produktif, yaitu sebesar 88% dari total penduduk pada tahun 2020, sedangkan untuk kelompok usia balita hanya 8% dan 4% untuk lansia. Hal ini berarti Kota Balikpapan berada dalam fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk merupakan komponen atau aspek yang strategis dalam mendorong dinamika kemajuan daerah dan bangsa, sehingga keberadaannya merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu pembangunan yang dirancang haruslah pembangunan yang “*population-responsive*”, atau ada yang menyebut “*people centered development*” yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan Kependudukan. Strategisnya masalah kependudukan diakui oleh seluruh negara termasuk Indonesia, sehingga pada akhirnya dalam sidang Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 disepakati sebagai hari kependudukan.

Pembangunan kependudukan yaitu upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) pilar pokok yaitu: 1) Pengendalian kuantitas penduduk, 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pembangunan Keluarga, 4) Pengarahan Mobilitas, 5) Pengembangan sistem informasi kependudukan.

Persentase pemakai alat kontrasepsi selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2017 – 2020, dimana pada tahun 2020, 70,61% telah menggunakan alat kontraspsi. Namun, terdapat beberapa kendala terkait pemakaian alat kontrasepsi ini di masyarakat, seperti

masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang beranggapan bahwa menggunakan alat kontrasepsi KB itu bertentangan dengan pemahaman agama yang dimiliki, khususnya di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

**Tabel 2.50 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Jenis Kontrasepsi	Tahun	Kecamatan						Jumlah
		Timur	Barat	Utara	Tengah	Selatan	Kota	
IUD	2017	621	1.449	3.442	2.195	1.629	1.029	10.365
	2018	678	1.170	4.149	2.323	1.801	1.156	11.277
	2019	760	1.228	3.950	2.476	1.902	1.414	11.730
	2020	821	1.195	3.426	2.545	1.931	1.211	11.129
MOW	2017	246	276	727	589	525	428	2.791
	2018	259	240	890	587	599	443	3.018
	2019	292	242	957	597	652	446	3.186
	2020	320	242	720	572	655	447	2.956
MOP	2017	16	17	20	57	19	13	142
	2018	16	16	20	54	19	13	138
	2019	16	16	21	57	20	13	143
	2020	14	14	20	47	20	15	130
Kondom	2017	267	243	1.443	600	748	417	3.718
	2018	263	255	1.596	586	806	433	3.939
	2019	281	260	1.714	616	898	435	4.204
	2020	290	247	1.416	463	926	468	3.810
IMPT	2017	719	469	943	1.081	748	328	4.288
	2018	778	463	1.110	1.217	915	394	4.877
	2019	751	498	1.170	1.232	1.437	446	5.534
	2020	816	520	984	1.112	1.085	418	4.935
STK	2017	3.734	6.179	6.266	4.604	5.393	3.321	29.497
	2018	3.835	5.428	6.652	4.600	5.695	3.474	29.684
	2019	4.041	5.384	7.556	5.175	5.891	3.597	31.644
	2020	4.102	5.406	8.470	4.947	5.991	3.810	32.726
PIL	2017	2.224	3.594	4.529	2.442	3.090	1.401	17.280
	2018	2.203	3.322	4.334	2.756	3.188	1.410	17.213
	2019	2.209	3.246	4.522	2.444	3.273	1.440	17.134
	2020	2.154	3.043	4.612	2.550	3.321	1.477	17.157

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020

Sementara itu berdasarkan jumlah akseptor yang digunakan, pada tahun 2020, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB aktif adalah suntik (STK) yaitu sebanyak 32.726 orang. Penggunaan suntik dianggap dapat lebih efektif dan lebih mudah digunakan oleh penduduk yang sedang mengikuti program keluarga berencana.

**Tabel 2.51 Persentase Pasangan Usia Subur dan Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2017 - 2020**

No.	Kecamatan	% PUS yang berKB aktif			
		2017	2018	2019	2020
1.	Balikpapan Utara	65,47%	70,63%	74,39%	74%
2.	Balikpapan Selatan	63,01%	65,36%	68,36%	69%
3.	Balikpapan Kota	63,57%	65,82%	67,49%	69%
4.	Balikpapan Timur	70,30%	70,23%	69,44%	70%
5.	Balikpapan Barat	68,48%	67,92%	68,98%	69%
6.	Balikpapan Tengah	68,82%	70,15%	68,37%	70%
<b>Jumlah</b>		<b>66,32%</b>	<b>68,35%</b>	<b>70,02%</b>	<b>71%</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020



Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan menurun dari tahun 2019 sebanyak 105.081 menjadi 103.169 pada tahun 2020. Sama halnya dengan jumlah akseptor aktif yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 72.843 dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 73.575. jumlah akseptor aktif terbanyak di Kecamatan Balikpapan Utara. Peningkatan akseptor aktif seiring dengan peningkatan persentase PUS yang ber KB aktif yaitu pada tahun 2019 sebesar 70,02% meningkat menjadi 71% pada tahun 2020. Persentase tertinggi di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tingkat kepesertaan KB usia subur didominasi oleh suntik, pil KB, dan IUD. Namun, IUD justru jarang dipakai karena ada ketakutan dalam diri masyarakat, sehingga yang paling diminati adalah KB suntik. Oleh karena itu, perlu peran dari mitra terkait dalam rangka membudayakan MKJP bukan hanya peran Pil KB namun juga Fasilitas Kesehatan untuk mengedukasi guna mengarahkan pasangan usia subur menggunakan MKJP. MKJP lebih aman dan dapat dipakai hingga jangka panjang, sedangkan suntik hanya satu bulan dan tiga bulan.

Capaian proporsi wanita usia subur yang tidak menggunakan alat KB mengindikasikan jumlah wanita usia subur yang sudah berstatus kawin tetapi tidak menggunakan alat KB. Pada tahun 2020 terdapat 14,04% proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan KB.

Namun, terdapat beberapa catatan permasalahan antara lain masih adanya kelompok masyarakat (PUS kategori *unmet need*) yang belum bisa secara optimal/ intensif dilakukan penyuluhan KB oleh Penyuluh KB, khususnya di wilayah permukiman elite (kalangan menengah keatas) dan beberapa pondok pesantren di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur maupun Balikpapan Utara.

Persentase peningkatan kelompok kegiatan yang mendukung program KKBPK menunjukkan kenaikan sejak tahun 2017 – 2020, dimana dari 4,52% pada tahun 2017 menjadi 8,50% pada tahun 2020. Sebaliknya, terkait dengan kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK, jumlahnya mengalami tingkat yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 terdapat 1,04% kelompok pemuda yang mendukung kegiatan KKBPK. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,59%.

Persentase jumlah keluarga yang telah terpapar program pemahaman terhadap fungsi keluarga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2019. Pada tahun 2019, capaian keluarga yang terpapar terkait program fungsi keluarga sebesar 8%. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 4,07% pada tahun 2020.

Persentase remaja yang terpapar program keluarga berencana mengalami jumlah yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 naik menjadi 4,72% dari tahun 2017 sebesar 1,51%, sebelum terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 1,13%.

Selain itu, terkait program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke depan, terdapat beberapa catatan permasalahan, seperti masih terdapat perkawinan pada

usia anak/remaja di bawah 21 tahun. Hal ini berbahaya dikarenakan aspek kesehatan reproduksi seorang perempuan layak melahirkan pertama kali usia 20 tahun ke atas dan menikah pada umur 20. Meskipun ada UU perkawinan, bahwa perempuan maupun laki-laki dapat menikah usia 19 tahun, minimnya dana untuk sarpras pendukung, seperti kendaraan operasional yang serba terbatas dan alat peraga penyuluhan yang sangat minim dan hanya tergantung pada penyediaan dana dari DAK. Tahun 2021, DAK tidak dialokasikan untuk alat peraga penyuluhan namun untuk pengadaan pelayanan KB di Faskes, selain itu sarana Kartu Identitas Anak (KIA) juga sangat minim, laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor migrasi, dan perlunya pengadaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

**Tabel 2.52 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate / CPR</i> )	66,32%	68,53%	70,02%	70,61%
Proporsi / Persentase Wanita Usia Subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi KB ( <i>Unmet Need</i> )	18,10%	15,64%	14,49%	14,04%
Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga	4,52%	5,32%	8,00%	4,07%
Persentase remaja terpapar tentang Program Generasi Berencana	1,51%	4,72%	1,59%	1,13%
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	4,52%	5,32%	8,00%	8,5%
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	1,51%	4,72%	1,59%	1,04%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, 2020

## 8. Perhubungan

Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan merupakan simpul transportasi dengan adanya Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, Pelabuhan Internasional Semayang dan Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau, sedangkan untuk transportasi darat dihubungkan melalui jalan baik jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Panjang ruas jalan Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Kota Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-415/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan adalah sepanjang 501,180 KM. Sementara Jalan Provinsi yang melalui Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi adalah Jalan KM 5,5 Balikpapan-Kariangau sepanjang 10,51 KM dan Jalan Mulawarman sepanjang 16,21 KM. Sementara menurut Kep.Men PUPR Nomor.290/KPTS/M/2015 Jalan Nasional yang berada di Kota Balikpapan antara lain: Jalan Sudirman sepanjang 8,07 KM, Jalan Iswahyudi sepanjang 4,06 KM, Syarifuddin Yoes (JL. Ke Airport) 5,69 KM, JLN. MT. Haryono / Ring Road 2,75 KM, dan JLN. Soekarno-Hatta sepanjang 25,09 KM.

**Tabel 2.53 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Kota Balikpapan Tahun 2020**

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Sedan	86	2836	1823	13259

Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum	Dinas	Jumlah
Station Wagon	28576	5299	2658	36533
Mini Bus	2419	2549	1266	6234
Jeep	10458	2419	2749	15626
Lain-lain	426	131	125	682
<b>Mobil Penumpang</b>	<b>41965</b>	<b>13234</b>	<b>8621</b>	<b>72334</b>
Bus	866	503	212	1581
Micro Bus	12169	401	473	13043
Bus Bertingkat	-	-	-	-
Lain-lain	23	120	19	162
<b>Mobil Bus</b>	<b>13058</b>	<b>1024</b>	<b>704</b>	<b>14786</b>
Pick Up	1463	1405	1789	17824
Deliver Van	2078	1002	712	3792
Truck	9727	4019	1825	15571
Tangki	5451	1318	804	7573
Double Cabin	3245	1369	1122	5736
Lain-lain	253	32	52	337
<b>Mobil Barang</b>	<b>22217</b>	<b>9145</b>	<b>6304</b>	<b>50833</b>
Sepeda Motor Solo	38987	12563	1126	413693
Sepeda Motor dgn Kereta Samping	993	554	497	2044
Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-
Scooter	12847	9769	6525	29141
Trail	3641	9817	639	52617
Lain-lain	386	199	276	861
<b>Sepeda Motor</b>	<b>56854</b>	<b>32902</b>	<b>9063</b>	<b>498356</b>
Mobil Pemadam Kebakaran	155	137	141	433
Mobil Ambulance	211	97	97	405
Mobil Jenazah	99	99	48	246
Fork Lift	45	50	43	138
Lain-lain	0	-	-	-
<b>Kendaraan Khusus</b>	<b>510</b>	<b>383</b>	<b>329</b>	<b>1222</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>134604</b>	<b>56688</b>	<b>25021</b>	<b>637531</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, 2021

Dalam hal penyelenggaraan transportasi darat, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, kendaraan di Kota Balikpapan masih kendaraan pribadi masih mendominasi jika dibandingkan dengan kendaraan umum.

Adapun mengenai penyelenggaraan angkutan, jumlah angkutan kota di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.755 unit pada tahun 2017 menjadi 782 unit, hal ini seiring dengan rencana peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meskipun jumlah koridor SAUM dari tahun 2017 hingga tahun 2020 belum mengalami penambahan yaitu berjumlah 1 koridor yang melayani jalur Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar. Berkurangnya jumlah angkutan kota dan belum tersedianya SAUM yang belum optimal mengakibatkan rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,31% pada tahun 2017 menjadi 0,12% pada tahun 2020.

**Tabel 2.54 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan**

	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Kendaraan	572.976	588.911	610.819	637.531
<b>Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,12%</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, 2021

Pengembangan SAUM ini berfungsi untuk mendukung tujuan 11 sasaran 2 SDGs yaitu menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. Perencanaan Koridor SAUM masih bersinggungan dengan rute angkutan kota yang menyebabkan akan terjadinya konflik kepentingan dan kondisi jalan di Kota Balikpapan yang curam dan kurang lebar juga menyebabkan sulitnya pengembangan moda transportasi publik.

Sama halnya dengan penyelenggaraan angkutan, penyelenggaraan perlengkapan dan prasarana jalan juga tidak mengalami penambahan yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 seperti jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda. Hal ini perlu diperkuat untuk beberapa tahun ke depan untuk mengantisipasi kepadatan lalu-lintas di Kota Balikpapan dan mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni dan sebagai *Smart City*.

**Tabel 2.55 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020**

	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkutan Kota	1.755	1.754	1.215	782
Jumlah Koridor SAUM	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal Batu Ampar)
Jumlah Halte SAUM	14	14	14	14
Jumlah Rambu	2.306	2.447	3.229	3.848
Jumlah ATCS	15	15	15	15
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	4.500

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, 2021

Sementara data kecelakaan tidak ditampilkan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan, seperti kondisi kendaraan, kondisi jalan, perilaku dan kondisi pengendara sehingga tidak dapat dijustifikasi menjadi kinerja urusan perhubungan.

## 9. Komunikasi dan Informatika

Terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 80% di tahun 2017 menjadi 90% di tahun 2019. Terdapat sekitar enam objek telekomunikasi yang dilakukan wasdal oleh Diskominfo. Namun secara kewenangan untuk infrastruktur bukan fungsi Diskominfo dikarenakan aturan kominfo tidak ada relevansinya dengan fungsi saat ini. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Oleh karena itu ketika fungsi tersebut terdapat di Diskominfo Kota Balikpapan namun tidak terdapat di Diskominfo Provinsi menjadikan fungsi tersebut tidak sinkron.

Pengawasan menara telekomunikasi terhambat dengan keterbatasan SDM yang melaksanakan survei, serta kurangnya pengetahuan dari SDM yang melakukan survei yang hanya belajar secara otodidak. Selain itu, pihak penyedia menara telekomunikasi



cenderung menyembunyikan data sehingga untuk survei hanya mengandalkan *google maps*. Regulasi/peraturan terkait menara telekomunikasi juga belum diterapkan dengan baik. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Balikpapan masih belum menjelaskan secara teknis hanya secara garis besarnya sehingga perlu direvisi atau di update ataupun di buat turunan dari perda tersebut. Belum adanya mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang tersistem, mengakibatkan pihak penyedia masih mengurus ke setiap Perangkat Daerah untuk perizinannya serta banyak menara yang terbangun sebelum dikeluarkannya izin untuk mendirikan.

Isu IKN juga berpengaruh terhadap urusan komunikasi dan informatika. Dengan adanya IKN, belum terdapat pemetaan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, selama ini menara telekomunikasi yang ada masih berdasarkan kebutuhan penyedia belum berdasarkan kebutuhan pemerintah kota atau hanya berdasarkan daerah padat penduduk sehingga tidak merata.

**Tabel 2.56 Data Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

No	Penyedia Menara	Jumlah Menara Telekomunikasi			
		2017	2018	2019	2020
1	PT. Telkomsel	54	54	112	112
2	PT. Indosat	46	46	46	46
3	PT. XL Axiata	15	14	19	14
4	PT. Protelindo	82	82	82	82
5	PT. Centratama Menara Indonesia	6	11	13	13
6	PT. Dayamitra Telekomunikasi	40	42	51	51
7	PT. Hutcison 3 Indonesia	17	17	18	18
8	PT. Inti Bangun Sejahtera	1	1	7	7
9	PT. Solusi Tunas Pratama	24	24	33	33
10	PT. Tower Bersama Grup	59	59	73	73
11	PT. Anugrah Comunication	-	3	4	4
12	PT. Komet Infra Nusantara	-	6	6	6
13	PT. Persada Sokka Tama	-	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>344</b>	<b>360</b>	<b>465</b>	<b>460</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Jumlah menara telekomunikasi di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebanyak 344 menara dari 10 perusahaan penyedia. Kemudian pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 360 menara dari 13 perusahaan penyedia menara. Sementara itu di tahun 2019 jumlahnya kembali meningkat menjadi 465 menara dari 13 perusahaan penyediaan menara. Meskipun jumlahnya terus meningkat namun masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara di Kota Balikpapan dikarenakan belum adanya kajian. Persentase tanggapan atas aduan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih stagnan di angka 80%. Kanal aduan masyarakat juga masih belum satu pintu, sehingga aduan publik masih belum efektif dalam penanganannya. Sistem pengelolaan pengaduan publik hanya sampai pada tingkat kecamatan dan perangkat daerah. Sementara kelurahan yang menjadi unit organisasi di bawah kecamatan dan berhubungan langsung dengan masyarakat masih belum terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan yang sudah ada. Proses pengelolaan pengaduan, Diskominfo selaku operator memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menanggapi langsung aduan melalui peralatan *comment center*, namun masih belum terealisasi dengan maksimal dikarenakan belum adanya ruangan untuk menempatkan alat tersebut.

Pengelolaan aduan masyarakat juga masih belum optimal dikarenakan kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal penanganan pengaduan publik. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas komunikasi publik juga menjadi salah satu permasalahan. Adapun SDM komunikasi publik diharapkan mampu untuk menganalisis isu publik, dan menyusun strategi komunikasi. Selain itu masih kurangnya SDM yang bertugas sebagai jurnalis, desainer grafis, fotografer dan vidiografer untuk mengoptimalkan komunikasi publik. Hal ini kemudian berpengaruh pada belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik mumpuni dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di tingkat perangkat daerah, serta belum adanya sistem pengkaderan SDM dan belum optimalnya manajemen database informasi dalam memenuhi permohonan informasi terkait implementasi undang-undang tersebut. Upaya penguatan kepada masyarakat pun menjadi terhambat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum dapat direalisasikan dikarenakan belum adanya acuan untuk melaksanakannya. Selain itu, faktor SDM yang belum mumpuni juga menghambat sehingga masih terus diupayakan untuk melaksanakan program dengan maksimal.

Upaya penguatan komunikasi publik ini adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan SDGs. Sebagaimana disebutkan pada tujuan 16 SDGs tentang menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, terdapat sasaran salah satunya yang terkait komunikasi publik yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Tujuan ini kemudian diturunkan pada sasaran nasional RPJMN untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik. Perubahan paradigma media cetak ke media digital menjadi tantangan ke depan, sehingga perlu pemetaan audience agar tepat sasaran untuk mengoptimalkan komunikasi publik.

Pemerintah Kota Balikpapan, saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal <http://balikpapan.go.id>. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook <http://www.facebook.com/pemkotbpn>, instagram [pemkot\\_balikpapan](https://www.instagram.com/pemkot_balikpapan), twitter [@PemkotBPN](https://twitter.com/PemkotBPN), layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis android *Digital Government* Info Balikpapan. Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan

evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Beberapa saluran informasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	Aplikasi	0	1	1	1
Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi	%	80%	85%	90%	83%
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	%	90%	90%	90%	84%
Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	%	80%	80%	80%	94%

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2020

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan masih belum dapat berjalan maksimal dikarenakan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan SPBE hanya dilaksanakan oleh satu bidang yaitu bidang *e-Government* dan memiliki keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaannya masih belum optimal. Sumber daya manusia pada bidang *e-Government* masih terbatas terutama pada seksi Bina *E-Government* yang hanya memiliki 1 (satu) orang pegawai non PNS, kemudian pada seksi Data dan Aplikasi terdapat 2 orang PNS sebagai tenaga programmer namun tidak memiliki kemampuan programming dan didukung 4 orang programmer tenaga Non PNS. Sementara itu, pada seksi Infrastruktur TIK terdapat 2 orang pranata komputer dan didukung 2 orang Non PNS.

Kendala lainnya adalah belum semua aplikasi terintegrasi secara menyeluruh yang disebabkan tidak adanya dokumentasi yang cukup atau bahkan tidak memiliki dokumentasi, sehingga menjadi kendala dalam pengintegrasian. Selain itu, terdapat programmer yang bertanggungjawab pada aplikasi sudah tidak dapat dihubungi. Saat ini masih terdapat lebih dari 100 aplikasi yang belum terintegrasi. Adanya SPBE diharapkan Kominfo dapat menyiapkan *dashboard* dengan adanya peta rencana untuk memberikan laporan layanan baik internal maupun eksternal. Pengembangan aplikasi pada setiap Perangkat Daerah tidak dapat dimonitoring dengan baik dari sisi perencanaan dan implementasinya. Masih terdapat proses bisnis utama di Perangkat Daerah yang belum terdukung aplikasi yang disebabkan tidak adanya perencanaan aplikasi dan perencanaan transformasi digital pada setiap proses bisnis yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Balikpapan.

Upaya lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyusun perencanaan *Masterplan Smart City*. Pembangunan *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung. Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah,

masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

Adapun pengembangan Smart City ini meliputi *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Keenam aspek ini yang akan dikembangkan sesuai dengan konteks sosial budaya di Kota Balikpapan. Untuk *Smart Governance* diarahkan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Komponen pendukung dari *Smart Governance* seperti *public service* dengan pemanfaatan SPBE di lingkungan pemerintahan, optimalisasi pengelolaan data secara terintegrasi pada satu atap, serta integrasi sistem untuk mendukung sistem efisiensi birokrasi.

**Tabel 2.58 Strategi Implementasi Smart Governance**

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
<i>Public Service</i>	Penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintahan	Pembangunan Aplikasi Portal Layanan Masyarakat .	Terlaksananya pelayanan publik melalui Aplikasi Portal Layanan Masyarakat.
		Implementasi paperless e-Office di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Terlaksananya birokrasi internal Pemerintah Kota Balikpapan melalui mekanisme paperless policy.
		Peningkatan jaringan internet secara terpusat dengan kapasitas 100MB per titik	Tersedianya koneksi internet di internal Pemerintah Kota Balikpapan dengan kapasitas 100MB per titik .
<i>Bureaucracy</i>	Integrasi sistem untuk mendukung efisiensi birokrasi .	Pengembangan Datawarehouse	Terbangunnya datawarehouse di internal Pemerintah Kota Balikpapan.
		Pembangunan Gedung <i>Command Center</i> .	Terbangunnya Gedung <i>Command Center</i> .
		Penyiapan Sarana Prasarana <i>Command Center</i> .	Tersedianya Sarana Prasarana <i>Command Center</i> .
<i>Public Policy</i>	Pendayagunaan informasi melalui implementasi satu data dan open data.	Identifikasi metadata dalam aspek pembangunan, termasuk geospasial, dan <i>environmental</i> untuk mendukung kebijakan satu data.	Teridentifikasinya metadata dalam aspek pembangunan, termasuk geospasial, dan <i>environmental</i> untuk mendukung kebijakan satu data.
		Pengembangan Portal <i>Open Data</i>	1. Ketersediaan Aplikasi Portal <i>Open Data e-Government</i> . 2. Ketersediaan akses elemen data pada portal <i>Open Data e-Government</i> .
		Regulasi tentang penyelenggaraan data terpadu (satu data).	Tersusunnya perwal tentang penyelenggaraan data terpadu (satu data).
		Penyusunan kajian zonasi Data Center	Tersusunnya kajian zonasi Data Center.

Selain pelaksanaan *smart governance*, upaya lainnya yang dilakukan dari bagian *smart city* adalah *smart branding*. Hal ini dilakukan untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun sub-pilar pelaksanaan *smart branding* adalah bussines branding melalui pemanfaatan sosial media untuk penyebarluasan city branding kota Balikpapan dan memperkuat pemasaran Kota Balikpapan melalui media promosi berbasis digital secara Nasional dan Global. *Branding* ini dilaksanakan melalui pembuatan dan pengelolaan akun media sosial resmi serta membentuk tim kreatif sebagai admin dan



pengelola konten untuk branding kota Balikpapan (twitter, instagram, facebook). Platform lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan aplikasi mobile Cinta Balikpapan.

Sub-pilar selanjutnya adalah *City Appearance Branding* dan *Tourism Branding*. Beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung sub-pilar tersebut adalah Menyusun desain autentik dan tematik kawasan (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL) Kota Balikpapan, Menata trotoar di 5 ruas jalan utama Kota Balikpapan sesuai desain autentik dan tematik Kota Balikpapan, serta Membangun *landmark* kawasan kota

**Tabel 2.59 Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi Smart Branding**

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indiator Keberhasilan
<i>Business Branding</i>	Pemanfaatan sosial media untuk penyebarluasan city branding Kota Balikpapan.	Membuat dan Mengelola Akun Media Sosial Resmi serta Membentuk Tim Kreatif sebagai Admin dan Pengelola Konten untuk Branding Kota Balikpapan (Twitter, Instagram, Facebook)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Akun Media Sosial Resmi untuk <i>Branding</i> Kota Balikpapan (Twitter, Instagram, Facebook).</li> <li>2. Terbentuknya Tim Kreatif sebagai Admin dan Pengelola Konten Akun Media Sosial Resmi untuk Branding Kota Balikpapan (Twitter, Instagram, Facebook).</li> <li>3. Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Admin dan Pengelola Konten promosi berbasis digital.</li> </ol>
		Pengembangan Aplikasi Mobile Cinta Balikpapan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Aplikasi Mobile Cinta Balikpapan.</li> <li>2. Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Admin dan Pengelola Aplikasi Mobile Cinta Balikpapan.</li> </ol>
	Memperkuat pemasaran Kota Balikpapan melalui media promosi berbasis digital secara Nasional dan Global.	Peluncuran Logo City Branding pada HUT Kota Ke - 123	Peluncuran Logo City Branding pada HUT Kota Ke - 123
		Menyusun video Pariwisata Kota Balikpapan dengan teknologi kamera 360 dan teknologi <i>Augmented Reality</i>	Tersusunnya video pariwisata Kota Balikpapan dengan teknologi kamera 360 dan teknologi <i>Augmented Reality</i> .
<i>City Appearance Branding</i>	Mewujudkan kualitas ruang Kota Balikpapan yang berciri khas lokal.	Menyusun desain autentik dan tematik kawasan (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL) kota Balikpapan.	Tersusunnya desain autentik dan tematik kota Balikpapan.
		Menata trotoar di 5 ruas jalan utama Kota Balikpapan sesuai desain autentik dan tematik Kota Balikpapan.	Tertatanya trotoar di 5 ruas jalan utama Kota Balikpapan sesuai desain autentik dan tematik Kota Balikpapan.
		Melaksanakan Sayembara Desain Ruang Terbuka Kota Berciri Khas Lokal (termasuk cagar budaya).	Terlaksananya sayembara desain ruang terbuka kota Berciri khas lokal (termasuk cagar budaya).
		Membangun landmark kawasan kota	Tertatanya landmark kawasan kota sebanyak 20 lokasi.
		Penetapan Perwal untuk RTBL kawasan (tema arsitektur khas Kota Balikpapan) sebagai pedoman dalam penerbitan izin pendirian bangunan.	Ditetapkannya Perwal RTBL yang menjadi pedoman penerbitan izin mendirikan bangunan.
<i>Business Branding</i>	Memperkuat pemasaran Kota Balikpapan melalui media promosi berbasis digital secara Nasional dan Global.	Peluncuran Logo City Branding pada HUT Kota Ke - 123	Peluncuran logo City Branding pada HUT Kota Ke - 123.
		Menyusun video Pariwisata Kota Balikpapan dengan teknologi kamera 360 dan teknologi <i>Augmented Reality</i> .	Tersusunnya video pariwisata Kota Balikpapan dengan teknologi kamera 360 dan teknologi <i>Augmented Reality</i> .
<i>Tourism Branding</i>	Pengembangan ekosistem pariwisata Kota Balikpapan yang ramah	Melaksanakan penataan kampung tematik di 34 Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penataan kampung tematik di 34 Kelurahan.</li> </ol>

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indiator Keberhasilan
	dan nyaman bagi pengunjung.		2. Terbangunnya kampung wisata kreatif di 34 Kelurahan.

Aspek selanjutnya adalah terkait dengan *smart economy*. Pelaksanaan *smart economy* dilaksanakan untuk Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Smart economy didukung melalui beberapa sub-pilar yaitu *welfare*, *industry*, dan *transction*. Pada sub-pilar *welfare* dan *industry* diarahkan untuk membangun perekonomian melalui pemutahiran basis data IKM, UKM dan Koperasi. Jenis usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja banyak akan menjadi prioritas agar dapat mengoptimalkan pendapatan masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Sedangkan dua sub-pilar selanjutnya yaitu *transction* akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pemberian kemudahan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan fasilitas layanan publik.

**Tabel 2.60 Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi Smart Economy**

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
<i>Welfare</i>	Peningkatan akses dan transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal.	Membangun/pemutahiran basis data IKM, UKM dan Koperasi	Tersedianya data base IKM, UKM dan Koperasi yang uptodate.
		Melaksanakan Perlombaan TTG tingkat Kota yang Kreatif dan inovatif dalam kerangka <i>Green Economy</i> tiap Tahun.	Terlaksananya Perlombaan TTG tingkat Kota yang Kreatif dan inovasi tiap Tahun.
		Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di 6 Kecamatan (Bekerjasama dengan Posyantek di 6 Kecamatan).	Termanfaatkannya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di 6 Kecamatan (Bekerjasama dengan Posyantek di 6 Kecamatan).
		Membentuk dan mengevaluasi Inkubator Industri Bisnis (IIB) di 6 kecamatan	Terbentuk Inkubator Bisnis di 6 kecamatan.
		Menyiapkan UMKM agar siap pemasaran dalam negeri/ luar negeri.	Tersedia UMKM yang siap memasarkan produk di dalam negeri/ luar negeri.
		Pembuatan Sistem <i>e-Commerce (Digital Marketing)</i> untuk IKM dan UKM.	Terbangunnya dan terkelolanya Sistem <i>e-Commerce (Digital Marketing)</i> untuk IKM dan UKM.
<i>Industry</i>	Peningkatan Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja;	Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip	Tersedianya rumah Produksi di Sentra Industri hasil Pertanian Teritip sebanyak 4 unit.
		Pembangunan Rusunawa di Sentra Industri Kecil Teritip.	Terbangun dan terkelolanya Rusunawa di Sentra Industri Kecil Teritip.
<i>Transaction</i>	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	Regulasi kemudahan pembayaran pajak & retribusi.	Tersedia Regulasi kemudahan pembayaran pajak & retribusi.
		Pemutakhiran data wajib pajak	Tersedianya data wajib pajak terkini.
		Penerapan pembayaran pajak dan retribusi non tunai.	Terlaksananya pembayaran pajak dan retribusi non tunai.
		Membuat Mal Layanan Publik.	Terbangun dan terkelolanya Mala Layanan Publik.

Smart city juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui penguatan *smart living* untuk Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Dalam konteks ini smart living ditopang melalui tiga pilar

yaitu *health*, *harmony*, dan *mobility*. Pembangunan *command center* menjadi kebutuhan untuk mewujudkan *smart living* karena berperan dalam identifikasi wilayah-wilayah rawan kriminalitas. Upaya lainnya adalah dengan membangun sistem transportasi yang canggih sehingga dapat mengidentifikasi titik-titik macet serta fasilitas jalan yang sesuai standar nasional.

**Tabel 2.61 Strategi Pembangunan *Smart City* dalam Dimensi *Smart Living***

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
<i>Health</i>	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Membangun sistem layanan kesehatan secara online terintegrasi.	Terbangunnya sistem layanan kesehatan secara online terintegrasi.
<i>Harmony</i>	Peningkatan Layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat.	Implementasi Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112.	Terkelolanya Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112.
		Menyediakan CCTV Balikpapan untuk program K4 (Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Kota) yang terpantau ke Command Center Kota Balikpapan	Tersedianya CCTV Balikpapan untuk keamanan kota di seluruh titik rawan di kota Balikpapan, yang terpantau ke Command Center Kota Balikpapan.
	Pengembangan mitigasi bencana untuk antisipasi dampak bencana.	Pembangunan EWS (banjir, longsor, tsunami, bendungan) berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Terbangunnya sistem Early warning System (banjir, longsor, tsunami, bendungan) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
		Menyediakan internet gratis & aman melalui kerjasama antara Pemda & swasta.	Tersedianya internet gratis & aman melalui kerjasama antara Pemda & swasta.
Peningkatan upaya-upaya pelestarian budaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya.	Membuat film, game, aplikasi terkait dengan sejarah Balikpapan, pengenalan tempat wisata, cagar budaya, seni & budaya dalam rangka 'Explore Balikpapan'	Tersedianya film, game, apps yang berhubungan dengan Balikpapan baik dari sejarah, pengenalan tempat wisata, cagar budaya, seni & budaya dalam rangka Exploring Balikpapan.	
<i>Mobility</i>	Pengembangan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.	Menyusun Aplikasi Intelligent Transport System berbasis IoT yang berfungsi untuk : 1. Memonitor dan menganalisa area-area kemacetan, jumlah <i>traffic &amp; management traffic</i> di Balikpapan 2. Membantu Pemda dalam menentukan keputusan-keputusan strategis terkait transportasi.	Tersusunnya Aplikasi Intelligent Transport System berbasis IoT yang berfungsi untuk : 1. Memonitor dan menganalisa area-area kemacetan, jumlah <i>traffic &amp; management traffic</i> di Balikpapan 2. Membantu Pemda dalam menentukan keputusan-keputusan strategis terkait Transportasi.
		Pengembangan <i>Public Transportation</i> yang ramah difabel	Tersedianya <i>Public Transportation</i> dengan fasilitas khusus untuk penumpang difabel.
		Pembangunan Smart PJU (Penerangan Jalan Umum)	Terbangunnya Smart PJU (Penerangan Jalan Umum) secara bertahap.

Aspek selanjutnya adalah penguatan kualitas masyarakat melalui pelaksanaan *smart society* untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. *Smart society* ditopang oleh empat pilar yaitu *learning*, *community*, dan *security*. Terkait dengan sub-pilar *learning* diarahkan untuk mengembangkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat melalui

pemanfaatan akses digital. Sedangkan untuk *community* berperan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat melalui fasilitasi terhadap komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Salah satu rencana aksi yang akan dilakukan adalah Membangun ruang kreativitas bagi komunitas maupun milenial (*Creative Hub*). Dan yang terakhir adalah sub-pilar security untuk meningkatkan peran asyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum melalui pembuatan aplikasi lapor warga (e-warga) hingga di tingkat RT.

**Tabel 2.62 Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi Smart Society**

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Learning	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang terintegrasi data Dapodik.	Terbangunnya manajemen pendidikan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang terintegrasi data Dapodik.
	Peningkatan kapasitas agen literacy digital	Peningkatan kapasitas literasi TIK bagi tenaga pendidik.	Meningkatnya literasi TIK bagi tenaga pendidik.
Community	Peningkatan literasi digital untuk menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan positif.	Peningkatan budaya digital sehat bagi peserta didik Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan digital (iBalikpapan)	1. Tersedianya Perpustakaan digital Balikpapan yang terintegrasi dengan e-Learning. 2. Ketersediaan bahan baca elektronik yang mencakup berbagai bidang ilmu dan peminatan.
	Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi kreativitas masyarakat.	Membangun ruang kreativitas bagi komunitas maupun milenial ( <i>Creative Hub</i> )	Terbangun dan dimanfaatkannya ruang kreativitas bagi komunitas maupun milenial ( <i>Creative Hub</i> ).
	Peningkatan sarana dan fasilitas untuk kemudahan mengakses layanan publik	Pemutakhiran Data Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat terintegrasi dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).	Terbangun Data Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang uptodate dan terintegrasi dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
		Menyusun Perwali Layanan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Tersusunnya Perwali Layanan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Security	Meningkatkan peran asyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Pembangunan aplikasi lapor warga (e-warga) tingkat RT	Terimplementasinya Pelaporan Warga melalui aplikasi lapor warga (e-warga) tingkat RT.

Aspek yang terakhir adalah pelaksanaan *smart environment* untuk Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Pelaksanaan smart environment ditopang oleh 3 sub-pilar yaitu *protection*, *energy*, dan *waste*. Pada sub-pilar *protection* diarahkan untuk melaksanakan penataan wilayah untuk memperbaiki kualitas tata ruang Kota Balikpapan. Pemanfaatan teknologi tepat guna seperti Pemanfaatan teknologi sensor pada *Internet of Thing* (IoT) pada pelaporan dan monitoring pencemaran air dan udara diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Sedangkan untuk sub-pilar *waste* diarahkan untuk mengembangkan tata kelola persampahan secara lebih komprehensif. Penanganan masalah sampah tidak lagi hanya menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi akan mulai diintegrasikan melalui kurikulum pembelajaran berbasis lingkungan. Hal ini dilakukan agar perilaku membuang sampah sudah mulai diterapkan sejak dini kepada anak-anak. Disamping itu juga dibutuhkan aplikasi bank



sampah sebagai upaya untuk mengelola sampah hasil rumah tangga sehingga tidak semua sampah langsung disalurkan ke TPA Manggar.

**Tabel 2.63 Strategi Pembangunan Smart City dalam Dimensi Smart Environment**

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Protection	Penyusunan Regulasi Penataan Wilayah dan Ketahanan Kota terhadap Iklim dan Bencana.	Menyusun Peraturan Daerah RTRW/RDTR	Disahkannya Peraturan Daerah RTRW/RDTR.
		Penerbitan Peraturan Walikota terkait ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana.	Diterbitkannya Peraturan Walikota terkait ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana.
		Menyusun Peraturan Daerah Bebas Tambang	Disahkannya Peraturan Daerah Bebas Tambang.
	Pemberian insentif dan disinsentif (Indis) terhadap ketepatan dalam pemanfaatan ruang.	Menyusun kajian, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian Insentif dan Disinsentif (Indis)	Tersusunnya kajian, penyusunan NA dan Rancangan Peraturan Walikota tentang pemberian Indis.
		Pembangunan dan perbaikan wajah Kota Balikpapan	Menyusun Peraturan Walikota (Peraturan Walikota ) tentang Reklame (Tata Cara pemasangan, sebaran lokasi, besaran retribusi dan lainnya) dalam bentuk Master Plan Reklame.
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan untuk dapat menggunakan basis data lokasi bangunan dan pemanfaatan ruang dalam proses perizinan IMB, Reklame, Izin Prinsip Izin Lokasi dan izin lainnya menggunakan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan		Dimanfaatkannya basis data lokasi bangunan dan ruang dalam proses perizinan IMB, Reklame, Izin Prinsip Izin Lokasi dan izin lainnya menggunakan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
	Pemanfaatan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing</i> (IoT) pada pelaporan dan monitoring pencemaran air dan udara	Revitalisasi AQMS ( <i>Air Quality Monitoring System</i> ) terintegrasi dengan aplikasi WEB/Mobile untuk informasi secara realtime (online)	Mengalokasikan AQMS ( <i>Air Quality Monitoring System</i> ) terintegrasi dengan aplikasi WEB/Mobile untuk informasi secara realtime (online).
Energy	Penggunaan bersama menara telekomunikasi atau base transceiver station (BTS)	Menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang BTS dalam bentuk Master Plan Menara Telekomunikasi.	Penggunaan satu BTS minimal untuk 3 operator telepon seluler
Waste	Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah ( <i>Waste</i> )	Kebijakan/regulasi kurikulum muatan lokal bagi sekolah TK, SD, SMP ke lokasi wisata berbasis lingkungan (eduwisata)	Diberlakukannya kurikulum muatan lokal bagi sekolah TK, SD, SMP ke lokasi wisata berbasis lingkungan (eduwisata).
		Penukaran biaya transport dengan sampah plastik yang bernilai ekonomi	Penukaran biaya transport dengan sampah (botol minuman).
		Kerjasama CSR untuk peningkatan produksi hasil pengolahan organik dan an organik dengan 3 perusahaan.	Terjalinnnya kerjasama CSR untuk peningkatan produksi hasil pengolahan organik dan anorganik dengan 3 perusahaan.
		Gerakan budaya pemilahan sampah dan pembuatan kompos oleh masyarakat	Adanya gerakan pemilahan sampah di institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
		Mewujudkan Bank Sampah 10 Unit dan 10 Sektor.	Terwujudnya bank sampah 10 Unit dan 10 Sektor.
		Pembangunan Aplikasi Bank Sampah	Termanfaatkannya Aplikasi Bank Sampah.
		Membangun aplikasi sistem tracking mobil angkutan sampah.	Tebangunnya aplikasi sistem tracking mobil angkutan sampah.

Sub Pilar Dimensi	Strategi	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
		Perluasan pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi dari tempat pemrosesan akhir sampah	Pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi dari tempat pembuangan air sampah.
	Peningkatan pengelolaan drainase untukantisipasi dan pengendalian banjir.	Monitoring kondisi saluran drainase melalui sistem informasi drainase.	Terbangunnya sistem informasi drainase untuk monitoring kondisi saluran drainase.
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran melalui Gerakan Bersih Saluran (GABAN)	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran melalui Gerakan Bersih Saluran (GABAN). 2. Terwujudnya pembersihan saluran dan bendali melalui swakelola oleh UPT drainase / bendali.

## 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi aktif di Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebanyak 436 unit, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 435 unit. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 menjadi 438 unit dan 478 unit di tahun 2020, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.64 Jumlah Koperasi Aktif Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Uraian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	436	435	438	478

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 hanya berjumlah 1.035 usaha, meningkat pesat menjadi 4.689 usaha di tahun 2020. Kecamatan Balikpapan Utara menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 2.194 usaha. Kemudian Kecamatan Balikpapan Selatan dengan 1.337 usaha. Lalu disusul oleh Kecamatan Tengah dengan 563 usaha.

**Tabel 2.65 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Kecamatan	UMKM			
	2017	2018	2019	2020
Balikpapan Selatan	230	373	407	1337
Balikpapan Kota	63	125	162	68
Balikpapan Timur	36	247	206	386
Balikpapan Utara	362	169	206	2194
Balikpapan Tengah	273	223	271	563
Balikpapan Barat	71	80	195	141
<b>TOTAL</b>	<b>1.035</b>	<b>1.217</b>	<b>1.447</b>	<b>4.689</b>

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jumlah unit usaha yang mengalami tren kenaikan, sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dan jumlah omsetnya. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja UMKM sebanyak 1.897 orang, jumlahnya meningkat menjadi 2.840 orang pada tahun 2019.

**Tabel 2.66 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Unit Usaha</b>				
Mikro	803	900	1.398	19.812
Kecil	232	174	22	2961
Menengah	0	0	0	272
Jumlah	1.035	1.074	1.420	23.045
<b>Tenaga Kerja (orang)</b>				

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Mikro	1.405	2.148	2.746	N/A
Kecil	492	0	44	N/A
Menengah	0	0	0	N/A
Jumlah	1.897	2.148	2.840	N/A
<b>Omzet (Rp Juta)</b>				
Mikro	8.106	0	60.064	N/A
Kecil	24.026	0	13.774	N/A
Menengah	0	0	0	N/A
Jumlah	32.132	0	73.838	N/A

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Upaya promosi produk UMKM melalui kerja sama dengan perusahaan, toko swalayan, ataupun retail modern lainnya mengalami tren kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dimana pada tahun 2017 hanya sebanyak 125 UMKM yang bermitra, naik menjadi 170 UMKM pada tahun 2020.

Dari sisi akses pinjaman permodalan bagi UMKM di Kota Balikpapan, presentase kredit di perbankan mengalami trend kenaikan pada tahun 2017 hingga 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Berikut merupakan tabel capaian kinerja urusan Koperasi UMKM tahun 2016-2020.

**Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Koperasi UMKM 2016-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	UMKM	125	135	150	170
Persentase Jumlah Koperasi aktif	Persen	80	80	84,19	87,86
Persentase kredit UMKM di Bank	Persen	36,41	37,80	36,74	36,50
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	Orang	66	100	60	60

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Tahun 2021

Adapun upaya peningkatan kualitas KUMKM ini sejalan dengan tujuan SDGs. Dalam SDGs tujuan ke 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

## 11. Penanaman Modal

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur berdampak pada semakin luasnya lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepannya. Selain itu, insensitas yang tinggi dari berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Balikpapan.

Oleh karenanya diperlukan penguatan daya saing investasi daerah yang didukung oleh faktor-faktor kunci daya saing investasi yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.

Jika melihat realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar. Pada tahun 2017, investasi dari modal dalam negeri sebesar Rp16,03 Miliar. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga mencapai Rp13,85 Triliun pada tahun 2020. Sementara investasi dari modal asing juga tidak kalah dengan modal dalam negeri. Pada tahun 2017, jumlah penanaman modal asing sebanyak Rp2.284,44 Miliar. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya angka ini mengalami penurunan. Hingga tahun 2020, jumlah investasi modal asing sebesar Rp519,75 Miliar.

**Tabel 2.68 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal Dalam Negeri (juta rupiah)	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41
Penanaman Modal Asing (juta rupiah)	2.284,44	865,60	374,61	519,75
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	538	760	2.469	7.023
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	29	21	31	56

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2021

Jika dijabarkan menurut sektor usahanya, sektor konstruksi menjadi yang paling berkontribusi terhadap investasi di Kota Balikpapan. Selama periode tahun 2016-2020, realisasi investasi sektor konstruksi mencapai Rp8,057 Triliun. Lalu selanjutnya adalah sektor industri kimia dan farmasi yang berkontribusi sebanyak Rp6,963 Triliun, dibawah sektor ini terdapat sektor pertambangan dengan realisasi investasi sebesar Rp6,887 Triliun. Berikut adalah tabel rincian realisasi investasi dari setiap sektor usaha periode tahun 2016-2020:

**Tabel 2.69 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha Kota Balikpapan Tahun 2016-2020 (juta rupiah)**

Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Total (2016-2020*)
Pertambangan	3.933.213,46	2.068.797,86	2.196,26	430.117,50	452.393,38	6.886.718,46
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	107.930,00	6.032,72	113.962,72
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23.328,33	14.389,40	7.211,84	132.795,20	19.225,30	196.950,07
Perdagangan dan Reparasi	77.723,89	38.112,46	32.796,04	190.848,80	186.669,30	526.150,49
Industri Makanan	560.346,53	1.242,18	472.546,98	29.337,00	193.597,26	1.257.069,95
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	542,10	-	75,04	-	-	617,14
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1.790,32	783,90	-	-	-	2.574,22
Hotel dan Restoran	4.085,21	3.350,70	672,94	24.318,80	6.379,56	38.807,21
Industri Logam Dasar, Barang	1.044.775,43	48.343,18	302,84	28.191,00	-	1.121.612,45



Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Total (2016-2020*)
Logam, Mesin & Elektronik						
Jasa Lainnya	9.058,63	273,36	2.211,64	406.680,40	356.010,38	774.234,41
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	185.313,24	505,06	64.160,42	192.267,50	398.252,78	840.499,00
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	-	127.840,02	-	135.704,90	-	263.544,92
Peternakan	-	14.000,32	-	-	-	14.000,32
Konstruksi	-	-	1.216.254,84	1.170.531,50	5.669.960,30	8.056.746,64
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	3.392,88	11.500,50	51.130,08	66.023,46
Industri Kayu	-	-	7.801,20	14.000,00	56.933,50	78.734,7
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	657,00	-	657,00
Industri Lainnya	-	-	-	177,00	-	177,00
Listrik, Gas dan Air	-	-	-	63,00	-	63,00
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	-	8.980,16	8.980,16
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	-	-	324,00	324,00
Industri Kimia dan Farmasi	-	-	-	-	6.963.271,80	6.963.271,80

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2021

Fluktuasi realisasi investasi di Kota Balikpapan saling berkorelasi dengan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Semakin baik pengelolaan perizinan tentu saja akan berkorelasi positif dengan peningkatan investasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan perizinan dilakukan seperti jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima, dan persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan.

Untuk indikator jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal dihitung melalui jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui *platform [lkpmonline.go.id](http://lkpmonline.go.id)*. Pada tahun 2017, jumlah unit usaha yang melaporkan kegiatan usahanya sebanyak 175 usaha. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 151 usaha, namun pada tahun selanjutnya angka ini terus meningkat hingga mencapai 1.241 usaha pada tahun 2020. Grafik peningkatan ini menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan usahanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Selain itu upaya untuk melakukan reformasi perizinan melalui digitalisasi perizinan secara online salah satu indikator yang digunakan adalah persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini masih berada diangka 19%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 mencapai 41,25%.

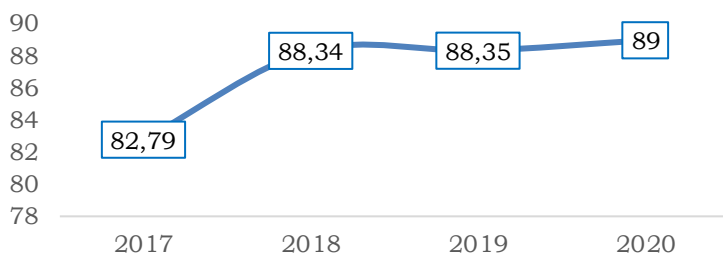
Tren peningkatan realisasi indikator ini menunjukkan bahwa upaya reformasi perizinan sudah semakin baik.

Indikator lainnya yang menunjukkan realisasi yang cukup baik adalah persentase penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan. Indikator ini memiliki realisasi yang konsisten di angka 100% yang berarti seluruh laporan terkait penanaman modal dan perizinan sudah ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait.

**Tabel 2.70 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal	175	151	315	1241
Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	19%	41,25%	41,25%	41.25%
Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	22,38%	-13,71%	108,61%	192.7%
Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2021



**Gambar 2.70 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Urusan Penanaman Modal di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

2016 mencapai sebesar 91,78. Indikator SKM ini mengalami penurunan terendah di tahun 2017 menjadi 82,79 namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 89,00.

Walaupun dari segi pengelolaan perizinan sudah menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat masih mengalami fluktuasi angka. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pada tahun

## 12. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan indikator jumlah pemuda berprestasi seperti Paskibraka, Pemuda Pelopor jumlahnya terus meningkat, namun peningkatannya masih belum signifikan setiap tahunnya. Salah satunya diakibatkan modernisasi yang merubah perilaku sehingga cenderung menghambat prestasi pemuda. Oleh karena itu, perlu adanya arahan pemanfaatan teknologi informasi ke arah yang positif dengan mengangkat kearifan lokal Kota Balikpapan melalui berbagai aplikasi.

Di Kota Balikpapan belum tersedia regulasi turunan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Disisi lain, implementasi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan masih belum efektif. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda di Kota Balikpapan meningkat. Sektor ekonomi kreatif yang dominan diisi oleh pemuda menjadi terkendala sehingga berjalan lambat, oleh karena itu banyak pemuda beralih usaha ke sektor lainnya yang lebih diminati di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan tujuan ke 8 SDGs tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran pada tahun 2030 yakni mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan kesempatan kerja terutama bagi pemuda untuk mengatasi tingkat pengangguran pemuda yang masih tinggi. Di tengah keterbatasan tersebut, pemuda Balikpapan masih menunjukkan prestasi dalam berbagai event dan bidang.

Di samping itu, jumlah atlet berprestasi terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 668 orang, angka ini terus mengalami penurunan hingga hanya 25 orang pada tahun 2020 seiring menurunnya event olahraga di masa pandemi *covid-19*. Prestasi atlet lokal diharapkan dapat mencapai level nasional atau internasional, yang perlu diimbangi pula dengan ketersediaan pelatih dari segi kualitas maupun kuantitas.

Presentase ketersediaan sarana prasarana olahraga mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 91,12% di tahun 2020. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2017-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	Orang	48	53	57	31
Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	668	566	25
Peningkatan prestasi olahraga	Medali	55	516	1.643	25
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	Persen	91,02	91,07	91,04	91,12

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, Tahun 2021

### 13. Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2017-2020.

**Tabel 2.72 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2017 – 2020**

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√		√		√	
2	IPM	√		√		√		√	
3	Suseda	√		√		√		√	
4	KBDA	√		√		√		√	
5	Indeks Gini Rasio	√		√		√		√	
6	Input Output		√		√		√		√
7	IKM	√		√		√		√	

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2021

Pada tujuan 17 SDGs tentang penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan terdapat sasaran yang berkaitan dengan urusan statistik yaitu pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Sasaran RPJMN terkait dengan sasaran tersebut yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

#### 14. Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pada tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik untuk aplikasi e-office serta pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakuan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN. Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Nomor: 188.45-39/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat 59 jenis informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas.

**Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Persentase PD yang melakukan pengamanan informasi	%	-	25	50	61
Jumlah PD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi	OPD	-	10	15	22

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2020, PD yang melakukan pengamanan informasi baru 61% meskipun meningkat dari tahun 2018 sebesar 25%. Pada tahun 2020 baru 19 PD termasuk seluruh kecamatan yang sudah melakukan pengamanan informasi yaitu:

1. Seluruh Kecamatan



2. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot, Bagian Perekonomian Setdakot, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bappeda Litbang
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Ketenagakerjaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
19. RSUD Beriman

**15. Kebudayaan**

Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897. Pada tahun 1907, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Kota Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi-etnis, sampai dengan saat ini terdapat 188 paguyuban berada di Kota Balikpapan,

Pengelolaan urusan kebudayaan dapat diukur melalui dua indikator yaitu Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan, serta Cagar budaya yang dilindungi. Adapun realisasi indikator prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan pada 6 kegiatan pada tahun 2017-2019. Realisasi indikator prestasi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi hanya 2 kegiatan saja yang dapat dilaksanakan karena kondisi pandemic  *covid-19*.

**Tabel 2.74 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	Kegiatan	6	6	6	2

Sumber: <http://esakip.balikpapan.go.id>

Indikator selanjutnya adalah cagar budaya yang dilindungi. Realisasi indikator ini menunjukkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 71 lokasi cagar budaya yang dilindungi. Realisasi ini meningkat menjadi 100 lokasi pada tahun 2017. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 144 lokasi cagar budaya yang dilindungi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua cagar budaya lokasinya berada di lahan pemerintah, terdapat lokasi cagar budaya yang masuk kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina sehingga sulit melakukan elaborasi dan promosi. Masalah lainnya yang dihadapi adalah anggaran kegiatan promosi cagar budaya belum maksimal karena terkendala wabah Covid-19. Upaya pelestarian cagar budaya telah dilakukan, namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menimbulkan kendala untuk memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana cagar budaya pada tahun 2021.

**Tabel 2.75 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi**

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
Cagar budaya yang dilindungi	Lokasi	100	119	129	144

Sumber: <http://esakip.balikpapan.go.id>

## 16. Perpustakaan

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berbagai upaya dan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik, penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami tren penurunan sejak tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 202.263 orang. Tahun 2018 sampai tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kunjungan perpustakaan hingga menjadi 19.818 orang pada tahun 2020.

Penurunan drastis jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 disebabkan karena perpustakaan pernah 1 bulan penuh tidak beroperasi karena sedang melakukan pengelolaan buku. Selain itu kondisi pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020 juga semakin mengurangi jumlah kunjungan ke perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kembali jumlah kunjungan baik secara langsung maupun online.

Selain penurunan jumlah kunjungan perpustakaan, penambahan jumlah anggota perpustakaan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penambahan jumlah anggota sebanyak 5.819 orang. Angka ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 penambahan jumlah anggota hanya sebanyak 1.349 orang.

Semakin berkurangnya penambahan jumlah anggota ini disebabkan karena pengembangan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan masih belum optimal.

Hal ini menurunkan minat masyarakat untuk datang langsung ke perpustakaan. Ketersediaan ruang untuk pendayagunaan perpustakaan masih belum sesuai kebutuhan.

Indikator lainnya yaitu penambahan jumlah judul koleksi bahan pustaka juga menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017, penambahan jumlah koleksi bahan pustaka hanya mencapai 2.243. Walaupun sempat terjadi kenaikan penambahan koleksi menjadi 3.772 di tahun 2018, realisasi indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 442 tambahan koleksi bahan pustaka. Pada tahun 2020, angka ini kembali meningkat menjadi 1.075 penambahan judul koleksi bahan pustaka.

Adapun terkait dengan pembinaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip juga memiliki program pembinaan terhadap perpustakaan dan taman baca yang ada di Kota Balikpapan. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina sebanyak 241. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 196, akan tetapi indikator ini kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 254 binaan perpustakaan dan menjadi 264 pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, kinerja urusan perpustakaan mengalami tren penurunan capaian kinerja, walaupun di beberapa aspek seperti jumlah binaan perpustakaan mengalami peningkatan. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan berpengaruh terhadap keseluruhan urusan perpustakaan. Merujuk pada standar nasional yaitu Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, per 75 ribu penduduk membutuhkan minimal 1 pustakawan. Dan saat ini jumlah pustakawan hanya 2 orang. Idealnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Balikpapan memiliki 10 pustakawan.

Dengan kondisi keterbatasan SDM ini menyulitkan untuk melaksanakan beberapa program yang telah direncanakan. Selain terkait kuantitas, kualitas pustakawan juga masih perlu untuk ditingkatkan. Bimbingan teknis kepada pustakawan maupun pengelola perpustakaan lainnya belum pernah dilaksanakan selama tahun 2016-2020. Hal ini bisa dilihat dari capaian pelaksanaan bimtek yang masih belum ada hingga saat ini. Capaian kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.76 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Orang	148.447	202.263	134.566	98.192	19.818
Jumlah Penambahan Anggota Perpustakaan	Orang	6.190	5.819	3.440	3.310	1.349
Penambahan Jumlah Judul Koleksi Bahan Pustaka	Judul	8.277	2.243	3.772	442	1.075
Jumlah Perpustakaan / Taman Baca yang Telah Dibina	Unit	224	229	239	254	264

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip

## 17. Kearsipan

Selain mengelola urusan arsip daerah, fungsi lainnya dari urusan kearsipan adalah menguatkan tata kelola arsip untuk semua Perangkat Daerah yang ada. Oleh karenanya

fungsi kearsipan yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip juga mengemban tugas untuk meningkatkan pengelolaan arsip bagi semua Perangkat Daerah. Untuk mengukur sejauh mana penguatan tata kelola terdapat dua indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD dan Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata.

Adapun di Kota Balikpapan, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dimulai sejak tahun 2018. pada tahun 2018 jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIKD sebanyak 7 Perangkat Daerah dari total 36 Perangkat Daerah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 semua Perangkat Daerah telah mengimplementasikan SIKD. Sedangkan untuk indikator persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata mengalami fluktuasi angka. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sebesar 14,35%. Lalu menurun menjadi 10% pada tahun 2018. Hingga tahun 2020 realisasi indikator ini kemudian meningkat lagi menjadi 25%.

**Tabel 2.77 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2016-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan SIKD	-	19,44%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	14,35%	10%	25%	25%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Walaupun kedua indikator telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah belum optimalnya SDM pengelola arsip, terbatasnya SDM menyebabkan struktur, dan kelembagaan arsip yang belum memadai. Selain terkait dengan SDM, kendala lainnya adalah kurang memadainya fasilitas penunjang untuk pengembangan arsip. Gudang yang ada saat ini untuk penyimpanan arsip inaktif dan statis masih belum sesuai standar penyimpanan arsip. Upaya digitalisasi arsip juga masih belum dapat diterapkan dengan baik. Dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024, dicanangkan untuk melakukan pengembangan E-Arsip dan Big Data Kearsipan. Pengembangan aplikasi arsip sendiri belum menunjukkan ke arah yang baik karena penataan dan pendataan arsip belum memanfaatkan aplikasi. Fenomena kerja dari rumah bagi para pegawai karena pandemi virus *covid-19* menjadi satu momentum penting agar semua Perangkat Daerah bekerja dengan pola virtual. Namun momentum ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena sistem informasi kearsipan yang dibangun masih bersifat parsial.

**c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap



unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Merujuk Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2020 dapat terlihat pada tabel berikut. Capaian produksi perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu sebesar 6.384,52 ton. Sementara capaian produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4.242,54 ton. Dari sisi peningkatan produksi perikanan, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan, tingkat produksi perikanan Kota Balikpapan sebesar – 1.450,63 Ton. Selanjutnya, pada tahun 2018, jumlah produksi perikanan mengalami kenaikan menjadi 293,41 ton serta mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.849 ton. Namun angka ini kembali mengalami penurunan menjadi – 1.700,86 pada tahun 2020

**Tabel 2.78 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
Jumlah produksi perikanan	4.242,54	4.536,3	6.384,52	4.684,7
Jumlah produksi perikanan budidaya	411,54	391,3	266,92	275,50
Jumlah produksi perikanan tangkap	3.831,00	4.145,0	6.117,60	4.409,20
Jumlah peningkatan produksi perikanan (kenaikan)	-1450,63	293,41	1.849,27	-1.700,86

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, 2021

## 2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Balikpapan memiliki 57 objek wisata pada tahun 2019. Merujuk Keputusan MENPARPOSTEL No 98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Dari 57 Objek wisata di Kota Balikpapan, 14 diantaranya adalah objek wisata buatan, 12 objek wisata belanja/kuliner, 9 objek wisata religi, 8 objek wisata alam dan wisata bahari, serta 6 objek wisata sejarah. Berikut daftar objek wisata di Kota Balikpapan.

**Tabel 2.79 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan**

No	Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
1	Wisata Alam/Hutan atau Ekowisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)</li> <li>2. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)</li> <li>3. Kawasan Wisata Mangrove Center</li> <li>4. Kawasan Kebun Raya Balikpapan (KBB)</li> <li>5. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)</li> <li>6. Kawasan Wisata Mangrove Center</li> <li>7. Kawasan Kebun Raya Balikpapan (KBB)</li> <li>8. Kawasan Ekowisata Teluk Balikpapan</li> </ol>
2	Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penangkaran Buaya Teritip</li> <li>2. Carribean Island Waterpark Regency</li> <li>3. Waterpark Griya Permata Asri Ringroad</li> </ol>



No	Objek Wisata	Nama Tempat Wisata
		4. Jembatan Ulin Kariangau 5. Kampung Atas Air Magasari 6. Kampung Warna-Warni Teluk Seribu 7. Aqua Boom 8. Taman Bekapai 9. Taman Tiga Generasi 10. Kilang Minyak Balikpapan 11. Waduk Manggar 12. Kampung Kenangan Lamaru 13. Kampung Pinisi 14. Kampung Kangkung
3	Wisata Religi	1. Islamic Center 2. Mahavihara Budha Manggala Balikpapan 3. Masjid Jami' Al Ula 4. Masjid Agung At-Taqwa 5. Masjid Istiqomah 6. Klenteng Guang De Miao 7. Pondok Pesantren Hidayatullah 8. Wisata Religius Vihara Eka Dharma Manggala 9. Wisata Religius Vihara Budha Maitreya
4	Wisata Bahari	1. Pantai Manggar Segara Sari 2. Pantai Lamaru 3. Pantai Monpera 4. Pantai Kemala Polda 5. Pantai Kilang Minyak Pertamina 6. Pantai Seraya 7. Pantai Banua Patra 8. Pantai Nirmala Lamaru
5	Wisata Bersejarah	1. Tugu Jepang dan Makam Jepang Lamaru 2. Tugu Australia Lapangan Merdeka 3. Museum Kodam VI Mulawarman 4. Monumen Mathilda 5. Meriam Jepang 6. Rumah Dahor Herritage
6	Wisata Belanja/Kuliner	1. Pasar Inpres Kebun Sayur 2. Melawai 3. Plaza Balikpapan 4. Ruko Bandar 5. Balikpapan Super Block 6. Living Plaza 7. Mall Fantasi Komp Balikpapan Baru 8. Ramayana Plaza 9. Pasar Segar 10. Taman Tiga Generasi 11. Taman Bekapai 12. Lapangan Merdeka

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2020

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Kota Balikpapan tahun 2016 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2026. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: Destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Industri pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “Terwujudnya Daerah sebagai Tujuan Pariwisata Internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, MICE, dan wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat”.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2017 – 2019, pada tahun 2017 jumlah kunjungan ke Kota Balikpapan mengalami kenaikan 2.554.423 orang dan terus meningkat menjadi 2.802.058 pada tahun 2018 dan 2.917.514 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, karena dampak pandemi covid, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Balikpapan mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.082.273 orang.

Jumlah event pariwisata dan budaya Kota Balikpapan tahun 2017 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah event yang dapat diselenggarakan sebanyak 7 event. Sementara pada tahun 2017 1 event dan 5 event pada tahun 2018. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang dapat menyelenggarakan 8 event.

Upaya pengembangan destinasi pariwisata selain bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan juga menjadi sarana penyediaan ruang publik bagi penduduk Kota Balikpapan. Berdasarkan grafik pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 terdapat 41 destinasi pariwisata yang dikembangkan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan, bahwa pengembangan destinasi pariwisata di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 1 destinasi pariwisata yang dikembangkan. Pengembangan destinasi pariwisata terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41 destinasi pada tahun 2020.

Merujuk tujuan 8 SDG's pengembangan destinasi pariwisata mendukung menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal pada tahun 2030. Selain itu, berdasarkan dokumen Roadmap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, secara spesifik terdapat 2 tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menjadikan urusan pariwisata sebagai bagian dari strateginya. Pertama, tujuan 7 Energi Bersih dan Terbarukan. Kedua, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 2.80 Arah Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan SDG's**

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi Tahun 2020-2024
Energi Bersih dan Terbarukan	Mendorong pemanfaatan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga dan industri	Pengembangan kluster industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan baru	Meningkatkan konektivitas destinasi pariwisata dengan fokus pada MICE, pariwisata minat khusus, dan lintas batas pariwisata

Sumber: Roadmap SDG's Nasional, 2017

Terkait pengembangan destinasi objek wisata unggulan Kota Balikpapan pada tahun 2016 – 2020, terdapat 2 destinasi yang dikembangkan menjadi destinasi objek wisata unggulan pada tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya menjadi 1 objek destinasi unggulan pada 2018. Kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 menjadi

10 objek destinasi wisata, hingga kembali mengalami penurunan menjadi 6 objek destinasi wisata pada tahun 2020.

Jumlah asosiasi yang bermitra adalah banyaknya asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Jumlah asosiasi pengusaha pariwisata yang bermitra dengan Pemerintah Kota Balikpapan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020, terdapat 9 asosiasi perusahaan yang bermitra dari sebelumnya 1 asosiasi pada tahun 2018.

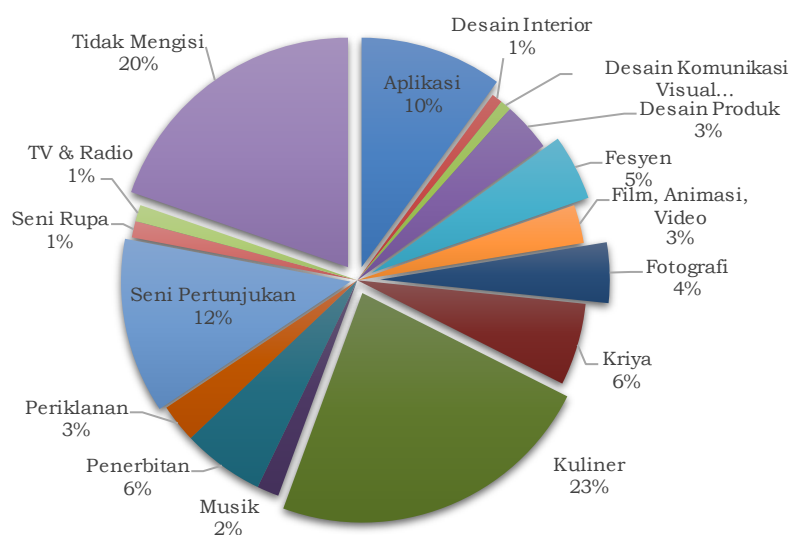
**Tabel 2.81 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan wisatawan	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273*
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	1	5	8	7
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	1	1	30	41
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	2	1	10	6
Jumlah asosiasi yang bermitra	0	1	8	9

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, 2021

Ekonomi Kreatif sebagai konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama mulai masuk di Kota Balikpapan ditandai dengan berdirinya Forum Ekonomi Kreatif (BCF) ada tahun 2016. Yang dilanjutkan dengan aktivasi 6 sub sektor ekonomi kreatif dan kolaborasi pentahelix aktor ABCGM pada tahun 2017 dan 2018. Eksistensi ekonomi kreatif ini dikukuhkan kembali dengan ditandatanganinya MoU antara Bekraf dan Pemerintah Kota Balikpapan serta BCF pada tahun 2019. Dan di tahun yang sama dilakukan peresmian Balikpapan Creative Center (BCC) di Gedung Parkir Klandasan sebagai wadah pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berkreasi. Pada tahun 2019 Kota Balikpapan juga ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi 10 kota kreatif dari 55 kabupaten kota dalam bidang aplikasi dan gim.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama relawan ekonomi kreatif. Sub sektor ekonomi kreatif yang mendominasi responden di Kota Balikpapan antara lain: Kuliner, Seni Pertunjukan, dan Aplikasi yang tergambar sebagaimana grafik dibawah ini.



**Gambar 2.71 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan**

Sumber: Bappeda Litbang (diolah), 2021

Adapun terkait dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan, mengalami tren peningkatan. kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB



Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp12,598 juta menjadi sebesar Rp14,123 juta di tahun 2019. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi Rp 12,077 juta pada tahun 2020. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta kenaikan tarif retribusi.

**Tabel 2.82 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Tahun	Kontribusi terhadap PDRB (juta rupiah)
2017	12.597.911,4
2018	13.531.136,5
2019	14.123.397,7
2020	12.077.471,3

Sumber : BPS, diolah

### 3. Pertanian

Lahan pertanian di Kota Balikpapan relatif terbatas luas dan sebarannya. Selain itu, pertanian di Kota Balikpapan umumnya dilakukan dalam skala kecil. Kawasan yang masih mengusahakan pertanian cenderung terpusat di Kecamatan Balikpapan Timur, utamanya Kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip.

Berdasarkan tabel luas panen padi dan palawija di Kota Balikpapan tahun 2017 – 2020. Pada tahun 2020, luas lahan panen ubi kayu merupakan lahan yang terluas diantara komoditas lainnya, terdapat 324 hektare luas lahan untuk panen ubi kayu. Terkait dengan luas lahan panen padi ladang, sejak tahun 2017 – 2020 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 40 hektare lahan untuk panen padi ladang, tetapi turun menjadi 3 pada tahun 2018, hingga 0 hektare pada tahun 2020. Hal serupa juga terjadi bagi luas lahan panen padi sawah, luas tersebut mengalami penurunan menjadi 38 hektare pada tahun 2019 dari 60 hektare pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 luas lahan panen padi sawah mengalami peningkatan kembali menjadi 66 hektar.

**Tabel 2.83 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau Green Bean
2017	97	40	137	190	217	23	22	-	-
2018	60	3	63	80	232	24	20	-	-
2019	38	1	39	96	257	-	-	-	-
2020	66	-	66	247	324	17,5	21	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel produksi panen padi dan palawija Kota Balikpapan tahun 2017 – 2020, pada tahun 2020 jumlah panen terbanyak adalah ubi kayu dengan 15.186,8 ton, sedangkan kacang tanah menjadi komoditas dengan jumlah paling sedikit yaitu 42 ton. Terdapat, temuan menarik bahwa luas lahan panen yang meningkat pada tanaman padi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah produksi panen, tetapi pada lahan kacang tanah justru mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi catatan, bahwa jenis tanah di Kota Balikpapan lebih tepat bagi komoditas ubi kayu.

**Tabel 2.84 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Tahun	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau Green Bean
2017	NA	NA	NA	448	8.834	360	315	-	-
2018	362,1	6	368	492	10.332	360	94	-	-
2019	222,4	3	225,4	672	12.032	717	138	-	-
2020	358,5	-	358,5	1358	15.187	262,5	42	-	-

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sementara dari perkembangan luas tanam sawah maupun ladang Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan luas tanam padi sawah dari 31 Ha menjadi 2 Ha. Sedangkan perkembangan luas tanam sawah ladang di Kota Balikpapan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari 1 Ha menjadi 0, sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut.

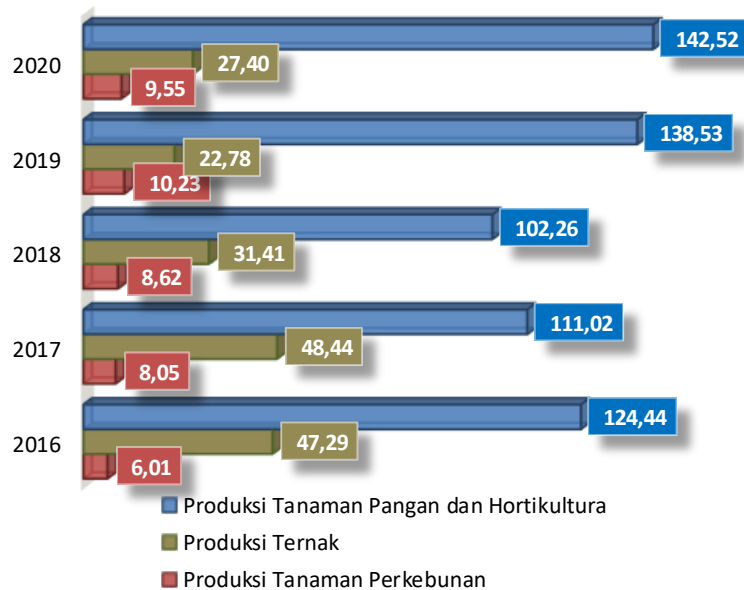
**Tabel 2.85 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2017 – 2020**

No	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2017	66	89	376	5	34	70
2	2018	45	60	362	3	3	6
3	2019	31	45	245,6	1	1	3
4	2020	2	3	358.5	0	0	0

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 2021

Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dihitung dari realisasi produksi bidang pertanian untuk komoditi padi, palawija, sayuran dataran rendah dan buah-buahan tahun berjalan. Komoditas hortikultura yang dikembangkan antara lain meliputi kangkung, sawi, ketimun, terung, bayam, salak, pepaya, dan pisang. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, jumlah produksi meningkat menjadi sebesar 138.525 ton, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 142.524 ton pada tahun 2020.

Jumlah produksi tanaman perkebunan dihitung dari realisasi produksi bidang perkebunan untuk komoditi karet, kelapa dan lada tahun berjalan. Berdasarkan grafik kenaikan produksi tanaman perkebunan, terjadi peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, terjadi penurunan menjadi 9.547,99 ton pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2019 yang menyentuh angka 10.229,77 ton.



**Gambar 2.72 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribuan Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 2021

Jumlah produksi ternak diperoleh dari realisasi produksi

bidang peternakan untuk komoditi daging sapi, daging ayam dan telur tahun berjalan.

Berdasarkan grafik jumlah produksi ternak Kota Balikpapan sejak tahun 2016 – 2020 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah produksi ternak adalah 47.285,74 ton, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 48.439,32 ton pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 22.783,56 ton pada tahun 2019. Jumlah produksi ternak kembali mengalami peningkatan menjadi 27.4040,56 ton pada tahun 2020.

Merujuk capaian kinerja urusan pertanian Kota Balikpapan, terdapat tiga indikator yang dijadikan acuan antara lain: kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura, kenaikan produksi tanaman perkebunan, dan kenaikan produksi ternak sebagai berikut.

**Tabel 2.86 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 – 2020**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
Kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	-13.420,4	-8.751,14	36.264,60	3,809,40
Kenaikan produksi tanaman perkebunan (ton)	2.064,3	565,62	1.609,36	-688,76
Kenaikan produksi ternak (ton)	1.153,58	-17.028,18	-8.628,91	4.621,00

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 2021

#### 4. Perdagangan

Sarana perdagangan di Kota Balikpapan berkembang pesat cukup. Pada tahun 2017 jumlah toko mencapai 209. Jumlahnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 220 toko. Hingga akhir tahun 2019 jumlah toko mencapai 264. Namun, pada tahun 2020 jumlah toko mengalami penurunan menjadi 230 toko. Sementara untuk pasar rakyat perubahan jumlahnya tidak signifikan seperti minimarket. Tercatat hingga tahun 2020 jumlah pasar rakyat di Kota Balikpapan sebanyak 19 pasar. Adapun sarana perdagangan lainnya seperti Supermarket, Hypermarket, Toko Grosir, dan Department Store jumlahnya tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 2.87 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Sarana Perdagangan	2017	2018	2019	2020
Pasar	16	13	17	19
Toko/Minimarket	209	220	264	230
Supermarket	7	9	9	11
Hypermarket	2	-	-	-
Grosir	1	1	1	1
Department Store	5	5	5	4

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jumlah kios di 11 pasar rakyat yang ada di Kota Balikpapan sejumlah 4.259 kios. Dimana jumlah kios terbanyak terdapat di Pasar Pandansari, yaitu sebanyak 781 kios. Sementara jumlah kios terendah di Pasar Rakyat KM.12 Karang Joang yaitu sebanyak 56 kios.

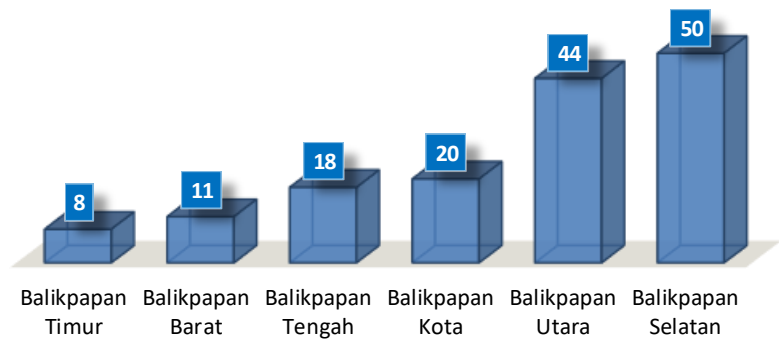
**Tabel 2.88 Jumlah Kios dan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan Tahun 2020**

Wilayah Pasar	Jumlah Kios	Jumlah PKL
Inpres Kebun Sayur	223	50
Penampungan A	265	-
Kampung Baru Tengah	332	-
Laok Besi dan Warung	72	-
Pasar Rakyat Km.12	56	-
Pandansari	781	108
Klandasan I	578	80
Klandasan II	579	-
Damai	294	20
Sepinggan	883	100
Tertip	234	-

Wilayah Pasar	Jumlah Kios	Jumlah PKL
Total	4.259	358

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Pada tahun 2020, mini market dan toko tradisional di Kota Balikpapan yang belum memiliki izin paling banyak tersebar di Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu sebanyak 50 mini market/toko tradisional. Sementara itu, Kecamatan



**Gambar 2.73 Mini Market dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin Tahun 2020**

Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2020

Balikpapan Timur menjadi daerah dengan mini market/toko yang tidak berizin paling sedikit, yaitu sebanyak 8 mini market/toko tradisional.

Adapun terkait dengan ekspor impor, realisasi ekspor yang melalui Kota Balikpapan tahun 2020 mencapai \$2.934.541.516,32. Hal ini mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai \$3.103.163.031,62. Sementara itu, realisasi impor yang masuk ke Kota Balikpapan tahun 2020 mencapai \$2.780.828.826,45 sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar \$7.395.368,84. Perkembangan realisasi nilai produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2016-2020 tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.89 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Ekspor (\$)	Realisasi Impor (\$)
2017	2.510.019.355,83	84.874.061,78
2018	2.780.087.611,87	5.342.734,65
2019	3.103.163.031,62	7.395.368,84
2020	2.934.541.516,32	2.780.828.826,45

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2021

Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar di tahun 2017 sebesar 79%. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 66% dan 64,96%. Hingga tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 64,25%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jumlah pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi.

Untuk pelaku usaha wajib tera yang melakukan tera/tera ulang capaiannya mengalami tren kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun mengalami penurunan yang signifikan menjadi 36,09% di tahun 2020.

Terdapat 4 pasar yang sudah berklasifikasi A yaitu: Pasar Klandasan I, Klandasan II, Pandansari dan Pasar Inpres Kebun Sayur. Di tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase pasar berklasifikasi A menurun menjadi 33,3% di tahun 2020 dari sebelumnya mencapai 36%.



Nilai pasar terhadap penilaian adipura pada kurun waktu 2017 hingga 2020 masih stagnan di 72,15.

**Tabel 2.90 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2017 – 2020**

Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020
Cakupan unit usaha dagang	Unit usaha	248	248	248	230
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	%	79	66	64,96	64,25
Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	66,12	66,56	70,73	36,09
Persentase pasar berklasifikasi A	%	36	36	36	33,3
Nilai ekspor bersih (US\$ Juta)	US\$ Juta	2.510,10	2.780,12	3103,16	2937,12
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	Nilai	72,15	72,15	72,15	72,15

Sumber: Dinas Perdagangan Tahun 2021

## 5. Perindustrian

Jumlah usaha yang mendapat sertifikasi kompetensi di Kota Balikpapan menjadi penting untuk melihat sejauh mana kualitas iklim usaha yang telah terbentuk. Untuk usaha kecil, jumlah usaha yang telah mendapatkan sertifikasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, total usaha kecil yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 169 usaha. Angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2019, hanya 119 usaha kecil yang tersertifikasi. Namun, pada tahun 2020 angka ini kembali meningkat menjadi 138 usaha kecil yang tersertifikasi. Jenis usaha terbanyak yang mendapatkan sertifikasi kompetensi adalah CV Limited Partnership yaitu sebanyak 77 usaha pada tahun 2020.

**Tabel 2.91 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020
CV Limited Partnership	99	86	73	77
Koperasi	-	-	-	-
Perseroan Terbatas	69	62	44	59
Toko	-	1	1	1
Usaha Dagang	1	1	1	1
Firma	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>119</b>	<b>138</b>

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sementara itu untuk usaha non-kecil, jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan usaha kecil. Walaupun mengalami fluktuasi angka setiap tahunnya, akan tetapi penurunannya tidak sebanyak dengan usaha kecil. Pada tahun 2017, usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 158 usaha. Jumlah ini menurun pada tahun 2018 menjadi 143 usaha, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 144 usaha. Hingga tahun 2020, hanya tersisa 122 usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi. Jenis usaha yang memiliki sertifikasi kompetensi terbanyak adalah perseroan terbatas yang memiliki sebanyak 107 usaha pada tahun 2020.

**Tabel 2.92 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020
CV Limited Partnership	6	14	6	11
Koperasi	4	4	4	4
Perseroan Terbatas	148	125	134	107
Toko	-	-	-	-
Usaha Dagang	-	-	-	-
Firma	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>158</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>122</b>

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Jika dilihat lebih lanjut, perkembangan sektor perindustrian Kota Balikpapan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.93 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020**

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Unit Usaha				
Industri Kecil	621	622	628	628
Industri menengah	139	144	146	146
Industri Besar	128	128	128	128
<b>Jumlah</b>	<b>883</b>	<b>894</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
Tenaga Kerja (orang)				
Industri Kecil	4.008	4.013	4035	4035
Industri Menengah	2.459	2.594	2667	2667
Industri Besar	6.887	6.887	6887	6887
<b>Jumlah</b>	<b>13.354</b>	<b>13.494</b>	<b>13.589</b>	<b>13.589</b>
Investasi (juta Rp.-)				
Industri Kecil	75.915	76.578	77691	77691
Industri Menengah	85.130	151.643	169025	169025
Industri Besar	588.667	588.667	588667	588667

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2021

Pembangunan industri Kota Balikpapan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan bukan migas, hingga saat ini pembangunan industri bukan migas di Indonesia mengalami pertumbuhan dan berkembang signifikan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan, telah mengatur terkait kawasan peruntukan industri. Sesuai arah kebijakan pemerintah Kota Balikpapan akan membangun dan mengembangkan industri Prioritas, Industri Pendukung dan Industri potensial masa depan pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan.

Kawasan rencana peruntukan industri di Kota Balikpapan, terbagi atas:

- **Kawasan Industri Kariangau (KIK)**

KIK berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui darat dan laut. Pembangunan keseluruhan memiliki total luasan sekitar 2.117 Ha. Industri yang sudah eksisting sampai dengan tahun 2020 sebanyak 15 perusahaan, kawasan ini juga dilengkapi dengan sarana terminal peti kemas yang beroperasi pada tahun 2012.

- **Koridor Perwilayahan Industri di Batakan dan Mulawarman**

Klaster Batakan merupakan wilayah peruntukan kategori industri sedang. Kawasan industri Batakan tersebar di sepanjang Jalan Mulawarman.

- **Kawasan Industri Kecil Sumber**

Kawasan Industri Kecil di Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS). KIKS seluas 9 Ha yang telah dimanfaatkan seluas 3 Ha. Di KIKS telah terdapat 60 industri tahu tempe dari total 118 industri tahu tempe di Kota Balikpapan. Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS) telah dilengkapi infrastruktur seperti jalan, gudang, drainase, jaringan listrik, pengolahan air limbah dan air bersih.

- **Kawasan Industri Kecil Teritip**

Kawasan Industri Kecil Teritip berada di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur meliputi lahan seluas 6,4 ha. Industri Kecil Teritip meliputi: Industri Pengelolaan Hasil Pertanian dan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan. Saat ini telah terdapat 24 rumah produksi dari total perencanaan sebanyak 48 rumah produksi.

- **Kawasan Industri Perikanan Manggar**

Kawasan Industri Perikanan Manggar terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan Industri Perikanan Manggar termasuk dalam kawasan minapolitan Manggar, dimana terdapat 6 blok dalam kawasan minapolitan tersebut.

Pertumbuhan IKM mengalami tren kenaikan walupun tidak terlalu signifikan. Capaian kinerja pertumbuhan IKM pada tahun 2017 sebesar 0,57% meningkat menjadi 0,80% pada tahun 2020. Pertumbuhan ini hanya disumbang oleh kelompok industri Agro, Logam Mesin dan Perekayasaan, serta Aneka dalam 3 tahun terakhir (2017-2019), sedangkan kelompok industri Hasil Hutan, Pulp dan Kertas, Kimia, Alat Angkut, dan Tekstil jumlahnya tidak berkembang dan cenderung tidak bertambah.

**Tabel 2.94 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

No	Kelompok Industri	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Hutan	78	78	78	78
2	Pulp dan Kertas	108	108	108	108
3	Kimia	109	109	109	109
4	Agro	195	197	201	201
5	Logam Mesin dan Perekayasaan	147	152	153	153
6	Alat Angkut	128	128	128	128
7	Tekstil	93	93	93	93
8	Aneka	30	30	32	32
<b>Total</b>		<b>888</b>	<b>895</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
<b>% Pertumbuhan Industri</b>		<b>0,57</b>	<b>0,79</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Tahun 2021

Untuk persentase IKM menerapkan teknologi industri juga mengalami tren kenaikan. Dimana capaian ada tahun 2017 sebesar 16% menjadi 38,81% pada tahun 2020.

Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal dihitung berdasarkan Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan menggunakan bahan baku lokal, namun demikian capaian setiap tahunnya cenderung berfluktuatif. Bahan baku lokal yang kerap digunakan yaitu salak, buah naga, ikan, nanas, pisang, rumput laut, kepiting, pepaya, dan singkong. Jumlah IKM yang ikut pelatihan pada setiap jenis bahan baku rata-rata hanya 20 IKM. Capaian pada tahun 2018 sebesar 11,11% dan di tahun 2019 hingga 2020 sebesar 11,10%.

**Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2016-2020**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan IKM	%	0,57	0,79	0,78	0,80
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	%	16	19	36,23	38,81
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	%	37,13	28,7	30	27
Persentase industri <i>eksisting</i> terhadap <i>siteplan</i> SIKS	%	51,35	60,89	58,71	58,71
Persentase industri <i>eksisting</i> terhadap <i>siteplan</i> SIKT	%	7,19	7,51	10,34	10,34
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	%	5,3	11,11	11,1	0

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Tahun 2021

Selain mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur industri juga menjadi aspek penting yang terus diupayakan sesuai dengan standar nasional. Infrastruktur industri dalam hal ini meliputi lahan industri, energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, fasilitas sanitasi, serta fasilitas jaringan transportasi. Terkait dengan kebutuhan lahan industri, berdasarkan data dari RPIK Kota Balikpapan, pada tahun 2020-2024 dibutuhkan lahan seluas 3.590 Ha. Kebutuhan

terhadap lahan ini akan meningkat pada tahun 2025-2035 menjadi 3.600 Ha. Upaya pemenuhan lahan ini memang membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Perlu adanya penyesuaian perencanaan agar pembangunan industri berjalan secara integratif serta mendukung pembangunan nasional.

**Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Lahan dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035**

Uraian	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
Kebutuhan Lahan Kawasan Industri (Ha)	3.580	3.590	3.600
Jumlah Kawasan Industri yang Akan Dibangun (Unit)	1	1	1

Sumber: RPIK 2015-2035 Kota Balikpapan

Pada SDGs tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta IKM di Kota Balikpapan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kompetensi SDM yang sesuai dan memiliki kompetensi yang memadai.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Beberapa indikator yang dianalisis dalam melihat kemampuan ekonomi daerah seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non – pangan lebih tinggi sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan. Keseluruhan indikator tersebut tersebut menggambarkan total pengeluaran serta kemampuan daya beli masyarakat. Berikut adalah indikator total pengeluaran Kota Balikpapan:

**Tabel 2.97 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
<b>Total Pengeluaran</b>		<b>1.843.111</b>	<b>2.085.477</b>	<b>1.877.211</b>	<b>1.999.470</b>
1	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non – Pangan	1.072.510	1.204.028	1.079.842	1.164.430
2	Rasio	0,58	0,57	0,57	0,58
3	Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan	-	881.449	797.369,83	835.040
4	Rasio	-	0,42	0,42	0,42

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka 2021

**b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Semakin pesatnya arus modernisasi dan pembangunan, tentu saja akan berdampak pada kebutuhan akan pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan. Oleh karenanya pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (*non motorized vehicle*) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal. Pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi *liveable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

**1) Aksesibilitas Daerah**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

**Tabel 2.98 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2020**

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	453,635	501,18	501,18	501,18
2	Jumlah Kendaraan	572.976	588.911	610.819	637.531
3	Rasio	0,000792	0,000851	0,00082	0,00079

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Tahun 2021

Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara SAMS Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.99 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan Tahun 2017-2020**

Penerbangan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Internasional	45.320	56.802	59.002	8.870
Domestik	7.254.136	7.441.334	5.370.714	2.730.924

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2020, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggang turun menjadi 2.739.794 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak akhir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Jumlah penumpang angkutan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.100 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Tahun	Penumpang turun (Jiwa)	Penumpang naik (Jiwa)
2017	148.998	162.852
2018	251.304	206.026
2019	251.304	206.026
2020	93.038	86.606

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

## 2) Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:

- Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;
- Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;
- Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan; Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.101 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan**

Penilaian Kesesuaian	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Total Rencana Pola Ruang	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Tidak sesuai	2.617,86	9,67	3.667,70	13,42	6.285,56	12
Sesuai	24.242,60	89,52	21.789,46	79,73	46.032,06	85

Penilaian Kesesuaian	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Total Rencana Pola Ruang	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Belum dilaksanakan	218,8	0,81	1.872,11	6,85	2.090,91	4

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016

### 3) **Infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti air minum, restoran, hotel, kelistrikan, dan telekomunikasi diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.102 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

No	Infrastruktur	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	76,56%	79,05%	77,29%	81,37%
2.	Jumlah Bank	187	187	187	187
3.	Jumlah Hotel	67	67	67	45
4.	Masyarakat yang menggunakan listrik	203.420	214.570	214.570	235.140

### 4) **Ketersediaan Air Bersih dan Listrik**

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Salah satu fasilitas dasar yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan akan air bersih dan listrik.

Jumlah konsumen air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2020 mencapai 108.418 pelanggan. Dari total pelanggan tersebut didominasi dari pelanggan rumah tangga sebanyak 102.410 pelanggan dan niaga sebanyak 3.727 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 25.879.931m<sup>3</sup> dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 244.118.115.629.

**Tabel 2.103 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2020**

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
Sosial	1.457	1.138.936	3.065.759.323
Rumah Tangga	102.410	22.665.569	221.578.288.711
Instansi Pemerintah	262	415.004	1.681.345.028
Niaga	3.727	1.389.057	17.646.112.119
Industri	12	7.435	146.610.448
Khusus	551	263.930	4.635.849.637

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik, ketersediaan listrik menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, industri, hingga fasilitas publik yang ada. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang cukup maju di Pulau Kalimantan memang memiliki kebutuhan listrik yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk pelanggan rumah tangga sendiri sudah mencapai 213.850 pelanggan hingga tahun 2020. Jumlah ini meningkat cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun 2016, pelanggan listrik rumah tangga saat itu sebanyak 172.164. hal yang sama juga terjadi pada fasilitas publik. Hingga tahun 2020, jumlah pelanggan yang masuk dalam kategori publik mencapai 1.113, angka ini juga meningkat cukup tajam, pada tahun 2016 jumlahnya baru mencapai 778 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan juga terjadi pada sektor bisnis dengan total sebanyak 16.859 pelanggan. Padahal pada tahun 2016 jumlahnya hanya sebanyak 14.705. Pada sektor bisnis memang mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang konsisten setiap tahunnya, yang mana rata-rata meningkat sebanyak 1.000an pelanggan. Adapun untuk sektor industri, jumlahnya menjadi yang paling sedikit dibandingkan sektor lainnya karena hanya memiliki 85 pelanggan. Meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2016 yang baru memiliki 83 pelanggan.

**Tabel 2.104 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Kelompok Tarif	2017	2018	2019	2020
Sosial	2.781	2.953	3.041	3.233
Rumah Tangga	184.167	194.396	204.281	213.850
Bisnis	15.592	16.183	16.388	16.859
Industri	87	91	86	85
Publik	793	947	1.089	1.113
Jumlah	203.420	214.570	224.885	235.140

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

Meningkatnya jumlah pelanggan pengguna listrik setiap tahunnya, tentu saja berpengaruh pada kebutuhan listrik di Kota Balikpapan. Produksi listrik terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, produksi listrik mencapai 948.278.941 KWh. Secara perlahan-lahan meningkat setiap tahunnya, hingga akhir tahun 2020, produksi listrik sudah mencapai 1.088.423.119 KWh. Adapun listrik terjual juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah listrik yang terjual di Kota Balikpapan sebanyak 902.556.690 KWh. Jumlahnya pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2020, jumlah listrik terjual sebanyak 1.046.308.251 KWh.

**Tabel 2.105 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Daya Terpasang (KW)	516.162.322	563.062.959	516.477.000	613.764.772
Produksi Listrik (KWh)	948.278.941	981.711.526	1.096.861.192	1.088.423.119
Listrik Terjual (KWh)	902.556.690	938.862.796	1.051.811.715	1.046.308.251
Susut/Hilang (KWh)	45.722.251	41.763.730	45.049.747	42.114.868

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2020, BPS Kota Balikpapan

### c. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Realisasi investasi

Realisasi investasi di Kota Balikpapan hingga sejauh ini sudah cukup baik. Investasi dari modal dalam negeri dan modal asing walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi angka, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dengan penyerapan tenaga yang juga cukup besar.

**Tabel 2.106 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)	16,03	26,71	2.500,51	13.849,41
Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)	2.284,44	865,60	374,61	519,75
Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	538	760	2.469	7.023
Penyerapan Tenaga Kerja Asing	29	21	31	56

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

## 2. Angka Kriminalitas

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2020 relatif kondusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa serta mogok kerja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparaturnya keamanan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.107 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2020**

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	276	319	371	233
2	Kebakaran	12	5	5	2
3	Pemalsuan Surat	3	2	3	2
4	Perzinahan	9	5	8	2
5	Melanggar Kesopanan/Cabul	34	37	36	23
6	Perjudian	27	15	7	5
7	Pembunuhan	5	9	2	2
8	Penganiayaan Berat	124	-	58	46
9	Penganiayaan Ringan	45	-	25	6
10	Pencurian dengan pemberatan	226	-	114	106
11	Pencurian Biasa	85	80	50	54
12	Pencurian dengan Kekerasan	48	42	22	17
13	Pemerasan	-	1	-	3
14	Penggelapan	54	62	39	45
15	Penipuan	65	51	35	20
16	Perusakan	14	16	6	4
17	Curanmor R2	271	137	100	81
18	Curanmor R4	12	6	-	2
19	Lain-lain	796	1.000	230	88
<b>Jumlah</b>		<b>2.106</b>	<b>1.787</b>	<b>1.111</b>	<b>741</b>

Sumber: Polresta Balikpapan Tahun 2021

## 3. Jumlah Demo

Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktivitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2020 terjadi sebanyak 11 kali kegiatan demonstrasi. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Tanjung Pura dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan

indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

#### 4. Usaha Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan jumlah investasi. Apalagi dengan begitu banyaknya potensi baik di sektor perdagangan maupun industri di Kota Balikpapan yang dapat digarap oleh para investor. Oleh karenanya penting untuk kemudian melihat sejauh mana kemudahan investasi di Kota Balikpapan.

Berdasarkan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan yang dirilis oleh BPS, pengurusan izin di Kota Balikpapan cukup banyak. Dari grafiknya, memang masih terjadi fluktuasi angka setiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebanyak 9.060 pengajuan izin yang dilakukan. Angka ini menurun pada tahun 2018 menjadi 6.666 izin. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, angka ini kembali mengalami peningkatan hingga 15.987 pengajuan izin yang dilakukan pada tahun 2020.

Jika diuraikan lebih lanjut, walaupun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi pengajuan izin untuk tempat usaha mengalami lonjakan yang cukup tinggi dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, jumlah pengajuan izin tempat usaha hanya 1.799 izin. Lalu meningkat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 hingga 3.514 izin. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengajuan izin tempat usaha menjadi 1.982 izin. Sementara untuk izin tempat tinggal jumlahnya cenderung menurun. Pada tahun 2017, pengajuan izin tempat tinggal mencapai 895 izin. Sempat kembali meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 1.202 izin. Jumlahnya kembali merosot pada tahun 2019 dan tahun 2020 hingga menjadi hanya sebanyak 599 izin.

**Tabel 2.108 Jumlah Tempat Usaha, Tempat Tinggal, dan Lain-lain yang Mengurus Izin di DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Izin Usaha	2017	2018	2019	2020
Tempat Usaha	1.799	2.042	3.514	1.982
Tempat Tinggal	895	1.202	701	599
Lainnya	6.366	3.422	1.164	13.406
Jumlah	9.060	6.666	5.379	15.987

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2021, BPS Kota Balikpapan

#### d. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu penunjang keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan urusan daerah adalah kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Semakin baik tingkat kualitas dan kompetensi ASN tentu saja berkorelasi positif dengan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya penting dilakukan upaya peningkatan kualitas ASN sebagai wujud menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Fungsi tersebut menjadi ranah dari urusan kepegawaian yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Untuk mengukur sejauh mana tingkat pengembangan ASN terdapat 4 indikator yang digunakan yaitu Indeks Profesionalitas ASN, Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan,



Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin PNS, dan Skor nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Untuk indikator yang pertama yaitu indeks profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Merujuk pada data historis yang ada, indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 89, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 93,3 pada tahun 2020.

Terkait dengan perbedaan data tersebut, proses integrasi data kepegawaian yang dilakukan saat ini memang masih belum optimal. Proses integrasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2019. Koordinasi dengan BKN juga telah dilakukan sehingga saat ini masih berproses untuk integrasi daerah. Sifatnya bisa dilihat dari SKPK agar bisa diintegrasikan dengan SIMPEG di BKPSDM. Pada tahun 2020 proses integrasi data kepegawaian terkendala karena keterbatasan SDM sehingga belum sampai pada integrasi satu arah. Sehingga akan tetap dilakukan proses integrasi 2 arah pada tahun 2021.

Selain itu kendala lainnya adalah tingkat kedisiplinan pegawai yang masih perlu untuk ditingkatkan. Dari data historis terkait persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS, penurunan persentase pelanggaran disiplin PNS meningkatkan adanya tren yang semakin baik karena angka realisasinya semakin tinggi. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini berada diangka 19,05%. Hingga tahun 2019, persentase penurunannya sudah mencapai 35,71%. Walaupun persentase penurunannya semakin meningkat akan tetapi upaya untuk peningkatan disiplin terhadap PNS harus tetap dimaksimalkan. Namun, pada tahun 2020, realisasi indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 11,11%.

Berdasarkan data yang sudah direkap, terdapat 99 pelanggaran disiplin ASN sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Upaya untuk meminimalisir pelanggar disiplin ini belum dilakukan secara kolektif oleh semua Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan sistem pengukuran kedisiplinan belum dilakukan secara integratif masih melalui Perangkat Daerah masing-masing. Terkait dengan absensi pun juga belum dilaksanakan secara integratif masih melalui Perangkat Daerah masing-masing. Fungsi pengawasan dari inspektorat sudah dilakukan dengan baik akan tetapi belum didukung dengan fungsi pengawasan dari setiap Perangkat Daerah. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah pembentukan satgas pedis (Satuan Tugas Peningkatan Disiplin), pemberian *reward* kepada PNS teladan masih belum optimal untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Indikator selanjutnya adalah pengukuran tingkat ketepatan posisi aparatur dengan kompetensi sesuai syarat jabatan. Pengukuran indikator ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran seluruh jabatan yang tersedia dijabat oleh ASN yang memiliki kompetensi yang baik sehingga pelaksanaan kinerja juga akan semakin meningkat. Pada tahun 2017 realisasi indikator ini sebesar 83,85%. Peningkatan terus terjadi hingga tahun

2018 mencapai 92,9%. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan, hingga menjadi 80,44%.

Ketercapaian indikator ini sangat ditentukan dari penerapan sistem merit ASN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut adalah nilai indeks yang ada saat ini belum tervalidasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Telah dilakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit <https://sipinter.kasn.go.id/>. Total Akhir Penilaian Instansi sebelum diverifikasi KASN : 259 namun belum divalidasi. Secara keseluruhan dari hasil identifikasi penilaian yang dilakukan masih terdapat 8 unsur yang menjadi titik lemah.

Untuk melihat mana tingkat keberhasilan upaya peningkatan ASN yang telah dilaksanakan, salah satu indikator yang digunakan adalah skor dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun realisasi skor SKM menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Pada tahun 2017, skor dari hasil SKM sebesar 78,69, angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 80,37 pada tahun 2020.

Perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 menuntut pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) dan pembangunan SDM yang menguasai IT. Kebijakan dari pusat, pada tahun 2024 diarahkan menuju smart ASN yaitu seluruh ASN sudah menguasai IT. Upaya yang dilakukan saat ini adalah pemberian pelatihan terhadap guru-guru yang masih kurang melek IT. Adapun terkait pelayanan akan melakukan sistem kepegawaian secara online. Tahun 2021 sudah dianggarkan untuk aplikasi SIMPEG terkait dengan kepegawaian dan penyediaan SDM berbasis IT.

Selain itu BKPSDM juga terus mengupayakan pembuatan aplikasi diklat secara daring. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan ruang gerak karena kondisi pandemic yang terjadi. Untuk aplikasi yang dibuat baru proyek awal dan kemudian ada evaluasi pembelajaran sifatnya CBT yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Akan tetapi aplikasinya saat ini masih bermasalah sehingga belum bisa ditunjukkan secara fisik.

**Tabel 2.109 Capaian Tingkat Pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	89	92,58	93,04	93,3
Penurunan Pelanggaran disiplin PNS (%)	19,05	17,65	35,71	11,11
Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan (%)	83,85	92,9	89,39	80,44
Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	78,69	78,78	79,96	80,37

Sumber : BKPSDM, 2021

**Tabel 2.110 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Balikpapan**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
Laju Inflasi (%)	4,13	2,45	3,13	1,88	0,65	5(+ - 1)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Indeks Gini	0,28	0,32	0,32	0,302	0,311	0,3	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Tingkat Kemiskinan (%)	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57	2,3	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,73	10,39	9,52	7,29	9,00	4,55	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	128,12	137,92	151,3	159,91	155,98	Rp. 126,64 (Juta)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
PDRB Non Migas (ADHK) (Rp/Triliun)	46,06	42,28	67,5	40,6	40,61	Rp. 38,62 (Triliun)	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>Pendidikan</b>								
Angka Melek Huruf	99,01	99,38	99,33	99,38	99,2	99,91%	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
Jumlah Kunjungan Perpustakaan	148.447	202.263	134.566	98.192	19.818	190.000	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021
Rata-Rata Lama Sekolah	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68	10,53	Tercapai	IPM Kota Balikpapan, 2021
Angka Harapan Lama Sekolah	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14	15,73	Tidak Tercapai	IPM Kota Balikpapan, 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,2	0,08	0,08	0,03	0,11	0,05	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	N/A	56	98,11	107,33	103,85	107,36	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	N/A	84,54	115,3	115,3	100,56	101,81	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
<b>Kesehatan</b>								
Usia Harapan Hidup	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49	74,04	Tercapai	BPS Balikpapan, 2020
Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	63	65	66	96,5	83,65	70	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2020
<b>Fokus Budaya dan Olahraga</b>								
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	-	48	53	57	31	50	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Peningkatan prestasi olahraga	24	55	516	1.643	25	40 Provinsi, 41 Nasional	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	-	91,02	91,07	91,04	91,12	91,07	Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan	1	6	6	6	2	6	Tidak Tercapai	<a href="http://esakip.balikpapan.go.id">http://esakip.balikpapan.go.id</a>
Cagar budaya yang dilindungi	71	100	119	129	144	141	Tercapai	<a href="http://esakip.balikpapan.go.id">http://esakip.balikpapan.go.id</a>
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>Pendidikan</b>								
APK PAUD/TK/Sederajat	N/A	76	86	22,85	65,68	77	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APK SD/MI/Sederajat	104,92	108,21	107,35	107,35	105,52	93,25	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APK SMP/MTs/Sederajat	99,66	85,23	92,78	92,78	96,81	84,25	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APM SD/MI/Sederajat	98,68	98,19	99,98	99,98	99,52	98,72	Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APM SMP/MTs/Sederajat	80,52	81,51	82,93	82,93	83,24	91,23	Tidak Tercapai	BPS Balikpapan, 2021
APS SD/MI/Sederajat	111,8	88,21	107,35	103,01	79,8	98,37	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
APS SMP/MTs/Sederajat	102,4	108,34	91,62	75,65	93,36	89,29	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	N/A	40,5	40,5	40,5	N/A	41,8	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat	N/A	100,54	26,81	68,5	30,18	26,81	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	N/A	55,96	55,96	89,06	28,49	20,57	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	N/A	68,81	11,15	85,27	57,75	11,21	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik	N/A	81,59	57,13	83,37	77,11	38,4	Tercapai	Dinas Pendidikan, 2021
<b>Kesehatan</b>								
Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	95,13%	97%	98%	99,56%	128,56%	99%	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
AKB	6/100.000 KH	6/1.000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	1/1.000 KH	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
AKABA	7/100.000 KH	6/1.000 KH	8/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	2/1.000 KH	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
AKI	72/100.000 KH	78/100.000 KH	72/100.000 KH	64/100.000 KH	73,43 / 100.000 KH	60/100.000 KH	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Angka Kesakitan	98,11%	103,26%	103,26%	74,64%	98,23%	98,35%	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Prevelensi HIV dan AIDS	0,03	0,05	0,05	2,26	0,43	< 1	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	657,06/10 0.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	78,3 / 100.000 penduduk	240,65/100. 000 penduduk	112,46/ 100. 000 penduduk	250/100.00 0 penduduk	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Prevelensi TBC	300,00/10 0.000 penduduk	199,5/100. 000 penduduk	199,50/100. 000 penduduk	272,29/100. 000 penduduk	123,90/100. 000 penduduk	140/100.00 0 penduduk	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	51, 85 %	81,81%	96,30%	96,30%	96,30%	90%	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	60%	65%	70%	98,00%	98,15%	90%	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
Persentase Pemenuhan SDM RS	70,00%	70,00%	70,00%	52,00%	97,32%	90%	Tercapai	Dinas Kesehatan, 2021
<b>Pekerjaan Umum</b>								
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar		78,1	80,4	77,8	82,03	79	Tercapai	Hasil Survei Bappedalitbang
Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)		0,06	0,1	2	2	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 insentif&Disentif)	Tercapai	DPPR, 2021
Kapasitas Air Baku	1.265	1.265	1.615	1.525	1.570	1.686	Tidak Tercapai	PDAM Kota Balikpapan
Cakupan Layanan Air Minum	76,5	76,56	79,05	79,6	81,37	80,8	Tercapai	PDAM Kota Balikpapan
Cakupan Layanan Air Limbah			81,74	95	94,25	97	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Menurunnya Titik Banjir	36	35	34	30	88	35	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Persentase penertiban pemanfaatan ruang		0	0	98,3	98,58	98,5	Tercapai	DPPR, 2021
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan		1,45	1,427	1,43	1,475	1,49	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Persentase panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik		44,97	46,43	48,88	50,09	47,86	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Kantor pemerintah dalam kondisi baik		72,58	78,08	84,8	85	90,32	Tidak tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar		10,58	12,73	14,98	14,98	10,04	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
Persentase kemandapan jalan		96,86	83,76	84,06	86,79	81,14	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum, 2021
<b>Perumahan</b>								
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	282,2 Ha	224,86Ha	58,58 Ha	0 Ha	153,3 Ha	257 Ha	Tercapai	Disperkim, 2021
Menurunnya Backlog Perumahan	33.849	49.806	49.806	87.782	92.556	56.299	Tidak Tercapai	Disperkim, 2021
<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>								
Livable City Indeks	N/A	80,81	81,3	77,58	81,69	74,5	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2021



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Tingkat waktu tanggap	80,86	90	90	89,86	92,63	98,63	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90	70	75	81	83,16	100	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	70	100	100	80	95,42	100	Tidak Tercapai	BPBD, 2021
Persentase pos kampling aktif	63,21%	63,41%	63,61%	63,81%	64,01%	64,21	Tidak Tercapai	Satpol PP, 2021
Penurunan angka kriminalitas	21%	18%	20%	18,50%	18%	16	Tercapai	Satpol PP, 2021
Rasio Petugas Linmas	2,43%	4%	4%	3,50%	4,50%	5,5	Tidak Tercapai	Satpol PP, 2021
Angka Partisipasi dalam pemilihan umum		60%	60%	82%	65%	65%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Penurunan prevelensi penyalahgunaan narkoba		3.0	3,1	1,8	3,8	2,9	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Perhubungan</b>								
Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang barang	17	17	17	17	17	67	Tidak Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Persentase pembangunan koridor SAUM	16	16	16	16	16	33,33	Tidak Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Persentase penyediaan rambu jalan	27,3	32,3	34,8	37,3	31,73	47,3	Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Persentase penyediaan ATCS	60	60	76	76	46,82	100	Tidak Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Rasio penyediaan jalur sepeda	85	85	85	85	85	90	Tidak Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Persentase zebra cross dan pita penghaduh untuk zona aman sekolah	10	35	35	35	12,5	100	Tidak Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia		1	0			2		RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase pengujian kendaraan bermotor	-	68	70,3	80	92,83	80	Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Pembangunan PJU	12.239	0	13.139	13.439	14.091	13.439	Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	10	11	53	69	99,41	80	Tercapai	Dishub Kota Balikpapan
<b>Lingkungan Hidup</b>								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,45%	61,25%	59,58%	60,19%	63,52%	60,46	Tercapai	DLH
Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DLH
Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%	100%	70%	70%	100%	100%	Tercapai	DLH
Persentase Sekolah Adiwiyata	45,45%	73,93%	74%	76%	81%	80%	Tercapai	DLH
Indeks tutupan lahan	48,12	48,12	48,15	48,24	55,4	48,32	Tercapai	DLH
Penurunan Indeks Pencemaran Udara	92,4	97,9	84,93	88,42	88,92	93,84	Tidak Tercapai	DLH
Penurunan Indeks Pencemaran Air	51,6	42,1	49,5	47,9	40,9	43,3	Tidak Tercapai	DLH
Persentase jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	28,60%	31,00%	45,42%	78,50%		100%	Tercapai	DLH
Persentase pengangkutan sampah ke TPA	63,02%	64,79%	74,43%	77,86%	75,45%	60,91%	Tercapai (dengan mengacu pada perhitungan Jakstrada sesuai	DLH

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
							Perwali 38 Tahun 2018)	
Persentase pengelolaan sampah di sumbernya	22,83%	22,93%	19,22%	20,37%	22,14%	25,80%	Tercapai (dengan mengacu pada perhitungan Jakstrada sesuai Perwali 38 Tahun 2018)	DLH
<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Disdukcapil
Cakupan Penerbitan KTP-el	96,49%	93,05%	97,80%	97,69%	99,32%	95,00%	Tercapai	Disdukcapil
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	82,96%	85,74%	88,61%	92,05%	92,87%	90,00%	Tercapai	Disdukcapil
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	95,11%	99,31%	97,04%	88,90%	95,00%	Tidak Tercapai	Disdukcapil
Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,86%	-	32,71%	56,13%	63,22%	85,00%	Tidak Tercapai	Disdukcapil
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	68,05%	66,32%	68,53%	70,02%	70,61%	67,50%	Tercapai	DP3AKB
Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin yang Tidak Menggunakan KB	16,35%	18,10%	15,64%	14,48%	14,04%	14,51%	Tidak Tercapai	DP3AKB
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK	7,92%	4,52%	5,32%	8,00%	8,50%	4,63%	Tercapai	DP3AKB
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)	0,60%	1,51%	4,72%	1,59%	1,04%	1,52%	Tidak Tercapai	DP3AKB
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
Indeks Pembangunan Gender	N/A	90,11	89,74	89,76	89,65	92	Tidak tercapai	BPS
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak	62,07%	72,16%	63,64%	52,54%	72,31%	65,15%	Tercapai	DP3AKB
Peningkatan dan Penguatan Gugus Tuga KLA (Strata KLA)	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Madya	Tercapai	DP3AKB
<b>Sosial</b>								
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	N/A	84,37	85,14	68,00	86,66	100	Tidak Tercapai	Dinsos
Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh		60%	64%	80,07%	82%	80%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Persentase Peserta Didik Keluarga Miskin Penerima Beasiswa		100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai, konsisten realisasi setiap tahunnya	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase PMKS Miskin yang Terlayani		23.65	100	49	165.42	100	Tercapai	Dinsos
Rumah Tidak Layak Huni				749		975	Tidak Tercapai	
<b>Ketenagakerjaan</b>								
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,28	63,38	64,33	65,14	62,9	64,92	Tidak Tercapai	BPS
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	72,40%	74,80%	334,20%	122,70%	57,80%	100%	Tidak Tercapai	Disnaker
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	27,40%	158%	190,48%	443,64%	129,60%	100%	Tercapai	Disnaker
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	20%	0,00%	0,00%	541,66%	0,00%	40%	Tidak Tercapai	Disnaker
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	6,08%	28,76%	19,27%	3,98%	62,47%	22,35%	Tercapai	Disnaker
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	52,99	70,42	66,19	79,36	96,58%	50	Tercapai	Disnaker
<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>								
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	100	125	135	150	170	180	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase Jumlah Koperasi aktif	80,00%	80%	80%	84,19%	87,86%	80.90%	Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase kredit UMKM di Bank	36,00%	36,41%	37,80%	36,74%	36,50%	36,6	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	90	66	100	60	60	300	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
<b>Penanaman Modal</b>								
Rencana investasi (Triliun)	3,29	3,49	2,24	3,75		6,50%	3,994 T (Tidak Tercapai)	Data Rencana Investasi PMA dan PMDN tahun 2015 s.d 2018 diperoleh dari data Press Release DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk data tahun 2019 semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
								Terintegrasi Secara Elektronik; data Rencana Investasi PMDN berasal dari data OSS berdasarkan komitmen Izin Terbit
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal	143	175	151	315	1241	145	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	8,05%	37,07%	66,45%	0		25%	Tidak tercapai	Data Rencana Investasi PMA dan PMDN tahun 2015 s.d 2018 diperoleh dari data Press Release DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur sedangkan untuk data tahun 2019 semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa Rencana Investasi PMA menjadi bagian dari kewenangan Pusat (BKPM)
IKM pelayanan perizinan	91,78	82,79	88,34	88,35	89	88,9	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	12%	19%	41,25%	41,25%	41,25%	40%	Tercapai	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>								
Indeks Persepsi Korupsi	6,62	6,64	6,87	6,89	6,92	6,8	Tercapai	Data Bappeda Litbang 2020
Survei Kepuasan Masyarakat	69,38	78,69	78,8	81,7	80,37	80,36	Tercapai	Data Bappeda Litbang 2020
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	Data Bappeda Litbang 2020
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik					83,00	83,33		
<b>Pangan</b>								
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum ada Kegiatan	81,5 (AKE 2150) 83,8 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2150) 89,0 (AKE 2000)	87,7 (AKE 2150) 90,2 (AKE 2000)	86,2 (AKE 2100)	85	Tercapai	Hasil perhitungan menggunakan formulasi aplikasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN		100%	100%	100%	85,22	100%	Tercapai	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>								
Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan		6%	6%	7,92	10,67	7.50%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Kearsipan</b>								
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD	-	-	19,44%	100%	100%	75%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021
Persentase SKPD yang nya telah terdata dan tertata	-	14,35%	10%	25%	25%	35%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021
<b>Informasi dan Komunikasi</b>								
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	-	0	1	1	1	1 Aplikasi	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>								
<b>Pertanian</b>								
Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	-	-13.420,40	-8.751,14	36.264,60	3.809,40	79.667	Tidak Tercapai	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	-	2.064,30	565,62	1.609,36	-688,76	1.561	Tidak Tercapai	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	-	1.153,58	-17.028,18	-8.628,91	4.621,00	2.901,09	Tercapai	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
<b>Pariwisata</b>								
Jumlah kunjungan wisatawan	1.065.610	2.554.423	2.802.058	2.917.514	1.082.273*	2.488.535	Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	7	1	5	8	7	14 Event (Luar 4, Dalam 10)	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28	1	1	31	41	38	Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Meningkatnya potensi objek wisata unggulan di kota Balikpapan	2	2	1	10	41	11	Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
Jumlah asosiasi yang bermitra	5	0	1	8	9	10	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021
<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	-	-1.450,63	293,41	1.849,27	-1.700,86	6.859,40	Tidak Tercapai	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
<b>Perdagangan</b>								
Cakupan unit usaha dagang (unit usaha)		248	248	248	230	140	Tercapai	Dinas Perdagangan



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	-	79%	66%	64,96%	64,25%	39%	Tercapai	Dinas Perdagangan
Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	-	66,12%	66,56%	70,73%	36,09%	80,06%	Tidak tercapai	Dinas Perdagangan
Persentase pasar berklasifikasi A	-	36%	36%	36%	33,30%	22%	Tercapai	Dinas Perdagangan
Nilai ekspor bersih (US\$ Juta)	-	2.510,10	2.780,12	3.103,16	2.937,12	2.946,60	Tercapai	Dinas Perdagangan
Nilai pasar terhadap penilaian adipura	-	72,15	72,15	72,15	72,15	73,5	Tidak tercapai	Dinas Perdagangan
<b>Perindustrian</b>								
Pertumbuhan IKM	0,46	0,57	0,79	0,78	0,8	0,9%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase IKM menerapkan teknologi industri	15,00%	16,00%	19,00%	36,23%	38,81%	25,00%	Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
<b>Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS &amp; SIKT)</b>								
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	19,00%	37,13%	28,70%	30,00%	27,00%	28,00%	Tidak tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS	50,00%	51,35%	60,89%	58,71%	58,71%	85,00%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT	0,00%	7%	8%	10,34%	10,34%	20,00%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	5,00%	5,30%	11,11%	11,10%	0,00%	15,00%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
<b>Sumber Daya Manusia</b>								
Indeks Pembangunan Manusia	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01	79,53	Tercapai	Data Bappeda Litbang 2020
<b>Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>								
SD/MI/ Sederajat	86,70%	94%	95%	92,45%	94,08%	86,64%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
SMP/MTs/Sederajat	90,20%	100,00%	97%	308,63%	109,26%	94,49%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata</b>								
PAUD/TK	N/A	01:11	01:11	01:10	01:11	01:10	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
SD/MI/Sederajat	01:26	01:22	01:26	01:23	01:23	01:20	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Perkiraan capaian Target akhir RPJMD (2021)	Sumber
	2016	2017	2018	2019	2020			
SMP/MTs/Sederajat	01:24	01:21	01:24	01:21	01:20	01:18	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Perencanaan</b>								
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD				131,75		85	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan
Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang				114		75	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan		100%	100%	100		95	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase capaian kinerja RKPD		92.00%	96.23%	118,77		98	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Keuangan</b>								
Total Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah)	1,99	1,87	2,09	2,25	2,34	1,90 Triliun	Tercapai	Laporan Realisasi APBD Kota Balikpapan, diolah
Persentase pendapatan daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%		61.11%	69%	93,96%	93,97%	94.44%	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat		39.72%	39.72%	47,5%		40.77%	Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>								
Indeks Profesionalitas ASN	83,43	89	92,58	93,04	93,3	87	Tercapai	BKPSDM
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir		26%	27%	56,91%	65,55%	100%	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS		100%	100%	60%	81,43%	100%	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur		0%	40%	40%	66,60%	100%	Tidak Tercapai	RKPD Kota Balikpapan, 2020
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dalam perencanaan Pembangunan daerah		94,74%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	<a href="http://esakip.balikpapan.go.id">http://esakip.balikpapan.go.id</a>

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan sebagai berikut terdeskripsi pada uraian penjelasan dibawah ini.

### URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja RKPD terhadap target RPJMD Periode IV (Tahun 2020) pada **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sampai Dengan Semester II Tahun 2020 ADALAH 78,86% dan Kinerja Keuangan sebesar 52,79%**. Adapun capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.111 Capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2020**

No	Urusan	Bidang Urusan	Jumlah Indikator Program	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
1	Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	28	148.11	227.42
2	Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	14	113.59	3.74
3	Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	68.82	21.85
4	Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	(44.55)	6.06
5	Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8	87.19	8.89
6	Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	8	100.01	48.80
<b>Jumlah Indikator dan Capaian Kinerja</b>			<b>80</b>	<b>78.86</b>	<b>52.79</b>

Sumber : Data diolah, Bappeda Litbang. 2020

Berdasarkan capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II Tahun 2020 capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan adalah 148,11% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 227,20%. Capaian kinerja bidang pendidikan tersebut menunjukkan capaian Kinerja Indikator dan kinerja keuangan **“SANGAT TINGGI”**. Peningkatan kinerja indikator sangat signifikan dipengaruhi dengan hasil capaian indikator pada program pendidikan dasar serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih kecil dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Urusan Kesehatan adalah 113,59% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 3,74%. Capaian kinerja bidang urusan kesehatan tersebut menunjukkan capaian Indikator Kinerja **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja

keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 68,82% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 21,85%. Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut menunjukkan capaian **“SEDANG”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah - 44,55% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 6,06%. Capaian kinerja bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT RENDAH”** hal ini disebabkan oleh meningkatnya backlog perumahan pada tahun 2020 meningkat menjadi 92.556 unit dari target RPJMD akhir sebesar 56.229 unit, sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah 87,19% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 8,89%. Capaian kinerja bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tersebut menunjukkan capaian **“TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Sosial adalah 100,01% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 48,80%. Capaian kinerja bidang urusan Sosial tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan

(tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

Capaian kinerja RKPD terhadap target RPJMD Periode IV (Tahun 2020) pada **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2020 ADALAH 22,32%**. Adapun capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.112 Capaian Kinerja Rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2020**

No	Urusan	Bidang Urusan	Jumlah Indikator Program	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>					
1	Wajib Non Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	3	94.79	35.74
2	Wajib Non Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	8	107.77	26.15
3	Wajib Non Pelayanan Dasar	Pangan	3	154.56	6.36
4	Wajib Non Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	6	100.00	50.37
5	Wajib Non Pelayanan Dasar	Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	5	91.24	19.05
6	Wajib Non Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat	4	43.07	19.95
7	Wajib Non Pelayanan Dasar	Perhubungan	9	60.81	87.01
8	Wajib Non Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	1	100.00	236.98
9	Wajib Non Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	101.25	6.93
10	Wajib Non Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	5	268.93	10.92
11	Wajib Non Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	4	250.42	34.63
12	Wajib Non Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2	91.67	82.90
13	Wajib Non Pelayanan Dasar	Perpustakaan	1	100.00	10.56
14	Wajib Non Pelayanan Dasar	Kearsipan	2	9.63	18.25
<b>Jumlah Indikator dan Capaian Kinerja</b>			<b>57</b>	<b>112.44</b>	<b>46.13</b>

Sumber : Data diolah, Bappeda Litbang. 2020

Berdasarkan capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sampai dengan Semester II Tahun 2020 pada tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Tenaga Kerja adalah 94,79% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 35,74%. Capaian kinerja bidang urusan Sosial tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT**



**RENDAH**” hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 107,77% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 26,15%. Capaian kinerja bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Pangan adalah 154,56% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 6,36%. Capaian kinerja bidang urusan Pangan tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Lingkungan Hidup adalah 100% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 50,37%. Capaian kinerja bidang urusan Lingkungan Hidup tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah 91,24% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 19,05%. Capaian kinerja bidang urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah 43,07% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 19,95%. Capaian kinerja bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Perhubungan adalah 60,81% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 87,01%. Capaian kinerja bidang urusan Perhubungan tersebut menunjukkan capaian **“TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Komunikasi dan Informatika adalah 100% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 236,98%. Capaian kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT TINGGI”**

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah 101,25% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 6,93%. Capaian kinerja bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut menunjukkan capaian **“TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Penanaman Modal adalah 268.93% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 10,92%. Capaian kinerja bidang urusan Penanaman Modal tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah 250,42% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 34,63%. Capaian kinerja bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Kebudayaan adalah 91,67% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 82,90%. Capaian kinerja bidang urusan Kebudayaan tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“TINGGI”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Perpustakaan adalah 100% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 10,56%. Capaian kinerja bidang urusan Perpustakaan tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar sampai dengan Semester II pada Bidang Kearsipan adalah 9,63% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 18,25%. Capaian kinerja bidang urusan Kearsipan tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT RENDAH”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

#### **URUSAN WAJIB PILIHAN**

Capaian kinerja RKPD terhadap target RPJMD Periode IV (Tahun 2020) pada **URUSAN PILIHAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2020 ADALAH 3,27%**. Adapun capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.113 Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan Semester II Tahun 2020**

No	Urusan	Bidang Urusan	Jumlah Indikator Program	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Pilihan	Kelautan dan Perikanan	1	(4.00)	2.01
2	Pilihan	Pariwisata	5	56.74	26.39
3	Pilihan	Pertanian	3	76.58	2.42
4	Pilihan	Perdagangan	6	129.70	670.47
5	Pilihan	Perindustrian	6	56.80	1.99
<b>Jumlah Indikator dan Capaian Kinerja</b>			<b>21</b>	<b>63.16</b>	<b>140.66</b>

Sumber : Data diolah, Bappeda Litbang. 2020

Berdasarkan capaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pilihan sampai dengan Semester II Tahun 2020 pada tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II pada Bidang Kelautan dan Perikanan adalah -4% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 2,01%. Capaian kinerja bidang urusan Kelautan dan Perikanan tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT RENDAH”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II pada Bidang Pariwisata adalah 56,74% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 26,39%. Capaian kinerja bidang urusan Pariwisata tersebut menunjukkan capaian **“SANGAT RENDAH”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II pada Bidang Pertanian adalah 76,58% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 2,42%. Capaian kinerja bidang urusan Pariwisata tersebut menunjukkan capaian **“TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II pada Bidang Pertanian adalah 129,70% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 670,47%. Capaian kinerja bidang urusan Pertanian tersebut menunjukkan capaian

**“SANGAT TINGGI”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT TINGGI”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih kecil dari pagu anggaran pelaksanaan.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II pada Bidang Perindustrian adalah 56,80% dan realisasi kinerja anggaran sebesar 1,99%. Capaian kinerja bidang urusan Perindustrian tersebut menunjukkan capaian **“RENDAH”** sedangkan kinerja keuangan **“SANGAT RENDAH”** hal ini dipengaruhi adanya refofusing anggaran pada tahun berjalan (tahun 2020) pada tiap-tiap indikator untuk dialokasikan dalam penanganan covid-19 di Kota Balikpapan serta alokasi pagu rencana pada RKPD tahun 2020 lebih besar dari pagu anggaran pelaksanaan.

Berikut dijabarkan Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2020 (Semester II).



**Tabel 2.114 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2020 (Semester II)**

1	2	3		4		5		6		7		8		9	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Wajib Pelayanan Dasar		100.00	10,448,784,785,794	84.21	1,009,704,656,597	100.00	682,114,422,106	168.82	189,909,158,586	152.27	27.84	253.03	1,199,613,815,184	253.03	11.48
<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>28 Indikator</b>	<b>100.00</b>	<b>1,644,858,727,446</b>	<b>105.77</b>	<b>312,133,399,943</b>	<b>100.00</b>	<b>30,664,376,000</b>	<b>148.11</b>	<b>69,735,924,609</b>	<b>148.11</b>	<b>227.42</b>	<b>253.88</b>	<b>381,869,324,551</b>	<b>253.88</b>	<b>23.22</b>
Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun (persen)	99.95	64,807,896,000	99.92	35,774,964,538	0.01	14,405,656,000	0.01	14,356,239,952	100.00	99.66	99.93	50,131,204,490	99.98	77.35
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/ Sederajat (persen)	77.00	33,226,284,000	65.83	16,117,382,273	4.35	7,378,830,000	3.71	5,954,325,813	85.29	80.69	69.54	22,071,708,086	90.31	66.43
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK (persen)	41.80	-	41.56	-	0.42	-	0.68	-	162.86	-	42.24	-	101.06	-
Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IPTEK) (persen)	7.61	525,560,700,696	7.76	258,321,376,592	0.20	7,378,830,000	1.13	48,986,341,263	565.00	663.88	8.89	307,307,717,854	116.82	58.47
Program Pendidikan Dasar	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) (persen)	23.61	-	24.39	-	0.83	-	3.54	-	426.51	-	27.93	-	118.30	-
Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IMTAQ) (persen)	100.00	-	83.05	-	8.48	-	8.48	-	100.00	-	91.53	-	91.53	-
Program Pendidikan Dasar	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) (persen)	100.00	-	76.00	-	12	-	12	-	100.00	-	88.00	-	88.00	-
Program Pendidikan Dasar	APK SD/MI (persen)	93.25	-	92.88	-	0.05	-	0.05	-	100.00	-	92.93	-	99.66	-
Program Pendidikan Dasar	APK SMP/MTs (persen)	84.25	-	84.17	-	0.05	-	0.06	-	120.00	-	84.23	-	99.98	-
Program Pendidikan Dasar	APM SD/MI (persen)	98.72	-	97.37	-	0.86	-	0.70	-	81.40	-	98.07	-	99.34	-
Program Pendidikan Dasar	APM SMP/ MTs (persen)	91.23	-	89.24	-	0.91	-	0.73	-	80.22	-	89.97	-	98.62	-
Program Pendidikan Dasar	APS SD/MI/Sederajat (persen)	98.37	-	96.50	-	1.00	-	0.82	-	82.00	-	97.32	-	98.93	-
Program Pendidikan Dasar	APS SMP/ MTs/ Sederajat (persen)	89.29	-	87.49	-	1.00	-	1.06	-	106.00	-	88.55	-	99.17	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (persen)	0.02	-	0.03	-	0.00	-	0.01	-	100.00	-	0.04	-	50.00	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (persen)	0.15	-	0.19	-	(0.01)	-	(0.01)	-	100.00	-	0.18	-	83.33	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (persen)	100	-	59.20	-	20.00	-	21.19	-	105.95	-	80.39	-	80.39	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (persen)	100	-	60.00	-	20.00	-	20.00	-	100.00	-	80.00	-	80.00	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (persen)	107.36	-	104.36	-	1.19	-	1.16	-	97.48	-	104.36	-	97.21	-
Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (persen)	101.81	-	99.99	-	0.92	-	0.92	-	100.00	-	100.91	-	99.12	-



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat	30.00	-	65.98	-	5.36	-	6.04	-	112.69	-	72.02	-	240.07	-
Program Pendidikan Dasar	Rasio ketersediaan sekolah /Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (persen)	20.57	-	60.73	-	4.11	-	5.69	-	138.44	-	66.42	-	322.90	-
Program Pendidikan Dasar	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (persen)	11.21	-	13.39	-	0.22	-	1.15	-	522.73	-	14.54	-	129.71	-
Program Pendidikan Dasar	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (persen)	38.40	-	53.01	-	0.20	-	0.40	-	200.00	-	53.41	-	139.09	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Paud/TK/Sederajat	86.00	6,008,424,750	75.60	1,919,676,540	5.20	1,501,060,000	5.20	439,017,581	100.00	29.25	80.80	2,358,694,121	93.95	39.26
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Sederajat	76.00	-	73.60	-	1.20	-	1.04	-	86.67	-	74.64	-	98.21	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Sederajat	86.00	-	83.60	-	1.20	-	1.08	-	90.00	-	84.680	-	98.47	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI/Sederajat	94.00	-	93.06	-	1.00	-	1.02	-	102.00	-	94.08	-	100.09	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs/Sederajat	100.00	-	106.45	-	1.00	-	2.81	-	281.00	-	109.26	-	109.26	-
<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>14 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>507,627,711,000</b>	<b>73.26</b>	<b>89,382,584,504</b>	<b>100.00</b>	<b>108,454,288,000</b>	<b>113.59</b>	<b>4,055,337,590</b>	<b>113.59</b>	<b>3.74</b>	<b>186.85</b>	<b>93,437,922,094</b>	<b>186.85</b>	<b>18.41</b>
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35	280,260,696,000	98.22	54,523,106,723	0.01	64,619,788,000	0.01	3,058,817,959	100.00	4.73	98.23	57,581,924,682	99.88	20.55
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV dan AIDS	1.00		2.26		1.00		0.43		43.00		2.69		37.17	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Angka Kejadian DBD (Per 100.000)	250	21,650,000,000	240.65	1,553,361,825	250.00	3,750,000,000	0.00	2,047,965	0.00	0.05	240.65	1,555,409,790	103.89	7.18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Prevalensi TBC (Per 100.000)	140		272.29		135.00		121.65		90.11		121.65		115.08	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi Kelahiran Yang Dibantu Tenaga Kesehatan Terlatih (persen)	100.00	21,976,280,000	58.63	2,162,943,591	100.00	5,000,000,000	69.93	428,238,716	69.93	8.56	128.56	2,591,182,307	128.56	11.79



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Angka Kematian Bayi (Per 1000)	1.00	-	7.00	-	2.00	-	7.00	-	28.57	-	7.00	-	14.29	-
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Angka Kematian Balita (Per 1000)	2.00	-	7.00	-	3.00	-	7.00	-	42.86	-	7.00	-	28.57	-
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Angka Kematian Ibu (Per 1000)	60.00	-	64.00	-	63.00	-	73.43	-	85.80	-	64.00	-	93.75	-
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Nasional (persen)	100.00	183,740,735,000	96.30	31,143,172,364	85.00	35,084,500,000	96.30	566,232,950	113.29	1.61	96.30	31,709,405,314	96.30	17.26
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (persen)	90.00	-	92.86	-	80.00	-	98.15	-	122.69	-	98.15	-	109.06	-
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit (persen)	90.00	-	51.64	-	85.00	-	51.64	-	60.75	-	51.64	-	57.38	-
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi nasional (persen)	85.00	-	86.67	-	80.00	-	86.67	-	108.34	-	86.67	-	101.96	-
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Ketersediaan SDM UPTD (persen)	90.00	-	82.72	-	85.00	-	82.72	-	97.32	-	82.72	-	91.91	-
Program Peningkatan Kualitas,Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas (persen)	90.00	-	72.24	-	85.00	-	72.24	-	84.99	-	72.24	-	80.27	-
<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>10 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>2,002,019,061,751</b>	<b>72.99</b>	<b>550,090,212,878</b>	<b>100.00</b>	<b>462,585,890,000</b>	<b>68.82</b>	<b>101,092,087,151</b>	<b>68.82</b>	<b>21.85</b>	<b>141.81</b>	<b>651,182,300,029</b>	<b>141.81</b>	<b>32.53</b>
<b>Bidang Penataan Ruang</b>	<b>2 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>12,076,885,000</b>	<b>48.42</b>	<b>3,056,267,281</b>	<b>100.00</b>	<b>2,600,000,000</b>	<b>50.00</b>	<b>1,582,241,931</b>	<b>50.00</b>	<b>60.86</b>	<b>98.42</b>	<b>4,638,509,212</b>	<b>98.42</b>	<b>38.41</b>
Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Tata Ruang (dokumen)	3.00	7,000,000,000	-	2,234,186,770	3.00	1,500,000,000	0.00	1,242,984,746	0.00	-	-	3,477,171,516	0.00	49.67
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang (persen)	98.50	5,076,885,000	98.30	822,080,511	98.30	1,100,000,000	98.30	339,257,185	100.00	-	98.30	1,161,337,696	99.80	22.88
<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>	<b>8 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>1,989,942,176,751</b>	<b>96.08</b>	<b>547,033,945,597</b>	<b>100.00</b>	<b>459,985,890,000</b>	<b>87.65</b>	<b>99,509,845,220</b>	<b>87.65</b>	<b>21.63</b>	<b>183.73</b>	<b>646,543,790,817</b>	<b>183.73</b>	<b>32.49</b>

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan Air Minum (persen)	80.80	89,096,583,000	79.60	38,216,178,600	80.20	21,652,140,000	79.60	2,682,871,991	99.25	-	79.60	40,899,050,591	98.51	45.90
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan Air Limbah (persen)	97.00		94.25		96.00		0.00		0.00		94.25		97.16	
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Penyediaan Kapasitas Air Baku (liter/detik)	1,686	138,140,781,251	1,570	-	1670	28,940,625,000	1570.00	-	94.01	0.00	3,140	-	186.24	-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas	1.492	287,120,378,500	1.451	71,381,057,967	1.478	67,443,585,000	1.461	18,087,894,616	98.85	26.82	1.461	89,468,952,583	97.92	31.16
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jembatan penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia (unit)	2.00		-		2.00		0.00		0.00		-		0.00	
Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir	35.00	138,644,505,000	42.00	25,671,640,358	40.00	33,359,050,000	26.00	16,767,242,526	65.00	50.26	26.00	42,438,882,884	134.62	30.61
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik (persen)	47.86	199,037,500,000	77.10	59,045,708,049	46.92	45,375,000,000	77.57	23,659,540,858	165.32	52.14	77.57	82,705,248,907	162.08	41.55
Program Pembangunan Pedestrian Kota	Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (persen)	10.04	124,515,000,000	13.73	22,916,547,885	9.35	30,250,000,000	14.53	116,141,600	155.40	0.38	14.53	23,032,689,485	144.72	18.50
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (persen)	81.14	467,339,354,000	81.05	216,838,759,598	80.64	101,874,740,000	81.50	30,545,794,924	101.07	29.98	91.67	247,384,554,522	112.98	52.93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (persen)	90.32	546,048,075,000	84.60	112,964,053,140	87.10	131,090,750,000	85.00	7,650,358,706	97.59	5.84	85.00	120,614,411,846	94.11	22.09
<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>3 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>63,753,000,000</b>	<b>72.53</b>	<b>20,446,707,716</b>	<b>100.00</b>	<b>14,501,000,000</b>	<b>-44.55</b>	<b>878,951,693</b>	<b>-44.55</b>	<b>6.06</b>	<b>27.98</b>	<b>21,325,659,409</b>	<b>27.98</b>	<b>33.45</b>
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (persen)	257	53,203,000,000	282	16,888,822,895	(25)	12,400,000,000	0.00	652,484,923	0.00	5.26	282.00	17,541,307,818	109.73	32.97
Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan (unit)	56,299	7,050,000,000	(20,869)	1,187,044,431	(11,260)	1,226,000,000	24,998	8,770,135.00	-45.04	0.72	4,129.00	1,195,814,566	7.33	16.96
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (unit)	975	3,500,000,000	952	2,370,840,390	-25	875,000,000	196.00	217,696,635	-12.76	24.88	1,148.00	2,588,537,025	84.93	73.96
<b>Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>6,134,741,633,000</b>	<b>99.37</b>	<b>7,946,147,832</b>	<b>100.00</b>	<b>44,621,789,000</b>	<b>87.19</b>	<b>3,966,064,003</b>	<b>87.19</b>	<b>8.89</b>	<b>186.56</b>	<b>11,912,211,835</b>	<b>186.56</b>	<b>0.19</b>
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (persen)	98.63	35,047,843,000	89.78	5,455,913,772	93.15	29,546,789,000	95.00	282,685,200	101.99	0.96	95.00	5,738,598,972	96.32	16.37
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan	Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran (persen)	100		80.72		87.50		100.00		114.29		100.00			

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
bencana dan bahaya kebakaran															
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (persen)	100	6,050,000,000,000	81.07	234,108,300	75.00	1,575,000,000	100.00	0.00	133.33	0.00	100.00	234,108,300	100.00	0.00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase poskamling aktif (persen)	64.21	1,847,700,000	63.81	13,314,400	64.01	600,000,000	64.01	14,547,041.00	100.00	2.42	64.01	27,861,441	99.69	1.51
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan Angka Kriminalitas (persen)	17.00	11,244,890,000	18.50	85,415,000	18.50	3,400,000,000	15.43	2,352,214,512	83.41	69.18	33.93	2,437,629,512	199.59	21.68
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Linmas	5.50		3.50		5.00		5.00		100.00		5.00		90.91	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum (persen)	65.00	21,601,200,000	82.00	2,157,396,360	65.00	6,500,000,000	0.00	1,316,617,250	0.00	20.26	65.00	3,474,013,610	100.00	16.08
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	2.90	15,000,000,000	1.80	-	3.10	3,000,000,000	2.00	0.00	64.52	0.00	3.80	-	131.03	-
<b>Bidang Sosial</b>	<b>8 Indikator</b>	<b>100</b>	<b>87,086,350,000</b>	<b>93.50</b>	<b>8,767,830,429</b>	<b>100.00</b>	<b>19,706,417,000</b>	<b>807.51</b>	<b>9,615,855,640</b>	<b>807.51</b>	<b>48.80</b>	<b>901.00</b>	<b>18,383,686,069</b>	<b>901.00</b>	<b>21.11</b>
Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana) (persen)	100	32,413,538,000	51.98	97,714,000	85	9,246,000,000	85.00	89,553,170	100.00	0.97	85.00	187,267,170	85.00	0.58
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh (persen)	80.00	7,123,917,000	80.07	505,085,717	75	253,917,000	82.00	27,600,000	109.33	10.87	82.00	532,685,717	102.50	7.48
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Memperoleh Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD) (persen)	70		68		69		83.65		121.23		83.65		119.50	
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa (persen)	100	31,300,000,000	100	1,555,631,947	100	7,000,000,000	100	7,090,959,195	100.00	1.01	100.00	8,646,591,142	100.00	27.62
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase PMKS miskin yang terlayani (persen)	100		49		100		64.39		64.39		64.39		64.39	
Program Penanggulan Kemiskinan Terpadu	Persentase Pencaker Gakin Yang mendapatkan pelatihan kerja (persen)	100		100		100		133		133.30		133.30		133.30	



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (persen)	79.30	10,789,046,000	74.26	4,542,295,937	0.10	2,541,000,000	5.76	1,804,522,455	5760	71.02	80.02	6,346,818,392	100.91	58.83
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang telah dibina (persen)	50.35	5,459,849,000	78.60	2,067,102,828	50.35	665,500,000	36.15	603,220,820	71.80	90.64	114.75	2,670,323,648	227.90	48.91
<b>Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>5 Indikator</b>	<b>100.00</b>	<b>8,698,302,597</b>	<b>72.06</b>	<b>20,937,773,297</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,662,106</b>	<b>1.08</b>	<b>564,937,900</b>	<b>1.08</b>	<b>35.74</b>	<b>73.13</b>	<b>21,502,711,197</b>	<b>73.13</b>	<b>247.21</b>
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja (persen)	100.00	6,098,449,959	60.00	20,342,348,957	3.00	1,046,142,818	4.00	449,526,400	133.33	42.97	64.00	20,791,875,357	64.00	340.94
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan (persen)	60.00		52.00		58.00		66.57		114.78		66.57			
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (persen)	26.00	791,861,638	22.00	327,757,500	0.05	157,995,968	0.04	20,730,500	80.00	13.12	22.04	348,488,000	84.77	44.01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan (persen)	40.00		34.00		8.00		4.00		50.00		38.00			
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama (persen)	50.00	1,807,991,000	22.00	267,666,840	2.40	376,523,320	2.30	94,681,000	95.83	-	24.30	362,347,840	48.60	20.04
Wajib Non Pelayanan Dasar		100.00	789,320,640,065	95.39	358,293,281,662	100.00	192,480,266,432	100.72	100,606,177,690	106.87	46.93	162.64	458,899,459,352	162.64	63.02
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	8 Indikator	100	25,900,265,500	96.61	3,575,603,823	100.00	4,443,816,325	107.77	1,162,022,020	107.77	26.15	96.61	4,737,625,843	96.61	18.29
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase PUS anggota Poktan yang ber KB (jumlah PUS anggota Poktan Ber KB dibagi jumlah PUS anggota Poktan X 100 %)	80.51	8,456,788,500	87.27	494,950,676	80.48	1,393,816,325	84.59	194,625,400	105.11	13.96	87.27	689,576,076	108.40	8.15
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	- BKB	85.70	-	85.24	-	85.65	-	82.75	-	96.61	-	82.75	-	96.56	-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan	- BKR	70.20	-	89.45	-	70.15	-	87.57	-	124.83	-	87.57	-	124.74	-

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak															
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	- BKL	81.43	-	88.50	-	81.40	-	82.49	-	101.34	-	88.50	-	108.68	-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	- UPPKS	84.70	-	85.89	-	84.70	-	85.55	-	101.00	-	85.89	-	101.40	-
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	Prosentase remaja perempuan sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun (jumlah perempuan di bawah 20 tahun yang sudah menikah dibagi jumlah perempuan di bawah 20 tahun X 100%) (persen)	0.64	1,710,645,000	0.57	194,044,876	0.67	600,000,000	0.46	866,562,070	145.65	144.43	0.57	1,060,606,946	112.28	62.00
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian Angka IPG (persen)	91.00	1,384,621,000	89.71	237,384,394	84.00	350,000,000	89.71	5,271,750	106.80	1.51	89.71	242,656,144	98.58	17.53
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%) (persen)	75.01	14,348,211,000	62.16	2,649,223,876	60.02	2,100,000,000	72.86	95,562,800	121.39	4.55	72.86	2,744,786,676	97.13	19.13
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban)	65.15	-	52.73	-	50.16	-	72.31	-	144.16	-	52.73	-	80.94	-



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
	kekerasan sampai akhir tahun X 100%) (persen)														
Bidang Pangan	3 Indikator	100	10,329,448,300	100.57	1,331,152,375	100.00	1,583,440,000	154.56	100,630,930	154.56	6.36	255.13	1,431,783,305	255.13	13.86
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (persen)	50.00	5,161,737,300	90.20	821,237,500	30.00	1,060,000,000	90.20	49,175,430	300.67	4.64	90.20	870,412,930	180.40	16.86
Program Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	5.00	1,917,711,000	1.88	444,240,325	5.00	450,000,000	0.65	46,857,750	769.23	10.41	0.65	491,098,075	769.23	25.61
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin (persen)	100.00	3,250,000,000	83.72	65,674,550	1.00	73,440,000	1.50	4,597,750	150.00	6.26	85.22	70,272,300	85.22	2.16
Bidang Lingkungan Hidup	6 Indikator	100	488,373,158,110	92.16	163,641,073,747	100.00	126,840,508,500	100.00	63,884,930,888	100.00	50.37	192.16	227,526,004,635	192.16	46.59
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Lahan	48.32	78,684,465,000	48.24	8,380,681,619	0.5	19,525,000,000	0.50	3,967,503,439	100.00	20.32	48.74	12,348,185,058	100.87	15.69
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Udara	93.84	51,389,153,000	88.42	8,684,471,792	0.5	13,824,676,000	0.50	1,845,061,593	100.00	13.35	88.92	10,529,533,385	94.76	20.49
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Air	43.30		47.90		0.50		0.50		100.00		48.40		111.78	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Informasi Lingkungan yang mudah diakses (persen)	100.00	9,926,273,250	55.00	1,373,501,856	20	2,222,832,500	20.00	259,148,011	100.00	11.66	75.00	1,632,649,867	75.00	16.45
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA (persen)	60.91	348,373,266,860	74.94	145,202,418,480	0.5	91,268,000,000	0.50	57,813,217,845	100.00	63.34	75.44	203,015,636,325	123.85	58.28
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengolahan Sampah di Sumber (persen)	25.80		20.19		1.00		1.00		100.00		21.19		82.13	
Bidang Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	5 Indikator	100	17,048,589,000	50.40	1,923,958,900	100.00	4,700,708,000	91.24	895,262,360	91.24	19.05	50.40	2,819,221,260	50.40	16.54
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (persen)	100.00	17,048,589,000	60.00	1,923,958,900	100	4,700,708,000	69.49	895,262,360	69.49	19.05	69.49	2,819,221,260	69.49	16.54
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP-elektronik (persen)	95.00		60.22		95.00		160.30		168.74		160.30		168.74	

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (persen)	90.00		63.59		88.00		72.12		81.95		72.12		80.13	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan akta kematian (persen)	95.00		30.22		95.00		66.53		70.03		66.53		70.03	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	cakupan kepemilikan kartu identitas anak (persen)	85.00		22.22		85.00		56.09		65.99		22.22		26.14	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4 Indikator	100	12,301,770,380	90.67	2,481,597,065	100.00	2,991,382,680	43.07	596,680,730	43.07	19.95	90.67	3,078,277,795	90.67	25.02
Pogram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan (persen)	7.50	4,210,579,380	9.03	1,498,845,282	7.00	915,132,680	1.64	214,401,990	23.43	23.43	10.67	1,713,247,272	142.27	40.69
Program Keluarga Berencana	Prosentase Peserta KB Aktif MKJP dibandingkan Peserta KB Aktif (peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB Aktif X 100 %) (persen)	30.98	8,091,191,000	27.99	982,751,783	1.41	2,076,250,000	1.20	382,278,740	85.39	18.41	29.19	1,365,030,523	94.24	16.87
Program Keluarga Berencana	Prosentase DO ber KB (Menurunnya angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi) (persen)	11.95		7.32		-0.30		-0.06		4.91		7.26		164.63	
Bidang Perhubungan	9 Indikator	100	127,837,820,000	34.93	116,148,767,994	100.00	27,831,200,000	60.81	24,216,826,961	60.81	87.01	95.74	140,365,594,955	95.74	109.80
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (persen)	67.00	21,367,850,000	-	872,109,509	50.00	4,658,500,000	-	15,244,900.00	0.00	0.33	-	887,354,409	0.00	4.15
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pembangunan Koridor E Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) (persen)	33.33	6,300,000,000	-	-	33.33	500,000,000	-		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penyediaan Rambu Jalan (persen)	47.30	14,536,750,000	44.30	6,293,548,858	1.00	7,658,500,000	1.00	168,602,500.00	100.00	2.20	45.30	6,462,151,358	95.77	44.45
	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS) (persen)	100.00	16,831,100,000	5.56	4,162,039,640	11.12		5.56		50.00		11.12	4,162,039,640	11.12	24.73
Program Keselamatan Pengguna Jalan	Rasio Penyediaan Jalur Sepeda (persen)	13.83	1,685,120,000	-	-	12.21	387,200,000	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Keselamatan Pengguna Jalan	Persentase Zebra Cross dan pita penghaduh untuk zona aman sekolah (persen)	100.00		-		77.78		-		0.00		-		0.00	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor (persen)	80.00	7,927,000,000	64.92	2,855,968,617	5.00	1,727,000,000	4.00	779,732,800	80.00	45.15	68.92	3,635,701,417	86.15	45.86
Program Penerangan Jalan Umum	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (unit)	13,439.00	59,190,000,000	12,839	101,965,101,370	300	12,900,000,000	652.00	23,253,246,761	217.33	180.26	13,491	125,218,348,131	100.39	211.55
Program Penerangan Jalan Umum	Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) (persen)	88.45		34.00		20		20.00		100.00		54.00		61.05	
Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Indikator	100	6,765,019,675	60	13,035,098,842	100.00	1,594,305,927	20.00	3,778,216,050	100.00	236.98	80	16,813,314,892	80.00	248.53
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD (sistem)	1.00	6,765,019,675	0.60	13,035,098,842	0.20	1,594,305,927	0.20	3,778,216,050	100.00	236.98	0.80	16,813,314,892	80.00	248.53
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Indikator	100	8,648,952,500	96.95	606,671,170	100.00	1,650,000,000	101.25	114,329,500	101.25	6.93	96.95	721,000,670	96.95	8.34
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif (persen)	80.90	1,650,000,000	84.19	112,244,308	0.66	350,000,000	0.66	5,951,650	100.00	1.70	84.85	118,195,958	104.88	7.16
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank (persen)	36.60	994,677,500	36.74	130,154,250	0.10	200,000,000	0.1	17,222,150	100.00	8.61	36.84	147,376,400	100.66	14.82
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat (unit)	60	2,000,000,000	60	175,812,211	60.00	450,000,000	60.00	91,155,700	100.00	20.26	60.00	266,967,911	100.00	13.35
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan (UMKM)	180	4,004,275,000	150	188,460,401	20.00	650,000,000	21.00	-	105.00	0.00	171.00	188,460,401	95.00	4.71
Bidang Penanaman Modal	5 Indikator	100	29,538,546,600	139.25	5,131,172,346	100.00	6,386,155,000	268.93	697,105,005	268.93	10.92	408.17	5,828,277,351	408.17	19.73
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rencana investasi (Triliun)	6.50	1,220,000,000	3.75	781,772,500	6.15	245,000,000	3.58	1,200,000.00	58.21	0.49	7.33	782,972,500	112.78	64.18
Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal (perusahaan)	145.00	4,429,000,000	644.00	112,478,460	140.00	916,000,000	1,241	146,834,548	886.43	16.03	1,885.00	259,313,008	1300.00	5.85
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional (persen)	25.00	8,797,899,000	-	246,179,800	20.00	1,850,000,000	-	18,450,845	0.00	1.00	-	264,630,645	0.00	3.01





Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan proses perizinan	SKM pelayanan perizinan (persen)	88.90	10,610,860,000	88.36	2,214,898,400	0.10	2,302,949,000	0.30	172,085,850	300.00	7.47	88.66	2,386,984,250	99.73	22.50
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online (persen)	40.00	4,480,787,600	38.00	1,775,843,186	1.00	1,072,206,000	1.00	358,533,762	100.00	33.44	39.00	2,134,376,948	97.50	47.63
Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4 Indikator	100	38,462,130,000	281.00	34,999,985,331	100.00	8,385,300,000	250.42	2,903,474,892	250.42	34.63	531.42	37,903,460,223	531.42	98.55
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)	50.00	3,663,060,000	53.00	5,590,027,898	48.00	798,600,000	25.00	784,888,850	52.08	98.28	53.00	6,374,916,748	106.00	174.03
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	81.00	15,262,750,000	516.00	25,120,014,811	73.00	3,327,500,000	-	1,176,969,096	0.00	35.37	516.00	26,296,983,907	637.04	172.30
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah medali prestasi olahraga tingkat Provinsi (piala)	40.00		485.00		36.00		-		0.00		485.00		1212.50	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah medali prestasi olahraga tingkat Nasional (piala)	41.00		31.00		37.00		-		0.00		31.00		75.61	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga (persen)	91.07	19,536,320,000	91.04	4,289,942,622	0.01	4,259,200,000	0.12	941,616,946	1200.00	22.11	91.16	5,231,559,568	100.10	26.78
Bidang Kebudayaan	2 Indikator	100	8,939,940,000	69.29	7,713,996,535	100.00	2,073,450,000	91.67	1,718,987,456	91.67	82.90	69.29	9,432,983,991	69.29	105.52
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan (event)	6.00	7,539,940,000	6.00	4,716,063,810	6.00	1,748,450,000	5.00	499,212,850	83.33	28.55	6.00	5,215,276,660	100.00	69.17
Program Pelestarian Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi (persen)	121.00	1,400,000,000	82.00	2,997,932,725	3.00	325,000,000	3.00	1,219,774,606	100.00	375.32	85.00	4,217,707,331	70.25	301.26
Bidang Perpustakaan	1 Indikator	100	7,240,000,000	97.72	3,593,773,260	100.00	2,500,000,000	10.00	263,975,198	10.00	10.56	107.72	3,857,748,458	107.72	53.28
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan (persen)	190	7,240,000,000	185.66	3,593,773,259.93	1.00	2,500,000,000	0.10	263,975,198	10.00	10.56	185.76	3,857,748,458	97.77	53.28
Bidang Kearsipan	2 Indikator	100	7,935,000,000	30.48	4,110,430,275	100.00	1,500,000,000	9.63	273,735,700	9.63	18.25	40.11	4,384,165,975	40.11	55.25
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi kan SIKD (persen)	75.00	3,075,000,000	35.00	676,342,770.00	50.00	575,000,000	5.00	50,852,320	10.00	8.84	50.00	727,195,090	66.67	23.65
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata (persen)	35.00	4,860,000,000	5.00	3,434,087,505	15.00	925,000,000	1.39	222,883,380	9.27	24.10	6.39	3,656,970,885	18.26	75.25
Pilihan		100.00	421,488,718,975	323.41	97,712,303,396.18	100.00	109,249.365.000	44.60	15,551,845,586	63.16	140.66	368.00	113,264,148,982	386.57	23.45

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Indikator	100	22,559,531,000	403.59	3,642,101,794	100.00	4,928,371,000	-4.00	99,046,418	-4.00	2.01	399.59	3,741,148,212	399.59	16.58
Peningkatan produksi Perikanan	Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	458.20	22,559,531,000	1,849.26	3,642,101,794	425.50	4,928,371,000	(1,700.87)	99,046,418	(399.73)	2.01	148.39	3,741,148,212	32.39	16.58
Bidang Pariwisata	5 Indikator	100	141,719,825,000	84.85	20,526,061,571	100.00	29,908,250,000	56.74	7,892,106,985	56.74	26.39	141.59	28,418,168,556	141.59	20.05
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	2,488,535	41,790,000,000	2,917,514	2,171,466,134	2,439,740	8,450,000,000	1,500,233	1,956,235,707	61.49	23.15	4,417,747	4,127,701,841	177.52	9.88
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan event Pariwisata dan Budaya (event)	14.00	65,629,825,000	8.00	2,795,983,218	14.00	14,308,250,000	5.00	1,002,381,420	35.71	7.01	13.00	3,798,364,638	92.86	5.79
Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (destinasi)	38.00	22,050,000,000	30.00	10,834,053,490	2.00	4,600,000,000	2.00	3,159,438,150	100.00	68.68	32.00	13,993,491,640	84.21	63.46
Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (obyek)	11.00	10,500,000,000	10.00	4,532,851,879	1.00	2,150,000,000	1.00	1,637,336,708	100.00	76.16	11.00	6,170,188,587	100.00	58.76
Program pengembangan kemitraan	Jumlah asosiasi yang bermitra (asosiasi)	10.00	1,750,000,000	8.00	191,706,850	1.00	400,000,000	1.00	136,715,000	100.00	34.18	9.00	328,421,850	90.00	18.77
Bidang Pertanian	3 Indikator	100	31,106,907,325	915.22	3,379,067,872	100.00	15,027,732,000	76.58	364,086,581	76.58	2.42	991.80	3,743,154,453	991.80	12.03
Program Peningkatan produksi pertanian	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1,423.00	29,740,321,600	36,264.60	2,012,482,147	1300.00	6,702,260,000	3998.40	236,296,936	307.57	3.53	40,263.00	2,248,779,083	2829.44	7.56
Program Peningkatan produksi perkebunan	Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	325.36	1,106,440,945	1,609.36	1,106,440,945	329.75	4,226,800,000	(688.76)	18,159,250	-208.87	0.43	920.60	1,124,600,195	282.95	101.64
Program Peningkatan produksi peternakan	Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	2,901.09	260,144,780	(8,628.81)	260,144,780	2637.36	4,098,672,000	3,455.83	109,630,395	131.03	2.67	(5,172.98)	369,775,175	(178.31)	142.14
Bidang Perdagangan	6 Indikator	100	96,829,443,400	147.85	27,659,520,933	100.00	900,000,000	129.70	6,034,233,024	129.70	670.47	277.54	33,693,753,957	277.54	34.80
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan unit usaha dagang	140.00	3,953,000,000	389	630,466,312	130.00	900,000,000	237.00	63,255,050	182.31	7.03	625.70	693,721,362	446.93	17.55
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Presentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar (persen)	39.00	4,908,500,400	32.99	1,419,851,406	37.00	1,500,000,000	64.25	649,185,000	173.65	43.28	97.24	2,069,036,406	249.33	42.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Presentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang (persen)	80.06		69.46		80.06		92.36		115.36		161.82		202.12	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Presentase pasar berklasifikasi A (persen)	22.00	71,581,000,000	12.00	15,076,412,249	17.00	40,000,000,000	33.30	287,796,500	195.88	0.72	45.30	15,364,208,749	205.91	21.46
Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan,	Nilai pasar terhadap penilaian adipura	73.50	14,959,180,000	72.53	10,047,864,786	73.00	3,046,860,000	-	5,020,302,474	0.00	164.77	72.53	15,068,167,260	98.68	100.73



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar															
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih (juta dollar)	2,946.60	1,427,763,000	8,393.62	484,926,180	2,646.50	323,433,000.00	2,937.12	13,694,000	110.98	4.23	11,330.74	498,620,180	384.54	34.92
Bidang Perindustrian	6 Indikator	100	129,273,012,250	65.53	42,505,551,227	100.00	58,485,012,000	56.80	1,162,372,578	56.80	1.99	122.33	43,667,923,805	122.33	33.78
Program penataan struktur industri	Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK (persen)	28.00	116,175,200,000	20.74	40,653,760,933	2.00	51,899,600,000	0.00	1,038,856,349	0.00	2.00	20.74	41,692,617,282	74.07	35.89
Program penataan struktur industri	Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS (persen)	85.00		60.07		5.00		3.89		77.80		63.96		75.25	
Program penataan struktur industri	Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT (persen)	20.00		8.31		3.00		1.89		63.00		10.20		51.00	
Program penataan struktur industri	persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal (persen)	15.00		12.40		2.00		0.00		0.00		12.40		82.67	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan IKM (persen)	0.90	7,507,812,250	0.36	1,756,299,749	0.10	5,319,720,000	0.10	99,516,229	100.00	1.87	0.46	1,855,815,978	51.11	24.72
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM menerapkan teknologi industri (persen)	25.00	5,590,000,000	21.05	95,490,545	2.00	1,265,692,000	2.00	24,000,000	100.00	1.90	23.05	119,490,545	92.20	2.14
Fungsi Penunjang		100.00	366,297,099,521	83.54	147,752,968,990	100.00	89,526,536,818	97.32	57,337,811,581	97.32	60.45	161.92	205,090,780,571	161.92	63.51
Perencanaan	4 Indikator	100	14,961,000,000	94.72	4,304,698,012	100.00	3,605,000,000	100.00	1,592,278,449	100.00	44.17	100.00	5,896,976,461	100.00	39.42
Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD (persen)	85.00	7,246,000,000	75.00	2,361,913,164	5.00	1,435,000,000	5.00	554,592,470	100.00	38.65	80.00	2,916,505,634	94.12	40.25
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang (persen)	75.00	4,470,000,000	75.00	1,118,745,133	1.00	1,210,000,000	1.00	636,082,080	100.00	52.57	76.00	1,754,827,213	101.33	39.26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan (persen)	95.00	3,245,000,000	90.00	824,039,715	2.00	710,000,000	2.00	294,350,212	100.00	41.46	92.00	1,118,389,927	96.84	37.77
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja RKPD (persen)	98.00		94.00		2.00	250,000,000	2.00	107,253,687	100.00	42.90	96.00	107,253,687	97.96	
Keuangan	7 Indikator	100	88,106,427,921	119.78	60,167,702,349	100.00	19,809,287,208	118.31	39,576,007,807	118.31	199.79	238.09	99,743,710,156	238.09	113.21



Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		3	4	5	6	7	8	9							
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Mlik Daerah	Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat (persen)	40.77	9,757,476,075	47.50	40,115,741,954	97.06	2,127,270,750	100	34,101,559,542	103.03	1603.07	147.50	74,217,301,496	361.79	760.62
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	1,904.00	232,756,938	2,469.53	168,692,427	1,891	50,744,375	2,341	72,928,656	123.82	143.72	4,810.97	241,621,083	252.68	103.81
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85% (persen)	94.44	3,331,210,750	93.96	1,280,733,602	91.67	701,790,000	0.01	2,836,586,190	0.01	404.19	93.97	4,117,319,792	99.50	123.60
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA (persen)	100.00	11,989,017,553	103.57	7,345,767,419	100.00	2,566,926,683	100.00	-	100.00	0.00	203.57	7,345,767,419	203.57	61.27
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Pajak daerah dan rertribusi daerah terhadap APBD (persen)	23.50	57,179,274,605	25.14	8,058,390,933	23.00	13,138,035,400	23.00	2,411,745,943	100.00	18.36	48.14	10,470,136,876	204.85	18.31
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan (persen)	86.00	5,616,692,000	83.94	3,198,376,014	1.00	1,224,520,000	0.81	153,187,476	81.33	12.51	84.75	3,351,563,490	98.55	59.67
Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Pengawasan Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (OPD)	13.00		24.00		10.00		32		320.00		32.00		246.15	
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3 Indikator	100	77,254,017,000	49.82	16,475,794,930	100.00	19,992,512,000	95.26	7,139,215,991	95.26	35.71	145.07	23,615,010,921	145.07	30.57
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir ASN	Persentase aparaturnya yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi (persen)	89.00	72,210,452,000	44.01	14,415,852,952	23.00	18,744,646,000	21.54	6,767,928,130	93.65	36.11	65.55	21,183,781,082	73.65	29.34
Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns (persen)	100.00	5,043,565,000	60.00	2,059,941,978	25.00	1,247,866,000	21.43	371,287,861	85.72	29.75	81.43	2,431,229,839	81.43	48.20
Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase fasilitasi pelayananan kesejahteraan aparaturnya (persen)	100.00		40.00		25.00		26.60		106.40		66.60		66.60	
Penelitian dan Pengembangan	1 Indikator	100	3,052,550,000	86.00	2,857,554,745	100.00	974,604,510	100.00	25,846,180	100.00	2.65	186.00	2,883,400,925	186.00	94.46
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (persen)	100.00	3,052,550,000	86.00	2,857,554,745	7.00	974,604,510	7.00	25,846,180	100.00	2.65	93.00	2,883,400,925	93.00	94.46
Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	6 Indikator	100	182,923,104,600	67.39	63,947,218,954	100.00	45,145,133,100	73.04	9,004,463,154	73.04	19.95	140.43	72,951,682,108	140.43	39.88

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Persen)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah (persen)	30.00	82,727,974,000	23.30	20,144,515,408	6.00	28,456,595,000	3.00	5,786,788,215	50.00	20.34	26.30	25,931,303,623	87.67	31.35
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan (persen)	80.00		48.00		16.00		8.00		50.00		56.00		70.00	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Ketepatan agenda sidang (persen)	100.00		60.00		20.00		20.00		100.00		80.00		80.00	
Program Penataan peraturan perundang-undangan	Presentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi (persen)	10.00	3,000,000,000	6.00	2,364,174,093	20.00	600,000,000	15.00	119,140,754	75.00	19.86	7.50	2,483,314,847	75.00	82.78
Program Bantuan Hukum	Presentase Perkara yang Ditangani (persen)	100.00	2,735,000,000	53.25	1,202,343,099	20.00	547,000,000	12.65	203,095,885	63.25	37.13	65.90	1,405,438,984	65.90	51.39
Program Peningkatan Peran Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat (persen)	85.00	94,460,130,600	79.39	40,236,186,354	3.00	15,541,538,100	3.00	2,895,438,300	100.00	18.63	82.39	43,131,624,654	96.93	18.63

Sumber : Data diolah, Bappeda Litbang, 2020



## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas**

#### **2.3.1.1. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemerataan Akses Pendidikan**

##### **Pendidikan:**

- a. Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pada bagian keempat jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, kualitas pendidik paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 bidang PAUD, Kependidikan lain, Psikologi, serta memiliki sertifikat profesi guru PAUD. Sedangkan kondisi di Kota Balikpapan, jumlah guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik PAUD masih rendah yaitu terdapat 280 guru, sedangkan 922 guru masih belum bersertifikasi. Adapun guru PAUD yang memiliki ijazah S1 PD-PAUD masih rendah yaitu sebesar 47,10%. Untuk menyiasati hal tersebut, guru PAUD yang mengajar di Kota Balikpapan diperbolehkan dari lulusan SMA/SMK, akan tetapi disebut guru pendamping

- b. Terbatasnya jumlah guru yang bersertifikasi pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pada bagian keempat jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD, kualitas pendidik paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 serta memiliki sertifikat pendidik. Jumlah guru SD di Kota Balikpapan sebanyak 2.298 Guru, terdiri dari 1.235 Guru PNS dan 1.063 Guru Non PNS, sedangkan kebutuhan guru sebanyak 2.370 guru, sehingga masih terdapat kekurangan 72 guru. Persentase kualifikasi pendidikan tenaga pendidik pada tahun 2019 untuk guru SD yang berijazah S1 PD-PGSD belum 100% yaitu masih 94,10%. Oleh karena itu perlu peningkatan kualifikasi akademik bagi tenaga pendidik agar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada jenjang pendidikan SD, diperlukan kualifikasi pendidikan S1 PGSD, sedangkan lulusan PGSD masih minim sehingga masih terdapat kekurangan guru SD dari lulusan S1 PGSD. Kualifikasi S1 PGSD untuk mengajar di Kota Balikpapan dapat berasal dari luar daerah, namun harus memiliki Kartu Keluarga (KK) Balikpapan. Selain kualifikasi akademik, syarat lainnya adalah sertifikasi. Adapun guru SD yang sudah bersertifikasi sebanyak 1.357 guru, sedangkan yang belum sebanyak 2.052 guru, sehingga masih belum banyak guru SD yang bersertifikasi.

Untuk mengatasi kekurangan Guru SD, pemerintah daerah merekrut guru S1 dengan titel S.Pd. sesuai dengan SPM No 32 Tahun 2018. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengajukan permintaan 400 guru, namun baru 80 guru yang baru bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat sehingga masih belum memenuhi target untuk memenuhi kebutuhan guru SD.

- c. Terbatasnya jumlah guru yang bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pada bagian keempat jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP, kualitas pendidik paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 serta memiliki sertifikat pendidik. Jumlah Guru SMP sebanyak 896 Guru, terdiri dari 638 Guru PNS dan 258 Guru Non PNS, sedangkan kebutuhan guru sebanyak 1.031, sehingga masih terdapat kekurangan 135 guru. dari total tersebut, Terdapat 734 guru yang sudah bersertifikasi, sedangkan sebanyak 1.143 guru belum bersertifikasi, sehingga masih banyak guru SMP yang belum bersertifikasi. Terkait kualifikasi pendidikan, persentase kualifikasi pendidikan tenaga pendidik pada tahun 2019 untuk guru SMP belum mencapai 100% yaitu masih 96,80%. Oleh karena itu, masih perlu meningkatkan kualifikasi akademik untuk tenaga pendidik SMP sehingga dapat memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

- d. Kompetensi guru yang masih kurang

Total jumlah Guru di Balikpapan sebanyak 7.488 guru, dengan guru yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 2.471 guru, sedangkan sisanya sebanyak 5.117 guru masih belum bersertifikasi. Sementara itu, pada tahun 2020 guru yang bersertifikasi baru bertambah 34 guru. Dari total tersebut capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV dan Sertifikasi bagi Guru capaiannya masih 44.7%. Untuk mendapatkan sertifikasi, saat ini tahapan sertifikasi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya tahapan PPGDJ dan pretest. Hal ini mengakibatkan jika salah satu tahapan tidak berhasil maka tidak mendapat sertifikat pendidik. Sertifikasi bagi guru lebih banyak diikuti oleh guru muda (<50 tahun), sedangkan guru yang sudah berusia >50 tahun banyak yang belum bersertifikasi. Banyak guru SD yang gaptek atau kurang melek teknologi, sehingga saat pandemi ini banyak guru yang tidak bisa melakukan pembelajaran online dan mengaplikasikan *zoom meeting/google classrom*, sehingga tidak ada pembelajaran langsung. Banyak guru senior/usia tua dan akan pensiun, sehingga sulit untuk menguasai perkembangan teknologi, oleh karena itu dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pembelajaran yang dilakukan hanya bersifat statis atau hanya melalui pemberian tugas melalui *Whatsapp* dengan cara mengirim foto ke murid lalu murid mengirimkan kembali ke guru. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas guru ini memang banyak terjadi sehingga menyulitkan pengembangan pendidikan. Adapun guru honorer belum bisa membantu banyak. Belum ada aturan atau kewenangan guru honorer memiliki kewenangan sama dengan guru ASN terutama untuk membantu tugas guru ASN.

Jika merujuk pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), target SDGs pada tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas salah satu targetnya yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama

negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Adapun indikator untuk memenuhi target tersebut yaitu melalui persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik diharapkan berdampak signifikan baik pada peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa.

e. Belum terpenuhinya Rasio Guru/Murid

Saat ini kondisi rasio guru/murid masih belum ideal. Rasio guru/murid SD=1:54, SMP=1:46, sementara dalam SPM Pendidikan, rasio ideal TK=1:15, SD=1:28, SMP=1:32. Pertambahan guru juga perlu menghitung penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), unit sekolah baru, dan jumlah siswa berdasarkan potensi penambahan siswa APK dan APM penduduk usia sekolah belum optimal

f. Belum optimalnya capaian APK PAUD/TK

Capaian APK PAUD/TK/Sederajat berdasarkan LKJIP tahun 2019 sebesar 22,85% sedangkan target yang ingin dicapai sebesar 72%. Artinya pada tahun 2019, target APK PAUD/TK/Sederajat masih belum tercapai. Sementara itu target RPJMN untuk APK PAUD pada tahun 2019 sebesar 77,2%. Hal ini dikarenakan masih banyak peserta didik PAUD yang belum terinput ke dalam data pokok Pendidikan terutama peserta didik PAUD non formal. Pada tujuan ke 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, terdapat target pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Salah satu indikator untuk memenuhi target tersebut yaitu melalui APK PAUD. Indikator SDGs APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Balikpapan pada tahun 2019 capaiannya sebesar 22,85% turun dari tahun 2018 sebesar 86,00%, sedangkan target RPJMN sebesar 77,2%

g. Belum optimalnya capaian APK dan APM SD/MI.

Capaian APM SD/MI/Sederajat pada tahun 2019 sebesar 94,75% dan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 97,73% dan target akhir RPJMD sebesar 98,72%. APM SD lebih dipengaruhi oleh usia siswa baru yang mendaftar masih berusia dibawah 7 tahun dan jumlah siswa yang usianya di atas 12 tahun, sehingga mempengaruhi ketercapaian APM SD. Pada tujuan ke 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, terdapat target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Salah satu indikator untuk mencapai target tersebut yaitu melalui perhitungan APK SD/MI. Indikator SDGs APK SD/MI di Kota Balikpapan pada tahun 2019 capaiannya 94,75%, sedangkan target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 114,09%.

h. Belum optimalnya capaian APK dan APM SMP/MTs

Capaian APM SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2019 sebesar 78,08%, sedangkan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 89,41% dan target akhir RPJMD sebesar

91,23%. Belum tercapainya APM SMP dikarenakan masih terdapat siswa yang berusia di bawah 13 tahun, serta siswa berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/Sederajat. Pada tujuan ke 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, terdapat target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Salah satu indikator untuk mencapai target tersebut yaitu melalui perhitungan APK SMP/MTs. Indikator SDGs APK SMP/MTs/ sederajat di Kota Balikpapan pada tahun 2019 capaiannya 105,68%, sedangkan target RPJMN pada tahun 2019 menjadi 106,94%.

i. Belum maksimalnya angka Harapan Lama Sekolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebesar 14,1 tahun sedangkan target akhir RPJMD sebesar 15,73 tahun, meskipun sudah tergolong tinggi namun jika dibandingkan dengan Kota Samarinda masih tertinggal yaitu 14,70 tahun. HLS Kota Balikpapan sebesar 14,1 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,1 tahun atau setara dengan Diploma II.

j. Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK

Capaian Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK pada tahun 2019 sebesar 40,50%, sementara target akhir RPJMD sebesar 41,8%. Hal ini disebabkan karena hanya terdapat satu TK Negeri Pembina, perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan TK di Kota Balikpapan untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun jumlah PAUD sebanyak 592 terdiri dari TK, Kelompok Bermain, Satuan Kelompok Sejenis, Taman Pengasuhan Anak, dan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia.

k. Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat di tahun 2019 sebesar 69 meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan yang terjadi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya rata-rata rasionya sebesar 26. Namun demikian persentase bangunan SD kondisi baik masih 85,27%. Jumlah SD sebanyak 210 terdiri dari 136 SD Negeri, 50 SD Swasta, 1 MIN, dan 23 Madrasah. Pada jenjang pendidikan SD, jumlah penduduk usia SD sebanyak 14.238 dan 75% dari jumlah tersebut sebanyak 10.679. Sementara itu, daya tampung Rombongan Belajar sebanyak 317 sehingga jumlah siswa yang mampu untuk ditampung hanya 8.876 siswa atau masih terdapat 1.803 siswa yang belum tertampung. Masih terdapat kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 64 ruang, dan kekurangan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 16 unit. Jumlah SD yang ada saat ini sebanyak 137 SD namun belum mampu menampung semua siswa berdasarkan kriteria ideal. Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD hanya 72% seharusnya terdapat 75% RKB SD.

1. Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun persentase bangunan SMP kondisi bangunan baik masih 83%. Jumlah SMP sebanyak 83 terdiri dari 23 SMP Negeri, 46 SMP Swasrta, 2 MTs Negeri, dan 12 MTs Swasta. Jumlah penduduk usia SMP sebanyak 12.014 dan 75% dari jumlah tersebut sebanyak 9.011. Sementara itu, daya tampung Rombongan Belajar sebanyak 188 sehingga jumlah siswa yang mampu untuk ditampung hanya 6.768 siswa atau masih terdapat 2.243 siswa yang belum tertampung. Masih terdapat kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 70 ruang, dan kekurangan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 6 unit. Jumlah SMP yang ada saat ini sebanyak 25 SMP namun belum mampu menampung semua siswa berdasarkan kriteria ideal. Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 7-15, mengakibatkan masih ada sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran secara shift.

- m. Kualitas sekolah swasta yang belum mengimbangi sekolah negeri

Di Kota Balikpapan hanya 25% sekolah swasta yang memenuhi kualifikasi dari sarana prasarannya maupun gurunya. Masyarakat lebih memilih sekolah negeri daripada swasta karena ada kesenjangan mutu antara sekolah negeri dan swasta. Kelas sekolah swasta di Balikpapan masih tergolong menengah ke bawah, sehingga masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Pada tujuan 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas, salah satu target yang ingin dicapai yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Berdasarkan target tersebut, salah satu indikator untuk mencapai target tersebut adalah proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi pembangunan sarana prasarana penunjang baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang berimbang.

#### **Kesehatan:**

- a. Masih Belum Optimalnya Upaya Penanganan dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu  
Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 adalah 64/100.000 KH. Angka ini belum mencapai target akhir RPJMD, walaupun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Diperkirakan indikator ini tidak mencapai target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu 60/100.000 KH. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) berkaitan dengan tujuan ketiga pada target pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menurunnya angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000. Jika



dibandingkan dengan realisasi AKI Kota Balikpapan pada tahun 2019, target SDGs ini sudah tercapai dengan baik. Akan tetapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya untuk meningkatkan layanan persalinan pada fasilitas layanan kesehatan serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan terampil. Pelayanan persalinan terhadap ibu hamil masih terkendala oleh terlambatnya penanganan terhadap ibu hamil di Rumah Sakit karena keterbatasan peralatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana persalinan masih belum optimal sehingga perlu dilakukan akselerasi peningkatan fasilitas layanan kesehatan untuk terus menekan angka kematian ibu.

b. Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 7/1.000 KH. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 6/1.000 KH. Selain itu, angka tersebut masih jauh dari target akhir yang ditetapkan yaitu 1/1.000 KH. Indikator ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan 3 sasaran 2 terkait dengan upaya menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12/1.000 KH. Realisasi AKB Kota Balikpapan jika dikaitkan dengan SDGs sudah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi untuk mengoptimalkan penurunan AKB, perlu untuk memperhatikan sasaran lainnya yaitu pemenuhan persentase imunisasi dasar lengkap sebanyak 80%. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kelengkapan peralatan medis yang terbatas menyulitkan tenaga kesehatan ketika akan melakukan pertolongan medis terhadap bayi yang mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, kapasitas SDM dalam penanganan persalinan masih belum optimal.

c. Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Bayi

Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga terkait penanganan kondisi darurat, salah satu penyebabnya adalah penyusunan buku kesehatan ibu dan anak tidak terisi dengan lengkap. Pemberian edukasi secara rutin juga belum dilaksanakan dengan baik. Belum lengkapnya isi dari buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Jika mengacu Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, BUKU KIA wajib memuat pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. Selain itu setiap bayi (usia maks 28 hari) wajib mendapatkan vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi hepatitis B, serta penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Masih Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2019, persentase ketersediaan SDM kesehatan di Rumah Sakit masih rendah yaitu 51,64%. Angka ini masih belum mencapai target akhir yaitu 90%. Angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 70%. Selain rumah sakit, realisasi persentase ketersediaan SDM di Puskesmas masih berada diangka 82,72%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa puskesmas yang belum memenuhi standar jumlah SDM-nya. Jika merujuk pada Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 (menggantikan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014) dijelaskan bahwa standar SDM untuk Puskesmas kawasan perkotaan non rawat inap persyaratan SDMnya bahwa jumlah minimal perawat 5 orang dan bidan 4 orang. Masih terdapat beberapa puskesmas hanya memiliki 2 bidan. Selain itu belum semua puskesmas memiliki apoteker.

Tercatat baru 15 puskesmas yang memiliki apoteker. Persyaratan lainnya dari kementerian kesehatan adalah harus ada 2 tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) setiap puskesmas. Kondisi saat ini hampir puskesmas belum memiliki promkes. Puskesmas di Balikpapan juga belum ada yang memiliki tenaga kesehatan lingkungan.

e. Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku

Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar Kemenkes, biasanya di Puskesmas yang masih bergabung dengan ruang administrasi, sehingga belum memenuhi standar akreditasi. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memenuhi penyesuaian pada regulasi baru. Masih belum optimalnya pemahaman terkait dengan informasi dari regulasi kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, kepada Rumah Sakit, dan Klinik. Upaya untuk melakukan akreditasi terhambat karena kondisi pandemi Covid-19 menyulitkan dalam menilai kualitas mutu fasilitas kesehatan. Walaupun persentase akreditasi puskesmas sudah mencapai 96,3% pada tahun 2019, akan tetapi jika dilihat berdasarkan hasil akreditasinya, sebanyak 8 puskesmas masih terakreditasi dasar dan 9 puskesmas terakreditasi madya. Hanya 2 puskesmas yang sudah mendapatkan akreditasi paripurna yaitu Puskesmas Mekar Sari dan Puskesmas Baru Tengah. Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas akreditasi puskesmas agar dapat memberikan layanan kesehatan yang baik kepada seluruh masyarakat.

f. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan

Alat kesehatan di fasilitas kesehatan masih belum memadai, Persentase ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) masih dibawah 60% di setiap puskesmas. Disamping itu kendaraan operasional untuk petugas di fasilitas kesehatan belum terpenuhi secara maksimal, misalnya kendaraan dinas operasional petugas. Hal ini menyulitkan ketika memberikan pelayanan kesehatan di lapangan. Keterbatasan ini juga terjadi pada fasilitas kesehatan di kawasan industri. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kesehatan di kawasan industri masih bergantung pada Puskesmas Karangjoang sehingga masih kurang dalam memberikan pelayanan dengan area cakupan seluas itu.

### **2.3.1.2. PENGENDALIAN BANJIR**

Jumlah titik banjir yang cenderung meningkat akibat kegiatan pembukaan lahan. Belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran drainase sehingga kegiatan belum terlaksana 100%. Upaya untuk

penanganan banjir juga terkendala oleh tingginya biaya operasional dan pemeliharaan jaringan drainase akibat sedimentasi mengingat jenis tanah Kota Balikpapan yang mudah lepas (pasir). Masalah lainnya adalah masih terjadinya pembukaan lahan seperti pembangunan perumahan yang menjadi tupoksi dari urusan perumahan dan permukiman sehingga menimbulkan sedimentasi. Sedimentasi ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab banjir. Penanganan masalah banjir belum terintegrasi dengan baik antar-Perangkat Daerah, diperlukan koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam menyelaraskan programnya.

#### **2.3.1.3. PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM**

- a. Terbatasnya ketersediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat  
Kapasitas air baku pada tahun 2019 adalah 1.525 liter/detik. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 1.615 liter/detik. Dengan kondisi seperti itu kekurangan sumber air baku diproyeksikan sebesar 400 liter/detik pada tahun 2021. Selama ini air Baku Kota Balikpapan sebagian besar masih di topang di Waduk Manggar sehingga diperlukan sumber baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan.
- b. Terbatasnya cakupan penyediaan air minum untuk masyarakat  
Cakupan layanan air minum pada tahun 2019 realisasinya sebesar 79,6%. Realisasi ini masih berada di bawah capaian nasional yang sudah mencapai 100%. Selain itu indikator cakupan layanan air minum ini terkait dengan SDGs pada tujuan keenam sasaran satu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM PU dan Pera, kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari. Definisi air minum yang dimaksud dalam hal ini adalah air yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga seperti minum, masak, cuci, mandi, dan lain-lain. Tingkat kebocoran air masih cukup tinggi yaitu 35%. Persentase ini hampir sama dengan membuat 1 SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) baru.
- c. Upaya pengembangan SPAM masih tergantung dengan daerah lain  
Pelaksanaan pembangunan SPAM masih terkendala karena bergantung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam perencanaannya, Kota Balikpapan akan bekerjasama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **2.3.1.4. BALIKPAPAN KOTA KREATIF**

- a. Akses pinjaman permodalan bagi UMKM belum optimal  
Persentase kredit UMKM di bank pada tahun 2020 sebesar 36,74%. Angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 37,8%. Rendahnya akses peminjaman modal ini disebabkan karena sulitnya perizinan dan syarat jaminan. Disamping itu belum adanya *mapping data* terkait kebutuhan pendanaan bagi KUMKM untuk memastikan kredit yang disalurkan tepat sasaran. Dalam SDGs tujuan ke 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Adapun salah satu indikator untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui Persentase akses UMKM ke layanan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Sasaran lainnya adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua, yang mana terdapat indikator untuk mencapai sasaran tersebut melalui proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Hal ini perlu dilakukan sebagai proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan

b. Terbatasnya anggaran untuk keikutsertaan event promosi KUMKM

Upaya promosi melalui kerja sama dengan perusahaan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kerja sama pada tahun 2019 sebanyak 150 kerja sama. Capaian ini masih belum mencapai target akhir yaitu 180 kerja sama. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk mengakomodir keikutsertaan event-event promosi/pameran serta terbatasnya pengetahuan para pelaku Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) terhadap tujuan promosi.

c. Belum optimalnya kerjasama KUMKM dengan toko swalayan untuk promosi produk

Kerja sama yang dilakukan dengan toko swalayan untuk mempromosikan produk KUMKM masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurang transparannya toko swalayan dalam hal kemitraan dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).

d. Terbatasnya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat

Jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlahnya sebanyak 60. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 100 pengurus/pengawas/pengelola. Dengan kondisi seperti itu pelaku usaha Koperasi UMKM masih belum siap dalam pemanfaatan teknologi informasi karena didominasi pengurus yang sudah tua dan kurang mengerti dengan teknologi. Hal ini ditambah dengan masih banyaknya pengurus dan pengelolaan koperasi yang belum mengikuti bimtek. Upaya pelaksanaan pelatihan menjadi kurang optimal karena terkadang terjadi pergantian pengurus sehingga menyebabkan pelatihan harus diulang dari awal lagi. Masalah lainnya adalah target Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak tercapai disebabkan banyaknya pengurus dan pengelola koperasi yang terdaftar tetapi tidak aktif

e. Belum adanya aplikasi data UMKM yang terintegrasi

Database terkait dengan koperasi dan UMKM belum ada sehingga menyulitkan bagi dinas ketika akan mengelola perizinan koperasi dan UMKM. Bahkan masih ada data

yang belum sinkron antar kecamatan. Hal ini menyebabkan tidak terintegrasinya data perijinan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dengan Perangkat Daerah terkait

f. Masih kurangnya jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten

Masih kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi. Hal ini disebabkan biaya yang cukup besar untuk melakukan sertifikasi bagi pelaku pariwisata ekonomi kreatif. Upaya pembinaan yang dilakukan juga belum optimalnya kepada Pelaku Wisata. Perlunya optimalisasi SDM pariwisata yang berdaya saing internasional terutama dengan adanya IKN, sehingga SDM yang bergerak berasal dari Kota Balikpapan

g. Belum optimalnya pelaksanaan edukasi dan dukungan terhadap SDM Pariwisata

Belum optimalnya pelaksanaan edukasi terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini disebabkan karena masih minimnya dukungan baik secara regulasi maupun fasilitas bagi pelaku usaha pariwisata sehingga menyulitkan untuk berinovasi dan meningkatkan kreativitas. Disamping itu pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata masih bekerja secara individual karena minimnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholders pariwisata.

h. Pelaksanaan event-event promosi pariwisata belum terlaksana dengan baik

Pelaksanaan *event* promosi pariwisata masih minim, pada tahun 2019 baru terselenggara sebanyak 8 event dari target sebanyak 14 *event*. Pada tahun 2020 dengan adanya Covid-19 mengakibatkan penyelenggaraan event promosi pariwisata menjadi terkendala. Minimnya kegiatan promosi pariwisata untuk mengikuti pameran dan pertunjukan seni budaya di daerah lain, salah satunya karena keterbatasan anggaran.

Pengembangan destinasi wisata ini mendukung tujuan 8 sasaran 8 SDGs yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal pada tahun 2030

i. Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata

Minimnya pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah aplikasi berbasis *e-tourism* (Aplikasi Cinta Balikpapan) yang dikembangkan sebagai media informasi sekaligus promosi untuk destinasi pariwisata. Aplikasi yang ada saat ini masih belum cukup informatif dan akomodatif sebagai acuan bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kota Balikpapan. Selama ini memang masih belum dikembangkannya *database* yang integratif dan komprehensif terkait dengan pariwisata di Kota Balikpapan

j. Masih Rendahnya Realisasi Investasi di Bidang Pariwisata

Minimnya realisasi investasi dalam hal pengembangan pariwisata seperti sektor transportasi, restoran, hiburan, maupun tempat rekreasi. Hal ini disebabkan karena arus informasi dan *branding* yang belum optimal menyebabkan investor kurang



berminat untuk menanamkan modalnya. Kota Balikpapan belum memiliki *branding image* yang kuat terkait dengan sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak merata menyebabkan investor menanam modal hanya ke industri pariwisata, karena minimnya atraksi daya tarik wisata dan aksesibilitas yang kurang memadai.

k. Dukungan infrastruktur pariwisata yang belum memadai

Aksesibilitas destinasi pariwisata yang masih rendah sehingga wisatawan kurang tertarik untuk berkunjung. Pengembangan fasilitas pariwisata terkendala karena minimnya anggaran baik dari investor maupun anggaran pemerintah. Selain itu, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel kurang memadai karena kondisi pandemi *Covid-19*. Beberapa hotel berhenti beroperasi atau mengurangi fasilitas layanan mereka untuk menghemat biaya operasional.

l. Belum optimal kualitas sarana dan prasarana di tempat pariwisata

Sarana prasarana destinasi wisata perlu menerapkan unsur *healthy dan safety serta enviromental sustainable* yang dikembangkan untuk menarik wisatawan baik yang dikelola oleh Pemerintah daerah maupun *private sector*. Tidak ada truk sampah untuk mengangkut sampah ke TPA, karena tidak ada anggaran UPTD untuk pengadaan truk sampah. Selain truk sampah, beton pemecah ombak untuk menahan air laut pasang di Pantai Manggar juga belum tersedia.

Fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha yang belum maksimal mengakibatkan pelaku usaha ekonomi kreatif sulit untuk berinovasi. Disamping itu kurang pedulinya masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga lokasi pariwisata, meskipun telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi oleh Pokdarwis.

m. Koordinasi antar stakeholder belum terjalin dengan baik

Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata. Perlu kerja sama semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat batapa pentingmya manfaat pariwisata untuk menunjang dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berguna bagi pembangunan.

n. Dukungan regulasi terkait pariwisata masih belum optimal

Pelaksanaan kebijakan dan peraturan daerah mengenai pengembangan pariwisata belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus untuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata atau objek wisata.

o. Belum tersusunnya dokumen teknis perencanaan pariwisata

Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif belum berjalan semestinya karena belum tersusunnya *Bussiness Plan* dan *Road Map* pengembangan potensi dan pengelolaan daya tarik wisata. Hal ini menyebabkan masih belum jelas batas tanah/area kawasan Pantai yang sesungguhnya karena belum ada bukti fisik dari bagian aset daerah yang berupa sertifikat batas tanah milik Pemerintah Kota, sehingga perlu berkoordinasi dengan BPKD selaku pengelola aset.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.115 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	
1.1.	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas guru	Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK Terbatasnya jumlah guru yang bersertifikasi pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat Terbatasnya jumlah guru yang bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat Kompetensi guru yang masih kurang Belum terpenuhinya Rasio Guru/Murid
1.2.	Belum adanya perhitungan jumlah kebutuhan guru yang ideal	Pemenuhan kebutuhan guru yang belum optimal
1.3.	APK dan APM penduduk usia sekolah belum optimal	Belum optimalnya capaian APK PAUD/TK Belum optimalnya capaian APK dan APM SD/MI. Belum optimalnya capaian APK dan APM SMP/MTs
1.4.	Angka Harapan Lama Sekolah yang belum maksimal	Belum maksimalnya angka Harapan Lama Sekolah
1.5.	Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat Belum terpenuhinya Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat Anggaran pembangunan RKB terbatas Tidak update-nya data Dapodik
1.6.	Kesenjangan mutu sekolah negeri dengan swasta	Kualitas sekolah swasta yang belum mengimbangi sekolah negeri Belum optimalnya akreditasi sekolah Belum bersinerginya pemenuhan kewenangan sekolah negeri dan swasta.
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>	
2.1.	Masih Adanya Angka Kematian Ibu (AKI)	Masih Belum Optimalnya Upaya Penanganan dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Ibu Hamil Masih terhambatnya Upaya Penanganan Medis terhadap Ibu Hamil
2.2.	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB)	Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Angka Kematian Bayi Belum Meratanya Akses terhadap Pengetahuan dan Informasi terkait Penanganan Bayi
2.3.	Jumlah SDM Kesehatan Tidak Linier dengan Peningkatan Kebutuhan Layanan	Masih Kurangnya jumlah SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Belum Meratanya Penyebaran SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
2.4.	Pengembangan Kualitas SDM Kesehatan Belum Optimal	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Keterbatasan Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan
2.5.	Mutu Sarana dan Prasarana Fasilitas Masih Kurang Optimal	Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum Sesuai dengan Standar Aturan yang Berlaku Kualitas SDM yang Belum Sepenuhnya Mampu Mengoperasikan Fasilitas Kesehatan dengan Baik
2.6.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Belum Optimal	Terbatasnya sarana prasarana kesehatan
2.7.	Penerapan Teknologi yang Masih Terbatas	Belum Optimalnya Implementasi Teknologi dalam penggunaan Fasilitas Kesehatan SDM Kesehatan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menggunakan teknologi
2.8.	Ketersediaan Obat yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan	Masih Rendahnya Kesadaran terhadap Penggunaan Obat Masih Kurang Belum Optimalnya Perencanaan Ketersediaan dan Kebutuhan Obat
2.9.	Masih Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Masih Rendahnya Penerapan Pola Hidup Sehat di Masyarakat
2.10.	Masih Tingginya Penyakit Menular yang Menjangkiti Masyarakat	Masih Tingginya Angka Penyakit Menular Belum Optimalnya Upaya Penanganan Penyakit Menular
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	
3.1.1.	Masih Terjadinya Overlapping (Tumpang Tindih) Kewenangan dengan OPD Lain	Masih adanya kewenangan yang sama antara Urusan PU dan Lingkungan Hidup Masih terdapat aturan yang tumpang tindih dengan urusan Perumahan dan Permukiman
3.1.2.	Terdapat Dualisme Aturan dalam Pelaksanaan Teknis	Adanya aturan yang berbeda antara dua kementerian
3.1.3.	Belum Optimalnya Kapasitas SDM Internal	Pelaksanaan tupoksi dari internal masih belum optimal Penggunaan Teknologi dan Informasi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik
4.1.4.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas untuk Tenaga Konstruksi Belum Optimal	Keterbatasan Tenaga Konstruksi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Belum adanya basis data tenaga konstruksi Belum adanya rencana pengembangan kapasitas tenaga konstruksi

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
4.1.5.	Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Masih Belum Memadai	Pembangunan jalan belum sesuai dengan kondisi ideal.
4.1.6.	Pengembangan Jaringan Utilitas Belum Tertata dengan Baik	Kurangnya penataan jaringan utilitas Kurangnya koordinasi dan kesadaran dalam pengembangan jaringan utilitas
4.1.7.	Ketersediaan Air Baku yang Belum Sesuai dengan Target	Terbatasnya ketersediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
4.1.8.	Belum Optimalnya Pemenuhan Air Minum	Terbatasnya cakupan penyediaan air minum untuk masyarakat Upaya pengembangan SPAM masih tergantung dengan daerah lain
4.1.9.	Penanganan Masalah Banjir yang Belum Efektif	Terjadi peningkatan jumlah titik banjir
<b>3.2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>	
3.2.1.	Belum Adanya Perda Tata Ruang yang Disahkan	Masih belum selesainya penyusunan tiga perda yang saat ini sedang diproses
3.2.2.	Pembaruan Data Peta yang Belum Optimal	Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru
3.2.3.	Belum sinkronnya antara perencanaan Tata Ruang dan pelaksanaannya	Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan Masih kurangnya petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang
3.2.4.	Masih Terjadinya Alih Fungsi Lahan	Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat Belum Adanya Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	
4.1.	Masih Tingginya Backlog Perumahan	Meningkatnya kebutuhan terhadap rumah karena angka urbanisasi juga terus melonjak Adanya Potensi peningkatan jumlah penduduk karena pengembangan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Penurunan backlog perumahan diprediksi belum mencapai target akhir Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat
4.2.	Masih Adanya Rumah Tidak Layak Huni yang Tidak Diintervensi Karena Tidak Masuk dalam Kriteria	Masih Belum Optimalnya Upaya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Perilaku masyarakat belum mendukung untuk penanganan rumah tidak layak huni
4.3.	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan kepada Masyarakat	Belum Terisnya Unit Hunian Vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Masih belum optimalnya upaya penegakan hukum terkait perencanaan pengembangan lahan
4.4.	Belum Optimalnya Peran Pemerintah dan Pengembang dalam Menyediakan Fasilitas Perumahan	Belum optimalnya kinerja pengembang dalam memenuhi 7 indikator kawasan kumuh Ketersediaan PSU yang belum optimal berpotensi menghasilkan kawasan kumuh baru
4.5.	Belum optimalnya upaya pemenuhan kriteria kawasan bebas kumuh	Masih terdapat beberapa kriteria yang belum memenuhi standar kawasan bebas kumuh Tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanganan kawasan kumuh
4.6.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender	Belum sinkronnya dokumen perencanaan, evaluasi, dan tata kelola terkait pengarusutamaan gender Perlunya koordinasi untuk pelaksanaan program pengarusutamaan gender karena intervensinya bukan hanya di urusan Perumahan dan Permukiman
<b>5.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	
5.1.	<b>Satpol PP</b>	
5.1.1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja di Satpol PP	Belum idealnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
5.1.2.	Masih adanya Kendala terkait dengan Penegakan Regulasi Daerah	Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati regulasi daerah Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan regulasi daerah
5.1.3.	Terbatasnya Jumlah SDM Satpol PP	Belum idealnya jumlah personel Satpol PP jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bertambahnya beban terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
5.1.4.	Masih Kurangnya Jumlah Petugas Linmas	Masih kurangnya jumlah petugas Linmas sehingga mempengaruhi fungsi Linmas.
<b>5.2.</b>	<b>BPBD</b>	
5.2.1.	Masih Kurangnya Jumlah Sarana dan Prasarana	Kurangnya jumlah mobil operasional kebakaran sesuai dengan Standar Nasional
5.2.2.	Masih Belum Optimalnya Kapasitas SDM terkait Penanganan Kebakaran	Belum optimalnya tingkat tanggap waktu kebakaran Belum optimalnya upaya peningkatan SDM
5.2.3.	Belum Optimalnya Area Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Masih rendahnya area cakupan pelayanan kebakaran Proyek pemindahan IKN berpotensi akan menambah jumlah cakupan pelayanan kebakaran
5.2.4.	Masih Seringnya Terjadi Kebakaran di Daerah Kumuh	Kasus kebakaran masih banyak terjadi di wilayah kumuh
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	
6.1.	Keterbatasan Anggaran untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana belum sesuai dengan SPM Urusan Sosial karena keterbatasan anggaran

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
		Belum optimalnya capaian pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana karena keterbatasan anggaran
6.2.	Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta Data Terpadu terkait Penanganan Korban Bencana	Sarana dan Prasarana logistik bagi korban bencana belum memadai Belum tersusunnya data terpadu terkait kebutuhan logistik korban bencana
6.3.	Rendahnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan PPKS Masih terhambat oleh penetapan kriteria PPKS sesuai dengan regulasi Kementerian Sosial
6.4.	Belum Tersedianya Sarana Rehabilitasi Sosial Terpadu untuk Memberikan Pelayanan Kepada PPKS	Belum tersedianya rumah/tempat yang representatif untuk melaksanakan rehabilitasi sosial
6.5.	Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belum Optimal	Terbatasnya jumlah SDM untuk melaksanakan pemberdayaan bagi PPKS
6.6.	Pengelolaan Data PPKS Belum optimal	Kesulitan untuk mendapatkan data PPKS Masih terkendala ketika mengubah ataupun memperbarui data
6.7.	Kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dengan Stakeholders Bidang Sosial dalam Memberdayakan PPKS Masih Rendah	Masih belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar-PD
6.8.	Belum Maksimalnya Fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Cakupan pelayanan SLRT masih belum menjangkau seluruh masyarakat
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	
7.1.	Masih Rendahnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Keterbatasan lapangan kerja disertai dengan meningkatnya pencari kerja
7.2.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja
7.3.	Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja	Belum optimalnya program magang untuk calon tenaga kerja Kurangnya Pembinaan terhadap Calon Tenaga Kerja yang Ingin Berwirausaha
7.4.	Belum optimalnya perencanaan terpadu terkait ketenagakerjaan	Belum Tersusunnya Masterplan Ketenagakerjaan Belum adanya kajian terkait dampak pemindahan IKN
7.5.	Belum Optimalnya Regulasi (Perwal) dan Pemanfaatan Sistem terkait Ketenagakerjaan	Belum Adanya Regulasi (Perwal) Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar Perda Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pemetaan Angkatan Kerja
7.6.	Pemahaman terkait dengan Syarat Kerja Belum Sepenuhnya Dipahami Baik Oleh Pekerja Maupun Perusahaan	Masih kurangnya pemahaman terkait hubungan kerja
7.7.	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Masih Belum Optimal	Penanganan kasus hubungan industrial masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>	
8.1.	Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase Indeks Pembangunan Gender Cenderung menurun Belum adanya kajian evaluasi terhadap capaian IPG Capaian Komponen Pembentuk IPG belum Optimal
8.2.	Koordinasi lintas sektoral belum optimal	Koordinasi antar PD belum berjalan dengan baik Belum adanya data terpilah Pandemi Covid-19 menghambat proses pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat
8.3.	Banyaknya permasalahan anak dan Perempuan yang perlu ditangani	Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan Belum maksimalnya penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak
8.4.	Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan waktu lama	Kinerja PD yang sangat berkaitan dengan peran lintas sektor PD lain, dan atau para lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)
8.5.	Masih terdapat beberapa OPD yang belum melibatkan masyarakat, dunia usaha dan media masa dalam mewujudkan Balikpapan Layak Anak	Belum berkolaborasinya PD dengan stakeholder dalam mewujudkan Balikpapan Layak Anak
8.6.	Minimnya dana serta ketersediaan Sarana dan Prasarana yang layak untuk dukungan kinerja	Kurangnya dana dan kerjasama antar-PD untuk mewujudkan Balikpapan Layak Anak Kurangnya dana serta sarana prasarana kegiatan penyuluhan
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>	
9.1.	Belum Optimalnya gerakan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi pangan lokal non rice	Belum optimalnya upaya penguatan gerakan diversifikasi pangan Belum optimalnya peran PD untuk memberikan sosialisasi
9.2.	Minimnya sarana dan prasarana serta regulasi penunjang kegiatan pengawasan keamanan pangan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan pangan Masih kurangnya SDM Pengawasan Pangan Belum adanya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Daerah
9.3.	Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pangan baik dari segi instansi daerah dengan instansi Kementerian yang memiliki kewenangan terkait pangan	Kurang Koordinasi antara instansi di daerah dengan UPT dari Kementerian yang memiliki kewenangan terkait pangan

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
9.4.	Ketidaksesuaian tupoksi yang dibuat serta belum adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dalam menganalisa ketahanan pangan	Ketidaksesuaian tugas di daerah, provinsi dan pusat karena job desk yang dibuat tidak memperhatikan pembagian urusan
9.5.	Ketersediaan pangan	Belum adanya BUMD pangan Belum adanya infrastruktur pangan yang memadai
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>	
10.1.	Terjadinya Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah terkait dengan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap Keterbatasan kewenangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Menyelesaikan Permasalahan IMTN Permintaan IMTN melonjak akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
10.2.	Terhambatnya Proses Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik	Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk Pembangunan Waduk Krikrit Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Instituit Teknologi Kalimantan (ITK) Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran Jalan Letjend Suprpto Belum berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden
10.3.	Belum Optimalnya Upaya Penanganan Sengketa Lahan	Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017
10.4.	Belum Optimalnya Upaya Pengawasan Peruntukan Lahan	Dokumen perencanaan berupa RTRW masih belum sepenuhnya dipatuhi
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
11.1.	Terbatasnya ketersediaan air baku	Kurangnya sumber air Tingginya tingkat ketergantungan air permukaan terhadap curah hujan Permintaan air bersih meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, investasi usaha, dan kegiatan yang membutuhkan air bersih
11.2.	Terjadinya bencana banjir	Pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik yang berizin maupun tidak berizin Curah hujan yang tinggi Berkurangnya kapasitas drainase
11.3.	Degradasi di wilayah Kota Balikpapan	Pertemuan dua arus dari selat makassar Banyaknya aliran muara sungai Sedimentasi
11.4.	Tercemarnya air permukaan	Tekanan jumlah penduduk Usaha ilegal di daerah aliran sungai Limbah cair domestik
11.5.	Pengupasan lahan yang tidak terkendali	Pembukaan lahan dan pengupasan lahan yang dilakukan pengembang tidak sesuai dengan aturan Terjadinya Bencana Tanah Longsor Kerusakan mangrove Masih belum optimalnya pembebasan hutan lindung dan hutan kota yang ada di wilayah Kota Balikpapan.
11.6.	Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber	Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah Belum tersedianya pusat daur ulang Harga beli sampah anorganik rendah dan fluktuatif Kurangnya sebaran dan jumlah bank sampah Kurangnya fasilitas pemerintah untuk angkutan sampah terpilih
11.7.	Belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga	Pertumbuhan penduduk mengakibatkan sampah B3 Rumah Tangga meningkat Belum ada regulasi untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga Banyaknya produk kebutuhan rumah tangga yang mengandung B3 Perubahan gaya hidup masyarakat Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah B3 rumah tangga Belum tersedianya fasilitas pemerintah kota untuk pengelolaan sampah B3 rumah tangga
11.8.	Timbulan sampah di pesisir/laut	Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan sungai Kurangnya infrastruktur untuk pengambilan sampah dari aliran air Beralihnya kewenangan pengaturan wilayah pesisir dan perairan
11.9.	Perubahan iklim	Pengupasan lahan tidak terkendali Peningkatan emisi kegiatan industri Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor Penggunaan energi listrik di permukiman dan usaha serta kelembagaan
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
12.1.	Belum Optimalnya Sosialisasi Administrasi Kependudukan Khususnya Perubahan Kebijakan Pelayanan Kependudukan	Adanya perubahan aturan terkait kependudukan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat dalam Memanfaatkan/Menggunakan Pelayanan Daring Masih Adanya Penyalahgunaan Dokumen Administrasi Kependudukan oleh Masyarakat Masih Rendahnya Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
12.2.	Minimnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan	Belum semua PD yang memanfaatkan data kependudukan
12.3.	Terbatasnya Jumlah SDM Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya jumlah pegawai untuk melayani urusan kependudukan dan catatan sipil Adanya Potensi Peningkatan Beban Kerja Karena Meningkatnya Jumlah



No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
		Penduduk yang Disebabkan oleh Proyek Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
12.4.	Ruang pelayanan serta Sarana dan Prasarana kependudukan yang belum representative	Tingginya aktivitas pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belum optimalnya fasilitas dan peralatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
<b>13.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
13.1.	Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi	Penolakan pemakaian alat KB yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Belum semua kelompok masyarakat dilakukan penyuluhan KB Dana operasional dan sarana prasarana pembinaan terbatas
13.2.	Rendahnya persentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Masih tingginya Proporsi Wanita Subur dalam Status Kawin yang tidak menggunakan Alat Kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda / menjarangkan Anak
13.3.	Masih terdapatnya perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun	Tingginya perkawinan usia anak di bawah 21 tahun
13.4.	Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat	Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat yang dominan disebabkan faktor Migrasi
<b>14.</b>	<b>Perhubungan</b>	
14.1.	Belum optimalnya angkutan umum dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Belum optimalnya pembangunan terminal angkutan penumpang dan barang Kebutuhan terhadap terminal karena semakin meningkatnya mobilitas penduduk Kapasitas dan kondisi terminal saat ini kurang menunjang mobilitas penduduk dan barang Belum optimalnya pembangunan dermaga kampung baru tengah Pengembangan Pelabuhan Sumber (mengaktifkan kembali status Pelabuhan Sumber untuk aktivitas penyebrangan) belum terealisasi Belum optimalnya pengembangan koridor sarana angkutan umum Belum optimalnya proses interkoneksi antar angkutan umum
14.2.	Belum Optimalnya Pengujian Kendaraan Bermotor	Masih kurangnya jumlah pengujian kendaraan bermotor. Belum optimalnya proses pengujian kendaraan
14.3.	Minimnya Ketersediaan Jalur Sepeda	Belum terealisasinya pengembangan jalur sepeda dan fasilitas pendukungnya
14.4.	Minimnya Ketersediaan Rambu Petunjuk Dan Fasilitas Pendukung di Ruas Jalan	Masih sedikitnya jumlah rambu lalu lintas jika dibandingkan dengan total kendaraan yang ada Belum Tersedianya Indikator Laik Fungsi Jalan dari Sudut Pandang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Minimnya ketersediaan rambu lalu lintas di sekitar sekolah Belum optimalnya ketersediaan teknologi penunjang pengawasan lalu lintas
14.5.	Pemenuhan Estetika Penerangan Jalan Umum (PJU) masih rendah	Belum diperbaharainya fasilitas Penerangan Jalan Umum Belum optimalnya upaya pemenuhan estetika PJU
14.6.	Belum Optimalnya Pengelolaan Parkir	Kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola parkir Kurang penegakan aturan bagi masyarakat yang melanggar
14.7.	Perencanaan dan Penganggaran Sektor Perhubungan dengan Stakeholders Lainnya Belum Sinergis	Belum tersusunnya perencanaan transportasi yang terpadu Keterbatasan anggaran dalam upaya pengembangan fasilitas transportasi
<b>15.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
15.1.	Belum ada pemetaan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di Kota Balikpapan	Belum adanya kajian pemetaan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi
15.2.	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM survey menara telekomunikasi	Petugas survey menara terbatas dan belajar secara otodidak
15.3.	Regulasi/peraturan terkait menara telekomunikasi belum diterapkan dengan baik	Perlu adanya turunan Perda No 4 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Balikpapan Belum ada mekanisme perizinan pembangunan menara yang tersistem
15.4.	Terbatasnya pengelolaan aduan masyarakat	Sistem pengelolaan aduan publik belum satu pintu Kurangnya SDM yang mumpuni dalam penanganan pengaduan publik dan komunikasi publik
15.5.	Belum terpetakannya audience sasaran komunikasi	Komunikasi publik hanya bersifat agenda rutin Belum optimalnya digitalisasi media komunikasi publik
15.6.	Terbatasnya anggaran dan SDM yang menangani SPBE	Belum optimalnya anggaran dan SDM dalam mewujudkan SPBE
15.7.	Belum optimalnya pengembangan dan pengintegrasian aplikasi pada semua OPD	Belum terintegrasinya aplikasi secara menyeluruh
<b>16.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	
16.1.	Kualitas Produk Koperasi dan UMKM yang Masih Rendah	Banyak produk belum bersertifikasi halal Produk yang dipasarkan belum dapat bersaing Akses pinjaman permodalan bagi UMKM belum optimal
16.2.	Belum Optimalnya Upaya untuk Mempromosikan Koperasi dan UMKM	Terbatasnya anggaran untuk keikutsertaan event promosi KUMKM Belum optimalnya kerjasama KUMKM dengan toko swalayan untuk promosi produk
16.3.	Pengembangan Kapasitas Bagi Pelaku Koperasi UMKM yang Belum Optimal	Terbatasnya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang memiliki sertifikat
16.4.	Belum Tersusunnya Data Terpadu Koperasi UMKM	Belum adanya aplikasi data UMKM yang terintegrasi

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
<b>17.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	
17.1.	Terhambatnya Rencana Investasi yang Disebabkan oleh Kondisi Pandemi	Target akhir rencana investasi pada tahun 2021 diprediksi tidak tercapai
17.2.	Menurunnya Perekonomian khususnya di Sektor Migas dan Pertambangan	Masih tingginya ketergantungan terhadap sektor migas dan pertambangan
17.3.	Kurang sinkronisasi Antara Peraturan Hukum Pusat dan Daerah	Masih adanya regulasi daerah yang belum sinkron
		Masih adanya perbedaan data antar dokumen perencanaan di daerah
17.4.	Terbatasnya Kewenangan Daerah dalam Mengelola Urusan Penanaman Modal	Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih terdapat ketidakjelasan diharapkan akan dapat dirinci dalam aturan turunannya
		Terbatasnya kewenangan daerah terkait penanaman modal
17.5.	Terbatasnya Peruntukan Lahan Usaha untuk Penanaman Modal Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Keterlambatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS)
		Perubahan struktur organisasi
17.6.	Belum Optimalnya Rencana Penanaman Modal Daerah	Terbatasnya peruntukan lahan untuk pengembangan investasi
17.7.	Belum Optimalnya Pengelolaan Aplikasi Perizinan OSS dan Aplikasi Penduduknya	Belum Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
		Rendahnya Jaminan Ketersediaan Data dalam Pengembangan Kawasan Usaha
17.8.	Belum Optimalnya Akses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penggunaan OSS belum memudahkan urusan perizinan
		Penggunaan Aplikasi SICANTIK masih belum optimal
18.	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	Belum meratanya akses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
		Mal Pelayanan Publik yang masih dalam proses pelaksanaan/ penyelenggaraan
		Belum optimalnya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait perizinan
18.1.	Belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan	Belum tersedianya peraturan serta belum efektifnya implementasi regulasi tentang kepemudaan
18.2.	Gerakan pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif	Gerakan pramuka dianggap masih belum memberikan manfaat yang signifikan
18.3.	Tingkat pengangguran pemuda masih tinggi	Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda meningkat
18.4.	Penyimpangan pergaulan serta pengaruh teknologi informasi yang memberikan dampak negatif kepada pemuda	Minimnya jumlah pemuda berprestasi
		Pemuda terjebak dalam pergaulan bebas
18.5.	Terbatasnya sarana prasarana olahraga	Keterbatasan dana cabang olahraga
		Belum adanya masterplan atau road map keolahragaan
		Belum adanya sarana olahraga di setiap kecamatan
		Belum ada fasilitas pengembangan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
18.6.	Kurang promosi dan sosialisasi kegiatan olahraga di masyarakat	Minat masyarakat terhadap olahraga masih kurang
		Belum optimalnya peran dan fungsi FORMI
		Belum terselenggaranya pekan olahraga tingkat kota
18.7.	Kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang terbatas	Belum optimalnya prestasi atlet lokal
		Belum adanya pengembangan industri olahraga
<b>19.</b>	<b>Statistik</b>	
19.1.	Belum adanya regulasi /kebijakan tata kelola satu data	Regulasi yang belum disusun
19.2.	Urusan statistik masih bergabung dengan seksi statistik dan persandian	Kurangnya SDM
<b>20.</b>	<b>Persandian</b>	
20.1.	Belum terlaksananya penyelenggaraan persandian pengamanan informasi	Terbatasnya SDM persandian
		Belum dilaksanakannya kembali perhitungan indeks kematangan keamanan informasi
20.2.	Belum adanya regulasi /kebijakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi	Tidak adanya regulasi tentang tata kelola persandian
<b>21.</b>	<b>Kebudayaan</b>	
21.1.	Belum optimalnya kegiatan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Sinergisitas antar PD masih belum maksimal dalam pelaksanaan event
		Belum optimalnya pembinaan dan pendataan terhadap Paguyuban yang ada
		Anggaran yang terbatas
21.2.	Belum optimalnya pengelolaan dan promosi cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan	Lokasi cagar budaya yang berjauhan
		Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan di tahun 2018 mengakibatkan kinerjanya belum optimal
		Pandemi Covid-19 yang menghambat pengelolaan cagar budaya
<b>22.</b>	<b>Perpustakaan</b>	
22.1.	Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perpustakaan	Jumlah pustakawan belum sesuai dengan standar nasional.
		Kompetensi Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan perlu ditingkatkan
22.2.	Belum Optimalnya Pembinaan terhadap Perpustakaan dan Taman Baca	Keterbatasan data dan SDM dalam melakukan pembinaan
22.3.	Belum Optimalnya Ketersediaan Fasilitas dan Buku Perpustakaan	Masih kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan
		Keterbatasan jumlah buku di perpustakaan
22.4.	Terjadinya Penurunan Jumlah Pengunjung dan anggota Perpustakaan	Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
		Menurunnya jumlah anggota perpustakaan

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
22.5.	Masih Kurangnya Kegiatan untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca pada tahun 2020 masih belum optimal Belum optimalnya koordinasi dengan PD lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat
<b>23.</b>	<b>Kearsipan</b>	
23.1.	Belum Optimalnya SDM Pengelola Arsip	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Arsip Belum Dilaksanakannya Peningkatan Kompetensi SDM
23.2.	Masih rendahnya Komitmen OPD dalam Hal Pengelolaan Arsip	Masih kurangnya jumlah PD yang tertib terhadap pengelolaan arsip
23.3.	Fasilitas Penunjang untuk Pengembangan Arsip Kurang Memadai	Gedung penyimpanan arsip belum memadai Belum optimalnya upaya pengembangan digitalisasi arsip
23.4.	Keterbatasan Anggaran dalam Menyediakan Fasilitas Pengelolaan Arsip	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan pengelolaan kearsipan
	<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>	
<b>24.</b>	<b>Perikanan</b>	
24.1.	Rendahnya produksi perikanan tangkap	Kualitas armada nelayan belum memadai Faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi tangkapan nelayan Tingginya biaya melaut dan meningkatnya harga ikan Tingginya biaya melaut dan meningkatnya harga ikan
24.2.	Ikan Hasil Tangkapan Belum Sepenuhnya Terjamin Kualitasnya	Nelayan tidak memiliki fasilitas penyimpanan ikan tangkapan yang memadai
24.3.	Belum optimalnya aktivitas budidaya perikanan	Belum optimalnya aktivitas budidaya perikanan Sarana prasarana tambak dan ketersediaan benih ikan yang tidak memadai
24.4.	Rendahnya produktivitas budidaya rumput laut karena padatnya aktivitas pelayaran	Tingginya aktivitas kapal pelayaran dan pengangkut batu bara
<b>25.</b>	<b>Pariwisata</b>	
25.1.	Kurangnya SDM yang Mengelola Bidang Pariwisata	Terbatasnya jumlah SDM yang mengelola destinasi dan urusan pariwisata
25.2.	Kualitas SDM Pariwisata Belum Cukup Baik	Masih kurangnya jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten Masih kurangnya jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten
25.3.	Masih Minimnya Promosi dan Realisasi Investasi Pariwisata	Pelaksanaan event-event promosi pariwisata belum terlaksana dengan baik Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata Masih Rendahnya Realisasi Investasi di Bidang Pariwisata
25.4.	Belum Optimalnya Kualitas Destinasi Pariwisata	Dukungan infrastruktur pariwisata yang belum memadai Belum optimal kualitas sarana dan prasarana di tempat pariwisata
25.5.	Masih Kurangnya Dukungan dari Stakeholder terkait Pengembangan Urusan Pariwisata	Koordinasi antar stakeholder belum terjalin dengan baik
25.6.	Belum Tersusunnya Regulasi dan Rencana Pengembangan Pariwisata	Dukungan regulasi terkait pariwisata masih belum optimal Belum tersusunnya dokumen teknis perencanaan pariwisata
<b>26.</b>	<b>Pertanian</b>	
26.1.	Status kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	Status kepemilikan lahan pertanian yang bukan milik sendiri Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian
26.2.	Produksi dan Produktivitas tanaman sulit untuk ditingkatkan	Belum optimalnya penggunaan bibit unggul bersertifikat Luas lahan pertanian terus berkurang Tidak adanya sistem irigasi yang baik Berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian
26.3.	Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan belum optimal	Lahan perkebunan masih perlu diintensifkan dengan tanaman sela tumpang sari Produktivitas tanaman karet masih rendah
26.4.	Kurangnya ketrampilan petani pekebun dalam mengelola tanah perkebunan	Petani perkebunan masih mengandalkan kesuburan tanah secara alami
26.5.	Ketersediaan/jumlah populasi ternak terutama sapi betina belum memadai	Banyak peternak yang beranggapan bahwa memelihara sapi betina kurang menguntungkan Pola peternakan di Kota Balikpapan hanya untuk penggemukan hewan ternak
26.6.	Ketersediaan pakan ternak untuk sapi dan kambing masih minim	Minimnya minat peternak untuk menanam pakan hijauan ternak Kurangnya lahan untuk menanam pakan hijauan ternak
26.7.	Risiko kesehatan hewan dan ternak masih tinggi	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan hewan secara berkala
<b>27.</b>	<b>Perdagangan</b>	
27.1.	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kurang optimal	Nilai Ekspor produk UMKM masih rendah Kurangnya fasilitas penunjang serta promosi perdagangan luar negeri
27.2.	Belum maksimalnya kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok	Implementasi hasil kajian kerja sama dengan daerah pemasok di Indonesia belum optimal
27.3.	Tidak menentukannya ketersediaan dan pelaporan stok bahan pokok	Pemenuhan stok bahan pokok terkendala musim tanam dan pengaruh iklim Belum optimalnya kerjasama antar-PD dalam memenuhi kebutuhan stok pangan Belum tersedianya dokumen Kajian Penelitian Neraca Pangan
27.4.	Belum semua pelaku usaha memiliki izin usaha	Pelaku Usaha belum memiliki TDPUD/izin usaha Belum semua pelaku usaha menjual produk sesuai dengan standar
27.5.	Belum tercapainya target UTTP	Kurangnya alat Uji Tera

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
		Kurangnya kesadaran pemilik/wajib tera
		Terbatasnya SDM
		Wilayah pengawasan yang sulit di jangkau
27.6.	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Berklasifikasi A masih rendah
		Belum adanya pasar berstandar SNI
		Minimnya pemeliharaan bangunan pasar
		Penataan pedagang informal masih belum maksimal
27.7.	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar	Penyelenggaraan sarana perdagangan masih belum maksimal
		Belum adanya kajian potensi pasar
		Belum optimalnya pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan sarana perdagangan
28.	<b>Perindustrian</b>	
28.1.	Kualitas Pelaku Industri Belum Memiliki Daya Saing yang Tinggi	Kurangnya kemampuan modal dan peralatan
		Kurangnya kapasitas SDM
28.2.	Masih Rendahnya Kualitas Produk dari Industri Kecil dan Menengah	Persyaratan ekspor yang sulit untuk didapatkan
		Bahan baku sulit untuk didapatkan
		Terbatasnya akses permodalan
28.3.	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Masih Terhambat Oleh Keterbatasan Fasilitas dan Akses	Fasilitas penunjang kegiatan sentra industri perlu untuk ditingkatkan
		Fasilitas penunjang kegiatan sentra industri perlu untuk ditingkatkan
		Ekspor produk belum optimal
28.4.	Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pengolahan	Pelaku usaha sulit untuk mengembangkan produk dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi
	<b>URUSAN PENUNJANG</b>	
29.	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b>	
29.1.	Belum optimalnya pendapatan daerah	Belum semua jenis pajak/retribusi memberikan kontribusi besar terhadap PAD/PD
		Perhitungan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum sesuai harapan daerah
		Menurunnya penerimaan pajak daerah khusus dalam masa pandemi Covid-19 (masalah khusus yang terjadi pada tahun 2020)
29.2.	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi daerah	Kurang tertibnya wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi
29.3.	Identifikasi objek pajak belum optimal	Belum adanya peta PBB-P2 di kota Balikpapan
		Tidak akurat dan tidak update-nya data objek pajak daerah (baik data pajak PBB-P2 maupun data pajak non PBB-P2)
		Belum adanya klasifikasi nilai pasar wajar properti Kota Balikpapan
29.4.	Besarnya piutang pajak daerah (khusus dari PBB-P2) sebagai akibat akumulasi piutang tahun-tahun sebelumnya	Belum terbayarnya piutang pajak
29.5.	Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam operasional pengelolaan pajak daerah	Belum tersedianya sarana pembayaran/perizinan yang mudah dijangkau
29.6.	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan sebagian pegawai/petugas di unit kerja BPPDRD	Terbatasnya SDM yang mumpuni terkait perpajakan daerah
30.	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan &amp; Pelatihan</b>	
30.1.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Masih rendah	Adanya perbedaan aturan terkait penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
		Masih kurangnya kedisiplinan pegawai
		Masih Kurangnya Perencanaan Kebutuhan ASN
30.2.	Nilai Indeks Sistem Merit Masih belum tervalidasi	Masih belum optimalnya sistem merit dilihat dari unsur penilaiannya
30.3.	Perkembangan Teknologi Menuntut Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Upaya pengembangan SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh ASN
		Pengembangan aplikasi daring untuk diklat masih dalam tahap proses pengembangan
30.4.	Integrasi Data Kepegawaian Belum Optimal	Proses integrasi data masih dalam tahap proses
		Belum optimalnya SDM yang ada terkait integrasi data
31.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	
31.1.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD Belum Optimal	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD Belum Optimal
		Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) saat ini sudah berada di level 3
		Penggunaan teknologi informasi dalam hal pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara efektif
		Capaian PD pada penilaian SAKIP yang masih perlu ditingkatkan
31.2.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Belum Optimal	Belum optimalnya proses audit kepada PD
		Fasilitas dan Sarana Prasarana belum sepenuhnya mendukung proses audit
31.3.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Konsisten, Terintegrasi dan Fokus pada Akar Masalah Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala pada aspek tertentu
		Masih kurangnya komitmen PD dalam mewujudkan unit kerja yang masuk dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
		Masih rendahnya implementasi budaya integritas

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2022 difokuskan pada **Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Kesehatan, Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur**. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi pada perekonomian global dan nasional sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.

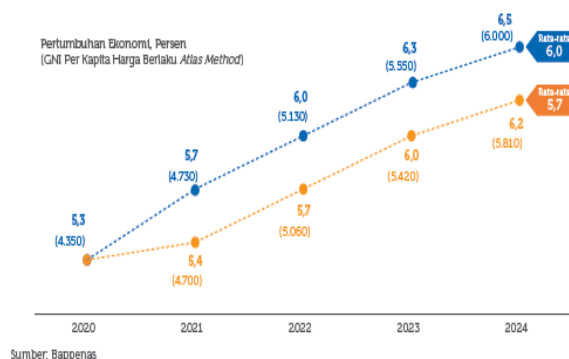
#### 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Sehubungan dengan ekonomi yang terkoreksi tajam pada tahun 2020 dan upaya perbaikan di tahun 2021, maka tahun 2022 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi untuk bangkit pasca pandemi *Covid-19* terutama dalam rangka mengejar target jangka panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi, seperti: jasa, perdagangan, industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap kembali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi *covid-19*.

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Vaksinasi yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021 yang lalu telah memberikan angin segar kepercayaan publik dalam upaya perbaikan ekonomi tahun 2022.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata **5,7-6,0%** per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per



**Gambar 3.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024**



kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas.

Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar **2,7%** pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *Covid-19*. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi *Covid-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *Covid-19* terjadi.

Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan



Sumber: Bappenas

**Gambar 3.2 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024**

*comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *Covid-19*. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

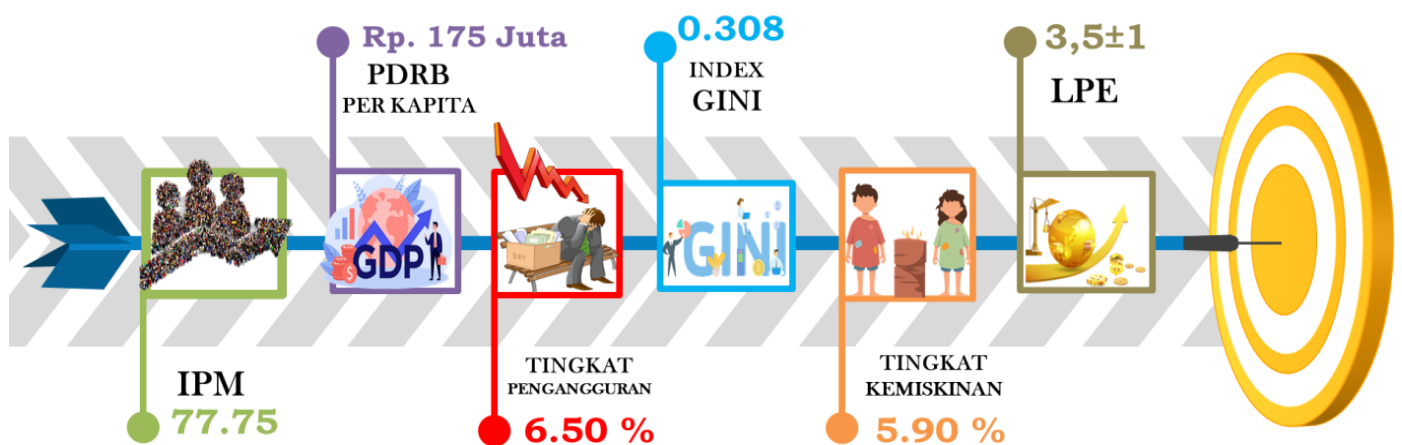
### 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi *COVID-19* atau dalam kondisi terakhir ini adanya resesi global dan nasional berupa antara lain pembatasan aktivitas sosial dan berkurangnya aktivitas ekonomi yang berdampak

pada penurunan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara masif. Respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara nasional dan daerah telah direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya realokasi dan refocusing APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Hasil evaluasi kebijakan jangka menengah daerah sampai dengan tahun 2020 juga menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak. Berikut adalah penyesuaian target indikator makro Kalimantan Timur untuk tahun 2023:

**Gambar 3.3 Penyesuaian Target Indikator Makro Kalimantan Timur Tahun 2023**



### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan, yakni Kota Balikpapan sebagai Kota yang Terkemuka, Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam program prioritas Wali Kota terpilih untuk mencapai sasaran pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yakni:

### **1. Balikpapan Kota MICE dan Wisata**

Mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terkemuka untuk penyelenggaraan MICE (*Meeting Incentive Conference Exhibition*) dan sebagai kota wisata bagi pengunjung domestik maupun mancanegara.

### **2. Balikpapan Kota Kreatif**

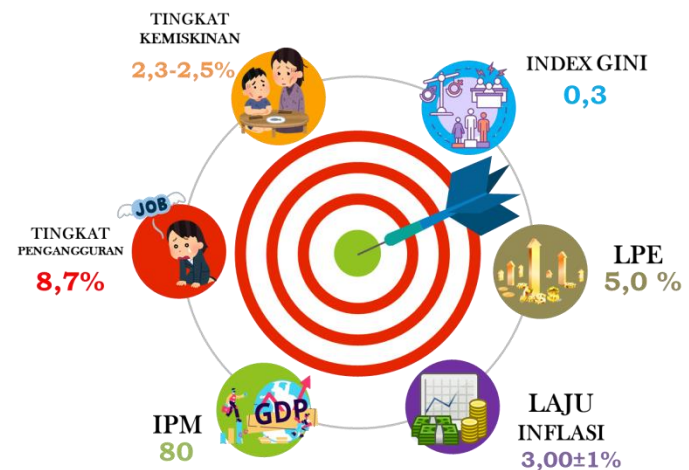
Menciptakan pasar yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang dilakukan melalui: penguatan wadah pusat pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, mendorong pemuda/pemudi Balikpapan terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif, dan membentuk rumah kreatif di setiap kecamatan Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM serta mengikuti event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mampu tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terutama didorong oleh penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan transportasi. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan masih relatif berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena perekonomian Kota Balikpapan bergantung pada pendukung sektor ekonomi Kalimantan Timur yang masih didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas serta pertambangan yang dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan permintaan secara global.

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2022 dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Gambaran umum pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2020 diperkirakan terkontraksi cukup dalam pada kisaran 1,8-2,3% karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan diproyeksi dapat tumbuh positif dua kali pada tahun 2021. Berbagai pihak yang terdampak yaitu:

1. Sektor rumah tangga diperkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena berbagai pembatasan aktivitas di luar rumah sehingga konsumsi rumah tanggayang menurun tajam.
2. Sektor UMKM dan pariwisata terpukul paling depan karena pembatasan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat.
3. Sektor korporasi diperkirakan mengalami tekanan. Untuk membuat korporasi atau pinjaman tetap bisa mengalir, diperlukan langkah-langkah revolusioner dari Bank Indonesia, perbankan dan OJK agar kredit tidak kemudian ditutup yang menyebabkan ekonomi makin macet.

Meskipun mengalami kontraksi di tahun 2021, perekonomian Kota Balikpapan diproyeksi tetap tumbuh positif yang didorong oleh pembangunan RDMP RU V Pertamina yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh pada kisaran **5,0%** dengan tingkat inflasi yang diharapkan dapat terkendali stabil dalam sasaran inflasi nasional yakni **3,0 ± 1%**. Sebagaimana disajikan dalam tabel Capaian dan Target makro Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2022 di samping ini:



**Gambar 3.4 Target Indikator Makro Kota Balikpapan**

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

#### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2021 dan berdasarkan hasil kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2019, oleh karena itu diperlukan beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapai Pendapatan Daerah yang lebih meningkat pada masa yang akan datang. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui
  - Pembenahan Manajemen data Penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif.
  - Pembentukan manajemen penerimaan PAD
  - Ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah terutama pajak yang memiliki potensi besar.
- b. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah
- c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.

- d. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- e. Mengembangkan alternative-alternatif pembiayaan pembangunan selain APBD, terutama melalui mekamisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005)**

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2018	2019	2020
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.230.736.621.233,10</b>	<b>2.469.528.492.671,86</b>	<b>2.340.933.449.547,01</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>646.868.407.485,10</b>	<b>764.087.241.241,05</b>	<b>503.777.309.492,01</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	474.455.854.717,30	565.236.192.479,07	417.326.622.082,10
4.1.2.	Retribusi Daerah	55.054.750.772,39	55.653.797.069,87	45.990.077.531,60
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.360.001.940,84	16.870.674.739,20	16.174.599.738,41
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.997.800.054,57	126.326.576.952,91	24.286.010.139,90
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.096.230.492.809,00</b>	<b>1.136.041.501.529,00</b>	<b>1.418.154.115.889,00</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	593.423.843.898,00	524.878.519.044,00	825.893.543.747,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	410.543.293.000,00	439.818.664.000,00	429.199.860.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	92.263.355.911,00	171.344.318.485,00	163.060.712.142,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>487.637.720.939,00</b>	<b>569.399.749.901,81</b>	<b>419.002.024.166,00</b>
4.3.1.	Hibah	3.300.000.000,00	67.556.501.863,81	6.960.000.000,00
4.3.2.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	266.019.978.000,00	298.759.062.038,00	230.943.325.166,00
4.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	167.488.330.939,00	46.534.186.000,00	71.303.699.000,00
4.3.4.	Bantuan Keuangan	50.829.412.000,00	156.550.000.000,00	109.795.000.000,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

Dari Tabel yang disajikan di atas diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mengalami Penurunan Sebesar Rp. 128.595.043.124,85 atau sekitar 5% dari Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019, yang mana Penurunan terbesar berasal dari sektor PAD dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah

**Tabel 3.2 Target Pendapatan Tahun 2021 - 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019)**

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
		TA 2021	TA 2022
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.179.152.180.000,00</b>	<b>2.033.633.850.200</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>692.000.000.000,00</b>	<b>750.000.000.000</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	515.000.000.000,00	564.793.951.000
4.1.2.	Retribusi Daerah	63.503.000.000,00	60.359.349.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.400.000.000,00	18.040.000.000
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.097.000.000,00	106.806.700.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.482.652.180.000,00</b>	<b>1.277.633.850.200</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.085.206.990.000,00</b>	<b>982.234.141.200</b>
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	1.000.995.174.000,00	898.022.325.200
4.2.1.01.01.	Dana Transfer Umum	816.383.932.000,00	898.022.325.200
4.2.1.01.02.	Dana Transfer Khusus	184.611.242.000,00	0
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah	84.211.816.000,00	84.211.816.000
<b>4.2.2.</b>	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>295.399.709.000</b>
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	268.545.190.000,00	295.399.709.000
4.2.2.02.	Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020



Arah kebijakan pendapatan daerah tidak lepas dari realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya dan proyeksi dari tahun berjalan, tetapi untuk target pendapatan tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Target penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar Rp. 2.179.152.180.000 atau mengalami penurunan sebesar 7% dibandingkan penerimaan pendapatan daerah tahun 2021 yang mencatat realisasi sebesar Rp. 2.033.633.850.200;
- b. Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 27% dibanding rencana tahun 2021 sebesar Rp 692.000.000.000 dengan kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar 74%;
- c. Pada pos Pendapatan Transfer untuk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.277.633.850.200 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan rencana tahun 2021 sebesar Rp. 1.482.652.180.000;
- d. Padapos Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan dengan rencana tahun 2021 sebesar Rp.4.500.000.000.

Pendapatan daerah Kota Balikpapan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2020, Kota Balikpapan masih bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat yang ditunjukkan dengan masih tingginya porsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 52%.

**Tabel 3.3 Kontribusi Pendapatan Daerah 2018-2020**

Kode Rek	Uraian	Kontribusi per Tahun			Rerata 2018 - 2020
		2018	2019	2020	
4	Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%
4.1	PAD	29%	31%	22%	27%
4.2	Dana Perimbangan	49%	46%	61%	52%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22%	23%	18%	21%

Sumber : BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

### 3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

**Tabel 3.4 Kontribusi Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Tahun 2017-2020**

Kode Rek	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
2	Belanja Daerah	100%	100%	100%	100%
2.1	Belanja Tidak Langsung	37%	38%	36%	49%
2.2	Belanja Langsung	63%	62%	64%	51%

Sumber: LRA 2017 s/d 2020 BPKD Kota Balikpapan, 2020

Dari sisi realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2018 – 2020) rata – rata mengalami penurunan sebesar 3% per tahun namun porsi Belanja Langsung (>60%) masih mendominasi belanja daerah sebagaimana ditunjukkan pada table di atas, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan Program/kegiatan daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi Kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Belanja daerah tahun 2022 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Belanja Tahun 2022 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Belanja Kota Balikpapan pada tahun 2022 antara lain:

- a. Kota Balikpapan menjadi salah satu kota yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, sehingga arah kebijakan bukan hanya berdasarkan RPJP Kota Balikpapan Tahun 2018 – 2026 tetapi juga menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja kepala daerah terpilih periode 2020 – 2025;
- b. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional yaitu untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan focus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM;
- c. Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
- e. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

**Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005)**

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2018	2019	2020
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.120.970.176.539,75</b>	<b>2.408.461.974.189,33</b>	<b>1.936.089.049.053,89</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>801.071.613.902,85</b>	<b>868.514.656.220,34</b>	<b>945.022.780.484,44</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	726.387.818.545,85	745.557.517.225,34	694.874.157.082,31
5.1.3	Belanja Subsidi	800.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	68.336.760.377,00	114.721.353.514,00	107.882.901.771,00

5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.092.093.800,00	2.228.826.800,00	40.627.750.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	998.806.796,00	3.141.232.527,00	1.271.220.600,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.456.134.384,00	1.865.726.154,00	100.366.751.031,13
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.319.898.562.636,90</b>	<b>1.539.947.317.968,99</b>	<b>991.066.268.569,45</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	212.923.025.231,30	230.111.913.445,35	191.524.145.434,49
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	498.634.959.485,02	622.064.723.166,62	389.442.969.987,78
5.2.3	Belanja Modal	608.340.577.920,58	687.770.681.357,02	410.099.153.147,18

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

**Tabel 3.6 Target Belanja Tahun 2021 - 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019)**

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
		TA 2021	TA 2022
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.283.785.370.623,00</b>	<b>2.445.988.110.400,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.827.574.312.467,00</b>	<b>1.964.642.385.900,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	808.480.943.400,00	869.117.014.155
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	885.776.348.467,00	952.209.574.600
5.1.4	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.075.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	131.857.020.600,00	141.746.297.145
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	460.000.000,00	494.500.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>433.219.356.113,00</b>	<b>468.345.724.500</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	41.512.587.084,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.261.492.787,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.297.113.541,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	229.286.724.101,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.861.438.600,00	
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.991.702.043,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	22.991.702.043,00	13.000.000.000,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Sumber : BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

**Tabel 3.7 Alokasi Belanja Mandatory Tahun 2022**

APBD	Gaji	Belanja		2.445.988.110.400
DISDIKBUD	339.226.942.800	265.073.057.200	604.300.000.000	%
DINKES	66.500.000.000	300.000.000.000	233.500.000.000	24,71
RSUD	14.500.000.000	105.000.000.000	90.500.000.000	13,81
RSKB	7.450.000.000	21.250.000.000	13.800.000.000	

Untuk mandatory spending tahun 2022, Kota Balikpapan mengalokasikan pada anggaran Pendidikan dan Kesehatan dengan persentase 24,71% atau Rp. 604.300.000.000,- untuk Pendidikan dan sekitar 13,81% atau sebesar Rp. 337.800.000.000,- untuk Kesehatan.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk

memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan dari tahun 2018 -2020 bersumber dari Silpa, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk proyeksi struktur pembiayaan daerah tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 29% dari tahun 2021. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dikeluarkan adalah untuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke BUMD (Perusda dan PDAM Tirta Manggar) sebesar Rp 26.000.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 206% dari tahun 2021 sebesar Rp. 8.500.000.000.

**Tabel 3.8 Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 - 2020 (Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005)**

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2018	2019	2020
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>181.868.841.735,20</b>	<b>262.765.199.606,15</b>	<b>309.171.718.088,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>199.228.175.213,20</b>	<b>291.631.786.428,55</b>	<b>323.831.718.088,00</b>
6.1.1.	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	199.228.175.213,20	291.631.786.428,55	323.831.718.088,00
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17.359.333.478,00</b>	<b>28.866.586.822,40</b>	<b>14.660.000.000,00</b>
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17.359.333.478,00	28.866.586.822,40	14.660.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>181.868.841.735,20</b>	<b>262.765.199.606,15</b>	<b>309.171.718.088,00</b>
	<b>SilPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>291.635.286.428,55</b>	<b>323.831.718.088,68</b>	<b>714.016.118.581,12</b>

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

**Tabel 3.9 Target Pembiayaan Tahun 2021 - 2022 (Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019)**

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
		TA 2021	TA 2022
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>104.633.190.623,00</b>	<b>412.354.260.200,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>113.133.190.623,00</b>	<b>438.354.260.200,00</b>
6.1.1.	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	113.133.190.623,00	438.354.260.200,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>26.000.000.000,00</b>
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	8.500.000.000,00	26.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>104.633.190.623,00</b>	<b>412.354.260.200,00</b>
<b>6.3</b>	<b>SilPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran No 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, perodesasi RPJMD berdasarkan kepada masa jabatan bukan berdasarkan kepada waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, **penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.**

VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 – 2025 sebagai berikut: “MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”. Pada penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.**

**Gambar 4.1 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2022**



Untuk mewujudkan VISI tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dirumuskan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan dan 9 (Sembilan) Program Prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

**Gambar 4.2 5 Misi Pembangunan Kepala Daerah terpilih**

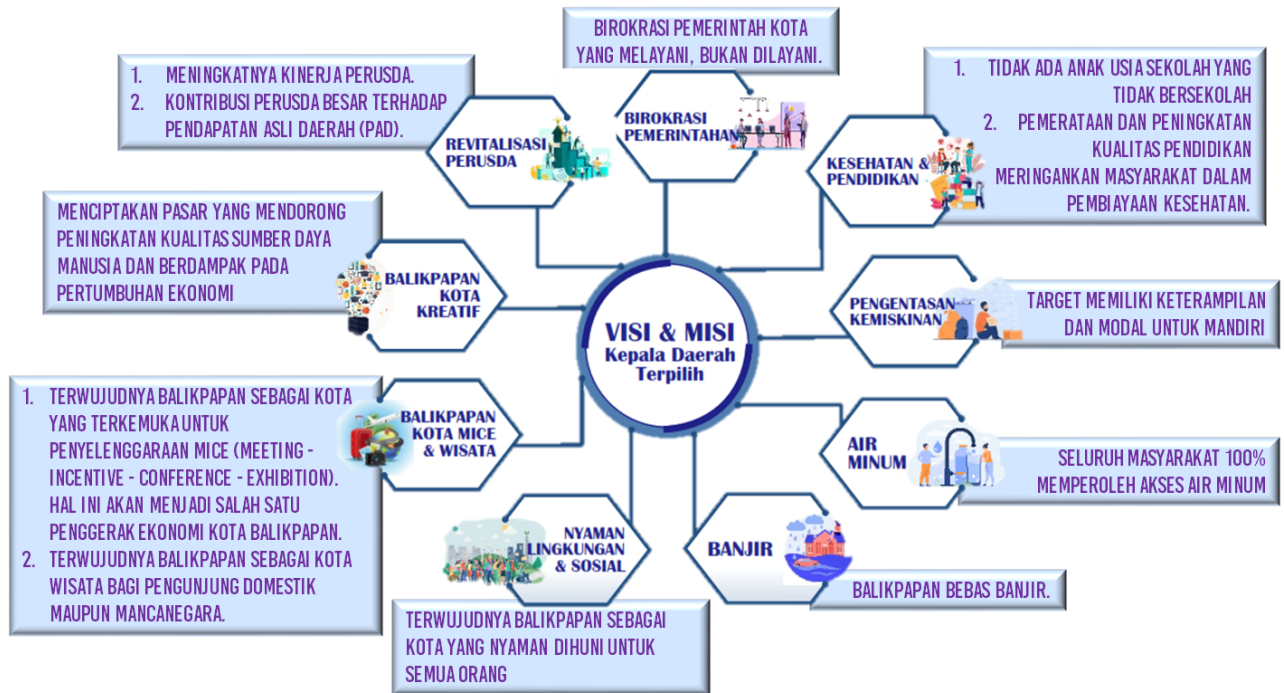
### VISI RPJPD TAHUN 2005 - 2025

MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI ( JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN





Gambar 4.3 9 Program dan Sasaran Prioritas Kepala Daerah terpilih



Berdasarkan program dan sasaran tersebut, adapun yang menjadi arahan fokus Pembangunan dan titik berat dalam 9 Program Prioritas Kepala Daerah terpilih, yaitu:

**1. BIROKRASI PEMERINTAHAN:**

- Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi.
- Menumbuhkan "trust" yang tinggi dari masyarakat melalui:
  - Inspirasi "trust" di lingkungan Pemerintah Kota;
  - Klarifikasi tentang tujuan organisasi;
  - Penyelarasan sistem dan prosedur;
  - Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat.

**2. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN:**

*Kesehatan:*

- Subsidi iuran BPJS;
- Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan;

*Pendidikan:*

- Bantuan subsidi SPP untuk sekolah swasta SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/Aliyah;
- Peningkatan Insentif Guru dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK;

3. Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya, dan kualitas proses belajar mengajar);
4. Optimalisasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

### **3. PENGENTASAN KEMISIKINAN:**

1. Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Bantuan Permodalan untuk UMKM.

### **4. AIR MINUM:**

1. Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum;
2. Supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik. Kebutuhan 2200 liter/detik;
3. Kekurangan akan dipenuhi dari supply dengan pipanisasi dari waduk Sungai Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik.

### **5. BANJIR:**

1. Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal;
2. Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur;
3. Percepatan revitalisasi drainase di seluruh kota Balikpapan;
4. Percepatan pembangunan Bendali/Bozem di lingkungan kawasan perumahan.

### **6. NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL:**

1. Mewujudkan Kota Layak Anak, Layak Difabel dan Layak Lansia;
2. Mewujudkan Kota Sehat, bebas Narkoba dan HIV/AIDS;
3. Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.

### **7. BALIKPAPAN KOTA MICE DAN WISATA:**

1. Pembangunan Trade Centre dan Balikpapan Convention Centre (BCC);
2. Penetapan City Branding Balikpapan;
3. Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan Internasional;
4. Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE;
5. Pengembangan objek wisata;
6. Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai Balikpapan;
7. Pembangunan Kampung Budaya;
8. Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata;
9. Peningkatan kualitas hotel dan restoran.

### **8. BALIKPAPAN KOTA KREATIF:**

1. Penyelenggaraan Pekan Ekonomi Kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif:
  - a. Arsitektur, b. Desain, c. Periklanan, d. Kuliner, e. Televisi, radio, f. Musik dan Seni, g. Multimedia, h. Permainan interaktif, i. Fashion dan Kerajinan;
2. Mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif;

3. Membentuk Rumah Kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM;
4. Mengikuti event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri.

#### 9. REVITALISASI PERUSDA:

Restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda untuk memberi kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Perusda yang akan dibentuk:

- Perusda Pergudangan;
- Perusda Pasar;
- Perusda Gas;
- Perusda Parkir;
- Perusda Perdagangan; dan
- Perusda Pelabuhan.

#### 4.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022



**Gambar 4.4 Tujuh Prioritas Nasional**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh Prioritas Nasional.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022, adapun Tema RKP Tahun 2022 adalah:

**Gambar 4.5 Tema RKP 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**



Berdasarkan Tema RKP Tahun 2022 tersebut, Fokus RKP tahun 2022 terbagi dalam 10 Major Project, yaitu Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Kesehatan.

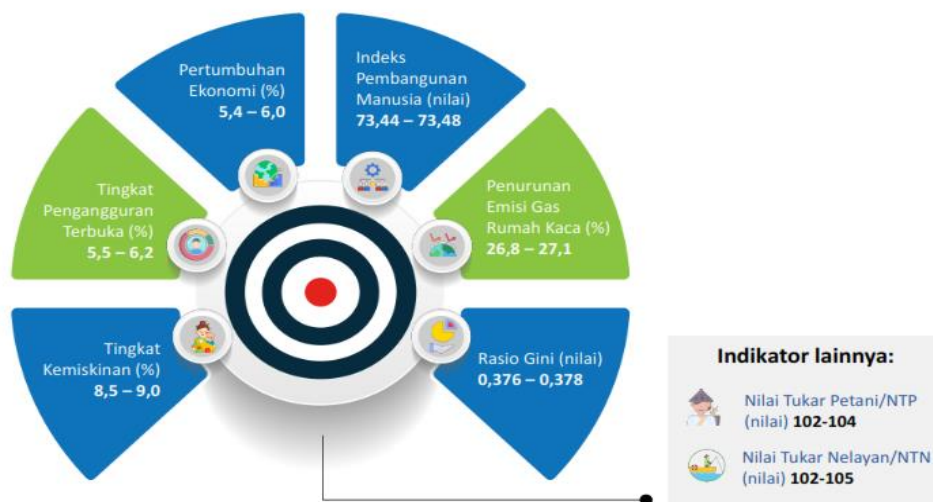
**Gambar 4.6 Fokus Pembangunan RKP Tahun 2022**



Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di tahun 2022, antara lain meliputi:



**Gambar 4.7 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022**



\*) Sasaran Pembangunan Tahun 2022 disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna 3 Maret 2021 dan telah mendapatkan arahan Bapak Presiden RI

Sedangkan untuk Target Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah:

**Tabel 4.1 Target Pembangunan Nasional Tahun 2022**

No.	Indikator	Target Pembangunan Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,21
2	Tingkat Kemiskinan(%)	8,5 - 9,0
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 - 6,2
5	Indeks Gini Ratio	0,376 - 0,378

**4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Pemaparan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	S1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	S2. Peningkatan daya saing generasi muda	7. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
		8. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	S3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		10. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan





TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya
		12. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	S4. Optimalisasi pengarusutamaan gender	14. Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
<b>Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	S5. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	15. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
		16. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	S6. Perluasan kesempatan kerja	17. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		18. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
<b>MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan</b>		
<b>Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	S7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	19. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		20. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	S8. Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	21. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		22. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor
		23. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	S9. Pengembangan industri unggulan provinsi	24. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		25. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		26. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	S10 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	27. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		28. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
	S11. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	29. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
		30. Peningkatan produksi ternak berkualitas
	S12. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	31. Pengembangan Kawasan Peternakan
		32. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		33. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		34. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
	S13. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	35. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		36. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
37. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan		
S14. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	38. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
	39. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	
	40. Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
	41. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	
	42. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	S15. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	43. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
		44. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
		45. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	S16. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	46. Pemantauan komitmen perizinan
		47. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman Modal
		48. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		49. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis Digital
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	S17. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	50. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		51. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
		52. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim
	S18. Pengembangan ekonomi kreatif	53. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		54. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
		55. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim
		56. Penguatan daya saing produk sub Kreatif Kaltim

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan</b>		
<b>Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/ kewilayahan.	S19. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	57. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan 58. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	S20. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	59. Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	S21. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	60. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		61. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		62. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	S22. Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	63. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
S23. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	64. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya	
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/ kewilayahan.	S24. Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	65. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	S25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	67. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
		68. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang
		69. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
<b>MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	S26. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim 71. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	S27. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	72. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 73. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
<b>MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>		
<b>Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	S28. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	74. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam urusan administrasi publik 75. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT 76. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	S29. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	77. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur 78. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	S30. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	79. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan memperhatikan urutan waktu. Arah kebijakan juga menjadi instrumen untuk memetakan kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan agar tetap dalam koridor untuk memecahkan berbagai akar permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Di tingkat provinsi, di samping akan dioperasionalkan oleh perangkat daerah, arah kebijakan juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten/Kota. Berikut merupakan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 4.3 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan**

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
1	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura
2	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
3	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
4	Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
5	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
6	Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
  - b. Kesejahteraan social.
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib;
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan;
  - c. Pelayanan urusan penunjang.
3. Aspek Daya Saing Daerah
  - a. Kemampuan Ekonomi;
  - b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator	Target Tahunke-				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
2	Tingkat Kemiskinan(%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi nonmigas dan Non Batubara(%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
4	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15
6	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

#### 4.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPJMD Kota Balikpapan sedang dalam Penyusunan sehingga penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan

RKP Tahun 2022, dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 berdasarkan penggalan keempat RPJPD 2005-2025 adalah Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Upaya mewujudkan keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Wali Kota Terpilih Kota Balikpapan tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5. Keselarasan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Wali Kota Terpilih Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN.	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1 Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Pendidikan 2 Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Kesehatan
	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Infrastruktur Berkelanjutan
	Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Hidup
	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Nilai Perdagangan dan Jasa Unggulan

Adapun keterkaitan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta fokus Pembangunan Daerah tahun 2022 dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

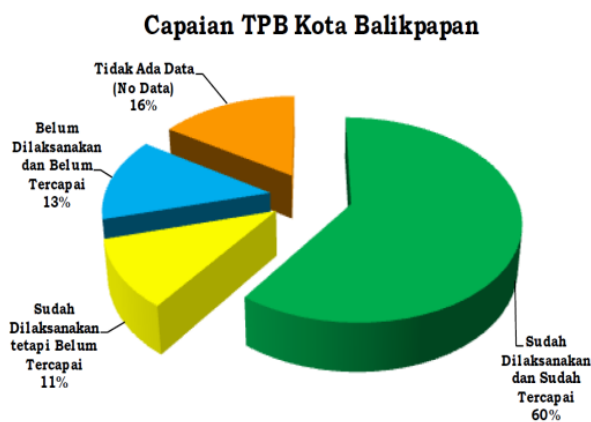
**Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta Fokus Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005-2025)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan ,sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Pendidikan seluruh Masyarakat
		Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Kesehatan (penguatan Sistem Kesehatan yang inklusif)
		Penguatan Jaring Pengaman Sosial
		Perluasan Kemitraan dan Pelatihan Kerja
Pemantapan pencapaian kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Percepatan Penanganan Banjir dan Percepatan Pemenuhan Layanan Air Bersih
Memantapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	Percepatan Perwujudan Kota Balikpapan sebagai Kota Sehat dan Nyaman yang Inklusif

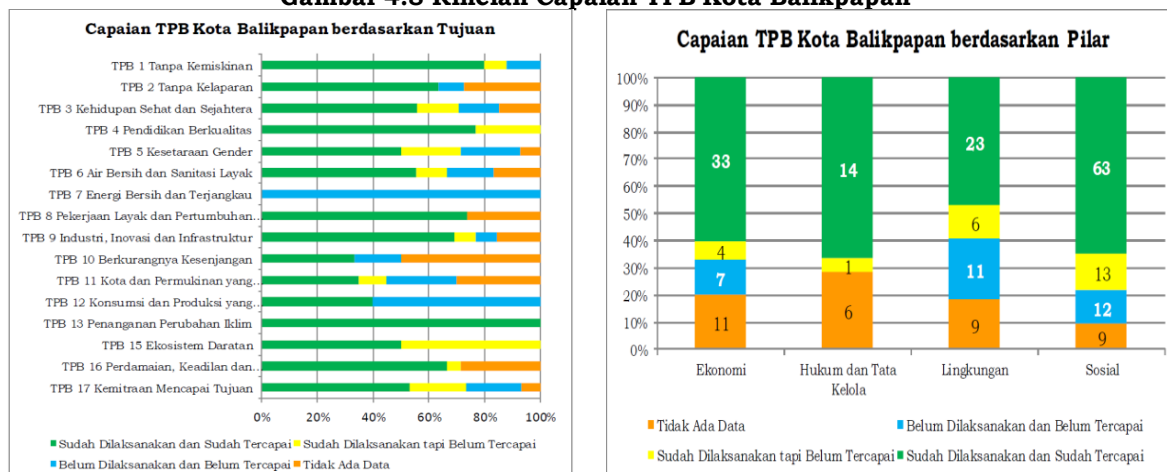
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005-2025)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.		
mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dan Revitalisasi Perusda
mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan padas emangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif,aman,tertib dan tentram	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Penguatan kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Birokrasi Pemerintahan

#### 4.1.4 Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

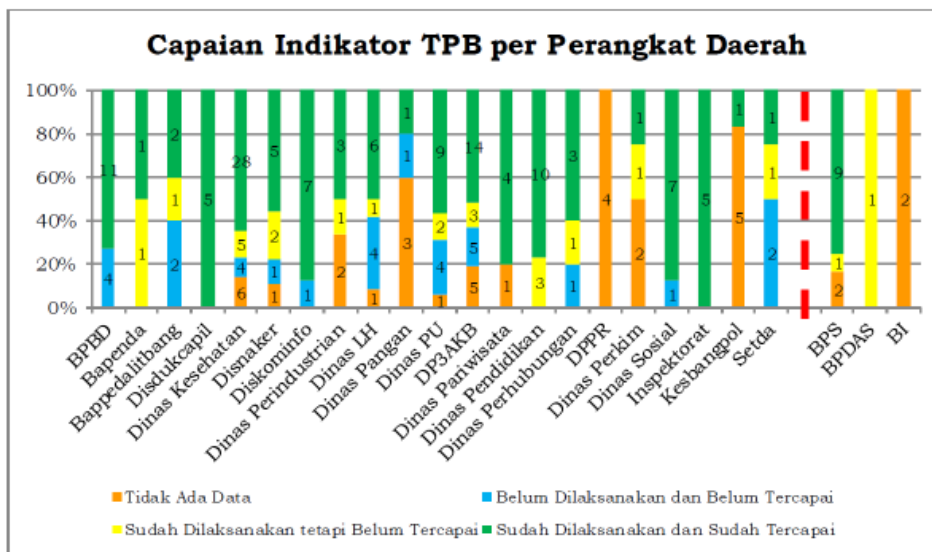
Dari hasil analisis dari 22 Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat 133 indikator (58%) indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Selanjutnya sebanyak 24 indikator (10%) indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, sebanyak 30 indikator (15%) yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. dan sebanyak 35 indikator (17%) indikator TPB yang tidak terdapat data. Selanjutnya, capaian indikator TPB untuk tiap Perangkat Daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Gambar 4.8 Rincian Capaian TPB Kota Balikpapan







Secara rinci keseluruhan indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebanyak 24 indikator disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 4.6 Indikator TPB Yang Belum Tercapai Pada Per Perangkat Daerah**

TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PD PELAKSANA
1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di manapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Ketenagakerjaan
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Ketenagakerjaan
3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat;(2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPAKB
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPPPAKB
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DPPPAKB
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan

TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PD PELAKSANA
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan dan Permukiman
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	
15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretaris Daerah
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota yang mengalami dampak terparah pandemi *Covid-19* untuk wilayah regional pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini akan mempengaruhi pola intervensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penetapan prioritas untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19* khususnya perlambatan perekonomian. Pemerintah Kota harus melakukan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi sosial dan pencegahan *Covid-19* melalui rencana aksi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu:

**“PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, REFORMASI BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA Mendukung Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Reformasi Struktural”.**

Penentuan prioritas pembangunan harus mampu menyelesaikan permasalahan strategis kota. Adapun permasalahan strategis pembangunan Kota Balikpapan diuraikan sebagai berikut:

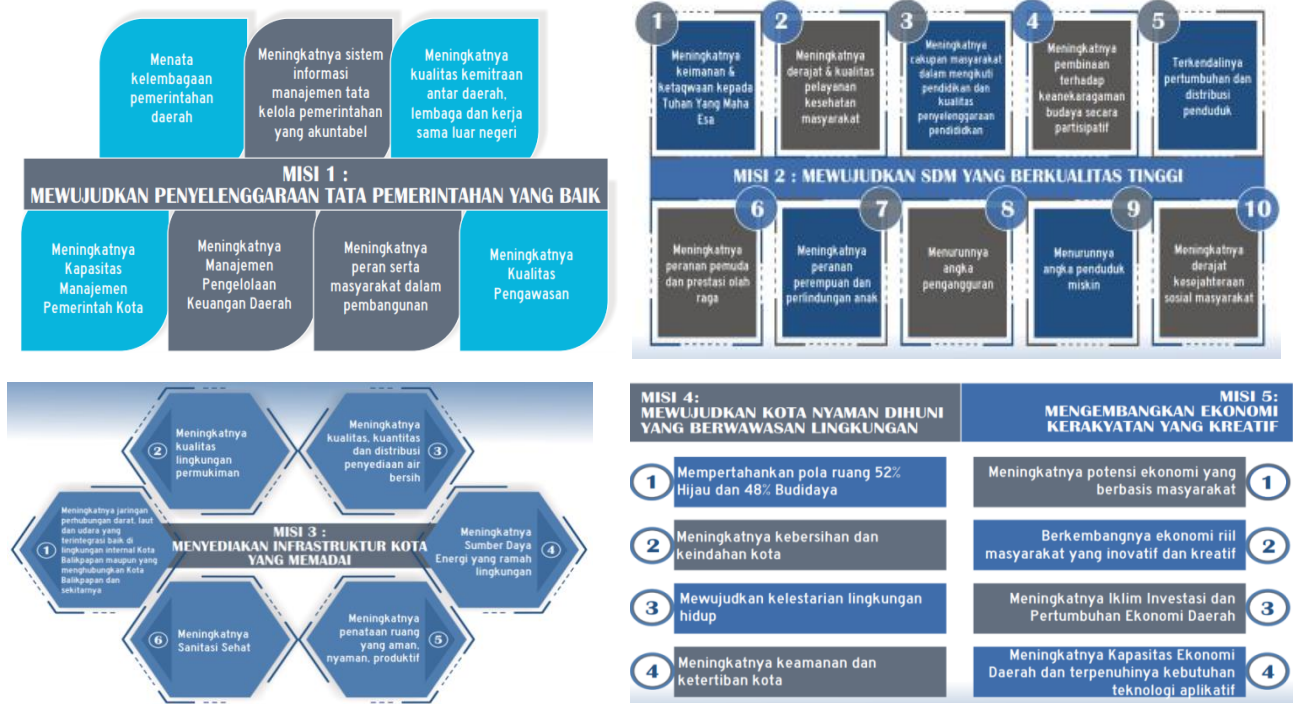
**Tabel 4.7 Permasalahan Strategis Pembangunan Kota Balikpapan**

No	Urusan	Permasalahan
1	PENDIDIKAN	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2	KESEHATAN	Penanganan dan pencegahan COVID-19
		Konvergensi percepatan pencegahan Stunting
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

No	Urusan	Permasalahan
		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM	Adanya daerah yang tergenang/banjir
		Belum optimalnya layanan air minum
		Belum optimalnya pembangunan jalan untuk mendukung fungsi kawasan strategis
		Masih adanya ODF / BABS
		Belum optimalnya sarana gedung pemerintah
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum terpenuhinya SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Adanya kendala dalam penegakan peraturan daerah
		Belum memadainya jumlah personel penegak peraturan daerah terhadap jumlah penduduk kota
		Kurangnya tingkat tanggap darurat dalam penanganan bencana dan kebakaran
6	SOSIAL	Belum adanya pusat rehabilitasi sosial terpadu
		Pendataan PMKS masih dilakukan secara manual
		Kondisi ekonomi sosial selama masa pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
7	KETENAGA KERJAAN	Masih tingginya TPT
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
9	PANGAN	Belum adanya Regulasi Pangan Daerah
10	LINGKUNGAN HIDUP	Terbatasnya ketersediaan air baku
		Timbulan sampah di pesisir/laut
		Belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga
		Pengupasan lahan yang tidak terkendali
11	PERTANAHAN	Adanya rasionalisasi akibat pandemi dan pembaharuan dokumen teknis pengadaan lahan
12	PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA	Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
		Masih terdapatnya perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun
		Rendahnya presentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
13	PERHUBUNGAN	Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan
14	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Belum terintegrasinya sistem informasi layanan publik
15	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Belum tersusunnya Data Terpadu Koperasi UMKM
16	PENANAMAN MODAL	Masih adanya regulasi daerah yang belum sinkron
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda meningkat
		Belum terselenggaranya pekan olahraga tingkat kota
18	KEBUDAYAAN	Registrasi Cagar Budaya
19	PERPUSTAKAAN	Meningkatkan minat baca masyarakat
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rendahnya produksi perikanan tangkap
21	PARIWISATA	Belum optimalnya kualitas destinasi pariwisata
22	PERTANIAN	Terdapat alih fungsi Lahan Baku Sawah seluas 99,81 Ha
		Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan belum optimal
		Ketersediaan/jumlah populasi ternak terutama sapi betina belum memadai
23	PERDAGANGAN	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan
24	PERINDUSTRIAN	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Masih Terhambat Oleh Keterbatasan Fasilitas dan Akses
25	KEUANGAN	Belum optimalnya pendapatan daerah

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2022, sebagai berikut:

**Gambar 4.9 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022**



Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan 9 (sembilan) prioritas kepala daerah terpilih, maka program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.10 Program dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih**

Dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih, pada tahun 2022 di fokuskan kepada 4 (empat) Prioritas yang di kelompokkan berdasarkan tingkat urgensi/kepentingannya yang di jabarkan sebagai berikut:





Gambar 4.11 4 Prioritas Kota Balikpapan tahun 2022

## 1. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemerataan Akses Pendidikan

### • Penguatan Sistem Kesehatan

#### 01 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

- Subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III (PBPU)
- PBPU Kelas III yang didaftarkan Pemda (PBI/Gakin) = 17.637 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 7.87 Miliar/Tahun
  - PBPU Kelas III peserta Aktif = 91.152 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 41,34 Miliar/Tahun
  - PBPU Kelas III Peserta Tidak Aktif/ Menunggak = 45.753 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 20,75 Miliar/Tahun

Catatan:

- › Perlu ada pembeda antara PBI dan Kelas III (Non-PBI) yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota.
- › Terdapat PBPU Kelas III Tidak Aktif (masih menunggak)
- › Untuk perlakuan terhadap Peserta yang menunggak perlu dilakukan verifikasi guna memutuskan apakah masyarakat yang menunggak akan dibantu pembayaran iuran BPJS atau dibantu pembayaran iuran setelah pelunasan tunggakan secara mandiri.

#### 02 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA

- Pengembangan RSKB Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, dimana
- Rencana Lahan berada di Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
  - Asset dimaksud telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - Kajian kelayakan Tahun 2020.
  - Penyusunan Masterplan, DED, AMDAL, dan ANDALALIN dilaksanakan pada Tahun 2021.

#### PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 03

- Belum tersedia Layanan Kesehatan Rujukan/ Rumah Sakit di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
- Belum tersediannya Kajian Kelayakan Rencana Pembangunan RSUD di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.

### • Pemerataan Akses Pendidikan

#### SUBSIDI UANG SEKOLAH (SPP) 1

bagi siswa di sekolah swasta (SD & SMP)

Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta sebesar:

**SD** opsi besaran subsidi Rp. 50.000 s.d Rp. 500.000  
 $= 26.327 \times 500.000 \times 12 \text{ bulan} = 157.962.000.000,$   
 $= 26.327 \times 300.000 \times 12 \text{ bulan} = 94.777.200.000,$   
 $= 26.327 \times 100.000 \times 12 \text{ bulan} = 31.592.400.000,$   
 $= 26.327 \times 50.000 \times 12 \text{ bulan} = 15.796.200.000,$

**SMP** opsi besaran subsidi Rp. 100.000 s.d Rp. 750.000  
 $= 11.508 \times 750.000 \times 12 \text{ bulan} = 103.572.000.000,$   
 $= 11.508 \times 500.000 \times 12 \text{ bulan} = 69.048.000.000,$   
 $= 11.508 \times 300.000 \times 12 \text{ bulan} = 41.428.800.000,$   
 $= 11.508 \times 100.000 \times 12 \text{ bulan} = 13.809.600.000,$

“Diasumsikan persentase daya serap Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75%”

#### 2 SUBSIDI UANG GEDUNG / PANGKAL

bagi siswa sekolah swasta kelas 1 SD dan kelas 7 SMP

Memberikan Subsidi Uang Gedung/Pangkal bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta, dengan rincian sebagai berikut:

**SD (Kelas 1)**  
 opsi besaran subsidi Rp. 500.000 & Rp. 750.000  
 $= 6546 \times 750.000 = 4.909.500.000,-$   
 $= 6546 \times 500.000 = 3.273.000.000,-$

**SMP (Kelas 7)**  
 opsi besaran subsidi Rp. 800.000 & Rp. 1.000.000  
 $= 6.316 \times 1.000.000 = 6.316.000.000,-$   
 $= 6.316 \times 800.000 = 5.052.800.000,-$

“Diasumsikan persentase daya serap pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75%”

#### PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA 3

bagi siswa sekolah negeri & swasta (kelas 1 SD dan kelas 7 SMP)

**SD** = 25.411 x 3 set x Rp. 300.000,-  
 = Rp. 22.869.900.000,-

**SMP** = 24.238 x 3 set x Rp. 300.000,-  
 = Rp. 21.814.200.000,-

“3 set Seragam Sekolah Putih Merah/Biru, Batik, Pramuka/ Olah Raga”

#### 4 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

1. Fokus pada lokasi/wilayah Kelurahan dengan cakupan layanan pendidikan yang masih rendah serta memiliki jumlah persebaran penduduk usia sekolah yang tinggi.
2. Diprioritaskan menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah kota dan fasilitas umum yang telah dihibahkan kepada pemerintah kota atau tanpa melakukan kegiatan pembebasan lahan.

	SD & SMP TERPADU	SMPN KEC. BALIKPAPAN BARAT
RENCANA LOKASI :	Fasum Balikpapan Regency	Pemukiman Atas Air Margasari (milik pemerintah kota)
LUAS LAHAN :	15.027 m2	1,6 Ha
KEL. KEC. :	Kel. Seppingan Baru, Kec. Balikpapan Selatan	Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat



**5 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB)**

1. Berdasarkan analisa dan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SD kekurangan sebanyak 64 RKB, sedangkan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SMP kekurangan sebanyak 70 RKB.
2. Sebagai solusi jangka pendek, dan hanya dapat dilakukan pada sekolah yang masih memiliki lahan yang luas.

**6 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK**

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	JUMLAH GURU		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		PNS	NON PNS	
I	SD Negeri	2,307	123	2,430	1,149	1,158	2,307
II	SMP Negeri	883	56	939	605	278	883
III	TK Negeri	10	20	30	9	1	10
IV	KESETARAAN (SKB)	99	111	175	68	31	99

- Formasi penerimaan PNS (khususnya guru) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak berimbang dengan kebutuhan guru di daerah.
- Pemenuhan kebutuhan PNS tetap sesuai dengan kuota dan formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB.
- Perlu dilakukan upaya khusus dalam pengusulan formasi penerimaan PNS (Khususnya guru).

BKPSDM mengusulkan formasi PPPK untuk tenaga pendidik ke BKN dan MENPAN RB pada tahun 2021 sebanyak 559 orang, dengan

- Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Dasar sebanyak 30 Pendidik dan 4 Tenaga Kependidikan.
- Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Menengah Pertama sebanyak 47 Pendidik dan 8 Tenaga Kependidikan.

**7 PENINGKATAN KUALITAS / PELAKSANAAN SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA**

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	KUALITAS PENDIDIK YANG BERKUALIFIKASI S1/D-IV		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		S1/D-IV	BELUM S1/D-IV	
I	SD	3,310	215	3,524	3,104	206	3,310
II	SMP	1,679	181	1,860	1,629	50	1,679
III	TK / PAUD	1,232	80	1,312	894	338	1,232
IV	KESETARAAN	209	187	456	183	86	209

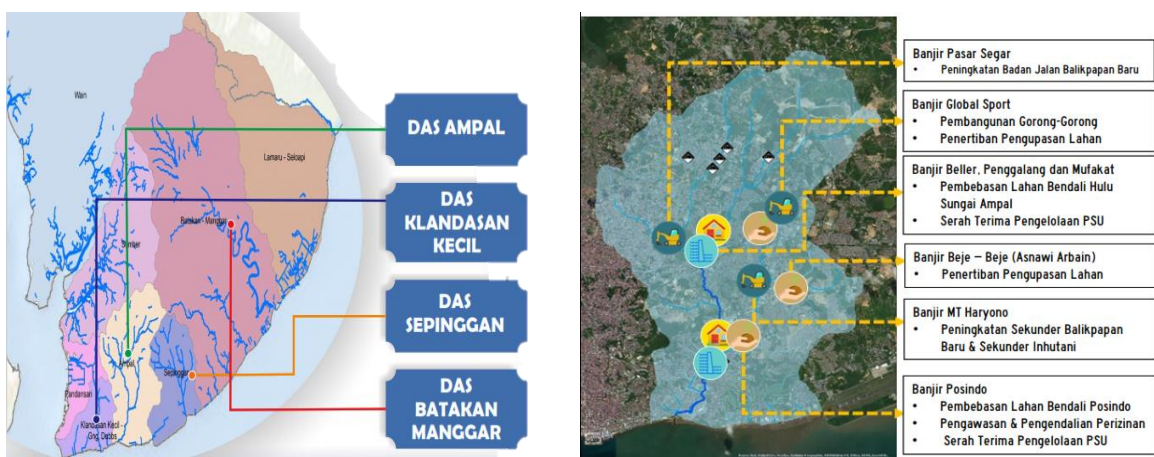
**2. PENGENDALIAN BANJIR**

Pengendalian Banjir dilakukan dengan mengendalikan penyebab dan memberikansolusi dari permasalahan, setelah diketahui penyebab dan permasalahan banjir, langkah langkah yang diambil dalam menangani permasalahan tersebut, berikut disajikan Penyebab, Permasalahan dan langkah langkah penanganannya:

**Gambar 4.12 Penyebab,Permasalahan dan Langkah-langkah Penanganannya**



**Gambar 4.13 Kawasan DAS Prioritas dan Rencana Keterpaduan Program DAS AMPAL**



### 3. PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM

Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan, karena masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh masyarakat Kota Balikpapan. Grafik berikut menunjukkan ketersediaan air baku serta kebutuhannya pada tahun 2018-2021 dan proyeksinya pada tahun 2022-2026.



**Gambar 4.14 Ketersediaan Air Baku Serta Kebutuhannya Pada Tahun 2018-2021 Dan Proyeksinya Pada Tahun 2022-2026**

Proyeksi ketersediaan air baku yang sama pada setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, beberapa upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.15 Ketersediaan Air Baku Di Kota Balikpapan**

### 4. BALIKPAPAN KOTA KREATIF

Beberapa isu dan permasalahan yang ada pada bidang Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.16 Isu dan Permasalahan di bidang Ekonomi Kreatif**

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain

1. Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan dan Industri Kreatif
2. Melibatkan aktor ABCGM (Aktor ABCGM yang dimaksud adalah Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media).

Konsep integratif ini diterapkan melalui:



**Gambar 4.17 Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM**

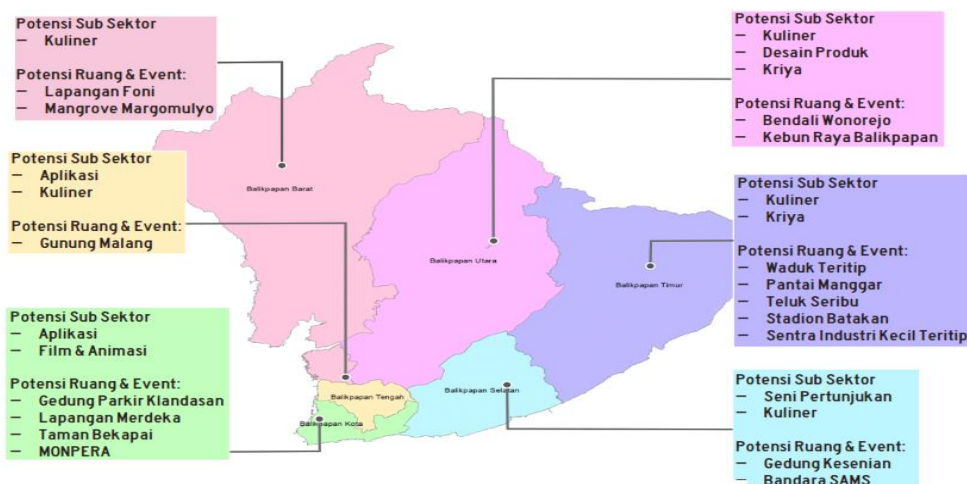
3. Mendorong Sub Sektor Prioritas yang mentrigger Ekonomi Berkelanjutan



**Gambar 4.18 Sub Sektor Prioritas Ekonomi di Kota Balikpapan**

4. Mengembangkan Potensi Ruang Kreatif

Pengembangan potensi ruang kreatif berdasarkan potensi wilayah pada masing-masing Kecamatan yang ditunjukkan pada peta berikut:



**Gambar 4.19 Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah Per Kecamatan**



#### 4.2.2 Integrasi Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Penyusunan RKPD setiap tahun harus dilakukan penyesuaian Prioritas dan Sasaran Daerah/Kota dengan Prioritas dan Sasaran Pemerintah Provinsi maupun Nasional. Sampai dengan batas waktu penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat belum menetapkan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2022, maka harmonisasi dan penyesuaian prioritas dan sasaran pembangunan antara Daerah/Kota dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat akan dilakukan setelah Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.

Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan**

No	Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kota
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 6,0	3,5±1	5,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,5 – 6,2	6,50	8,7
3	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0	5,90	2,3-2,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,21	77,75	80
5	Indeks Gini Ratio	0,376 – 0,378	0,308	0,3

Proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan berada pada masa transisi, dimana RPJMD tahun 2016-2021 telah berakhir dan RPJMD yang baru belum tersusun. Namun proses pembangunan Kota Balikpapan tahun 2022 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya. Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022, dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.10 dibawah ini:

**Tabel 4.9 Persandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 Dengan RPJMN 2020-2024**

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01</b>	<b>01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
	01	01-Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)			
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)			
	02	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )			
	03	03-Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)			
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)			
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)			
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</li> </ul>



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	04	04-Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
	05	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen )	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen )	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	06	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT





NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Riset
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyediaan Infrastruktur
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pemberian Insentif
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perlindungan Hasil Kreativitas
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan antar Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	07	07-Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)			
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)			
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)			
	08	08-Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)			
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)			
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)			
	<b>02</b>	<b>02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>				
	01	01-Pembangunan Wilayah Sumatera				

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	02	02-Pengembangan Wilayah Jawa-Bali				
	03	03-Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara				
	04	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan				
	05	05-Pembangunan Wilayah Sulawesi				
	06	06-Pembangunan Wilayah Maluku				
	07	07-Pengembangan Wilayah Papua				
	<b>03</b>	<b>03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>				
	01	01-Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
	02	02-Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial			
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah			
	03	03-Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
			Insidensi hepatitis B (persen)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai
			Persentase tekanan darah tinggi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Persentase rumah sakit terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
	04	04-Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	05	05-Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
	06	06-Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)			
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha			
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)			
			Bidang tanah yang didistribusi			

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Bidang tanah yang dilegalisasi			
	07	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 200			
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 300			
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 500			
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)			
	<b>04</b>	<b>04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
	01	01-Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	02	02-Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	n/a	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	03	03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	04	04-Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual





NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	<b>05</b>	<b>05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	n/a	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	01	01-Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
	02	02-Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			
03	03-Infrastruktur Perkotaan		Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
04	04-Energi dan Ketenagalistrikan		Rasio elektrifikasi (%)			
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)			
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)			
05	05-Transformasi Digital		Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Persentase pengguna internet (Persentase)	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	<b>06</b>	<b>06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>				
	01	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
			Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebun Raya
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	02	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)			
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)			
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran





NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
	03	03-Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)			

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)			
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)			
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)			
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)			
	<b>07</b>	<b>07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
	01	01-Konsolidasi Demokrasi	n/a			
	02	02-Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional			
	03	03-Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum			
	04	04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	05	05-Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index			
			Global Terrorism Index			
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian			
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN 2020-2024		RKPD 2022		
		PRIORITA NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



**Tabel 4.10 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2022**

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN & PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	254.941.541.801
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.469.500.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	423.500.000
	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Kualitas Layanan Kesehatan	Memberikan Kemudahan Akses Layanan Kesehatan Seluruh Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	246.809.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.210.000.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.235.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.750.000.000
PENGENDALIAN BANJIR	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Memperkuat Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	112.000.000.000
PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM	Meningkatkan Infrastruktur Kota Berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.750.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.000.000.000
BALIKPAPAN KOTA KREATIF	Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Nilai Perdagangan dan Jasa Unggulan	Revitalisasi Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.330.200.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.125.400.000



PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.100.000.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.750.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	800.000.000

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 selain mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional juga mempertimbangkan telaahan terhadap pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Balikpapan. Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan Reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan Tahun 2022 secara rinci disajikan pada sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi SIPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
1	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Badan jalan terjadi kerusakan dan perlu ditinggikan untuk menghindari banjir	Jl. BLORA III, RT.25, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
2	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Draianse RT 19 belum pernah di bangun pemerintah, sering longsong dan mengancam keselamatan warga	Jl. Gunung Empat gang Kenanga RT 19, Kota Balikpapan	50 cbm	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
3	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase RT 18 yang belum pernah di bangun pemerintah, air megikis dan sering longsor	Jl. Gunung Empat RT 18 dekat SMPN 9, Kota Balikpapan	50 cbm	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
4	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	drainase rusak dan buntu sehingga banjir	Jl. Gunung Empat RT 16 simpang SMPN 9, Kota Balikpapan	49 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
5	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Pelebaran drainase sering banjir	Jl. Gunung Satu RT 08 depan SD 005, Kota Balikpapan	45 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
6	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki jembatan kayu Ulin dan semenisasi jalan/gang	Jl. Letjend Suprpto RT 12 perumahan atas air, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
7	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan / gang karena sudah rusak dan menghambat aktifitas warga	Jl. Letjend Suptapto RT 02 Gang Mawar Gunung Traktor, Kota Balikpapan	68 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
8	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase di RT 30, saat ini rawan longsor karena air tidak terkendali	Jl. Gunung Empat gang Radial RT 30, Kota Balikpapan	50 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
9	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan turap pada jalan gang RT 23 , badan jalan longsor dan badan jalan semakin menyempit	Jl. Gunung Empat RT 23, Kota Balikpapan	50 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
10	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase di RT 02 dekat masjid al furqon yang masih alami sering longsor dan membahaya bangunan	Jl. Sido Mulyo RT 02 masjid Al Furqon, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
11	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	pembangunan Bedali drnagn membebaskan tanah warga di lingkungan RT 13 utk mengatasi banjir di RT 15,16,17 dan 50	Jl. Gunung Empat RT 13 Belakang SMA 8, Kota Balikpapan	1500 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
12	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase agar tidak longsor tanah dan bangunan rumah warga RT 48	Jl. Patriot RT 48, Kota Balikpapan	50 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
13	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaiki semenisasi jalan gang Jl. Sido Dadi RT 40	Jl. Sido Dadi RT 40, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
14	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	dinding drainase sudah rusak dan buntu	Jln.Lumba Lumba RT.11, Kota Balikpapan	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
15	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	drainase masih alami	Jl.Cakalang RT.23, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
16	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	drainase buntu dan rusak	Jl.Baronang RT.21, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
17	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	apabila hujan akan terjadi banjir, volume air dan drainase tidak seimbang	Jl.Mulawarman Gg.Setuju RT.07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
18	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	jika terjadi hujan akan banjir	Jl.Tengiri VI RT.24, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
19	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum dilakukan semenisasi	RT. 31 BDS 2, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
20	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum dilakukan semenisasi dan jalannya rusak	RT. 32 BDS 2, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
21	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum disemenisasi	RT. 35 BDS 2, Kota Balikpapan	98 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
22	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	perbaiki jalan jembatan kayu dan sekaligus semenisasi jembatan daerah pesisir selama ini kurang lebin 40 thn tdk pernah merasakan jalan semenisasi yang jembatan 1 m sampai 3m	JALAN RT 01 DAMAI, Kota Balikpapan	195 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM	
23	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan masih asli blm ada pengerasan dan semenisasi cor sehingga jalan tdk layak	jalan rt 14 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
24	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	drainase lingkungan yang mana sudah tdk menampung air krn kecil sehingga meminta di perbesar dan tingginya	jalan rt 14 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
25	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	perbaiki jembatan lingkungan sekaligus semenisasi cor lingkungan pesisir dengan lebar jalan 1 sampan 3 meter	jalan rt 09 ulu, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
26	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	permohonan jembatan lingkungan dibuatkan pagar jembatan krn sering Anak kecil jatuh ke laut krn daerah pesisir	jalan rt 35, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
27	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	permohonan pembuatan pagar jembatan krn sering Anak kecil jatuh ke laut daerah pesisir	jalan rt 9, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
28	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	permohon pembuatan pagar jembatan krn sering Anak kecil jatuh ke laut daerah pesisir	jalan rt 01, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
29	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	permohonan perbaikan jembatan kayu tempat sandaran kapal nelayan dan turun naik nelayan	jalan rt 35, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
30	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi lingkungan gang 1 m sampai 2 m yang ada sudah rusak dan membutuhkan perbaikan kembali	jalan rt 25 ulu, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
31	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi gang lingkungan yang ada sudah rusak jd butuh perbaikan kembali	jalan rt 27 pagar hijau, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
32	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah dan rusak	Jalan Gang Wijayakusuma Rt 51, Kota Balikpapan	350 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
33	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Sering Banjir dan parit kiri kanan jalan sudah rusak	JL. Bukit Niaga RT.16 Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	120 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
34	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Belum ada drainase	Jl. Siaga RT.08, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	120 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
35	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada parit	Jl. Jandam RT.08, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
36	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase	Jl. Blora II RT.24, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
37	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Parit rusak dan perlu ditambah tutup parit untuk memperlebar akses jalan	Jl. Gajah Mada RT.26, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	100 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
38	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase	Lingkungan RT.31, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	80 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
39	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase	Jl. Jend. Sudirman Gg. An-nash RT.29, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	40 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
40	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase	Lingkungan RT.28, Prapatan, Kota Balikpapan	40 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
41	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase dan penambahan tutup pada saluran untuk memperlebar akses jalan	Samping Hotel Sagita RT.38, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	100 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
42	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Drainase kecil dan selebihnya masih alami	Lingkungan RT.54, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	30 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
43	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	JL. Batu Raden RT.23, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
44	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi Jalan	Perum Polda Jalan Wira Bumi, Kota Balikpapan	126 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
45	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Pembuatan Drainase yang rusak	Jalan Taman Sari, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
46	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase Lingkungan	Perum PGRI Blok L RT.10, Kota Balikpapan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
47	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan belum di lakukan pengerasan	Jalan Soekarno Hatta Gang Cecep, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
48	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Semenisasi Jalan	Jalan Soekarno Hatta Gang Prihatin RT.36, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
49	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan Taman Sari Blok A RT.28, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
50	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan	Jalan Projakal Gang. RT.31, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
51	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. M.R Iswahyudi Rt 03, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
52	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Pembuatan Drainase	Jl. M.R Iswahyudi Rt 03, Kota Balikpapan	150 1 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
53	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase Lingkungan	Jl. Taman Sari RT.22, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
54	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase Alami	Perum PGRI Blok L1 RT.13, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
55	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki jalan lingkungan	Jalan Projakal Km.5,5 GG.SS 2 RT.55, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
56	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pengecoran Jalan Lingkungan	Jl. Perjuangan RT. 33, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
57	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	pembuatan jembatan kayu lingkungan akibat musibah kebakaran	jalan rt 8 ulu, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
58	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	jembatan sudah bergerak ketika dilewati perlu perbaikan atau buat baru	jln.perjuangan rt. 33, Kota Balikpapan	14 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
59	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	permohonan pembuatan siring jalan krn pengikisan Tanah membahaya pemukiman penduduk	rt 62 kland ilir, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
60	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	peningkatan semenisasi jln	jln.perjuangan rt.6, Kota Balikpapan	175 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
61	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan	rt 39, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
62	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan	rt 64, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
63	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan	rt 42, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
64	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaiki jalan lingkungan semenisasi karna sudah rusak	jalan rt 02 telagasari, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
65	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	pembuatan siring jalan krn rawan longsor jalan pemukiman	rt 10, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
66	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	pembuatan siring krn rawan longsor jalan bisa berdampak pemukiman	rt 45 telagasari, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
67	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	pembuatan draenase lingkungan blm ada sama sekali drenasenya masih alami air meluap kemanana	rt 53 Mulawarman, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
68	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	perlu perbaikan di perbesar drenase yang ada krn sudah tdk menampung jadi sering banjir dilingkungan	rt42, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
69	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase sempit serta rusak dan longsor menimbulkan banjir	Jl. Gunung Empat Menuju Masjid Darussalam RT 17, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
70	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan pada badan jalan	Lingkungan RT.28 Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	





No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
71	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikan drainase lingkungan karena rusak dan sedimen	Jl. Gunung Empat RT 13 Gang Atjuna, Kota Balikpapan	65 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
72	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pengerasan jalan dengan Hotmix karena jalan sudah rusak berlubang	Jl. Gunung Empat RT 13 Gang Arjuna, Kota Balikpapan	800 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
73	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan pada saluran drainase	Jl. Sahabat I, RT.44 Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
74	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	Jalan Projakal Km.5,5 Gang SS 5, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
75	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	Jalan Taman Sari Menuju Pondok Pinang RT.23, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
76	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Rusak	Jalan Pondok Pinang I - 5 RT.23, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
77	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Rusak	Jalan Pondok Pinang Dalam 2 RT.23, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
78	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Saat Hujan, Air Tergenang di Jalan	Jalan Kutilang Blok H, RT 22, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
79	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan Rusak	RT 34, Blok 6C, Kota Balikpapan	105 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
80	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Taman Sari RT. 28, Kota Balikpapan	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
81	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Pondok Pinang V RT. 68, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
82	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. soekarno Hatta Km. 10 Transad RT. 41, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
83	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase	Jl. Sunan Kalijaga RT. 39, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
84	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Kedu (kuburan Muslimin) RT. 30, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
85	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Batu Ratna RT. 15, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
86	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Soekarno Hatta Km 10 RT. 50, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
87	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Lanjutan yang telah disemenisasi	RT 30, Gang 9, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
88	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih tanah	RT 21, Gang Jaton, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
89	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Air tidak tertampung, sehingga sering terjadi banjir	RT 22, Gang Gondowangi, Kota Balikpapan	30 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
90	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan masih Tanah	RT 20, Gang Manunggal, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
91	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Jalanan Rusak Saat Hujan, Air tergenang	Jalan Savir IV Blok B6 RT 37, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
92	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan Rusak, Saat Hujan Air Tergenang	RT 02, Gang Dekarin 1, Kota Balikpapan	260 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
93	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Belum Pernah di Semenisasi	Jl. Mukmin Faisal, Blok C, RT 49 Perum Bukit Anugrah Indah,, Kota Balikpapan	115 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
94	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan cepat rusak berlubang maka megusulkan pengaspalan / hotmix	Jl. Gunung Empat menuju masjid Nur Salikin RT 45 dan RT 22, Kota Balikpapan	900 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
95	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan semenisasi jalan gang di RT 7 Marga Sari yang saat ini sdh rusak berlubang	Jl. letjend Soeprapto TR 07 Marga sari, Kota Balikpapan	65 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
96	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	permohonan perbaikan jalan lingkungan semenisasi krn yang ada Judah rusak	jalan rt 10 damai, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
97	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	perbaikan jembatan kayu yang ada rusak minta di perbaiki	jalan rt 6, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
98	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	belum adanya pembuangan limbah	jalan sepinggan RT 46 (gunung salasa), Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
99	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan rusak	jalan sepinggan RT 52, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
100	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah/pasir	jalan sepinggan baru RT 59 Gg. Perjuangan IV, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
101	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan RT 66, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
102	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan baru RT 30, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
103	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	melanjutkan	jalan sepinggan baru RT 59, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
104	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	gorong-gorong sangat sempit	jalan sepinggan baru RT 21 blok 1 E, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
105	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan baru RT 2 Gg. Pertiwi, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
106	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan baru RT 3 Gg. Puyuh, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
107	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	gorong-gorong sempit	jalan Tata Praja II RT 22 sepinggan baru, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
108	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	gorong-gorong sempit	jalan Tata Praja III RT 22 sepinggan baru, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
109	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 4 meter	jl. bhineka rt 30, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
110	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 5 meter	jl. merah delima rt 37, Kota Balikpapan	170 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
111	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 5 meter	jl. depan posyandu rt 37, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
112	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan besakih X lebar 4 meter	jalan besakih X rt 41, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
113	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 4 meter	rt 52, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
114	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan baru RT 37, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
115	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt 47 Jl. PGRI Blok R 12 B, Kota Balikpapan	150 1 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
116	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase	RT 09 Jl Mulawarman, Kota Balikpapan	150 1 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
117	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	peningkatan jalan semenisasi / aspal	jalan swadaya km 15 sungai wain rt.34, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
118	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaiki jalan lebar 4 meter	gang swadaya 1 rt 59, Kota Balikpapan	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
119	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 5 meter	gang arjuna rt 63, Kota Balikpapan	72 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
120	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	perbaiki jalan lebar 4,20 m	jalan kapuas rt 042 perum griya permata asri, Kota Balikpapan	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
121	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jl. al makmur semenisasi jalan di rt 31 kelurahan damai dengan panjang 125 meter lebar 4 meter	jl al makmur rt 31 kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
122	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan markoni atas kelurahan damai panjang jalan 150 meter lebar 3 meter	jl markoni atas rt 03 damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
123	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi kerusakan drainase di rt 21 klandasan ilir panjang 200 meter lebar 50cm	jl blora atas rt 21 klandasan ilir Balikpapan kota, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
124	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan rt 38 damai panjang 150 meter lebar 4 meter	jl bukit cinta perum bukit cinta damai bawah masjid baiturrahman ponpes	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
			sunan ampel, Kota Balikpapan			
125	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	drainase rusak hingga menyebabkan banjir di perumahan bukit cinta bawah masjid baiturrahman ponpes sunan ampel panjang kurang lebih 200 meter lebar 50 cm	jl bukit cinta rt 38 kelurahan damai perumahan bukit cinta bawah masjid Baiturrahman Ponpes sunan Ampel, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
126	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Parit rusak dengan dimensi P = 300m, L = 80cm, T = 1m	Gg. Sepakat I, RT 43 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
127	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi dan Pengerasan Jalan Arteri	Jalan Ksatrian RT.38, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
128	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Siringan rusak dengan P=60cm, T=2m	Gg. Pasar RT 43 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	60 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
129	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan utama dengan P = 300m, L = 4m	Jl. Wonorejo RT 34 & RT 35 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
130	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Kondisi parit masih alami dengan P = 150m, L = 60cm, T = 70cm	RT 21 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
131	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dengan P = 200m, L = 4m	RT 21 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
132	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih alami dengan P = 150m, L = 4m	RT 39 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
133	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Parit rusak dengan P = 20m, L = 0,5m, T = 0,5m	RT 59 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	20 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
134	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan menuju musholla dengan P = 50m, L = 4m	Jl. Wonorejo RT 35 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
135	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Pembuatan Drainase yang masih alami	Jalan Sunan Kalijaga (SPBU) Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	600 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
136	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembuatan Drainase Alami	Jalan Mulawarman (UPM) Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	600 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
137	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Tersebut sangat Becek dan Berlumpur pada saat hujan	Jalan Soekarno Hatta Blok SPBU Km.9 RT.39 (Azis), Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
138	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Belum adanya Pengerasan jalan sehingga berlumpur dan becek	Jalan Soekarno Hatta Blok SPBU Km.9 RT.39 (Wahyudi), Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
139	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Belum dilakukan pengersan Jalan	Jalan Soekarno Hatta Km.9 RT.39 (Merry), Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
140	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi kerusakan pada Drainase dan Penyempitan pada Drainase sehingga mengakibatkan ketika hujan, air hujan masuk ke sebagian rumah warga	RT. 27 dan RT. 28, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
141	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase yang ada sudah tidak bisa lagi menampung buangan air warga dan air hujan sehingga ketika hujan lebat mengakibatkan air hujan masuk ke sebagian rumah warga	RT. 84, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
142	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan sepinggan RT 49 , Melati, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
143	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	pembuangan air lingkungan	jalan sepinggan RT 49, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
144	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaiki jalan rusak	jalan Sepinggan RT 52, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
145	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalanan rusak	Sepinggan Raya RT 16, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
146	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan Sepinggan Raya RT 11, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
147	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	jalan Sepingga Raya RT 23, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
148	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	gorong-gorong sempit	jalan Damai Bahagia RT 41, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
149	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi parit rusak dengan ukuran P=250M,L=20-40cm, T=30-40cm	RT.41, Kota Balikpapan	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
150	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Parit rusak dengan P = 350m, L = 1m, T = 0,5m	RT 41 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	350 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
151	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih tanah dengan P = 200m, L = 4m	RT 50 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
152	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih tanah dengan P = 80m, L = 4m	RT 50 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	80 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
153	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Parit masih alami dengan P = 900m, L = 0,8m, T = 0,8m	RT 50 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	900 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
154	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Parit rusak dengan P = 1,5m, L = 0,9m, T = 0,7m	RT 34 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	150 centimeter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
155	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Kerusakan Drainase Dikarenakan Sudah Terlalu Lama Tidak Ada Perawatan	RT 15 Graha Indah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
156	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	perlu adangan siringan karna rawan longsor	jl.RE martadinata rt 19 kel.mekar sari kecamatan balikpapan tengah, Kota Balikpapan	30 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
157	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	banyak jalan berlubang	JL.RE Martadinata RT 19 Kel.Mekar Sari Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
158	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Pembangunan drainase di RT 37 saat ini rawan longsong karena masih alami	Jl. Bukiit Pelajar RT 37, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
159	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt 57 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	300 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
160	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaiki jalan	Rt 01 Kel. Karang jati, Kota Balikpapan	102 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
161	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase	Rt. 09 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	100 50	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
162	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Gang Andalas	Rt 61 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	100 62	DINAS PEKERJAAN UMUM	
163	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum dilakukan pengerasan jalan	Jalan Soekarno Hatta Blok UPM (Narti) Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
164	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan	Rt 08 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	100 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
165	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaiki Jalan	Rt 4 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	330 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
166	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt 23 Kel. Graha Indah Pondok Indah, Kota Balikpapan	200 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
167	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum dilakukan Semenisasi Jalan lingkungan	Jalan Soekarno Hatta Blok UPM (Narti Lanjutan) Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
168	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase	Rt. 20 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	81 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
169	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan berlubang	jalan Sungai angka RT 8, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
170	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaiki jalan rusak	jalan sepinggan RT 3, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
171	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Semen pada parit sudah rusak dengan P = 1,5m, L = 0,8, T = 0,6m	RT 34 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	150 centimeter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
172	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Parit rusak dengan P = 50m, L = 0,4m, T = 0,3m	RT 59 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
173	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Parit masih tanah/alami dengan P = 200m, L = 0,6m, T = 0,6m	RT 33 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
174	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen rusak sekitar 75% dengan P = 120m, L = 2-2,4m	RT 26 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
175	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Pembuatan saluran drainase baru dengan P = 100m, L = 0,8m, T = 0,8m	RT 26 Kelurahan Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
176	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Drainase yg ada masih alami dan seiring pertambahan penduduk sekitar membuat drainasa dangkal sehingga jika	RT 37, Kota Balikpapan	179 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
		hujan sdh lebih dari 1 jam terjadi banjir di lingkungan tsb Panjang = 179 M dan Lebar +/- 1 M				
177	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Dibutuhkan pengerasan jalan	Gang Arto Moro RT. 14, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
178	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah mengalami kerusakan dan dibutuhkan pelapisan baru	Gg. Selama 3 RT. 20, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
179	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah mulai rusak dan dibutuhkan pelapisan baru	Gg. Kakap 4 Jl. Lumbalumba RT. 08, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
180	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase lingkungan sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi.	Jl. Pemuda RT. 69, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
181	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan lama yang terbuat dari kayu sudah mengalami kerusakan	Jl. Pemuda Dalam RT. 68, Kota Balikpapan	47.5 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
182	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Parit yg ada masih alami dan belum ada penampang kiri/kanan dan dengan bertambahnya kepadatan penduduk air buangan makin banyak terlebih jika hujan, lokasi terletak di atas bukit. sehingga air mengikis halaman/ pinggir rumah sehingga tanah jadi lempung jika tdk segera di atasi tdk tertutup kemungkinan menjadi penyebab longsor. P= 100 M, Lebar - 70 cm & tinggi 70 cm	Jl.Taruna Sari RT 63, Gapura Merah, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
183	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Masih tanah dan perlu semenisasi	RT. 36 BDS 2, Kota Balikpapan	98 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
184	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak dan berlubang	jalan pesut rt 21, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
185	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jl. Lingkungan RT.01	RT.01 Kel. Sungainangka, Kota Balikpapan	78 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
186	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlu semenisasi rawan kecelakaan.	RT. 66 PT. HER 2, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
187	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan belum Semenisasi	Perum Daksa Timur Rt.05, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
188	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Penigkatan Jalan Semenisasi	Prona III RT.17, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
189	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan Semenisasi	Daksa Barat 7 RT.6, Kota Balikpapan	81 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
190	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan	Perum POKA Blok BAA RT.12, Kota Balikpapan	90 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
191	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan Lingkungan	Jl. Wiata I RT.23, Kota Balikpapan	88 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
192	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan	RT.24 Sepinggan raya, Kota Balikpapan	81 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
193	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan Masjid AT- Taulah	Jl. Masjid Al Taulah RT.7, Kota Balikpapan	76 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
194	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan	Jl. Tesora RT.01, Kota Balikpapan	81 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
195	Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Usulan utk pengadaan Kanopi di Hal SDN 021 Krg Jati, dima sebelumnya dst ada pohon Ketapang namun sdh di Tebang. Krn Lokasi sekolah krg luas sehingga ruang tunggu orgtua murid tdk ada dan tdk ada tempat kegiatan Olah Raga jika hujan/panas. Termasuk akan difungsikan sebagai tempat pertemuan orgtua dgn Guru. Panjang Kanopi = 16, Lebar = 6 M dan Tinggi = 4 M	Jl.Karang Jati RT 11 SDN 021, Kota Balikpapan	16 Meter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemerataan Akses Pendidikan
196	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jl. Lingkungan Belakan Perum POKA	belakang Perum POKA RT. 19, Kota Balikpapan	72 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
197	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan Perum POKA RT.14 Blok TA 1	Perum POKA RT.14 Blok TA 1, Kota Balikpapan	72 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
198	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl. Lingkungan Gang Kerukunan RT 37 GSU P= 60 M, L +/- 4 M	Jl. S.Parman Gang Kerukunan RT 37 GSU, Kota Balikpapan	70	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
199	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan masih tanah	gang damai 10 RT 65, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
200	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan Lingkungan	Perum BDS II Blok E1 Kakatua III, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
201	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan Lingkungan	RT.2, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
202	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatana Jalan Lingkuan	RT.3, Kota Balikpapan	72 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
203	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Jalan Lingkungan	Perum POKA Blok RB 80-90 RT.17, Kota Balikpapan	72 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
204	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jl Lorong dari Jl. Sulawesi RT 58 , Jl Perumahan warga yg sudah rusak dan berlobang sehingga kadang2 membuat pengendara motor jatuh apalagi jika hujan jalan licin P = 80 M, Lebar 160 cm	Jl. Sulawesi RT 58, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
205	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Belum ada saluran air	Daksa barat 2 RT.7, Kota Balikpapan	75 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
206	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Gang yg belum di Keraskan dan merupakan Jl. akses warga dari Perbukitan ke Jl.besar S.Parman P = 150 M , Lebar 1,5 M	Jl. S.Parman - Gang Darmo I RT 33 GSU, Kota Balikpapan	165 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
207	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi penyempitan drainase yang mengakibatkan banjir	jalan lumba-lumba RT 21, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
208	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kerusakan dinding drainase yang mengakibatkan penyumbatan aliran air	jalan pesut RT 21, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
209	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Parit yg ada masih merupakan alami belum ada penampang sisi kiri maupun kanan sehingga jika hujan air menggenangi jln gang yg ada . Panjang 90 M, Lebar /= 3 M Tinggi 70 cm	Gang Pembangunan RT 30 GSU, Kota Balikpapan	90 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
210	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan masih tanah, rusak dan berlubang dan tergenang air	jalan tanjung kelor RT 20, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
211	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi merupakan pemukiman baru sehingga yg ada baru jalan setapak , terletak Samping Apartemen Grand Valey Gn.Guntur P= 120 M, Lebar = 3 M ditambah dgn turaf	Gunung Sari Ulu RT 30 Dekat Apartemen Grand Valey, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
212	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan rusak dan berlubang	jalan pembangunan RT. 15, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
213	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan masih tanah dan rusak	RT 60, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
214	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	tidak ada saluran air atau drainase yang mengakibatkan banjir apabila hujan	RT.50, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
215	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	belum ada drainase	gang asoka rt 50, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
216	Belum terbangunnya jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan rusak dan berlubang	jalan selili rt 41, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
217	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan masih tanah apabila habis hujan jalan sangat becek dan jalan berlubang	gang rawasari RT. 07, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
218	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan rusak dan becek	jalan persatuan RT. 31, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
219	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase buntu karena dinding drainase runtuh	jalan persatuan RT. 31, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
220	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum	Jalan masih tanah	RT. 08, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
	dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)					
221	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Jalanan rusak	RT. 33, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
222	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Jalanan masih tanah dan rusak	RT. 16, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
223	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase buntu karena dinding drainase rebah dan dangkal	RT. 23, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
224	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak dan becek apabila habis hujan	RT. 25, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
225	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan rusak dan membahayakan pengguna jembatan yang melintas	jalan selili RT. 43, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
226	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan	RT. 27, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
227	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Drainase yang berada dipinggir jalan lingkungan masih bersifat alami.	Jl, Pemuda Dalam RT. 68, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
228	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	di daerah bukit cinta damai wilayah kelurahan damai beberapa rt belum terpasang pipa pdam	jl bukit cinta damai kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
229	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase di rt 13 kelurahan damai sudah tidak cukup menampung debit air yang ada panjang paret sekitar 180 meter dengan lebar 60cm	jl jendral sudirman belakang terminal BP RT 13 kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
230	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan yang rusak di jl blora rt 20 klandasan ilir	jl blora rt 20 klandasan ilir, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
231	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	drainase di jl blora rt 38 samping hotel sagita perlu dilakukan perbaikan	jl blora rt 38 klandasan ilir samping hotel sagita, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
232	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jembatan Ulin dan disemenisasi jalan / gang pantai RT 43 , saat ini belum pernah di bangun pemerintah	Jl. Bukit Pelajar Gang Pantau RT 43, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
233	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase dan Tutup Drainase Lingkungan, dengan ukuran P = 100 M, L = 41 Cm	RT.21, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
234	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Belum dilakukan Semenisasi di area tersebut	Jalan Blok UPM (Sutikno-Herani) Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
235	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Belum dilakukan Semenisasi di area tersebut	Jalan Soekarno Hatta Poros Km.9 ( Mislil) RT.39, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
236	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Belum dilakukan Semenisasi di area tersebut	Jalan Blok UPM (Nardi) RT.39, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
237	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase yang ada sudah rusak dengan ukuran P=63 M, , L 60 M, T= 60 Cm	RT.63, Kota Balikpapan	63 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
238	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan	Rt. 50 Jl. Sulawesi gang Rohani Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	300 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
239	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan belum dilakukan perkerasan sehingga sering tergenang air saat hujan.	Jalan Mulawarman Gg. Halmahera RT. 01, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
240	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi	Rt 69 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
241	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt. 37, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
242	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt 52, Kota Balikpapan	100 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
243	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan	Rt 55, Kota Balikpapan	100 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
244	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan	Rt 33, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
245	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan	Rt 21, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
246	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	Jalur PDAM	Rt 21, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
247	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	Rt. 11 Baru Ulu, Kota Balikpapan	200 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
248	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Perbaiki Drainase	Rt. 14 Kel. Baru Ulu, Kota Balikpapan	100 1 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
249	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Dibutuhkan pembangunan siring beton karena jalan lingkungan terancam longsor.	Jl. Pemuda RT. 10, Kota Balikpapan	150 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
250	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Gang	Jl. Sultan Hasanuddin Rt 34, Kota Balikpapan	150 2 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
251	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan Gang	Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 33, Kota Balikpapan	91 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
252	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaiki Gorong - Gorong / Parit	Jl Sultan Hasanuddin Rt 32, Kota Balikpapan	100 60 cm	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
253	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi pendangkalan pada drainase dan ujung drainase masih bersifat alami.	RT. 02, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
254	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Parit rusak dengan P = 200m, L = 0,4m	RT 07 Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
255	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen pada jalan sudah rusak dengan P = 50m, L = 4m	RT 10 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
256	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan yang rusak di rt 10 kelurahan telagasari panjang kira kira 250 meter lebar 1,5 meter	jalan tanjung pura rt 10 kelurahan telagasari, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
257	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	perlunya perbaikan dan pelebaran drainase di rt 31 kelurahan damai jl. al makmur dengan panjang 200 meter lebar 50cm	jl al makmur rt 31 kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
258	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	perlunya perbaikan dan pelebaran paret di rt 03 kelurahan damai jl markoni atas dengan panjang kurang lebih 200 meter lebar 60cm	jl markoni atas rt 03 kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
259	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	perlunya perbaikan drainase di jl. penggalang rt 30 kelurahan damai daerah bidan nila dengan panjang paret kira 200 meter lebar 60 cm	JL Penggalang rt 30 kelurahan damai (daerah bidan Nila) Balikpapan kota, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
260	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan di rt 18 kelurahan damai dengan panjang kira2 150 meter lebar 3 meter	rt 18 kelurahan damai, Kota Balikpapan	1 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
261	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Jalan utama belum dilakukan perkerasan	Jalan Utama RT. 25, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
262	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase saat ini rusak dan longsor menimbulkan banjir mengerus jalan / gang yang sudah di semenisasi dengan swadaya masyarakat,	Jl. Sidodadi RT 41 Baru Tengah, Kota Balikpapan	50 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
263	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan yang saat ini rusak berlobang	Jl. Sidodadi RT 40, Kota Balikpapan	70 CBM	DINAS PEKERJAAN UMUM	
264	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Perum Pondok Al-Ikhlas RT. 15, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
265	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berbahan latrit dan perlu dilakukan perkerasan.	Jalan Persawahan RT. 15 Gn. Binjai, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
266	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 43 Gang. Bakti, Gang. darma, Gang. Juwet, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
267	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan	Gang. Harmoni I RT. 72, Kota Balikpapan	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
268	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 34, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
269	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Batu Butok Gang. Tamrin RT. 84, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
270	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan Lingkungan	RT. 60 Gang. Halili, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
271	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 02, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
272	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 45, Kota Balikpapan	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
273	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 43 Gang. Diana (atas), Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
274	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 43 Gang. Diana (Bawah), Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
275	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Perumnas Gang. Bangkirai RT. 08, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
276	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT. 70 Blok K3, Kota Balikpapan	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
277	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mudah becek ketika hujan dan perlu di semenisasi ulang	Jalan Tanjung Kelor RT. 42, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
278	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berbahan latrit dan perlu dilapisi dengan beton.	Gg. Swadaya RT. 10, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
279	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dilakukan perkerasan.	RT. 04, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
280	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih berupa Tanah	Jl. Telagamas RT 04, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
281	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan dan mudah membuat genangan air ketika hujan.	RT. 07, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
282	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah mengalami kerusakan dan butuh pelapisan ulang.	RT. 29, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
283	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Rusaknya jembatan yang menjadi tambatan perahu para nelayan.	Jalan Selili RT. 43, Kota Balikpapan	1 jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM	
284	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pengaspalan jalan rusak dan banjir	Jalan Durian Rt 17 dan Rt 18, Kota Balikpapan	900 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
285	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	Gang Gama Rt 49, Kota Balikpapan	256 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
286	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	Rt 51 tembus jalan Prevab, Kota Balikpapan	525 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
287	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	Gang Masjid Khodijah Rt 58, Kota Balikpapan	180 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
288	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang dibangun 2004 mengalami kerusakan dan sebagian belum dilakukan perkerasan dengan beton.	Jalan Kenangan RT. 03, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
289	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jalan Sanggan Buana Gang. Mangga RT.35, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
290	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drainase sudah rusak dan perlu pembuatan dan perbaikan drainase dengan ukuran P=150 Meter,L=60 CM	Jl.Wolter Monginsidi RT.23 dan RT.21, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
291	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=185 M, L=125 M	Jl.Letjen Suprpto Gang Padaidi RT.9 dan RT.11, Kota Balikpapan	185 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
292	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=350 M, L=1,5 M	Jl.Letjen Suprpto Gang I dan Gang II RT.6, Kota Balikpapan	350 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
293	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=20 Meter, Lebar= 4 Meter	Jl.Letjen Suprpto Gang Kenang III RT.13, Kota Balikpapan	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
294	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan sudah mengalami kerusakan.	Jl. Baitul Makmur Gang Cinta Damai Blok G RT. 29, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
295	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan masih berbahan kayu dan ingin diganti ke beton.	RT. 44, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
296	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan belum dilakukan perkerasan	RT. 44, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
297	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan yang ada sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=120 Meter, L=1,5 Meter	Jl.Letjen Suprpto Gang Keluarga II dan VII Jalan RT.9, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
298	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan masih berbahan kayu dan ingin dibangun dengan beton.	RT. 01, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
299	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran	Jl.Letjen Suprpto Gang Perikanan RT.16, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
		dengan ukuran P=150 meter, L=1,5 Meter				
300	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah mengalami kerusakan dan butuh pelapisan ulang	Jl. Pasar Gunung Tembak RT. 21, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
301	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drianase yang ada sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=135 Meter, L= 80 CM	Jl.Letjen Suprpto RT.18, Kota Balikpapan	135 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
302	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan belum dilakukan perkerasan	RT. 18, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
303	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P= 70 Meter, L= 50 CM	Jl.Sultan Hasanuddin Jalan Gang RT.42, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
304	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan perlu semenisasi lingkungan dengan ukuran P=70 Meter, L=2 Meter	Jl.Sultan Hasanuddin Jalan Gang RT.24, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
305	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan perlu disemenisasi dengan ukuran P= 150 Meter, L= 1,5 Meter	Jl.Woltermonginsidi Jalan Gang RT.25, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
306	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drainase yang ada rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran P=100 Meter, L=1 Meter	Jl.Woltermonginsidi RT.39, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
307	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan perlu perbaikan semenisasi dengan ukuran P=150 Meter, L=1,5 Meter	Jl.letjen Suprpto Jalan Gang RT.51, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
308	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Jalan rusak dan perlu peningkatan pengaspalan jalan dengan ukuran P=215 M, L=4 M	Jl.Sepaku RT.14, Kota Balikpapan	215 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
309	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	Parit kecil tidak mampu menampung air bila curah hujan tinggi dikawatirkan menyebabkan banjir/longsor dengan ukuran P=150 Meter, L=100 Meter	RT.24, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
310	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan dan butuh pelapisan ulang.	RT. 30, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
311	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Drainase masih alami dan butuh pembuatan drainase dengan beton.	Gang Barokah 4 A RT. 10, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
312	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Saluran Draenase rusak dengan ukuran P=50 M, L=0,50 M,T=0,50 M	RT.05, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
313	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Draenase yang ada rusak , lantai parit dan dinding dengan ukuran P=100 M, L=0,80 M	RT.32, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
314	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Parit tanah/Alami dengan ukuran P=40 M, L=0,5- M, T= 1 M	RT.43, Kota Balikpapan	40 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
315	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan/Gang yang ada sudah rusak dan perlu perbaikan Jalan/gang (Semenisasi) dengan ukuran P= 25 M, L= 1,7 M, Tebal= 0.04 M	RT.17, Kota Balikpapan	25 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
316	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Draenase yang ada sudah rusak dengan ukuran P=80 M, L=50 CM, T= 70 CM	RT.66 GG I & IV, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
317	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Dranease sudah rusak dengan ukuran P=250 M, L= 0,40 M, T=0,70 M	RT.51, Kota Balikpapan	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
318	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	Gang masuk Rt 26, Kota Balikpapan	300 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
319	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	Semenisasi jalan Rt 37, Kota Balikpapan	300 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
320	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Belum dilakukan semenisasi jalan di tempat tersebut	Perum Taman Bukit Sari VIP II Blok Tunggal RT.25, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
321	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	jalan gang jalan Darma Bakti 1 Rt 33, Kota Balikpapan	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
322	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Llingkungan	Perum Taman Bukit Sari VIP II Blok Q2 RT.25, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
323	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Bolong-bolong dan belum pernah di semenisasi	RT 01, Gang Radar, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
324	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perum Taman Bukit Sari VIP II Blok Q2 RT.25	Perum Taman Bukit Sari VIP II Blok Q2 RT.25, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
325	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan Rusak Parak dan Belum Pernah di Semenisasi	RT 01, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	





No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
326	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan	Perum Graha Indah RT.01, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
327	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Draenase yang ada sudah rusak dengan ukuran P=-/+ 120 M	Jl.Sultan Hasanuddin RT.31, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
328	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi RT. 11 Tembusan RT. 12 Gang Kacang ibu Hayyin Mudho	RT. 11, Kota Balikpapan	125 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
329	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi	RT. 22 Gang. Puji Bpk. Joko, Kota Balikpapan	100 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
330	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi	RT. 22 bpk Joko gang. Subur, Kota Balikpapan	150 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	
331	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	Rt. 10 Bpk. Agus, Kota Balikpapan	150 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
332	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Masih Alami, belum dilakukan pengerasan	Gang Cemerlang RT 45, Jl. Wahab Syahrani, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
333	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaikan Jembatan akses jalan nelayan	RT. 46 Bpk. RT Kamaluddin, Kota Balikpapan	70 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
334	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 07, Kota Balikpapan	150 5	DINAS PEKERJAAN UMUM	
335	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 30, Kota Balikpapan	150 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
336	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 09, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
337	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan terbangun dari swadaya masyarakat dan belum dilakukan perkerasan secara keseluruhan	Gang Insan Cedikia, RT 38 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
338	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 08, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
339	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 28, Kota Balikpapan	130 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
340	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 40, Kota Balikpapan	120 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
341	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 12, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
342	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 31, Kota Balikpapan	120 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
343	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	RT. 60, Kota Balikpapan	150 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
344	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Draenase sudah rusak dengan ukuran P=50 M, L=0,50 M, T = 0,70 M	RT.07, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
345	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	Perum Taman Bukit Sari Vip II RT.25, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
346	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Belum adanya drainase	Jalan Sangga Buana RT.35, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
347	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase	Jalan Taman Sari RT.22, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
348	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase Lingkungan	Jalan Taman sari RT.22, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
349	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase	Perum PGRI Blok K1 RT.13, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
350	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase Lingkungan	Perum PGRI Blok N1 RT.13, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
351	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Pembangunan Drainase	Perum PGRI Blok M1 RT.13, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
352	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jalan PDAM Km.12 RT.15, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
353	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan rusak dan masih tanah	jalan swadesa RT 04, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
354	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan Lingkungan	Jalan Transad Km.08 (Gang Bugis) RT.04, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
355	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase Samping hotel sagita	RT. 38 JL. Mayjen Sutoyo, Kota Balikpapan	100 8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
356	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan jalan	RT. 24, Kota Balikpapan	30 1.5	DINAS PEKERJAAN UMUM	
357	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan jalan gang mawar	RT. 2 Telaga sari, Kota Balikpapan	165 5	DINAS PEKERJAAN UMUM	
358	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Parit	RT. 2, Kota Balikpapan	33 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
359	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Peningkatan Parit/ Drainase/ Perbaikan	RT. 15, Kota Balikpapan	120 2	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
360	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan jalan Trotoar	RT. 24, Kota Balikpapan	45 1.5	DINAS PEKERJAAN UMUM	
361	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan jalan	RT. 26, Kota Balikpapan	250 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
362	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikan drainase	RT. 33 Jl. pengalang, Kota Balikpapan	200 1.5	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
363	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Pengaspalan jalan	Jalan Karya Bakti RT.41, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
364	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Kerusakan Jalan	Jalan Karya Bakti RT.41, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
365	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drainase rusak dengan ukuran P= /+ 100 M	Jl.Sultan Hasanudin RT.45 Sidodadi, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
366	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dengan ukuran P = -/+ 150 M	Jl.Sultan Hasanuddin RT,45 Sidodadi, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
367	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh semenisasi.	RT. 24, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
368	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan masih berbahan kayu dan perlu dibangun dengan beton.	RT. 24, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
369	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Drainase perlu dibangun dengan beton.	Gang Sulir RT. 11, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
370	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Drainase masih bersifat alami.	Jl. Handil Tarun RT 33, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
371	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dibangun dengan beton.	Gang Sulir RT. 11, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
372	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan rusak dengan ukuran P=150 M, L= 60 M	Jl.Sultan Hasanuddin RT.3, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
373	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan lingkungan	Rt. 66, Kota Balikpapan	200 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
374	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Belum terbangunnya drainase	RT. 9, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
375	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi Jalan Gang masjid	Gang Masjid Nurul Iman RT.41, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
376	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Belum adanya draianase di area tersebut (Alami)	Jalan Soekano Hatta Gang Bakti RT.41, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
377	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Kerusakan Drainase di Area tersebut	Jalan Lestari Gang Lingkungan 8 RT.60, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
378	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan, semenisasi jalan lingkungan	Jalan Berahan Pare RT.57, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
379	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaiki Jalan	Rt 4 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	100 2 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
380	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase	Jalan Berahan Pare RT.57, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
381	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Perbaiki Jalan Kolektor	Perum Adi Guna Unggul RT.33, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
382	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Kerusakan Jalan/ Semenisasi jalan	Perum Bangun Rekxa RT.21, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
383	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan Projakal GG.Notaris RT.55, Kota Balikpapan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
384	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan	Rt 37 jln imanuel, Kota Balikpapan	1000 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
385	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drainase yang ada sudah rusak dengan ukuran P=100 M, L=50 M	Gn.I RT.8, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
386	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Setiap hujan air masuk kerumah warga	Jl. Decorin RT.02 Kel. Sungainangka, Kota Balikpapan	55 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
387	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. (Panjang:110m, Lebar:2m, Tinggi:15cm)	Jl. Pandan Sari RT 21 (Gang 1), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
388	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. ( Panjang: 110m, Lebar: 2m, Tinggi:15cm)	Jl.Pandan sari RT 21 (Gang 2), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
389	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. ( Panjang: 110m, Lebar: 2m, Tinggi: 15 cm)	Jl. Pandan Sari RT 22 (Gang 3), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
390	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. ( Panjang: 110m, Lebar: 2m, Tinggi:15cm)	Jl. Pandan Sari RT 22 (Gang 4), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
391	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. ( Panjang: 110m, Lebar: 2m, Tinggi:15cm)	Jl. Pandan Sari RT 23 (Gang 5), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
392	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan lingkungan	Rt. 62 jalan lingkungan, Kota Balikpapan	180 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
393	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya perbaikan/ semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. ( Panjang: 110m, Lebar: 2m, Tinggi:15cm)	Jl. Pandan Sari RT 23 (Gang 6), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
394	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan	Rt. 39, Kota Balikpapan	150 3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
395	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase	Rt. 10 jalan pemuda, Kota Balikpapan	150 1	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
396	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan	Rt. 17 jalan lingkungan, Kota Balikpapan	180 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
397	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Senemisasi jalan	Rt. 8, Kota Balikpapan	180 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
398	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum	Semenisasi jalan	Rt. 9 jalan lingkungan, Kota Balikpapan	180 4	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
	dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)					
399	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase butuh dibangun ulang.	RT. 59, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
400	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perlu dibangunnya drainase dengan beton.	RT. 02, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
401	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu pelapisan ulang.	RT. 02, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
402	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan memiliki pondasi yang mudah runtuh	RT. 02, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
403	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan dikarenakan jalan licin ketika hujan	Jl. Decoryn Gang, Kebun RT. 02, Kota Balikpapan	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
404	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase	Jl. Mulawarman RT. 7, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
405	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Longsor didepan rumah Pak Soegiarto, berbatasan dengan Kantor Sucofindo bagian belakang dengan ukuran P=15 M, L= 5,30 M, T = 5 M	Jl.A.Yani RT.18 No.83 Gang Telkomsel, Kota Balikpapan	15 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
406	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Longsor dibelakang rumah Pak Soegiarto dan posisi miring, dengan ukuran P=32 M, , T=18 M	Jl.A.Yani RT.18 No.83 Gang Telkomsel Kel.Gn.Sari Ulu, Kota Balikpapan	32 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
407	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pebbaikan jalanan I dengan ukuran P=34 M , L=2 M	RT.05, Kota Balikpapan	34 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
408	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	masuk warga sering tergenang air dipermukaan jalan	Jalan Padat Karya KM 8,5, RT 39 Graha Indah, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
409	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	saat hujan air mengalir masuk ke permukiman dan jalan	berhadapan jalanan dekat sekolah Kristen , RT 36 Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
410	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	tidak bisa menampung air hujan yang dari arah perumahan Caladium Residence 2	di lingkungan tembus RT 27 dan 28 Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	300 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
411	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Belum terbangunnya drainase.	RT. 21, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
412	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu perluasan dan sebagian masih belum di semenisasi.	Jalan antara RT. 5 dan RT. 6, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
413	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	pebaikan dan pelebaran draenase lingkungan	jalan rt 62, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
414	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan yang ada perlu di semenisasi karena sudah rusak	jalan rt 11 damai, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
415	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaikan Jembatan Lingkungan	Jl. Mulawarman RT. 29, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
416	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase Karena Penyempitan	Jl. Marsma Iswahyudi RT. 02, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
417	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. HER I RT. 15, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
418	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. Prona III RT. 53, Kota Balikpapan	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
419	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	Belum adanya pipa Induk PDAM	JL. Prona III RT. 53, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
420	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaikan Jembatan karena sudah rusak	Jl. Mulawarman Gang. Nelayan RT. 29, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
421	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Rusak	RT 76, Kota Balikpapan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
422	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi jalan lingkungan sudah rusak dengan ukuran 100 mx4mx15 cm	Gg.Makmur /belakang indomaret RT.14, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
423	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase sudah rusak dengan ukuran 60 cmx50cmx80 cm	RT.12 Gg.Telkom, Kota Balikpapan	60 CM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
424	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan perlu semenisasi jalan dengan ukuran 100mx3mx15 cm	RT.50, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
425	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Semenisasi Jalan dengan ukuran 100mx4mx15cm	RT.30, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
426	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Semenisasi yang rusak dengan ukuran 70mx4mx15cm	RT.16 Pupuk Utara II, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
427	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Semenisasi Gang dengan ukuran 50Mx4mx15Cm	RT.35 Gang Amco Kel.Damai Bahagia, Kota Balikpapan	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
428	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Drainase sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukuran 100mx60cmx80cm	RT.13, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
429	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dan perlu perbaikan semenisasi dengan ukuran 100mx3mx15cm	RT.40, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
430	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak dan berlubang	RT 26 GG MELATI, Kota Balikpapan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
431	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan rusak dengan ukuran P= 32 M, L= 2 M	RT.36, Kota Balikpapan	36 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
432	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan perlu perbaikan dengan ukurannya P= 70 M, L = 2 M	RT.38, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
433	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Saluran Drainase rusak dengan ukuran P=10M, L=40Cm	RT.41 No.23 an.Kahisa, Kota Balikpapan	10 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
434	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Sa.luran Drainase rusak dengan ukuran P=10M, L=40 cm	RT.41 No.32 an.Aminuddin, Kota Balikpapan	10 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
435	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Draenase Rusak dengan ukuran P=10 m x L=50 cm x Tinggi=80 Cm	RT.41 No.29 an.Embong, Kota Balikpapan	10 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
436	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dengan ukuran P=100m, L=270 M,paret T=34Cm, Lebar=45cm Draenase	RT42, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
437	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dengan ukuran P=100 M, L=3 M	RT.44, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
438	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan dan Anak tangga sudah rusak dengan ukuran P=300 M, L = 1 M	RT.47, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
439	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah rusak dengan ukuran 75m x2 m	RT.52 an.Muh.Jupri, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
440	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dengan ukuran P=13 M, T=3 M	RT.55, Kota Balikpapan	13 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
441	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi pinggir jalan dengan ukuran P=143 M, L=3 meter 70 cm	RT.57, Kota Balikpapan	143 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
442	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Perlu peningkatan jalan karena volume kendaraan naik	Jalan Pemuda, Kota Balikpapan	9000 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
443	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Jalan perlu peningkatan karena volume kendaraan naik.	Jl. Utama PJHI, Kota Balikpapan	9000 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
444	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jalan perlu adanya Perbaikan / Semenisasi karna sudah banyak yang Rusak & Berlubang. ( Panjang: 150m, Lebar: 3m, Tinggi:10cm).	Jl. Sepaku Laut RT 08, Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
445	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya Perbaikan / Semenisasi karna sudah banyak yang Rusak & Berlubang. (Panjang: 250m, Lebar: 2m, Tinggi: 10cm).	Jl. Letjen Suprpto RT 31, Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
446	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Jalan perlu adanya Perbaikan/Semenisasi dikarenakan sudah banyak yang berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. (Panjang:75m, Lebar:8m, Tinggi:15cm)	JL. Pandan Arum RT 28, Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
447	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu adanya Perbaikan/Semenisasi dikarenakan sudah banyak yang Rusak & Berlubang sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman. (Panjang: 131m, Lebar: 2m, Tinggi: 15cm)	JL. Pandan Sari RT 24 (Gang 8), Kota Balikpapan	1 titik	DINAS PEKERJAAN UMUM	
448	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi Kerusakan Drainase	Rt 18 Inpress Muara Rapak, Kota Balikpapan	75 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
449	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Rintisan Dibangun Oleh Warga	RT 54 Karang Joang, Kota Balikpapan	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
450	Kerusakan Sedang/Berat Gedung Sekolah SMP	Plafon runagn belajar dan teras SPMN 9 Balikpapan saat ini rusak dan membahayakan keselamatan peserta didik	Jl. Gunung Empat RT 18, Kota Balikpapan	8 ruang belajar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan & Pemerataan Akses Pendidikan





No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
451	Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Sarana Olahraga SMPN9 saat ini rusak tidak layak maka mengajukan pergecoran	Jl. Gunung Empat RT 18, Kota Balikpapan	200 CBM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan & Pemerataan Akses Pendidikan
452	Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Pagar SD 008 saat ini belum ada yang ada saat ini pagar seng dan sudah rusak	Jl. Gunung Empat RT 50, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan & Pemerataan Akses Pendidikan
453	Kerusakan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Atap mushola SD 008 saat ini sedang rusak dan perlu perbaikan	Jl. Gunung Empar RT 50, Kota Balikpapan	100 lembar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan & Pemerataan Akses Pendidikan
454	Tidak tersediannya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Demi keamanan maka mengajukan pembangunan pagar SMPN 9 yang saat ini hanya di pagar seng	Jl. Gunung Empat RT 18, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Sistem Kesehatan & Pemerataan Akses Pendidikan
455	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan dan Turap lingkungan RT 26 - 26 P=115M, L=2M	Lingkungan RT 25-26 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	230 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
456	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan RT.41-42, P = 250 M, L = 2 M	Jalan lingkungan RT.41-42 (Tidak ada nama Gang), Kota Balikpapan	500 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
457	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Saluran Drainase rusak dengan ukuran dengan ukuran P=65 m x ukuran lebar 60 cm x tinggi 60 cm	RT.63, Kota Balikpapan	65 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
458	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Normalisasi Drainase / semenisasi Saluran Drainase	GG. Samai lingkungan RT 38 GSU, Kota Balikpapan	100 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
459	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah, perlu di semenisasi Jalan dengan Ukuran P=114 M, L=2M	Jl. Guntur Damai VI RT 48 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	228 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
460	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlu perbaikan terhadap kondisi jalan/Semenisasi P=55 M. l= 3M	Jl. R.E Martadinata No. 30 RT 27 Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	165 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
461	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perlu perbaikan jalan Ukura Lebar 2 m Panjang 40 m	Gang Belimbing RT 49, Kota Balikpapan	80 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
462	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Betonisasi dengan ukuran 100m x 4m x 15 cm	RT.12 Gg.Semeru, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
463	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Peningkatan drainase	Jl. Prapatan RT 20, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
464	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Pembuatan drainase	Jl. Prapatan RT 35, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
465	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Pembuatan drainase/gorong-gorong	Jl. Mayjend Sutoyo RT 43, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
466	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi badan jalan	Jl. Jend Sudirman RT 2, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
467	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Siring & Jalan	RT 49 , dekat Mesjid, Kota Balikpapan	65 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
468	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	beberapa rumah belum terlayani air bersih	Rt 30, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
469	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan parit	RT 32, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
470	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikkan Drainase	Rt 45, Kota Balikpapan	1 Ls	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
471	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikkan jalan	Rt 45, Kota Balikpapan	70 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
472	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainse Rusak	Rt 30 samping belakang toko Rifqi, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
473	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainse Rusak	Rt 17 Gg Arjuna Dalam, Kota Balikpapan	1 Ls	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
474	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi badan jalan	RT 25, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
475	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter, )	Semenisasi badan jalan	Jl. Prapatan RT 12, Kota Balikpapan	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
476	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi	Jl Bhineka II rt 48 Sepinggah baru, Kota Balikpapan	200 2m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
477	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaikan drainase	Roda Mutar rt 48 Sepinggah baru, Kota Balikpapan	250 30cm	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
478	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan berlubang rawan kecelakaan	rt 14, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
479	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	rawan longsor di khawatirkan menimbulkan korban jiwa	jl.karang bugis RT 37, Kota Balikpapan	50 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
480	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	siringan rawan longsor di dekat jalan utama keluar masuk warga	jl.re martadinta rt 16, Kota Balikpapan	35 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
481	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan berlubang rawan kecelakaan	jl.re martadinata rt 17, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
482	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	jembatan sudah tidak layak dan sangat beresiko buat warga	gang mandor, rt 39, km 17, Kota Balikpapan	10 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
483	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	jembatan sudah tidak layak, kalau di lewati bergerak bisa membahayakan masyarakat	gang akasia km 12, rt .21,, Kota Balikpapan	10 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
484	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah kuning perlu semenisasi,	jalan tengku umar, gang tambora, rt.58, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
485	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan / Semenisasi Jalan P=175M .L=2M	Jl RE Martadinata RT 15 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	350 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
486	Kondisi Gedung Kantor dan Penunjangnya Tidak Laik	Perbaiki Gedung Dewan Kesenian Balikpapan karena beberapa bagian Gedung ada kerusakan/tidal laik	Jalan Telaga sari, Kota Balikpapan	1 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
487	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Perbaiki Drainase /Parit P=15M, L=0.5M	dil lingkungan RT 42 Karang Rejo, Kota Balikpapan	7.5 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
488	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan P=50M L=1M dan dan Rehab Poskamling Ukuran 2M x 3M	Gang persatuan Lingkungan RT 52 Karang Rejo, Kota Balikpapan	50 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
489	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Sulawesi GG. Ling RT 57 Karang Rejo P=60 M, L=1M	Jalan Sulawesi GG. Ling RT 57 Karang Rejo, Kota Balikpapan	60 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
490	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Gang P=126 M, L=2M	Jl. Sulawesi Gang Mawar RT 58, Kota Balikpapan	252 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
491	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan / Perbaiki Jalan P=125M, L= 2M	Jl. Sulawesi Gang Hikmah 2 RT 58 Karang Rejo, Kota Balikpapan	250 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
492	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan/Perbaiki Jalan P=110M, L=2M	Jl. Sulawesi Gang Hikmah 1 RT 58 Karang Rejo, Kota Balikpapan	220 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
493	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan dan pagar yang ada sudah rusak dan perlu direhab dengan ukuran volume 100 m2	RT.01, Kota Balikpapan	100 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM	
494	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pagar Jembatan rusak dan perlu direhab dengan volume 200 m2	RT,01, Kota Balikpapan	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
495	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jembatan dengan ukuran 110 Meter	Jl.Sepakat I RT.13, Kota Balikpapan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
496	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan aspal jalan karena kurang baik dengan ukuran P=215 M, L= 4 M	Jl.Sepaku RT.14, Kota Balikpapan	215 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
497	Belum terbangunnya jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Permohonan Perbikan Jembatan dengan ukuran P=80 M, L = 2 M	Jl.Sepaku RT.14, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
498	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 100m x 3m	RT. 02, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
499	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 75m x 65cm	RT. 02, Kota Balikpapan	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
500	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 20m x 3,5m	RT. 03, Kota Balikpapan	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
501	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 15m x 3m	RT. 07, Kota Balikpapan	15 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
502	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 300m x 1,5m	RT. 27, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
503	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 15m x 2m	RT. 27, Kota Balikpapan	15 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
504	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 105m x 70cm x 70cm	RT. 30, Kota Balikpapan	105 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
505	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	belum ada PDAM masuk, kebutuhan air bersih sangat di perlukan	jalan pjihi batakan, RT 50, Kota Balikpapan	300 rumah	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
506	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 150m x 3m	RT. 38, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
507	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 150m x 2m	RT. 04, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
508	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 300m x 3m	RT. 17, Kota Balikpapan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
509	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 160m x 3m	RT. 22, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
510	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 100m x 2,5m	RT. 23, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
511	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 160m x 60cm x 60cm	RT. 29, Kota Balikpapan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
512	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 150m x 2m	RT. 31, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
513	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 80m x 50cm x 50cm	RT. 38, Kota Balikpapan	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
514	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 150m x 3m	RT. 41, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
515	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 150m x 2m	RT. 12, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
516	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 465m x 1,5m	RT. 29, Kota Balikpapan	465 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
517	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 270m x 1,5m	RT. 29, Kota Balikpapan	270 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
518	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 150m x 1,5m	RT. 36, Kota Balikpapan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
519	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 100m x 40cm x 40cm	RT. 53, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
520	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 400m x 1,5m	RT. 45, Kota Balikpapan	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
521	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 140m x 40cm x 50cm	RT. 45, Kota Balikpapan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
522	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 130m x 70cm x 80cm	RT. 46, Kota Balikpapan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
523	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 20m x 4m	RT. 43, Kota Balikpapan	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
524	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir dengan ukuran 100m x 1m	RT. 55, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
525	Kerusakan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Terbatas akses jalan dan rawan kecelakaan dengan ukuran 70m x 30m	RT. 28, Kota Balikpapan	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
526	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	Jln. Pattimura (depan telkom) RT. 48, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
527	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadinya genangan dan rawan banjir	Blok A RT. 15, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
528	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan kayu mulai mengalami kerusakan	RT. 42, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
529	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dilakukan semenisasi	RT. 31, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
530	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan yang dibangun dari tahun 1999 butuh pelapisan ulang.	RT. 25, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
531	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	Jln.Telindung Permai RT. 06, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
532	Kerusakan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan kayu butuh perbaikan.	RT. 45, Kota Balikpapan	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM	
533	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	Jln.Wahab Syahrani RT.45, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
534	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadinya genangan dan rawan banjir	Jln.Perum Somber Banyuwangi RT.71, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
535	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.65, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
536	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.02, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
537	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.04, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
538	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.43, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
539	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.23 Pondok Indah Taman Sari, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
540	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadinya genangan dan rawan banjir	RT.11, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
541	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.45, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
542	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.42, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
543	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.41 Gg.Mekar Bakti, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
544	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.46, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
545	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.54, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
546	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.39, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
547	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	sering berlumpur jika hujan	jalan projakal , gang SS rt 55 Graha Indah, Kota Balikpapan	216 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
548	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	sedimentai dan mengecil sehingga sering banjir	jalan Projakal gang SS RT 55 Graha Indah, Kota Balikpapan	10 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
549	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	sering berlumpur dan licin jika hujan dan sering membuat kecelakaan terjatuh	jalan Batu Ratna , akses Utama masuk Rt 62 Karang Joang, Kota Balikpapan	400 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
550	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	sering banjir jika hujan karena tdk bisa menampung air hujan	jalan Batu Ratna sebelah kiri dan kanan jalan meliputi RT 14 dan 15 Karang Joang, Kota Balikpapan	500 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	pengendalian banjir
551	Belum terbangunnya pipa distribusi air minum	warga belum dapat sambungan air minum	jalan Batu Ratna RT 14 Karang Joang, Kota Balikpapan	50 rumah	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemenuhan Cakupan Layanan Air Minum
552	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	sering banjir dan tergenang air dijalan	jan Batu Ratna perbatasan RT 13 dan 14 Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
553	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	sering berlumpur saat hujan dan akses masuk ke kebun karet petani	RT 15 kelurhan Karang Joang, Kota Balikpapan	200 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
554	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	sering banjir dan licin saat hujan dan teganang air	jalan masuk RT 63 kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	300 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
555	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	perlu dibuat kan drainase agar tidak banjir	jalan tiga rt 3, Kota Balikpapan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
556	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	semenisasi jaln	rt 39, Kota Balikpapan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
557	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.26 Gang Mawar, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
558	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.56, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
559	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.13, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
560	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.19 Gg.Cirebon 1, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
561	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.57 Tranmigrasi, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
562	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.14 Gg.Bersama, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
563	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.33, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
564	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.08 Gg.Kuncrit, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
565	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	RT.67 Jln. Mutiara 1, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
566	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Bolong-Bolong dan Air Menggenang saat Hujan	RT 12, Blok BAA, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	





No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
567	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas	RT.50, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
568	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses terbatas	RT.16, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
569	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	RT.09, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
570	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	RT.68, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
571	Drainase/gorong-gorong masih alami (lebar drainase > 1 meter)	Terjadi genangan dan rawan banjir	RT.40, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
572	Drainase/gorong-gorong rusak (lebar drainase > 1 meter)	Gorong-Gorong dan Saluran Drainase Rusak, dengan ukuran Gorong-Gorong P= 6 M, Ukuran Drainase P = 60 M	RT 70, Jl. Senayan, Kota Balikpapan	66 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
573	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	Drainase Rusak dan perlu Perbaikan, dengan ukuran P= 100 M, L= 50 CM, T = 60 CM	RT 26, Gang Cendana eks Gang Rapi, Kota Balikpapan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
574	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh disemenisasi.	RT. 48, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
575	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh pelapisan ulang.	RT. 14, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
576	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	sebahagian jalan rusak perlu di Semenisasi Jalan Gang P=330M, L=3M	Gg Madiri dan Gg. Lestari di Jl. Sultan Alauddin RT. 04 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	990 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
577	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan sebagian akses jalan Gang/ Mengalami Kerusakan. Ukuran P=200 L=1M	Gg. Selamat Jl. Lingkungan RT 06 Kel Mekar Sari, Kota Balikpapan	200 M2	DINAS PEKERJAAN UMUM	
578	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Adanya kerusakan pada saringan Jalan dan ada retakan berpotensi jalan longsor. Perbaikan Saringan UK. P= 50M, L=4M, 0.25M	Jalan Lingkungan RT 10 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	50 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
579	Drainase/gorong-gorong lingkungan rusak (lebar drainase < 1)	perbaikan Drainase / Parit P=97, L= 0.8M, T=0.6M	Gg. Margamulya Lingkungan RT 22 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	46.56 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
580	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Drainase masih alami dan perlu dibangun menggunakan beton.	RT. 23, Kota Balikpapan	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
581	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh pelapisan ulang.	RT. 23, Kota Balikpapan	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM	
582	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Peningkatan semisasi rt 53, 54 dan 55	Rt 59, Kota Balikpapan	200 2m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
583	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih berupa tanah lempung	Jalan Menuju Perum Griyan Karang Joang Asri 2, RT. 62 pemekaran RT.15, Kota Balikpapan	200 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
584	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	penyebab genangan tinggi	jl. manunggal RT. 54, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
585	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak rawan kecelakaan	jl. manunggal RT. 54, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
586	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	potensial genangan tinggi	jl. Ar Rahman RT. 55, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
587	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	rawan kecelakaan	jl. Ar Rahman RT. 55, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
588	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak rawan kecelakaan	Rt 53, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
589	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan	RT 14 Jl. DR. Sutomo No. 51, Kota Balikpapan	250 2m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
590	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	Perbaikan parit	Rt 45 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	100 50cm	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
591	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan jalan	Rt 46, Kota Balikpapan	200 2m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
592	Terjadi Banjir karena penyempitan dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	sering terjadi banjir	Perum PGRI RT. 48, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
593	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	terjadi kerusakan jalan yg menyebabkan terjadinya longsor	rt14, Kota Balikpapan	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	



No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Perangkat Daerah Tujuan	Prioritas Pembangunan
594	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan berlubang	rt 15, Kota Balikpapan	400 m	DINAS PEKERJAAN UMUM	
595	Jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor belum dilakukan perkerasan (lebar jalan > 4 meter)	jalan masih tanah dan berlubang, becek dan berdebu	RT 07, Kota Balikpapan	20 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM	
596	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	menyebabkan genangan air tinggi	RT. 12, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir
597	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalan becek dan mengganggu masyarakat	RT. 14, Kota Balikpapan	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	
598	Drainase/gorong-gorong lingkungan masih alami (lebar drainase < 1)	tidak ada saluran pembuangan, sehingga menyebabkan genangan tinggi	RT. 28, Kota Balikpapan	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir

## 5.2. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2022

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah berdasarkan keluaran dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk RKPD, Adapun struktur informasi yang disajikan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan.

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

Kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah untuk tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2 Pagu Indikatif Kota Balikpapan Tahun 2022**

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	604.300.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	300.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	105.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0002	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	21.250.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	330.000.000.000
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22.800.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32.280.000.000
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.500.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	12.500.000.000
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	9.500.000.000



KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
2.08.2.13.2.14.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	21.000.000.000
2.10.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERTAHANAN DAN PENATAAN RUANG	78.375.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	109.250.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.970.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	71.250.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.150.000.000
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	17.400.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	14.250.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	60.500.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	10.070.000.000
3.27.3.25.2.09.01.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	22.200.000.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	28.499.996.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	126.764.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	96.211.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.218.114.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	73.000.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	35.500.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.750.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.000.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	20.800.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	21.000.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	19.500.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	21.700.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	24.800.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	17.200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.500.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.445.988.110.400</b>

Sumber: SIPD, 2022

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											261,875,512,200	894,445,497,240					
1	1	1				86.14 nilai	4,840,970,399						86.14 nilai	8,870,000,000					
1	1	1	2			76.37 Nilai	177,000,000						76.37 Nilai	300,000,000					
1	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja				12 Dokumen	177,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	12 Dokumen	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen			Dokumen	14 Dokumen	644,535,859					14 Dokumen	1,000,000,000	
1	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium				35 orang	644,535,859	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35 orang	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis			Jenis	11 Jenis	2,125,468,000					11 Jenis	4,700,000,000	
1	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 jenis	40,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 jenis	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				100 Jenis	300,178,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Jenis	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	1	1	2.1	4			100 jenis	614,750,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 jenis	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	5			4 Jenis	167,040,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	6			4 Jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	9			500 kali	423,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500 kali	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	11			1 dokumen	550,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				<b>4 Jenis</b>	<b>973,872,540</b>						<b>4 Jenis</b>	<b>1,500,000,000</b>	
1	1	1	2.1	2			4 rekening	461,872,540	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 rekening	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	1	1	2.1	4			1028 m2	512,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1028 m2	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1				12 Jenis	920,094,000						12 Jenis	1,370,000,000	
1	1	1	2.1	1			67 unit	423,094,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67 unit	670,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	6			100 Jenis	304,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Jenis	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.1	9			1 kali	193,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kali	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2					86.21 %	254,941,541,801						86.21 %	883,075,497,240	
1	1	2	2				88.7 %	128,554,584,430						88.7 %	453,475,847,240	
1	1	2	2	4			3 Unit	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	3 Unit	8,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	5			3 Unit	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,	Peserta Didik Sekolah Dasar	3 Unit	9,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
											sehat dan berdaya saing								
1	1	2	2	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				5 Unit	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	5 Unit	12,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				5 Unit	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	5 Unit	26,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah				1786 set	1,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	1786 set	18,199,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													DBH CHT						
1	1	2	2	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam )				2133 Siswa	11,246,400,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	2133 Siswa	10,919,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar				100 Siswa	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	100 Siswa	106,918,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1	1	2	2	23			71279 Siswa	568,475,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	71279 Siswa	7,127,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	24			213 Sekolah	137,812,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	213 Sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	25			6 Kegiatan	1,746,750,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	6 Kegiatan	1,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	27			3310 Orang	8,486,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	3310 Orang	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	28			213 Sekolah	1,108,187,250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	213 Sekolah	63,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	29			71279 Siswa	100,440,960,180	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Dasar	71279 Siswa	178,010,247,240	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2				95.26 %	92,770,876,834					95.26 %	365,499,900,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				2 Sekolah	5,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2 Sekolah	70,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru				4 Unit	2,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4 Unit	19,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				5 Unit	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5 Unit	32,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah				6 Unit	1,139,712,463	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6 Unit	12,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah				714 set	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	714 set	16,801,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam )				12129 Siswa	10,916,100,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12129 Siswa	10,080,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama				100 Siswa	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100 Siswa	65,924,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah							
											sehat dan berdaya saing							
1	1	2	2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah				10497 Siswa	454,550,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10497 Siswa	1,386,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penjaminan Mutu Pendidikan				91 Sekolah	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	91 Sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KSN, KOSN, LIGA, FLS2N, PAI, Pemb ekskul, LDK				5 Kegiatan	1,146,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5 Kegiatan	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK				1679 Orang	6,516,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1679 Orang	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				91 Sekolah	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	91 Sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS				32962 Siswa	63,048,514,371	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	32962 Siswa	123,607,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
									DBH CHT		Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing					
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					66.68 %	<b>16,935,666,948</b>				66.68 %	<b>28,958,000,000</b>		
1	1	2	2	14				486 sekolah	60,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta PAUD	486 sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	16				1232 Orang	5,124,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta PAUD	1232 Orang	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	17				498 Sekolah	510,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta PAUD	498 Sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	18				10965 Siswa	153,166,948	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta PAUD	10965 Siswa	4,620,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	19				1368 Orang	11,088,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Peserta PAUD	1368 Orang	13,338,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					64.6 %	<b>16,680,413,589</b>					64.6 %	<b>35,141,750,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				5 Unit	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	5 Unit	1,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				357 set	500,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	357 set	4,138,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam )				2365 Siswa	3,065,400,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2365 Siswa	2,128,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				15 Lembaga	72,150,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	15 Lembaga	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK				269 Kegiatan	288,750,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	269 Kegiatan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.2.2.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				15 Lembaga	116,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	15 Lembaga	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				2533 Siswa	3,372,113,589	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2533 Siswa	9,460,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.1.2.2.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Transport usuz				2435 orang	8,766,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2435 orang	15,814,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.1.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	%	%	65.45 %	<b>423,500,000</b>					65.45 %	<b>500,000,000</b>		
1.1.3.2	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	%	%	30 %	<b>423,500,000</b>					30 %	<b>500,000,000</b>		
1.1.3.2.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar				9 Buku	423,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peserta Didik Pendidikan Dasar	9 Buku	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.1.4	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang memenuhi standar	%	%	%	52.25 %	<b>1,469,500,000</b>					52.25 %	<b>500,000,000</b>		
1.1.4.2	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	%	%	%	31.13 %	<b>1,469,500,000</b>					31.13 %	<b>500,000,000</b>		
1.1.4.2.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				2 Kegiatan	1,469,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	2 Kegiatan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.1.5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	%	%	%	59.04 %	<b>200,000,000</b>					59.04 %	<b>1,500,000,000</b>		
1.1.5.2	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	%	%	89.21 %	<b>100,000,000</b>					89.21 %	<b>500,000,000</b>		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	22	2	2	1		6 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	6 Kegiatan	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2	2		2 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2 Kegiatan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2			60 %	1,347,545,000						60 %	1,500,000,000	
2	22	2	2	1		5 Kegiatan	1,347,545,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	5 Kegiatan	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2			60 %	50,000,000						60 %	500,000,000	
2	22	2	2	2		4 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	4 Kegiatan	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3				76.00 %	425,000,000						76.00 %	1,175,100,000	
2	22	3	2			40 %	425,000,000						40 %	1,175,100,000	
2	22	3	2	1		3 Kegiatan	375,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,	Masyarakat kota Balikpapan	3 Kegiatan	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%		%	87 %													
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%		%	70 %													
2	22	5	2	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara							Masyarakat kota Balikpapan	30 Orang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2	22	5	2	2	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru							Masyarakat kota Balikpapan	145 Situs	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2	22	5	2	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya							Masyarakat kota Balikpapan	4 Kegiatan	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
1	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														<b>300,000,000,000</b>	<b>475,175,882,675</b>		
1	2	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														<b>74,796,000,000</b>	<b>83,718,100,000</b>	
1	2	1	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														85.28 nilai	<b>31,500,000</b>
1	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA									1 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA									1 Dokumen	2,750,000	DINAS KESEHATAN		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan UPTD	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA				1 Dokumen	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan UPTD	1 Dokumen	2,750,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	7 jenis	<b>66,500,000,000</b>						7 jenis	<b>73,167,000,000</b>	
1 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	66,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Bagian Keuangan Perangkat Daerah Dinkes	26 Dokumen	73,150,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	"Jumlah Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	11 jenis	<b>1,231,000,000</b>						11 jenis	<b>1,653,100,000</b>	
1 2 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5 Jenis	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	5 Jenis	3,850,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah jenis perlengkapan kantor				15 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	15 Jenis	220,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor				4 Jenis	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul,	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	4 Jenis	750,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
											sehat dan berdaya saing								
1	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				9 Jenis	200,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	9 Jenis	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 Jenis	30,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	3 Jenis	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan Material				5 Jenis	15,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	5 Jenis	16,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu				300 Porsi	30,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	300 Porsi	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah				150 Kali	250,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	150 Kali	275,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 1 2.1 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				12 Laporan	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes.	12 Laporan	2,750,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 1 2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	jenis		jenis	6 jenis	<b>1,900,000,000</b>					6 jenis	<b>2,150,000,000</b>		
1 2 1 2.1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan				1 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes ( Dinkes dan UPTD )	1 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel				5 Jenis	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes ( Dinkes dan UPTD )	5 Jenis	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 1 2.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				4 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes ( Dinkes dan UPTD )	4 Jenis	275,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 1 2.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				4 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Umum Perangkat Daerah Dinkes ( Dinkes dan UPTD )	4 Jenis	275,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 1 2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	jenis		jenis	3 jenis	<b>2,450,000,000</b>					3 jenis	<b>2,695,000,000</b>		
1 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Jenis	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah Dinkes	3 Jenis	715,000,000	DINAS KESEHATAN	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				16 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Dinkes	16 Kali	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				9 Kali	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Dinkes	9 Kali	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				1 Kali	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Dinkes	1 Kali	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	%		%	100 %	<b>218,009,000,000</b>						100 %	<b>380,451,782,675</b>	
1 2 2 2	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	kategori		kategori	4 kategori	<b>72,970,735,200</b>						4 kategori	<b>199,635,000,000</b>	
1 2 2 2 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS yang dilakukan pembangunan				1 Unit	51,150,735,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	1 Unit	156,300,000,000	DINAS KESEHATAN
											Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan				3 Unit	270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	3 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan				3 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	3 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengadaan				2 Jenis	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	2 Jenis	660,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengadaan				5 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	5 Jenis	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				10 Jenis	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	10 Jenis	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi				2 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	2 Jenis	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis pengadaan obat dan vaksin				2 Jenis	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	2 Jenis	5,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai				1 Jenis	3,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	1 Jenis	4,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan				2 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	2 Jenis	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan				5 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	5 Jenis	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				5 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP)	5 Jenis	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%		%	100 %	<b>143,808,264,800</b>						100 %	<b>179,463,782,675</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 2 2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11549 Orang	335,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	11549 Orang	934,400,335	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11024 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	11024 Orang	311,891,250	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10746 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10746 Orang	315,733,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				52173 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	52173 Orang	846,696,015	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				26250 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	26250 Orang	585,157,595	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				461080 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	461080 Orang	618,762,650	DINAS KESEHATAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 2 2 2 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60966 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	60966 Orang	878,533,205	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				193993 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	193993 Orang	168,712,500	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				17958 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	17958 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				742 Orang	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	742 Orang	159,687,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14278 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	14278 Orang	550,540,705	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15000 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	15000 Orang	440,420,200	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa				10000 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10000 Orang	7,648,894,220	DINAS KESEHATAN
									DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat						
1 2 2 2 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Dukungan Kesehatan Lapangan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi Bencana sesuai standar				100 %	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 %	750,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Jenis	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Jenis	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM				34 Kelurahan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	34 Kelurahan	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
									DBH CHT						
									DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dikampanyekan dan dilaksanakan				60 %	6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	60 %	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya di Puskesmas				70 %	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	70 %	354,354,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan				60 %	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	60 %	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	395,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase orang yang dilakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai standar				100 %	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	260,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah jenis kegiatan kesehatan khusus yang dilaksanakan				7 Jenis	8,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Jenis	9,500,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan kegiatan pelayanan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan				100 %	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan orang yang mendapatkan pelayanan menular dan tidak menular sesuai standar				100 %	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	5,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Premi Iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk yang terdaftar oleh pemerintah kota dan dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data				100 %	69,973,264,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	75,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah jenis layanan puskesmas				17 Jenis	48,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	17 Jenis	52,800,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis layanan fasilitas kesehatan lainnya				3 Jenis	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Jenis	8,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%		%	100 %	<b>800,000,000</b>						100 %	<b>880,000,000</b>	
1 2 2 2 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi yang dikelola				300 Data	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Balikpapan	300 Data	330,000,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 2 2 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah SIK yang dikelola				20 SIK	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Balikpapan	20 SIK	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah jenis alat/perangkat sistem informasi yang diadakan				5 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Balikpapan	5 Jenis	220,000,000	DINAS KESEHATAN
<b>1 2 2 2</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penerbitan Izin RS Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan	%	%	%	100 %	<b>430,000,000</b>						100 %	<b>473,000,000</b>	
1 2 2 2 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS				4 Kali	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 Kali	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi kegiatan Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota				4 Kali	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 Kali	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Frekuensi kegiatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan				10 Kali	310,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Kali	341,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah kegiatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Kali	55,000,000	DINAS KESEHATAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3				75 %	1,210,000,000						75 %	1,331,000,000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%		%											
1	2	3	2			82 %	275,000,000						82 %	302,500,000		
<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan	%		%											
1	2	3	2	1		4 Kegiatan	75,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	4 Kegiatan	82,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	2		4 Kegiatan	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	4 Kegiatan	220,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	2		4 Kegiatan	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	4 Kegiatan	220,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2			70 %	135,000,000						70 %	148,500,000		
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	%		%											
1	2	3	2	1		1 Dokumen	50,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	1		1 Dokumen	50,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	2		75 %	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	75 %	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	2		75 %	10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	75 %	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	3		2.5 %	75,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	2.5 %	82,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	3		2.5 %	75,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	2.5 %	82,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2	3		2.5 %	75,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	2.5 %	82,500,000	DINAS KESEHATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 3 2	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	%		%	72 %	800,000,000						72 %	880,000,000	
1 2 3 2 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia				100 Orang	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Kesehatan	100 Orang	880,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 4	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%		%	100 %	1,235,000,000					100 %	1,400,000,000		
1 2 4 2	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang dilakukan Tindak lanjut Pengawasan	%		%	100 %	450,000,000					100 %	495,000,000		
1 2 4 2 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT berizin yang dilakukan pengawasan				45 %	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	45 %	165,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 4 2 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Laporan	165,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 4 2 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				4 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Kali	165,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 2 4 2	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	Persentase Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Tertentu yang memenuhi Persyaratan	%		%	70 %	300,000,000					70 %	330,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 4 2 1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Kali	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 2 2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Kali	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 2	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	%		%	75 %	<b>250,000,000</b>						75 %	<b>275,000,000</b>	
1 2 4 2 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Frekuensi kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi				5 Kali	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Industri Rumah Tangga	5 Kali	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 2	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	%		%	75 %	<b>50,000,000</b>						75 %	<b>75,000,000</b>	
1 2 4 2 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Frekuensi kegiatan Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM				10 Kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	10 Kali	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 2.1	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Persentase Penerbitan Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan	%		%	75 %	<b>50,000,000</b>						75 %	<b>75,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1	2	4	2.1	1		10 Kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Sentra Makanan Jajanan dan Makanan Jajanan	10 Kali	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.1			75 %	135,000,000						75 %	150,000,000	
1	2	4	2.1	1		4 Kali	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	4 Kali	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.1	2		1 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 Laporan	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5				82 %	4,750,000,000						82 %	8,275,000,000	
1	2	5	2			4 kegiatan	3,000,000,000						4 kegiatan	4,500,000,000	
1	2	5	2	1		4 jenis	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 jenis	4,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2			100 %	1,500,000,000						100 %	3,500,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 2 5 2 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah jenis kegiatan Promkes dan GERMAS				2 Jenis	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Jenis	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	%		%	100 %	<b>250,000,000</b>						100 %	<b>275,000,000</b>	
1 2 5 2 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah orang yang mendapatkan bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM				1250 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1250 Orang	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>21,250,000,000</b>						<b>22,935,000,000</b>	
1 2 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM	%		%	84 %	<b>17,950,000,000</b>						84 %	<b>19,435,000,000</b>	
1 2 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>7,450,000,000</b>						2 Jenis	<b>8,080,000,000</b>	
1 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 dokumen	7,450,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14 dokumen	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah jenis layanan kesehatan di RSIA Sayang Ibu	Jenis		Jenis	13 Jenis	<b>10,500,000,000</b>						13 Jenis	<b>11,000,000,000</b>	
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Layanan Kesehatan BLUD				16 jenis	10,500,000,000				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16 jenis	11,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	%		%	100 %	<b>3,300,000,000</b>						100 %	<b>3,500,000,000</b>	
1 2 2 2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pemberi layanan kesehatan rujukan tingkat kota Balikpapan	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>3,300,000,000</b>						2 Jenis	<b>3,500,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
1 2 2 2 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya SDM RS untuk Menjalankan Operasional Pelayanan				89 orang	3,300,000,000					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		89 orang	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1 2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																
1 2 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase SKM	%	%	%	80 %	<b>79,500,000,000</b>								80 %	<b>79,500,000,000</b>	
1 2 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaporan keuangan SKPD	%	%	%	20 %	<b>14,500,000,000</b>								20 %	<b>14,500,000,000</b>	
1 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				2 Dokumen	14,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2 Dokumen	14,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 2.1	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah penurunan komplain tahun berjalan dibanding Jumlah komplain tahun lalu	Komplain		Komplain	9 Komplain	<b>65,000,000,000</b>								9 Komplain	<b>65,000,000,000</b>	
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit pemberi layanan Kesehatan				23 Unit	65,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		23 Unit	65,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Presentasi Layanan Kesehatan Memenuhi Standar	%	%	%	100 %	<b>25,500,000,000</b>								100 %	<b>43,000,000,000</b>	
1 2 2 2	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yg memenuhi standar	Unit		Unit	1 Unit	<b>20,000,000,000</b>								1 Unit	<b>30,500,000,000</b>	
1 2 2 2 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2 Unit	20,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2 Unit	20,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja di Bidang Kesehatan Yang Memenuhi Standar	Unit		Unit	1 Unit	<b>5,500,000,000</b>								1 Unit	<b>12,500,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
1 2 2 2 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah layanan Rumah Sakit				5 Layanan	5,500,000,000					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5 Layanan	12,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1 3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>330,000,000,000</b>								<b>234,146,315,800</b>	
1 3 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	"IKM Internal Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	<b>19,869,378,000</b>							100 %	<b>26,146,315,800</b>		
1 3 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	%	%	%	100 %	<b>10,114,378,000</b>							100 %	<b>11,125,815,800</b>		
1 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan				69 orang	10,114,378,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai ASN pad Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	69 orang	11,125,815,800	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1 3 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	"Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	<b>950,000,000</b>						100 %	<b>1,045,000,000</b>			
1 3 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemeliharaan Jaringan Listrik				1 paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 paket	27,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1 3 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK				54 jenis	435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	54 jenis	478,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM		
		Jumlah Kotakan				1232 Kotak							1232 Kotak				
		Jumlah Materai				600 Lembar							600 Lembar				
1 3 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				6 Macam	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 Macam	137,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1 3 1 2.1 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu				1 paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 paket	16,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1 3 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan				1 paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 paket	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM		
1 3 1 2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>4,950,000,000</b>						3 Jenis	<b>9,735,000,000</b>			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.3.1.2.1.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				2 unit	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	layanan pengadaan BMD	2 unit	1,320,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.3.1.2.1.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar				1 unit	3,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	layanan pengadaan BMD	1 unit	7,590,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.3.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya				29 jenis	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	layanan pengadaan BMD	29 jenis	825,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>1.3.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	jenis		jenis	4 jenis	<b>2,050,000,000</b>						4 jenis	<b>2,255,000,000</b>	
1.3.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening AIR				12 Bulan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	12 Bulan	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Rekening Internet				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Rekening Listrik				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Rekening Telepon				12 Bulan							12 Bulan		
1.3.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan				1 Paket	1,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Paket	1,815,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Tenaga Bantuan (NABAN)				42 Orang							42 Orang		
<b>1.3.1.2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	jenis		jenis	5 jenis	<b>1,805,000,000</b>						5 jenis	<b>1,985,500,000</b>	
1.3.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara				6 unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 unit	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.3.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BPKB				30 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	30 Dokumen	495,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		jumlah kendaraan yang di pelihara roda dua dan roda empat				58 unit							58 unit		
		Jumlah STNK				58 Dokumen							58 Dokumen		
1.3.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang di pelihara				6 unit	450,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 unit	495,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 3 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara				8 paket	310,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	8 paket	341,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 1 2.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 Gedung	345,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Gedung	379,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Jaringan Listrik				1 paket		1 paket							
		Jumlah Taman				1 Paket		1 Paket							
1 3 2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	%	%	58.82 %	<b>60,750,000,000</b>						58.82 %	<b>0</b>	
1 3 2 2	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	%	%	83.33 %	<b>60,750,000,000</b>						83.33 %	<b>0</b>	
1 3 2 2 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1 Dokumen	44,000,000,000				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Luas tanah Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang bebaskan				3 Ha		3 Ha							
1 3 2 2 39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Dokumen Pengawasan Peningkatan Polder/Kolam Retensi				1 Dokumen	7,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan				1 Unit							1 Unit		
1 3 2 2 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi				20 Titik	6,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	20 Titik	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 2 2 56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara				12 Unit	2,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	12 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 2 2 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan				1 Rekomendasi	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Rekomendasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	%	%	%	98.49 %	<b>10,000,000,000</b>						98.49 %	<b>25,000,000,000</b>	
1 3 3 2	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air	%	%	%	81.83 %	<b>10,000,000,000</b>						81.83 %	<b>25,000,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
		minum perpipaan (PDAM)																	
1	3	3	2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan Layanan Air Minum				98.49 Persentase	1,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses Air Minum Perpipaan (PDAM)	98.49 Persentase	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Dokumen Perencanaan				3 dok											3 dok		
		Sub Kegiatan Terlaksana				100 Persentase											100 Persentase		
1	3	3	2	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Cakupan Layanan Air Bersih				98.49 %	8,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses Air Minum Perpipaan (PDAM)	98.49 %	15,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Panjang Pipa Sekunder Terbangun				1120 Meter											1120 Meter		
		Sub Kegiatan Terlaksana				100 %											100 %		
1	3	4			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%		%	97.82 %	<b>2,000,000,000</b>						97.82 %	<b>0</b>	
1	3	4	2		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%		%	41.82 %	<b>2,000,000,000</b>						41.82 %	<b>0</b>	
1	3	4	2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Pembuangan Limbah				97.82 %	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana Persampahan	97.82 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Dokumen Perencanaan				1 dok											1 dok		
		Sub kegiatan Terlaksanaan				100 %											100 %		
1	3	4	2	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan Layanan Pembuangan Limbah				97.82 %	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana Persampahan	97.82 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah TPA yang Terbangun				2 Unit											2 Unit		
		Sub Kegiatan yang Terlaksana				100 %											100 %		
1	3	4	2	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan Layanan Pembuangan Limbah				97.82 %	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana Persampahan	97.82 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA				100 Orang											100 Orang		
		Sub Kegiatan Terlaksana				100 %											100 %		
1	3	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%		%	96,79 %	<b>500,000,000</b>						96,79 %	<b>0</b>	
1	3	5	2		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	%		%	92.05 %	<b>500,000,000</b>						92.05 %	<b>0</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 3 5 2 5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Cakupan Pengelolaan Air Limbah Domestik				96.95 %	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	96.95 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				5 Unit							5 Unit		
		Sub Kegiatan Terlaksana				100 %							100 %		
1 3 6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	%	52.84 %	112,000,000,000						52.84 %	0	
1 3 6 2	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	%	%	70.22 %	112,000,000,000						70.22 %	0	
1 3 6 2 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				4 Dokumen	8,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi				16 Dokumen	4,370,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	16 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun				2500 Meter	24,440,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	2500 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan				1000 Meter	31,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab				500 Meter	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	500 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
									Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
1 3 6 2 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran drainase yang dipelihara				86000 Meter	20,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	86000 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi				1 Dokumen	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 3 6 2 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dibangun				1000 Meter	5,982,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 6 2 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang ditingkatkan				1000 Meter	9,707,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
									DBH CHT						
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1 3 6 2 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				1 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%		%	81 %	<b>41,000,000,000</b>						81 %	<b>42,000,000,000</b>	
		Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan (non Kumuh)	%		%	81 %							81 %		
1 3 7 2	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%		%	55 %	<b>41,000,000,000</b>						55 %	<b>42,000,000,000</b>	
1 3 7 2 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan yang dibangun				22875 Meter	37,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	jalan lingkungan dalam kondisi baik	22875 Meter	37,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1 3 7 2 2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara				1500 Meter	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	jalan lingkungan dalam kondisi baik	1500 Meter	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 7 2 4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	jalan lingkungan dalam kondisi baik	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 8	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%		%	99,00 %	<b>37,650,000,000</b>						99,00 %	<b>115,000,000,000</b>	
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%		%	99,00 %							99,00 %		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1	3	8	2			96.4 %	37,650,000,000						96.4 %	115,000,000,000	
1	3	8	2	1		900 dokumen	210,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Bangunan di Kota Balikpapan	900 dokumen	20,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2	2		3 Unit	26,150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Bangunan di Kota Balikpapan	3 Unit	50,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2	12		26 Unit	8,290,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Bangunan di Kota Balikpapan	26 Unit	25,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	8	2	13		15 Unit	3,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Bangunan di Kota Balikpapan	15 Unit	20,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10				7.35 %	45,480,622,000						7.35 %	23,800,000,000	
1	3	10	2			85.36 %	45,480,622,000						85.36 %	23,800,000,000	
1	3	10	2	1		4 Dokumen	1,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	4 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2	4		2 Dokumen	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3	10	2	6		1000 Meter	16,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	1000 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 3 10 2 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				500 Meter	13,180,622,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	500 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 3 10 2 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi				1500 Meter	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	1500 Meter	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 10 2 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin				4500 Meter	5,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	4500 Meter	7,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 10 2 16	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti				2 buah	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	2 buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 10 2 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin				60 Meter	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	60 Meter	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 10 2 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kegiatan jalan dan jembatan yang terawasi				5 Dokumen	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Kota Balikpapan	5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%		%	100 %	<b>750,000,000</b>						100 %	<b>2,200,000,000</b>	
1 3 11 2	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		%	6.55 %	<b>550,000,000</b>						6.55 %	<b>1,925,000,000</b>	
1 3 11 2 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah BUJK yang di bina				200 BUJK	550,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi)	200 BUJK	1,925,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah tenaga terampil disertifikasi				500 orang							500 orang		
1 3 11 2	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	%		%	20 %	<b>200,000,000</b>						20 %	<b>275,000,000</b>	
1 3 11 2 9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disusun				2 dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	2 dokumen	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										<b>22,800,000,000</b>	<b>41,686,788,535</b>		
1	4	1				70 skor	<b>8,914,549,790</b>					70 skor	<b>10,451,788,535</b>		
1	4	1	2			1 Dokumen	<b>6,549,549,790</b>					1 Dokumen	<b>7,030,788,535</b>		
1	4	1	2	1		14 dokumen	6,549,549,790	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	14 dokumen	7,020,788,535	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.1			1 Dokumen	<b>585,000,000</b>					1 Dokumen	<b>676,000,000</b>		
1	4	1	2.1	1		8 Jenis	15,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	8 Jenis	16,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.1	4		56 Jenis	265,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	56 Jenis	260,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.1	5		15 Jenis	105,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	15 Jenis	105,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.1	9		1 Paket	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Paket	250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.1			4 Jenis	<b>100,000,000</b>					4 Jenis	<b>810,000,000</b>		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.4.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	5 Jenis	110,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
<b>1.4.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>965,000,000</b>						3 Jenis	<b>991,000,000</b>	
1.4.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat				2 Jenis	5,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Jenis	6,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 kali	235,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	12 kali	235,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara				1100 Meter persegi	725,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	1100 Meter persegi	750,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
<b>1.4.1.2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	4 Jenis	<b>715,000,000</b>						4 Jenis	<b>740,000,000</b>	
1.4.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara				33 Unit	330,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	33 Unit	340,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				2 Unit	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Unit	110,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara				7 Jenis	85,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	7 Jenis	90,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya				1 kali	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	1 kali	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	4	2				0 Persen	10,185,450,210						0 Persen	18,360,000,000	
1	4	2	2			11.82 Persen	900,000,000						11.82 Persen	500,000,000	
1	4	2	2	1		2 lokasi	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukturu yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	2 lokasi	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2	2		1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukturu yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2	4		1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukturu yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2	5		1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukturu yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	4	2	2	6		2 dokumen	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukturu yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	2 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
											Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas				
1	4	2	2			8.27 Persen	250,000,000							8.27 Persen	460,000,000	
1	4	2	2	3		50 Buah	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	50 Buah	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1	4	2	2	4		50 Orang	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	50 Orang	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1	4	2	2	5		5 Kali	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat penerima bantuan terdampak bencana	5 Kali	60,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1	4	2	2.1			68 %	6,800,000,000						68 %	9,500,000,000		
1	4	2	2.1	1		1 Unit	5,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman dan Rusunawa di Kota Balikpapan	1 Unit	7,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.2.2.1.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni				507 Kamar	1,800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman dan Rusunawa di Kota Balikpapan	507 Kamar	2,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.2.2.1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Persentase Perumahan yang sesuai rencana	Persen		Persen	4.39 Persen	<b>2,235,450,210</b>						4.39 Persen	<b>4,650,000,000</b>	
1.4.2.2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan				86 lokasi	2,235,450,210	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Perumahan Kota Balikpapan	86 lokasi	4,600,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen		Persen	0 Persen	<b>1,600,000,000</b>						0 Persen	<b>7,750,000,000</b>	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		%	1,18 %							1,18 %		
		Persentase kawasan permukiman kumuh kota yang ditangani	Persen		Persen	6.1 Persen							6.1 Persen		
1.4.3.2	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Jumlah Kawasan Permukiman yang tertata	kawasan		kawasan	1 kawasan	<b>50,000,000</b>						1 kawasan	<b>200,000,000</b>	
		Persentase Perumahan yang sesuai rencana	%		%	4.39 %							4.39 %		
1.4.3.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				10 Kali	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kota Balikpapan	10 Kali	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.3.2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha		Ha	29.07 Ha	<b>150,000,000</b>						29.07 Ha	<b>775,000,000</b>	
1.4.3.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.3.2.3	Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP				6 Kelompok	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	6 Kelompok	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.3.2	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen		Persen	6.1 Persen	<b>1,400,000,000</b>						6.1 Persen	<b>6,775,000,000</b>	
1.4.3.2.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/peremugaran permukiman kumuh				6 dokumen	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	6 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.3.2.6	Pelaksanaan Pembangunan Peremugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Peremugaran/Peremajaan permukiman kumuh				1 Hektar	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 Hektar	3,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.3.2.7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.4	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen		Persen	4.3 Persen	<b>700,000,000</b>						4.3 Persen	<b>1,775,000,000</b>	
1.4.4.2	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Unit		Unit	26 Unit	<b>700,000,000</b>						26 Unit	<b>1,775,000,000</b>	
1.4.4.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				26 Unit	700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan	26 Unit	1,250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.4.5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Persen		Persen	3 Persen	<b>1,400,000,000</b>						3 Persen	<b>3,350,000,000</b>	
1.4.5.2	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	Persen		Persen	1.39 Persen	<b>1,400,000,000</b>						1.39 Persen	<b>3,350,000,000</b>	
1.4.5.2.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Penyerahan PSU Perumahan				3 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	3 dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1.4.5.2.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan				10 dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	10 dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1.4.5.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Kali	1,250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	12 Kali	3,200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
											Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas					
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1.5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>32,280,000,000</b>							<b>53,050,000,000</b>	
1.5.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase keselarasan perencanaan, penagaran dan evaluasi kinerja terhadap RPJMD	%	%	%	100 %	<b>25,300,000,000</b>						100 %	<b>36,675,000,000</b>		
1.5.1.2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	persentase penyelesaian dokumen	%	%	%	100 %	<b>10,000,000</b>						100 %	<b>45,000,000</b>		
1.5.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.5.1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan	%	%	%	100 %	<b>21,000,000,000</b>						100 %	<b>22,400,000,000</b>		
1.5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				165 Orang	21,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur BPBD Kota Balikpapan	165 Orang	22,400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.5.1.2.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis pelayanan administrasi kepegawaian	jenis		jenis	10 jenis	<b>850,000,000</b>						10 jenis	<b>2,130,000,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah jenis sarana prasarana yang tersedia				4 Jenis	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	4 Jenis	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas dan atribut yang disediakan				325 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	325 Orang	530,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat				100 Orang	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	100 Orang	750,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan				5 Kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	5 Kegiatan	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1.5.1.2.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	peningkatan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	<b>680,000,000</b>						100 %	<b>1,355,000,000</b>	
1.5.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				20 Jenis	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	20 Jenis	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia				25 Jenis	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	25 Jenis	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				15 Jenis	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	15 Jenis	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	1 Paket	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 5 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				15 Jenis	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	15 Jenis	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				2 Jenis	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	2 Jenis	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia				15 Jenis	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	15 Jenis	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	1 Paket	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi				1 Paket	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur dan masyarakat	1 Paket	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 5 1 2.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis barang yang diadakan	jenis		jenis	10 jenis	<b>65,000,000</b>						10 jenis	<b>6,140,000,000</b>	
1 5 1 2.1 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia				1 Jenis	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		masyarakat kota balikpapan	1 Jenis	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		masyarakat kota balikpapan		50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 5 1 2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>580,000,000</b>						100 %	<b>780,000,000</b>	
1 5 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 Jenis	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	aparatur BPBD	4 Jenis	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor dan lingkungannya				1 Paket	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	aparatur BPBD	1 Paket	130,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 5 1 2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	terpeliharanya barang milik daerah	%		%	100 %	<b>2,115,000,000</b>						100 %	<b>3,745,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	5	1	2.1	1			1 paket	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang milik daerah	1 paket	550,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.1	2			1 Paket	1,450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang milik daerah	1 Paket	2,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.1	6			5 Jenis	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang milik daerah	5 Jenis	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.1	10			1 paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang milik daerah	1 paket	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.1	11			15 jenis	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang milik daerah	15 jenis	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	2						50,000,000							60,000,000	
1	5	2	2					50,000,000							60,000,000	
1	5	2	2	7			2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3						1,110,000,000						100 %	6,080,000,000	
1	5	3	2				20 %	125,000,000						20 %	350,000,000	
1	5	3	2	1			1 dokumen	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2				100 %	700,000,000						100 %	3,065,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		jumlah penduduk yang berada dikawasan rawan bencana yang mendapat layanan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	%		%	100 %							100 %		
		Terkurangnya dampak buruk bencana terhadap penduduk yang terdampak bencana	%		%	50 %							50 %		
1	5	3	2	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah/legal							1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	tersedianya sarana prasarana pendukung pusdalops							30 jenis	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							15 Jenis	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah penyuluhan di kawasan resiko bencana							6 kegiatan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah rapat pembentukan relawan pada kawasan rawan bencana							2 Kegiatan	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang-barang kebutuhan darurat pascabencana							10 Jenis	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	tersedianya dokumen rencana kontijensi							1 dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah gladi kesiapsiagaan bencana dalam 1 tahun							3 kegiatan	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 5 3 2	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%		%	90 %	235,000,000						90 %	2,345,000,000	
1 5 3 2 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	persentase kecepatan respon kurang dari 24 setiap penetapan status KLB				12 jenis	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	12 jenis	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100 %	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	125,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persentase jumlah korban yang berhasil di cari dan di evakuasi				100 %	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang logistik yang disediakan untuk antisipasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam satu tahun				25 jenis	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kota Balikpapan	25 jenis	1,500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	persentase kecepatan respon kurang dari 24 untuk setiap penetapan status bencana non alam epidemik/wabah dalam satu tahun				100 %	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kota Balikpapan	100 %	20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 3 2	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	%		%	50 %	50,000,000					50 %	320,000,000		
1 5 3 2 5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah pembinaan pada masyarakat terhadap penanggulangan bencana dalam satu tahun				5 Kegiatan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Kegiatan	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 5 4	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	persentase cakupan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan berbahaya	%		%	94 %	5,820,000,000					94 %	10,235,000,000		
1 5 4 2	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan jumlah pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai respon time terhadap keseluruhan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan	%		%	80 %	5,020,000,000					80 %	8,065,000,000		
1 5 4 2 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pemadam kebakaran non PNS				146 Orang	4,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Masyarakat Kota Balikpapan	146 Orang	5,200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
1	5					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							<b>43,679,403,708</b>				
1	5	1				77 Nilai	<b>24,700,000,000</b>						77 Nilai	<b>29,616,728,708</b>			
1	5	1	2			3 Jenis	<b>22,400,000,000</b>						3 Jenis	<b>25,601,728,708</b>			
1	5	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 dokumen	22,400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	14 dokumen	25,601,728,708	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan	orang	258 orang	<b>20,000,000</b>						258 orang	<b>726,000,000</b>	
1	5	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		258 orang	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	258 orang	726,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis	5 jenis	<b>540,000,000</b>						5 jenis	<b>1,193,500,000</b>	
1	5	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2 jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	2 jenis	66,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor		3 jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	3 jenis	165,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor		2 jenis	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	2 jenis	495,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		3 jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	3 jenis	82,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.5.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				48 kali	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	48 kali	385,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.1.2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan pengadaan BMD	jenis		jenis	4 jenis	<b>20,000,000</b>						4 jenis	<b>275,000,000</b>	
1.5.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya				4 jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	4 jenis	275,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.1.2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis		jenis	2 jenis	<b>620,000,000</b>						2 jenis	<b>748,000,000</b>	
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 jenis	220,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	4 jenis	253,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				2 jenis	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	2 jenis	495,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.1.2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan pemeliharaan BMD	jenis		jenis	3 jenis	<b>1,100,000,000</b>						3 jenis	<b>1,072,500,000</b>	
1.5.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240 kali	950,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	240 kali	825,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	3 jenis	82,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	1 jenis	165,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Menurunnya Angka Pelanggaran Peraturan Daerah	%		%	55 %	<b>2,800,000,000</b>						55 %	<b>14,062,675,000</b>	
1.5.2.2	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Angka pelanggaran Perda/Perkada	Pelanggaran		Pelanggaran	4700 Pelanggaran	<b>2,595,000,000</b>						4700 Pelanggaran	<b>13,490,675,000</b>	
		Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan	Pelanggaran		Pelanggaran	4250 Pelanggaran							4250 Pelanggaran		
1.5.2.2.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Penyelenggaraan Trantibumlinmas				240 kegiatan	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	240 kegiatan	2,860,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Trantibumlinmas				240 kegiatan							240 kegiatan		
		Jumlah Pelaksanaan Patroli Penyelenggaraan Trantibumlinmas				240 kegiatan							240 kegiatan		
		Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Trantibumlinmas				360 kegiatan							360 kegiatan		
1.5.2.2.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				12 kegiatan	1,830,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	12 kegiatan	2,530,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Penertiban Gangguan sesuai Perda dan Perkada				72 kegiatan							72 kegiatan		
1.5.2.2.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan Kelinmasan				300 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	300 orang	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.5.2.2.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas dan Satgas Linmas yang diberdayakan				230 orang	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	230 orang	3,575,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Satlinmas dan Satgas Linmas yang diberikan honor dalam satu tahun				230 orang							230 orang		
1.5.2.2.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pembinaan personil Satpol PP				233 orang	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	233 orang	715,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 5 2 2 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah MoU/PKS dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum				10 dokumen/berkas	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	10 dokumen/berkas	110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang diadakan dan dipelihara				3 jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	3 jenis	3,080,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2 9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah SOP Trantibumlinmas yang dilaksanakan				15 dokumen/berkas	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	15 dokumen/berkas	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan yang diberikan kepada Masyarakat akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada				2 jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	2 jenis	345,675,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Perda/Perkada yang ditegakkan	Perda		Perda	16 Perda	<b>155,000,000</b>						16 Perda	<b>462,000,000</b>	
		Perda/Perkada yang memuat sanksi	Perda		Perda	26 Perda							26 Perda		
1 5 2 2 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada dalam satu tahun				12 kegiatan	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	12 kegiatan	132,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan Perda dan Perkada				240 kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	240 kegiatan	110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Perda dan Perkada				10 kegiatan	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Balikpapan	10 kegiatan	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 2	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PPNS Aktif	orang		orang	13 orang	<b>50,000,000</b>						13 orang	<b>110,000,000</b>	
		Jumlah PPNS Kota Balikpapan	orang		orang	27 orang							27 orang		
1 5 2 2 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Diklat PPNS				50 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	PPNS di lingkungan Pemerintah kota Balikpapan	50 orang	110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 6	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>12,500,000,000</b>						<b>13,535,000,000</b>	
1 6 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	<b>8,128,000,000</b>						70 nilai	<b>8,565,000,000</b>	
1 6 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	<b>6,000,000,000</b>						70 nilai	<b>6,200,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1.6.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,200,000,000	DINAS SOSIAL	
<b>1.6.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	<b>788,000,000</b>					70 nilai	<b>895,000,000</b>		
1.6.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				10 paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 paket	15,000,000	DINAS SOSIAL	
1.6.1.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor				5 paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	350,000,000	DINAS SOSIAL	
1.6.1.2.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakai Dinas beserta Atributnya kelengkapannya				40 Jumlah Pegawai	28,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 Jumlah Pegawai	30,000,000	DINAS SOSIAL	
1.6.1.2.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				2 paket	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 paket	500,000,000	DINAS SOSIAL	
<b>1.6.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	<b>1,040,000,000</b>					70 nilai	<b>1,150,000,000</b>		
1.6.1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				5 paket	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 paket	150,000,000	DINAS SOSIAL	
1.6.1.2.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani				15 jenis	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 jenis	1,000,000,000	DINAS SOSIAL	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 6 1 2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	300,000,000						70 nilai	320,000,000	
1 6 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara				30 unit	270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 unit	280,000,000	DINAS SOSIAL	
1 6 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan				1 paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	40,000,000	DINAS SOSIAL	
1 6 2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Jumlah Pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	lembaga		lembaga	15 lembaga	875,000,000					15 lembaga	960,000,000		
1 6 2 2	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	Lembaga		Lembaga	15 Lembaga	200,000,000					15 Lembaga	250,000,000		
1 6 2 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi PUB yang diterbitkan				15 rekomendasi	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	15 rekomendasi	250,000,000	DINAS SOSIAL
		Sosialisasi Tata cara UGB dan PUB				2 Kegiatan					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Kegiatan		
		Terlaksananya dana Hibah, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum				6 paket							6 paket		
1 6 2 2	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya fasilitas kegiatan lapangan TKSK	orang		orang	6 orang	675,000,000					6 orang	710,000,000		
		Terlaksananya fasilitas kegiatan lapangan PSM	orang		orang	34 orang						34 orang			
1 6 2 2 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan lapangan PSM				40 orang	585,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	40 orang	600,000,000	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
											Pelayanan Publik								
		Terlaksananya pelatihan PSKS				2 Kegiatan					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	2 Kegiatan							
											Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik								
1	6	2	2	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan lapangan TKSK				6 orang	90,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	6 orang	110,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang		Orang	868 Orang	<b>1,183,000,000</b>						868 Orang	<b>1,370,000,000</b>	
1	6	4	2		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang		Orang	868 Orang	<b>558,000,000</b>						868 Orang	<b>605,000,000</b>	
1	6	4	2	1	Penyediaan Permakanan						375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		400,000,000		DINAS SOSIAL





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
											berdaya saing									
											Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing									
1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang				51 orang	40,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	51 orang	50,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial				257 orang	93,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	257 orang	95,000,000	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 6 4 2 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk				30 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	30 orang	60,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 4 2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah Penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV /AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang		Orang	270 Orang	<b>625,000,000</b>						270 Orang	<b>765,000,000</b>	
1 6 4 2 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi				270 orang	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	270 orang	250,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 4 2 4	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV / AIDS NAPZA yang menerima paket sandang				270 orang	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	270 orang	15,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 4 2 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar				60 orang	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60 orang	350,000,000	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.4.2.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk				30 orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30 orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
1.6.4.2.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlantar yang meninggal dan mendapatkan pelayanan pemakaman melalui lembaga kemitraan				12 orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12 orang	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.6.5.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen		Persen	25.50 Persen	<b>1,469,000,000</b>						25.50 Persen	<b>1,520,000,000</b>	
1.6.5.2.	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen		Persen	25.5 Persen	<b>1,469,000,000</b>						25.5 Persen	<b>1,520,000,000</b>	
1.6.5.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Potensi Kejahteraan Sosial yang diperbaharui				30000 jiwa	1,150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	30000 jiwa	1,200,000,000	DINAS SOSIAL
1.6.5.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM Pendamping PKH yang melakukan pendampingan kepada KPM  Jumlah SDM Pendamping Program Sembako yang melakukan pendampingan kepada KPM				23 orang  7 orang	319,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	23 orang  7 orang	320,000,000	DINAS SOSIAL
1.6.6.	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jiwa		Jiwa	12751 Jiwa	<b>650,000,000</b>						12751 Jiwa	<b>910,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
1 6 6 2	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jiwa		Jiwa	12751 Jiwa	425,000,000						12751 Jiwa	610,000,000	
1 6 6 2 1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji  Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan Natura				12000 jiwa  230 Rumah Tangga Sasaran	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	12000 jiwa  230 Rumah Tangga Sasaran	150,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 6 2 2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang				407 jiwa	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	407 jiwa	200,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 6 2 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki				57 unit	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	57 unit	100,000,000	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 6 6 2 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban bencana khusus bagi kelompok rentan yang mendapat bantuan perlengkapan dan kebersihan pribadi				50 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	50 orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 6 2 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya tenaga dukungan layanan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam dan sosial di kabupaten / Kota				7 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	7 orang	60,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 6 2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen		Persen	80 Persen	<b>225,000,000</b>						80 Persen	<b>300,000,000</b>	
1 6 6 2 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pengurus Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial				100 orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan perberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	100 orang	100,000,000	DINAS SOSIAL





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 6 6 2 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pemantapan peningkatan kemampuan pendirian shelter, dapur umum dan manajemen logistik serta pengerahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial				104 orang	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan perberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	104 orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	Paket		Paket	5 Paket	<b>195,000,000</b>						5 Paket	<b>210,000,000</b>	
1 6 7 2	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	Paket		Paket	5 Paket	<b>195,000,000</b>						5 Paket	<b>210,000,000</b>	
1 6 7 2 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi Sarana dan Prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota				5 Kegiatan	145,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	5 Kegiatan	150,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 7 2 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota				3 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	3 Kegiatan	60,000,000	DINAS SOSIAL
		Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota				1 paket							1 paket		
		Terlaksananya Sosialisasi Restorasi Sosial				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>9,500,000,000</b>							<b>9,735,500,000</b>	
2 7 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	%		%	85 %	<b>6,945,000,000</b>						85 %	<b>7,065,500,000</b>	
2 7 1 2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	<b>15,000,000</b>						2 Sub Kegiatan	<b>15,000,000</b>	
2 7 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)				3 Dokumen	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	3 Dokumen	7,500,000	DINAS KETENAGAKERJAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 7 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)				2 Dokumen	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	2 Dokumen	7,500,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	<b>5,352,500,000</b>						1 Sub Kegiatan	<b>5,402,500,000</b>	
2 7 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN				26 Dokumen	5,350,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	26 Dokumen	5,400,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	2,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	1 Dokumen	2,500,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	<b>845,074,300</b>						8 Sub Kegiatan	<b>895,074,300</b>	
2 7 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				10 Jenis	5,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	10 Jenis	5,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor				12 Jenis	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	12 Jenis	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	7	1	2.1	3			5 Jenis	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	5 Jenis	35,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	4			78 Jenis	301,755,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	78 Jenis	301,755,800	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	5			20 Jenis	35,101,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	20 Jenis	35,101,500	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	6			3 Jenis	8,217,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	3 Jenis	8,217,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	8			200 Porsi	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	200 Porsi	35,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	9			200 Kali	400,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	200 Kali	450,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				3 Sub Kegiatan	<b>213,925,700</b>						3 Sub Kegiatan	<b>213,925,700</b>		



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	7	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya										
						7 Jenis	213,925,700	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	7 Jenis	213,925,700	DINAS KETENAGAKERJAN	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan						4 Sub Kegiatan	<b>214,000,000</b>		
2	7	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat Menyurat										
						1 Jenis	3,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	1 Jenis	4,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						6 Jenis	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	6 Jenis	35,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
2	7	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Bantuan (Non PNS Administrasi)										
						Jumlah Tenaga Profesional										
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						7 Orang	175,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	7 Orang	175,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	
						3 Orang							3 Orang			
						10 Jenis							10 Jenis			
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan						3 Sub Kegiatan	<b>325,000,000</b>		
2	7	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara										
						15 Unit	225,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	15 Unit	225,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN	









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 7 4 2 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha				25 Orang	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pencari Kerja, Pengusaha Sektor Formal, Informal dan BUMN	25 Orang	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 4 2	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	<b>140,000,000</b>						3 Sub Kegiatan	<b>220,000,000</b>	
2 7 4 2 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara				2 Aplikasi	60,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Data Ketenagakerjaan dan Pencari Kerja	2 Aplikasi	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 4 2 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah JMF Yang Dilaksanakan				1 Kali	80,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Data Ketenagakerjaan dan Pencari Kerja	1 Kali	160,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 4 2.1	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	<b>50,000,000</b>						1 Sub Kegiatan	<b>50,000,000</b>	
2 7 4 2.1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah TKA yang Mengurus Perpanjangan Notifikasi				100 Persen	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Perpanjangan Ijin	100 Persen	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2 7 5	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	20 %	<b>515,000,000</b>						20 %	<b>540,000,000</b>	
2 7 5 2	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	<b>40,000,000</b>						3 Sub Kegiatan	<b>40,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	7	5	2	2		100 Persen	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Prusahaan Di Balikpapan yang Melakukan Pendataan dan Pengambilan Informasi Sarana HI dan Jamsos Tenaga Kerja	100 Persen	15,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2	7	5	2	3		1 Dokumen	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Prusahaan Di Balikpapan yang Melakukan Pendataan dan Pengambilan Informasi Sarana HI dan Jamsos Tenaga Kerja	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>4 Sub Kegiatan</b>	<b>475,000,000</b>						<b>4 Sub Kegiatan</b>	<b>500,000,000</b>	
2	7	5	2	1		4 Kali	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dewan Pengupahan Kota Balikpapan dan LKS Tripartit Kota Balikpapan	4 Kali	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2	7	5	2	2		100 Persen	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dewan Pengupahan Kota Balikpapan dan LKS Tripartit Kota Balikpapan	100 Persen	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN
2	7	5	2	3		3 Kali	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dewan Pengupahan Kota Balikpapan dan LKS Tripartit Kota Balikpapan	3 Kali	125,000,000	DINAS KETENAGAKERJAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 7 5 2 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Sidang Dewan Pengupahan dan Jumlah Pertemuan Sidang LKS Tripartit				6 Kali Pertemuan	175,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dewan Pengupahan Kota Balikpapan dan LKS Tripartit Kota Balikpapan	6 Kali Pertemuan	175,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						11,335,654,100						12,837,954,100		
2 8 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terselenggaranya dukungan Administrasi Keuangan, Sarana Prasarana dan Perencanaan/Monev	Jumlah Jenis Layanan Penunjang Urusan		Jumlah Jenis Layanan Penunjang Urusan	3 Jumlah Jenis Layanan Penunjang Urusan	8,580,654,100						3 Jumlah Jenis Layanan Penunjang Urusan	9,702,954,100	
2 8 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	119 Dokumen	6,524,954,100						119 Dokumen	6,524,954,100	
2 8 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam setiap bulan				26 dokumen	6,524,954,100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	26 dokumen	6,524,954,100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2 8 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	5 Jenis	641,000,000						5 Jenis	703,000,000	
		jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	5 Jenis							5 Jenis		
2 8 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah jenis peralatan				14 jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DP3AKB	14 jenis	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Jumlah perlengkapan kantor				6 jenis							6 jenis		
2 8 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor (ATK)				24 jenis	260,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DP3AKB	24 jenis	280,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)				14.825 kotak							14.825 kotak		
2 8 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				3 jenis	90,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB	3 jenis	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah											
2	8	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material						14 jenis	11,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DP3AKB	14 jenis	13,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah						24 kali	180,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DP3AKB	24 kali	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
						Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah						25 kali										
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis			1 Jenis	<b>500,000,000</b>							1 Jenis	<b>1,320,000,000</b>	
2	8	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan						4 unit	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	4 unit	1,320,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis			3 Jenis	<b>429,700,000</b>							3 Jenis	<b>494,000,000</b>	
2	8	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik						7 rekening	45,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	7 rekening	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4 rekening	64,700,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	4 rekening	72,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS						18 orang	320,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	18 orang	352,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis		Jenis			2 Jenis	<b>485,000,000</b>							2 Jenis	<b>661,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah												
		Urusan Pemerintahan Daerah																					
		umlah jenis layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis						2 Jenis											
2	8	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM						30300 liter bbm	425,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	30300 liter bbm	468,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 2				1 unit						1 unit											
		Roda 2				50 unit						50 unit											
		Roda 4				12 unit						12 unit											
2	8	1	2.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya						4 jenis	60,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	4 jenis	193,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	rosentase OPD yang telah menyusun anggaran yang Responsif Gender (jumlah OPD yg telah menyusun PPRG/jumlah seluruh OPD x100%)	%		%			77,80 %	<b>375,000,000</b>							77,80 %	<b>412,500,000</b>		
2	8	2	2		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	Dokumen		Dokumen			1 Dokumen	<b>350,000,000</b>							1 Dokumen	<b>385,000,000</b>		
2	8	2	2	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD ( pendampingan pihak ketiga ) 2. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2024						3 OPD	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD di Kota Balikpapan	3 OPD	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
												1 Dokumen								1 Dokumen			
2	8	2	2	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Terlaksananya Sosialisasi PUG termasuk PPRG di Instansi Pemerintah 2. Penerbitan Modul PPRG 3. Pencetakan Leaflet 4. Pencetakan Banner						36 OPD	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD di Kota Balikpapan	36 OPD	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
												50 Buku								50 Buku			
												1000 Leaflet								1000 Leaflet			
												36 Banner								36 Banner			
2	8	2	2		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kelompok Industri Rumahan yang dibina	Kelompok		Kelompok			3 Kelompok	<b>25,000,000</b>							3 Kelompok	<b>27,500,000</b>		
						umlah Kelompok Industri Rumahan yang dibina	Kelompok		Kelompok			3 Kelompok								3 Kelompok			





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
								Semua Kelurahan								KELUARGA BERENCANA	
		2. Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA				1000 Orang						1000 Orang					
		3. Jumlah Calon Pengantin ( CATIN ) yang Mendapat Layanan Penguatan Pra Nikah				100 Pasangan						100 Pasangan					
		4. Jumlah Kemitraan PUSPAGA dengan Pihak Lain				6 Dokumen						6 Dokumen					
		5. Terselenggaranya Psychological First Aid/Trauma Healing dalam situasi bencana/krisis				30 Dokumen						30 Dokumen					
2	8	5															
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Cakupan OPD yang memiliki Data Terpilah (jumlah OPD memiliki data terpilah dibagi Jumlah OPD dikali 100)	%	%	27,8 %	75,000,000							27,8 %	82,500,000		
2	8	5	2														
		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah OPD	Jumlah OPD	10 Jumlah OPD	75,000,000							10 Jumlah OPD	82,500,000		
			umlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah OPD	Jumlah OPD	10 Jumlah OPD								10 Jumlah OPD			
2	8	5	2	1													
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Profil Gender (IPG)			50 Buku/CD	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			OPD di Kota Balikpapan	50 Buku/CD	82,500,000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
			2. Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan pelatihan pemanfaatan aplikasi SIGA			10 OPD							10 OPD				
			3. Terselenggaranya Pendampingan OPD dalam penginputan pada aplikasi SIGA ( durasi pendampingan )			3 Kali							3 Kali				
2	8	6															
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	%	25 %	595,000,000							25 %	720,500,000		
			Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	%	65 %							65 %				
2	8	6	2														
		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementrian PPPA	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	395,000,000							1 Dokumen	434,500,000		
2	8	6	2	1													
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA			2 Kali	395,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan	2 Kali	434,500,000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Terselenggaranya proses evaluasi KLA (Rekomendasi Gugus Tugas KLA)			1 Dokumen							1 Dokumen				
			Tersusunnya RAD Balikpapan menuju KLA Tahun 2021-2024			1 Dokumen							1 Dokumen				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2 8 6 2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	200,000,000						10 Lembaga	286,000,000		
2 8 6 2 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan di lapangan terkait kebijakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)				10 Puskesmas	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Lembaga Penyedia Layanan	10 Puskesmas	286,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak di Kota Balikpapan				1 Forum Anak							1 Forum Anak			
		Terselenggaranya pembinaan ke sekolah terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) & Pelaksanaan Outdoor Classroom Days (OCD)				10 SRA/OCD								10 SRA/OCD		
2 8 7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Prosentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA kalikan 100)	%	%		65 %	860,000,000						65 %	984,500,000		
2 8 7 2	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak (Jumlah RT terpapar regulasi perlindungan khusus anak dibagi jumlah RT dikalikan 100)	%	%		6.95 %	200,000,000						6.95 %	258,500,000		
2 8 7 2 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KIE yang terkait dengan AMPK ( Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus ) di Wilayah RT (Lautan RT)				24 RT	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kota Balikpapan	24 RT	258,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Terselenggaranya penguatan peran dan fungsi PPATBM ditingkat Kelurahan				34 Kelompok PPATBM							34 Kelompok PPATBM			
2 8 7 2	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPTD PPA	Nilai		Nilai	80 Nilai	660,000,000						80 Nilai	726,000,000		
2 8 7 2 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus				40 Orang	660,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kota Balikpapan	40 Orang	726,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus				1 Unit							1 Unit			
		Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam Penanganan Klien UPTD PPA				30 Orang								30 Orang		
		Terselenggaranya Penanganan Pengaduan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak				80 Orang								80 Orang		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		yang memerlukan Perlindungan Khusus													
		Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus				50 Dokumen Klien						50 Dokumen Klien			
2	13						7,904,345,900						10,010,000,000		
2	13	4											41,18 %	825,000,000	
2	13	4	2										14 Jumlah Kelurahan	825,000,000	
2	13	4	2	11									34 kegiatan	275,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				34 kegiatan	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelurahan di Kota Balikpapan	34 kegiatan	275,000,000	
		1. Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan				14 Jumlah kelurahan							14 Jumlah kelurahan		
		2. Terselenggaranya Pendampingan Peningkatan Data di Aplikasi Profil Kelurahan oleh Kelurahan Piloting				4 kegiatan							4 kegiatan		
		3. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Data Profil Kelurahan													
2	13	4	2	18									1 kegiatan	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 kegiatan	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelurahan di Kota Balikpapan	1 kegiatan	550,000,000	
		1. Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berprestasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		2. Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi/Tkt Nasional													
2	13	5											40 %	9,185,000,000	
2	13	5	2										10 Jumlah Lembaga	9,185,000,000	
2	13	5	2	2									1 Ormas	465,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Ormas	430,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	1 Ormas	465,000,000	
		Hibah Untuk Karang Taruna				28 Ormas							28 Ormas		
		Hibah untuk LPM													





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 13 5 2 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanel Posyandu, LPM dan Karang Taruna) 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota 3. Terselenggaranya Pembinaan kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan 4. Terselenggaranya Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan persiapan lomba Posyandu di Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional 5. Terfasilitasinya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 6. Rakorda Pemberdayaan Masyarakat				10 jumlah lembaga	1,425,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	10 jumlah lembaga	1,570,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						4 kegiatan							4 kegiatan		
						3 kegiatan							3 kegiatan		
						3 kegiatan							3 kegiatan		
						1 kegiatan							1 kegiatan		
						1 kegiatan							1 kegiatan		
2 13 5 2 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1. Terselenggaranya Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan) 2. Terselenggaranya Fasilitasi Rakor LPM Tingkat Kota 3. Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Karang Taruna Tingkat Kota 4. Terselenggaranya Lomba BBGRM Tingkat Kota dan Pendampingan keikutsertaan/ Tuan Rumah dalam di Tingkat Propinsi/Nasional				1 kegiatan	599,345,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	1 kegiatan	880,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						1 kegiatan							1 kegiatan		
						1 kegiatan							1 kegiatan		
						2 kegiatan							2 kegiatan		
2 13 5 2 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1. Terfasilitasinya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK : a. Sekretariat b. Pokja I c. Pokja II d. Pokja III e. Pokja IV Terselenggaranya Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/Nasional				5 kegiatan	4,700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	5 kegiatan	6,270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						1 kegiatan							1 kegiatan		
2 14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>1,760,000,000</b>						<b>1,780,000,000</b>	
2 14 2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	%		%	35 %	<b>180,000,000</b>						35 %	<b>100,000,000</b>	
2 14 2 2	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>180,000,000</b>						1 Dokumen	<b>100,000,000</b>	
2 14 2 2 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1. Tersedianya Data Lapangan ( Dallap )				12 Dokumen	180,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber	Masyarakat Kota Balikpapan	12 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		2. Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB				85 Nilai			DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				85 Nilai		KELUARGA BERENCANA
		3. Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB				66 Faskes							66 Faskes		
		4. Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum				465 Orang							465 Orang		
2	14	3	2		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Jumlah Intervensi		Jumlah Intervensi					34 Jumlah Intervensi	<b>100,000,000</b>	
					umlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	Jumlah Intervensi		Jumlah Intervensi					34 Jumlah Intervensi		
2	14	3	2	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1. Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)						Kampung KB di Kota Balikpapan	10 Rumah Data KB	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
					2. Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina								34 Kampung KB		
2	14	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan ( Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dibagi jumlah keluarga versi DALLAP BKKBN dikalikan 100 )	%	%					10.74 %	<b>1,000,000,000</b>	
					Cakupan Kelurahan yang Memiliki Profil Kelurahan sesuai Standar Prodeskel (Jml kel yang menyusun profil sesuai standar prodeskel/ jumlah kelurahan X 100%)	%	%						1.01 %		
2	14	4	2		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Cakupan jumlah kelompok BKB terbentuk ( Jumlah kelompok BKB terbentuk / Jumlah Sasaran BKB x 100%)	%	%					12.15 %	<b>1,000,000,000</b>	
					Cakupan jumlah kelompok BKL terbentuk (Jumlah kelompok BKL terbentuk / Jumlah Sasaran BKL x 100%)	%	%						10.14 %		
					Cakupan jumlah kelompok BKR terbentuk (Jumlah kelompok BKR terbentuk / Jumlah Sasaran BKR x 100%)	%	%						2.98 %		
					Cakupan jumlah kelompok PIK-R terbentuk (Jumlah kelompok PIK-R terbentuk / Jumlah Sasaran PIK-R x 100%)	%	%						39.7 %		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah													
		Cakupan jumlah kelompok UPPKA terbentuk (Jumlah kelompok UPPKA terbentuk / Jumlah Sasaran UPPKA dari keluarga rentan ekonomi (data Dinsos) x 100%)	%		%	2.71 %																		
2	14	4	2	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1 Bina Keluarga Balita								34 Kelompok	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	34 Kelompok	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2 Bina Keluarga Remaja									34 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. Bina Keluarga Lansia									34 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. UPPKA									10 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga : PIK Remaja									34 Kelompok										
2	14	4	2	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1. Kader UPPKA								30 Kelompok	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	30 Kelompok	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
					Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Guru BK									40 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. Bina Keluarga Balita									68 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. Bina Keluarga Remaja									68 Kelompok										
					Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 6. Bina Keluarga Lansia									68 Kelompok										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah									
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksanan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. PS/KS				68 Kelompok							68 Kelompok							
2	14	4	2	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Terselenggaranya Rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional 2. Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA								1 Kegiatan	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
						6 Kegiatan								6 Kegiatan						
2	14	4	2	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (Menjadi Orangtua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								4 Kegiatan	165,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						6,400,000,000				5,400,000,000					
1	3	9			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	%		%		14 %	4,500,000,000				14 %	4,650,000,000			
1	3	9	2		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase RTBL yang ditetapkan	%		%		25 %	4,500,000,000				25 %	4,650,000,000			
1	3	9	2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang disusun					5 dokumen	2,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungannya di Kota Balikpapan	5 dokumen	2,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
															Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan					
1	3	9	2	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan					1 lokasi	2,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungannya di Kota Balikpapan	1 lokasi	2,500,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	3	9	2	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan					1 dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungannya di Kota Balikpapan	1 dokumen	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1 3 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Prosentase terselenggaranya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%		%	20 %	1,900,000,000						20 %	750,000,000		
1 3 12 2	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Prosentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	%		%	50 %	1,200,000,000						50 %	0		
1 3 12 2 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persub RTRW Kota Balikpapan				1 dokumen	1,200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 dokumen	0	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
1 3 12 2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%		%	20 %	550,000,000						20 %	550,000,000		
1 3 12 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen berita acara rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyusunan RTRW				6 dokumen	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
1 3 12 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen standarisasi itensitas bangunan per wilayah kecamatan				6 dokumen	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
1 3 12 2 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah konsultasi publik (FGD) dalam penyelenggaraan penataan ruang				6 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 dokumen	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
1 3 12 2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%		%	91 %	150,000,000						91 %	200,000,000		
1 3 12 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan				350 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bangunan Umum di Kota Balikpapan	350 dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
		Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang				10 dokumen							10 dokumen			
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							71,975,000,000							74,560,200,000	
2 10 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	%		%	80 %	7,621,240,000						80 %	7,805,200,000		
2 10 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	5 jenis	6,000,000,000						5 jenis	6,200,000,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
		Jumlah Tenaga Profesional				5 orang										
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani				200 M2										
2	10	1	2.1													
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	jenis	jenis	3 jenis	285,000,000							3 jenis	305,000,000	
2	10	1	2.1	1												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara			17 unit	160,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kendaraan operasional dan peralatan inventaris DPPR Kota Balikpapan	17 unit	170,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2	10	1	2.1	2												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara			8 unit	70,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kendaraan operasional dan peralatan inventaris DPPR Kota Balikpapan	8 unit	80,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2	10	1	2.1	6												
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			5 jenis	55,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kendaraan operasional dan peralatan inventaris DPPR Kota Balikpapan	5 jenis	55,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2	10	4														
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Prosentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	%	%	41.7 %	30,000,000							41.7 %	100,000,000	
2	10	4	2													
		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	%	%	41.7 %	30,000,000							41.7 %	100,000,000	
2	10	4	2	2												
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.			5 dokumen	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bidang tanah yang disanggah dalam permohonan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	5 dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2	10	5														
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Prosentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	%	66.33 %	64,073,760,000							66.33 %	66,000,000,000	
2	10	5	2													
		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rata-Rata Prosentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	%	%	25.85 %	64,073,760,000							25.85 %	66,000,000,000	
2	10	5	2	1												
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR			5 dokumen	64,073,760,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah di Kota Balikpapan	5 dokumen	66,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
			Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR			4 dokumen							4 dokumen			
			Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh DPPR			4 dokumen							4 dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah										
		Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membutuhkan Tanah				2 dokumen							2 dokumen								
		Dokumen Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membutuhkan Tanah				2 dokumen							2 dokumen								
		Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR				35 hectar							35 hectar								
2	10	9				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%		%		88 %	250,000,000				88 %	655,000,000				
2	10	9	2			Penerbitan Izin Membuka Tanah	%		%		87 %	250,000,000				87 %	655,000,000				
2	10	9	2	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah penerbitan rekomendasi IMTN				230 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bidang-bidang tanah yang belum disertifikatkan dan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	230 dokumen	505,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2	10	9	2	2		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah laporan pengendalian pemanfaatan tanah negara				1 dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Bidang-bidang tanah yang belum disertifikatkan dan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	1 dokumen	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						109,250,000,000						138,012,965,920			
2	11	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	B indeks	17,016,955,400							B indeks	18,746,665,920	
2	11	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	2 jenis	11,636,150,400							2 jenis	12,217,957,920	
2	11	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN				12 dokumen	11,636,150,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN	12 dokumen	12,217,957,920	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	1	2			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi retribusi perangkat daerah	jenis		jenis	1 jenis	1,500,000,000							1 jenis	1,870,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 11 1 2 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi				24 orang	1,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Pemerataa n Infrastrukt r yang berkualitas	usaha atau pelaku kegiatan	24 orang	1,870,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2 11 1 2.1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan	orang		orang	75 orang	<b>37,500,000</b>						75 orang	<b>41,250,000</b>	
2 11 1 2.1 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya				75 orang	37,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	perkantoran	75 orang	41,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2 11 1 2.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	jenis		jenis	20 jenis	<b>581,865,000</b>						20 jenis	<b>929,958,000</b>	
2 11 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5 jenis	7,310,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan perkantoran	5 jenis	9,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				5 jenis	40,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan perkantoran	5 jenis	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK da tersedianya makan minum kantor				5 jenis	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan perkantoran	5 jenis	234,147,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				4 jenis	34,555,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan perkantoran	4 jenis	41,811,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				135 laporan	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan perkantoran	135 laporan	495,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2 11 1 2.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	jenis		jenis	6 jenis	<b>50,000,000</b>						6 jenis	<b>50,000,000</b>	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	11	2	2	2		1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3				64,20 indeks	1,070,000,000						64,20 indeks	2,485,500,000	
2	11	3	2			50 persen	120,000,000						50 persen	530,000,000	
2	11	3	2	1		33 dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	indeks kualitas lingkungan hidup	33 dokumen	180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						10 dokumen							10 dokumen		
2	11	3	2	2		2 dokumen	70,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	indeks kualitas lingkungan hidup	2 dokumen	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2			50 persen	850,000,000						50 persen	1,705,500,000	
2	11	3	2	1		3 dokumen	850,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	indeks kualitas lingkungan hidup	3 dokumen	1,705,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2			25 persen	100,000,000						25 persen	250,000,000	
2	11	3	2	4		3 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	indeks lingkungan hidup	3 dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4				5,74 persen	27,050,000,000						5,74 persen	37,000,000,000	
2	11	4	2			18 kawasan	27,050,000,000						18 kawasan	37,000,000,000	
2	11	4	2	3		500 pohon	3,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola	500 pohon	6,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 11 4 2 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah rth kota yang dipelihara dan dikelola (hutan kota 18, taman kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)				110 kawasan	23,750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola	110 kawasan	31,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 4 2 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	jumlah sarana prasarana				3 kawasan	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan yang dikelola	3 kawasan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola	persen		persen	51 persen	<b>50,000,000</b>						51 persen	<b>100,000,000</b>	
2 11 5 2	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen	dokumen		dokumen	15 dokumen	<b>50,000,000</b>						15 dokumen	<b>100,000,000</b>	
2 11 5 2 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen				25 dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	limbah yang dikelola	25 dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persen		persen	40 persen	<b>105,000,000</b>						40 persen	<b>350,000,000</b>	
2 11 6 2	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan	kegiatan		kegiatan	110 kegiatan	<b>105,000,000</b>						110 kegiatan	<b>350,000,000</b>	
2 11 6 2 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dokumen Fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan				80 dokumen	80,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	80 dokumen	175,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 6 2 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan				30 kegiatan	25,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	30 kegiatan	175,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen		persen	20 persen	<b>300,000,000</b>						20 persen	<b>1,075,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2 11 8 2	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	lembaga		lembaga	52 lembaga	300,000,000							52 lembaga	1,075,000,000	
2 11 8 2 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan RT Proklamasi dan kalpataru				22 lembaga	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	22 lembaga	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 8 2 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Lingkungan Hidup yang dilakukan pendampingan Sekolah Adiwiyata				30 lembaga	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	30 lembaga	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 8 2 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup sosialisasi rutin				18 dokumen kegiatan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	18 dokumen kegiatan	375,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 9	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	persen		persen	20 persen	200,000,000						20 persen	400,000,000		
2 11 9 2	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	penghargaan		penghargaan	26 penghargaan	200,000,000						26 penghargaan	400,000,000		
2 11 9 2 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan penilaian (CGH,Eco office, adiwiyata kota, kalpataru kota)				4 dokumen kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	lembaga/institusi/sekolah/masyarakat	4 dokumen kegiatan	400,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Penanganan Pengaduan	persen		persen	100 persen	125,000,000						100 persen	250,000,000		
2 11 10 2	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	persentase Laporan Pengaduan yang diselesaikan	persen		persen	70 persen	125,000,000						70 persen	250,000,000		
2 11 10 2 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pengaduan				25 dokumen	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	usaha/kegiatan	25 dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	indeks kinerja pengelolaan sampah	indeks		indeks	81,15 indeks	63,233,044,600						81,15 indeks	77,455,800,000		
2 11 11 2	<b>Pengelolaan Sampah</b>	persentase pengelolaan sampah	persen		persen	99 persen	63,233,044,600						99 persen	77,455,800,000		
2 11 11 2 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemilahan, Pengumpulan, dan Pengangkutan sampah	1 dokumen	525,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	11	11	2	2			30 kelompok	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemilahan, Pengumpulan, dan Pengangkutan sampah	30 kelompok	340,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2	3			134586 ton	62,433,044,600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemilahan, Pengumpulan, dan Pengangkutan sampah	134586 ton	71,881,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2	4			6 laporan kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemilahan, Pengumpulan, dan Pengangkutan sampah	6 laporan kegiatan	272,300,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2	7			8 unit	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemilahan, Pengumpulan, dan Pengangkutan sampah	8 unit	4,437,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	12						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							<b>11,970,000,000</b>	<b>15,360,725,000</b>	
2	12	1					80 Nilai	<b>11,245,500,000</b>						80 Nilai	<b>12,201,525,000</b>	
2	12	1	2				80 Nilai	<b>5,858,090,000</b>						80 Nilai	<b>6,600,000,000</b>	
2	12	1	2	1			28 dokumen	5,858,090,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	28 dokumen	6,600,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.1				80 Nilai	<b>3,750,217,000</b>						80 Nilai	<b>3,609,150,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2.12.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 jenis	5,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5 jenis	5,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				6 jenis	817,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6 jenis	1,600,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor				47 jenis	2,210,867,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47 jenis	1,650,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				5 jenis	469,350,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5 jenis	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman				400 porsi	12,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	400 porsi	13,750,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				37 kali	235,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37 kali	258,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai		Nilai	80 Nilai	<b>1,112,468,000</b>					80 Nilai	<b>550,000,000</b>		
2.12.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat				2 jenis	80,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 jenis	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2.12.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				6 rekening	198,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6 rekening	220,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS				40 orang	834,468,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40 orang	220,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani				500 m2						500 m2			
2.12.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	Nilai		Nilai	80 Nilai	<b>524,725,000</b>					80 Nilai	<b>698,500,000</b>		
2.12.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara				25 unit	409,725,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25 unit	550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara				5 jenis	15,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5 jenis	16,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				15 jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15 jenis	132,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase jaringan SLAK dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	<b>724,500,000</b>					100 Persen	<b>1,289,200,000</b>		
		Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kota Balikpapan Kepada Pemangku Kepentingan	OPD		OPD	5 OPD						5 OPD			
2.12.4.2	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Persentase laporan dan penyajian data kependudukan yang diterbitkan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	<b>382,500,000</b>					100 Persen	<b>935,000,000</b>		
2.12.4.2.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang diolah/disusun tepat waktu				7 laporan	382,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	7 laporan	935,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	12	4	2			100 Persen	342,000,000						100 Persen	354,200,000	
2	12	4	2	3		3 jenis	342,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	3 jenis	354,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	15						71,250,000,000							164,286,563,762	
2	15	1				76 Persen	26,658,900,000						76 Persen	87,098,113,762	
2	15	1	2			25 Persen	16,609,070,000						25 Persen	23,609,447,770	
2	15	1	2	1		14 Dokumen	16,391,900,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	14 Dokumen	23,370,563,520	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2	2		7 Dokumen	217,170,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	238,884,250	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2			25 Persen	200,000,000						25 Persen	50,000,000,000	
						100 Persen							100 Persen		
2	15	1	2	2		1 Jenis	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Jenis	50,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.1			86 Persen	720,000,000						86 Persen	1,128,000,000	
2	15	1	2.1	2		155 Orang	720,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	155 Orang	864,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.1			86 Persen	1,044,000,000						86 Persen	1,489,200,000	
2	15	1	2.1	1		19 Jenis	84,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	19 Jenis	100,800,000	DINAS PERHUBUNGAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		Interior ruang rapat				1 Paket		Semua Kelurahan	Alokasi Umum		r yang berkualitas		1 Paket		
2	15	2				100 Persen	43,726,100,000						100 Persen	76,288,450,000	
2	15	2	2			100 Persen	16,000,000						100 Persen	120,000,000	
2	15	2	2	2		300 Orang	16,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastruktu r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	300 Orang	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Rencana induk LLAJ kota yang disahkan				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	15	2	2			100 Persen	28,566,750,000						100 Persen	58,317,200,000	
2	15	2	2	1		1 Lokasi	1,100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mewujudka n Pemerataan Infrastruktu r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Lokasi	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Pembangunan Kamera CCTV				20 Unit							20 Unit		
2	15	2	2	2		0 Unit	700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastruktu r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	0 Unit	17,764,660,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Penyediaan Alat Pengendali Pengguna Jalan				30 Unit							30 Unit		
		Jumlah Penyediaan Cermin Tikungan				20 Unit							20 Unit		
		Jumlah Penyediaan Marka Jalan				600 m2							600 m2		
		Jumlah Penyediaan Pagar Pengaman Jalan (guardrail)				0 meter							0 meter		
		Jumlah Penyediaan Pita Pengaduh				500 m2							500 m2		
		Jumlah Penyediaan Rambu Lalu Lintas				120 Unit							120 Unit		
		Jumlah Penyediaan Tanda Patok Tikungan (delineator)				30 Unit							30 Unit		
2	15	2	2	3		16 Lokasi	1,018,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastruktu r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	16 Lokasi	1,128,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Pembangunan Kamera terpelihara				71 Unit							71 Unit		
		Jumlah Pembangunan Pos Pantau terpelihara				3 Lokasi							3 Lokasi		
		Jumlah Sistem Lalu Lintas yang dipelihara				1 Sistem							1 Sistem		
		Jumlah Taman Lalu Lintas yang dipelihara				1 Lokasi							1 Lokasi		
2	15	2	2	4		16368 Unit	25,748,250,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana		Mewujudka n Pemerataan Infrastruktu	Masyarakat Kota Balikpapan	16368 Unit	38,924,040,000	DINAS PERHUBUNGAN





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Alokasi Umum		r yang berkualitas				
		Jumlah bulan pembayaran rekening Listrik PJU				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Marka Jalan dipelihara				600 m2						600 m2			
		Jumlah Rambu Lalu Lintas dipelihara				250 Unit						250 Unit			
2	15	2	2			33 Persen	150,000,000					33 Persen	675,000,000		
		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe-C	Persen	Persen										
2	15	2	2	4		2 Lokasi	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Lokasi	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang terpelihara												
2	15	2	2			70 Persen	4,164,750,000					70 Persen	4,856,250,000		
		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	Persen	Persen										
2	15	2	2	2		7 Lokasi	4,164,750,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Lokasi	4,725,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lokasi parkir yang dikelola												
2	15	2	2.1			65.4 Persen	3,798,000,000					65.4 Persen	4,925,000,000		
		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	Persen	Persen										
2	15	2	2.1	1		10 Jenis	1,863,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	10 Jenis	2,250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana PKB yang disediakan												
2	15	2	2.1	2		5 Orang	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	5 Orang	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah orang yang mengikuti diklat PKB												
2	15	2	2.1	4		26000 Kartu	650,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	26000 Kartu	875,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Tanda Lulus Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersedia												
2	15	2	2.1	7		3 Jenis	1,135,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	3 Jenis	1,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara												
2	15	2	2.1	8		2 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudka n Pemerataan Infrastrukt r yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat	2 Kegiatan	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pelaksanaan koordinasi												
2	15	2	2.1			70 Persen	1,540,000,000					70 Persen	1,275,000,000		
		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan MRLL	Persen	Persen										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2.15.2.2.1.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LHR yang disusun				1 Dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	305,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Dokumen MRLI atau Andalalin Kawasan yang disusun				0 Dokumen						Masyarakat Kota Balikpapan	0 Dokumen		
2.15.2.2.1.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah lokasi penyediaan perlengkapan jalan dalam rangka MRLI				1 Lokasi	1,220,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Lokasi	750,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah lokasi ZOSS yang dibangun				5 Lokasi						Masyarakat Kota Balikpapan	5 Lokasi		
		Panjang jalur sepeda yang dibangun				11000 m2						Masyarakat Kota Balikpapan	11000 m2		
2.15.2.2.1.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi uji coba dan sosialisasi MRLI				1 Lokasi	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Lokasi	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.2.2.1.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Kegiatan	205,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2.15.2.2.1</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	Persen		Persen	10 Persen	<b>2,905,600,000</b>						10 Persen	<b>3,060,000,000</b>	
2.15.2.2.1.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan lomba pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas				14 Kegiatan	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	14 Kegiatan	360,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Terlaksananya Kegiatan Posko Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				2 Kegiatan						Masyarakat Kota Balikpapan	2 Kegiatan		
2.15.2.2.1.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Hari Operasi Khusus (Hari Besar Nasional dan Keagamaan)				83 Hari	2,605,600,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	83 Hari	2,700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Hari Operasi Umum				144 Hari						Masyarakat Kota Balikpapan	144 Hari		
<b>2.15.2.2.1</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	<b>2,485,000,000</b>						100 Persen	<b>2,950,000,000</b>	
2.15.2.2.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Massal yang di pelihara dan dioperasikan				8 Unit	2,485,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	8 Unit	2,950,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Angkutan Umum Massal yang disediakan				2 Unit						Masyarakat Kota Balikpapan	2 Unit		
		Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara				5 Halte						Masyarakat Kota Balikpapan	5 Halte		
		Jumlah Halte Angkutan yang dibangun				10 Halte						Masyarakat Kota Balikpapan	10 Halte		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2 15 2 2.1	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen		Persen	19 Persen	50,000,000						19 Persen	60,000,000		
2 15 2 2.1 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan				12 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	12 Kegiatan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 2 2.1	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	50 Persen	50,000,000						50 Persen	50,000,000		
2 15 2 2.1 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem informasi manajemen angkutan yang dikelola				1 Aplikasi	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Aplikasi	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Meningkatnya kinerja pelayanan kepelabuhanan	Persen		Persen	55 Persen	865,000,000						55 Persen	900,000,000		
2 15 3 2.1	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	Persen		Persen	81 Persen	700,000,000						81 Persen	700,000,000		
2 15 3 2.1 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan				1 Lokasi	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Lokasi	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 3 2.1 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pengadaan kendaraan operasi pengawasan pelabuhan pengumpan lokal				1 Lokasi	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Lokasi	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 3 2.2	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	Persen		Persen	31 Persen	165,000,000						31 Persen	200,000,000		
2 15 3 2.2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah TUKS yang diawasi				20 Lokasi	165,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	20 Lokasi	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							15,378,000,000							17,310,900,000	
2 16 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	"IKM Internal Perangkat Daerah	%		%	85.00 %	6,391,000,000							85.00 %	7,204,000,000	
2 16 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	%		%	100 %	5,000,000,000							100 %	5,000,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2.16.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor				1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				11 Jenis	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Jenis	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				121 Buku							121 Buku		
2.16.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu				1200 Kotak	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1200 Kotak	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah				100 Kali	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Kali	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.16.1.2.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	%		%	85 %	<b>120,000,000</b>						85 %	<b>150,000,000</b>	
2.16.1.2.1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel				6 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	jenis layanan pengadaan BMD	6 Unit	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1.2.1.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud				1 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	jenis layanan pengadaan BMD	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.16.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	%		%	100 %	<b>260,000,000</b>						100 %	<b>202,500,000</b>	
2.16.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat				10 Paket	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan jasa penunjang	10 Paket	2,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	16	1	2.1	2		4 Jasa	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan jasa penunjang	4 Jasa	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.1	4		1 Gedung	178,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan jasa penunjang	1 Gedung	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>			<b>100 %</b>	<b>400,000,000</b>						<b>100 %</b>	<b>585,000,000</b>	
2	16	1	2.1	1		3 Unit	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan pemeliharaan BMD	3 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.1	2		2 Unit	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan pemeliharaan BMD	2 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						4 Unit							4 Unit		
2	16	1	2.1	6		2 Unit	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan pemeliharaan BMD	2 Unit	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.1	9		1 Gedung Kantor	165,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan pemeliharaan BMD	1 Gedung Kantor	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>				<b>80.00 %</b>	<b>2,724,000,000</b>						<b>80.00 %</b>	<b>2,996,400,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 16 2 2	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%		%	80 %	2,724,000,000						80 %	2,996,400,000	
2 16 2 2 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan				2 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	2 Dokumen	82,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 2 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial				1 Laporan	418,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	1 Laporan	459,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Laporan NTPD 112	1 Laporan	1 Laporan											
		Jumlah Laporan Pemantauan Aduan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan											
		Jumlah pakaian dinas lapangan	12 Pakaian	12 Pakaian											
2 16 2 2 3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Dokumen Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen											
2 16 2 2 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Audio				25 Konten	288,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	25 Konten	316,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Konten Audio Visual	10 Konten	10 Konten											
		Jumlah Konten Berita Teks	480 Konten	480 Konten											
		Jumlah Konten Design 2 Dimensi	480 Konten	480 Konten											
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	11 Pakaian	11 Pakaian											
2 16 2 2 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Media Luar Ruang				121 Publikasi Luar Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	121 Publikasi Luar Ruang	1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Publikasi Media Massa Cetak	50 Media Cetak	50 Media Cetak											



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
		Jumlah Publikasi Media Massa Online				160 Publikasi Online					Pelayanan Publik		160 Publikasi Online							
		Jumlah Publikasi Media Massa Radio				72 Publikasi Radio							72 Publikasi Radio							
		Jumlah Publikasi Media Massa Televisi				14 Media Televisi							14 Media Televisi							
		Jumlah Siaran Keliling				24 Siaran Keliling							24 Siaran Keliling							
2	16	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Monev Pelayanan Informasi Publik					1 Monev	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	1 Monev	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik				1 Penilaian														
		Jumlah Rakor				1 Rakor														
		Jumlah Uji Konsekuensi				1 Uji Konsekuensi														
2	16	2	2	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konferensi Pers ; Jumlah Bimtek Wartawan ; Jumlah Kegiatan Forum Media Massa					2 Konferensi Pers	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	2 Konferensi Pers	77,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis					1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 16 2 2 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik				2 Bimtek	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	2 Bimtek	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 2 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112				1 Paket	573,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	1 Paket	630,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mobil Siaran Keliling		1 Paket											
		Jumlah Pemeliharaan Rangka Media Luar Ruang		6 Pemeliharaan											
		Jumlah Pengadaan Alat- Alat Studio		2 Pengadaan											
		Laptop editing video		2 Laptop											
2 16 3	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Pencapaian Peta Jalan SPBE Kota Balikpapan	%	%		80.00 %	<b>6,263,000,000</b>						80.00 %	<b>7,110,500,000</b>	
2 16 3 2	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	%		90 %	<b>4,211,000,000</b>						90 %	<b>4,270,500,000</b>	
2 16 3 2 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan domain balikpapan.go.id				1 domain	1,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aplikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan	1 domain	500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi Daring yang menggunakan subdomain dari balikpapan.go.id				100 %	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aplikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan	100 %	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen Hasil Audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 dokumen	4,250,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih,	Aplikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	4,250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
		Persentase ketersediaan konektivitas jaringan intra Pemerintah Daerah				90 %					Pelayanan Publik	Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		90 %		
2	16	3	2											80 %	2,840,000,000	
2	16	3	2	1										80 %	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Peta Jalan SPBE			80 %	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		80 %	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2	3										90 %	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan Pusat Data			90 %	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		90 %	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2	6										1 Kali	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Rakor Data dan Informasi Elektronik			1 Kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		1 Kali	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	2	7										1 Aplikasi	1,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Hasil Audit Aplikasi			1 Aplikasi	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		1 Aplikasi	1,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Aplikasi Baru yang Dibangun atau Dikembangkan			5 Aplikasi								5 Aplikasi		
			Jumlah Aplikasi yang Dipelihara			20 Aplikasi								20 Aplikasi		
2	16	3	2	9										2 Kali	320,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	FGD monev kota cerdas			2 Kali	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		2 Kali	320,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah video publikasi			1 Video								1 Video		
			Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas			1 Kali								1 Kali		
			Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas			1 Kali								1 Kali		
2	16	3	2	11										2 Orang	90,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pelatihan dan Setifikasi GCIO			2 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah		2 Orang	90,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 16 3 2 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen Revisi Arsitektur dan Peta Jalan SPBE				1 Dokumen	172,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Publik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>272,000,000</b>						<b>399,200,000</b>	
2 20 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%		%	80.00 %	<b>272,000,000</b>						80.00 %	<b>399,200,000</b>	
2 20 2 2	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	%		%	50 %	<b>272,000,000</b>						50 %	<b>399,200,000</b>	
2 20 2 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral				1 Buku	122,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Buku	134,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 2 2 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah				1 Bimtek	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Bimtek	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 2 2 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>500,000,000</b>						<b>550,000,000</b>	
2 21 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		%	80.00 %	<b>500,000,000</b>						80.00 %	<b>550,000,000</b>	
2 21 2 2	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%		%	80 %	<b>500,000,000</b>						80 %	<b>500,000,000</b>	
2 21 2 2 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	21	2	2	2		1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	2	3		1 dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1 dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Penanganan Insiden Keamanan Informasi				2 kali							2 kali		
2	21	2	2	4		2000 ASN	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	2000 ASN	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	17					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>13,597,429,100</b>		<b>17,532,703,400</b>	
2	17	1				91 Nilai	<b>9,873,703,400</b>						91 Nilai	<b>12,282,703,400</b>	
2	17	1	2			65 Dokumen	<b>6,518,703,400</b>						65 Dokumen	<b>6,518,703,400</b>	
2	17	1	2	1		24 Dokumen	6,518,703,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	24 Dokumen	6,518,703,400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1			9 Jenis	<b>965,000,000</b>						9 Jenis	<b>1,204,500,000</b>	
2	17	1	2.1	1		15 Jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	15 Jenis	22,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1	2		75 Jenis	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pegawai	75 Jenis	132,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2	17	1	2.1	4			5 Jenis	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	5 Jenis	220,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1	5			18 Jenis	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	18 Jenis	137,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1	6			5 Jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	5 Jenis	55,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1	9			60 Kali	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	60 Kali	330,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				3 Jenis	<b>500,000,000</b>						3 Jenis	<b>1,770,000,000</b>	
2	17	1	2.1	1			7 Unit	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	7 Unit	1,250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				3 Jenis	<b>1,090,000,000</b>						3 Jenis	<b>1,199,000,000</b>	
2	17	1	2.1	1			2 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	2 Jenis	11,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.1	2			5 Jenis	230,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	5 Jenis	253,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan bangunan/ gedung kantor pelayanan				80 M2	850,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	80 M2	935,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>2 17 1 2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>800,000,000</b>						3 Jenis	<b>1,044,000,000</b>	
2 17 1 2.1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan				29 Unit	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	29 Unit	330,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.1 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan meubelair yang mendapatkan pemeliharaan				10 Jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	10 Jenis	22,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan				12 Jenis	130,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	12 Jenis	142,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan gedung				12 Jenis	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai	12 Jenis	330,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.1 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)				5 Jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	5 Jenis	220,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>2 17 3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi yang sehat dan patuh	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	<b>268,125,700</b>						5 Koperasi	<b>350,000,000</b>	
<b>2 17 3 2</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Persen		Persen	13 Persen	<b>268,125,700</b>						13 Persen	<b>350,000,000</b>	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
		Jumlah usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				90 usaha mikro					dan Berkeadilan		90 usaha mikro						
		Penyusunan profil Dekranasda				1 dokumen							1 dokumen						
<b>3</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
<b>3</b>	<b>31</b>						<b>2,312,173,713</b>							<b>17,350,000,000</b>					
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Pertumbuhan industri kecil didalam sentra	Persen		Persen	5 Persen	<b>1,987,173,713</b>			5 Persen	<b>16,200,000,000</b>			
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri	Persen		Persen	5 Persen	<b>1,987,173,713</b>			5 Persen	<b>16,200,000,000</b>			
3	31	2	2	1		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Industri	5 Dokumen	350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2	3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah alat untuk pengolahan pangan di SIK				6 Jenis	195,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Industri	6 Jenis	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	31	2	2	4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah prasarana SIK yang dibangun dan revitalisasi				3 Jenis	1,302,173,713	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Industri	3 Jenis	15,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
							Jumlah sarana SIK yang dibangun dan revitalisasi				8 Unit								
3	31	2	2	5		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat				3 Kegiatan	140,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Industri	3 Kegiatan	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		Persen	10 Persen	<b>115,000,000</b>						10 Persen	<b>450,000,000</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	Persen		Persen	25 Persen	<b>115,000,000</b>						25 Persen	<b>450,000,000</b>





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	18	1	2	1		26 Dokumen	8,935,959,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	26 Dokumen	9,829,555,890	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	<b>480,000,000</b>					6 Sub Kegiatan	<b>2,165,000,000</b>		
2	18	1	2.1	1		9 Jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	9 Jenis	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	2		6 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	6 Jenis	1,200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	4		2 Jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	2 Jenis	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	5		3 Jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	3 Jenis	125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	9		50 Kali	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	50 Kali	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	<b>1,560,000,000</b>					3 Sub Kegiatan	<b>2,030,000,000</b>		
2	18	1	2.1	1		1 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	1 Jenis	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	2		4 Jenis	700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	4 Jenis	800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2	18	1	2.1	4		3984.5 m2	850,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	3984.5 m2	1,150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	<b>524,040,100</b>					3 Sub Kegiatan	<b>650,000,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
2	18	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara					24 Unit	330,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	24 Unit	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					8 Jenis	194,040,100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPT Kota Balikpapan	8 Jenis	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Presentase Jumlah Investor yang mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha Investor yang mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha	Persen			Persen	5 Persen	<b>300,000,000</b>					5 Persen	<b>1,200,000,000</b>	
2	18	2	2		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Peraturan			Peraturan	1 Peraturan	150,000,000					1 Peraturan	400,000,000	
2	18	2	2	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan fasilitasi insentif kemudahan investasi					1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Dunia Usaha	1 dokumen	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	150,000,000					2 Dokumen	800,000,000	
2	18	2	2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM Kota Balikpapan					1 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	masayarakat Dunia Usaha	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persen			Persen	80 Persen	650,000,000					80 Persen	2,000,000,000	
2	18	3	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah event yang dilaksanakan	Persen			Persen	5 Persen	650,000,000					5 Persen	2,000,000,000	
2	18	3	2	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Jenis Sarana Promosi					4 Jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Dunia Usaha	4 Jenis	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal					5 Event	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Dunia Usaha	5 Event	1,500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Skor SKM Pelayanan Perizinan	Skor			Skor	89,10 Skor	900,000,000					89,10 Skor	2,550,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2 18 4 2	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Prosentase Izin Terbit	Persen		Persen	80 Persen	900,000,000							80 Persen	2,550,000,000	
2 18 4 2 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan				6200 dokumen	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Pemohon Perizinan dan Non Perizinan	6200 dokumen	1,500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2 18 4 2 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha				96 Unit Usaha	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Pemohon Perizinan dan Non Perizinan	96 Unit Usaha	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2 18 4 2 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani				10000 Kali	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Pemohon Perizinan dan Non Perizinan	10000 Kali	550,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
		Jumlah survei SKM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali			
2 18 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (debottlenecking)	Perusahaan		Perusahaan	3 Perusahaan	400,000,000						3 Perusahaan	2,000,000,000		
2 18 5 2	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM		LKPM	300 LKPM	400,000,000						300 LKPM	2,000,000,000		
2 18 5 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				6 Proyek	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Dunia Usaha	6 Proyek	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
2 18 5 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Kemudahan Berusaha				1 Kali	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Dunia Usaha	1 Kali	1,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
									DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal							
2 18 5 2 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				12 Proyek	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Dunia Usaha	12 Proyek	500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
									DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal							





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
2	18	6				2 Jenis Perizinan	500,000,000						2 Jenis Perizinan	1,500,000,000		
2	18	6	2			12 Bulan	500,000,000						12 Bulan	1,500,000,000		
2	18	6	2	1		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Jenis Media Publikasi Perizinan dan Investasi						3 Jenis	1,500,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	
						Jumlah pemeliharaan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan							4 Aplikasi			
						Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan non perizinan							4 Aplikasi			
						Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi							3 Jenis			
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	19					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						48,550,000,000		69,995,069,451		
2	19	1				IKM Internal Perangkat Daerah	IKM						80 IKM	11,984,000,000		
2	19	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP					82 Nilai SAKIP	20,000,000	36,000,000	
2	19	1	2	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA						1 Dokumen	10,000,000	12,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP						1 Dokumen	5,000,000	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja						1 Dokumen	5,000,000	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen					31 Dokumen	6,489,000,000	6,808,632,451	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	19	1	2	1		26 Dokumen	6,484,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	26 Dokumen	6,800,932,451	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2	6		4 Laporan	5,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	4 Laporan	5,500,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		Jenis	12 Jenis	<b>1,551,000,000</b>						12 Jenis	<b>1,907,000,000</b>	
2	19	1	2.1	1		40 Jenis	55,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	40 Jenis	60,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.1	2		25 Jenis	290,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	25 Jenis	400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.1	4		57 Jenis	394,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	57 Jenis	420,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						5 Jenis							5 Jenis		
						16000 Kotak							16000 Kotak		
2	19	1	2.1	5		23 Jenis	210,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	23 Jenis	250,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.1	6		3500 exemplar	22,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	3500 exemplar	55,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2.19.1.2.1.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material				38 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	38 Jenis	150,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Rapat	350,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	100 Rapat	400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.1.2.1.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik				3 kegiatan	130,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	3 kegiatan	143,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
<b>2.19.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Jasa penunjang	Jenis		Jenis	8 Jenis	<b>2,794,000,000</b>						8 Jenis	<b>2,953,000,000</b>	
2.19.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Kebutuhan Surat Menyurat				2 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	2 Jenis	11,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan air				6 Jenis	1,484,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	6 Jenis	1,512,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.19.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS dan Jumlah Pihak Ketiga Outsourcing				35 Orang	1,300,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	35 Orang	1,430,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
<b>2.19.1.2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	5 Jenis	<b>1,130,000,000</b>						5 Jenis	<b>2,840,000,000</b>	
2.19.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Yang Dipelihara				25 Unit	500,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	25 Unit	460,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
2	19	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara					9 Jenis	170,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	9 Jenis	180,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Penyediaan solar untuk genset					2000 liter								
2	19	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah frekuensi pemeliharaan					4 kali	460,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DPOP Kota Balikpapan	4 kali	2,200,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Presentase Pemuda yang kreatif, inovatif dan Mandiri	Persen		Persen		2,30 Persen	<b>6,400,000,000</b>					2,30 Persen	<b>19,085,550,000</b>	
2	19	2	2		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Persen		Persen		1.83 Persen	<b>5,100,000,000</b>					1.83 Persen	<b>8,360,000,000</b>	
2	19	2	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda, KIPAN, Pepelingsih, Forum Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda					2000 Orang	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan yang berusia 16-30 Tahun	2000 Orang	1,100,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan pemuda					80 Orang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan yang berusia 16-30 Tahun	80 Orang	990,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Pemuda Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan					300 Orang								
2	19	2	2	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan					1 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan yang berusia 16-30 Tahun	1 Dokumen	770,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelayanan kepemudaan					400 Orang								
2	19	2	2	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pelatihan Paskibraka					45 Orang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemuda Kota Balikpapan yang berusia 16-30 Tahun	45 Orang	5,500,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi Paskibraka					200 Orang								



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Paskibraka				70 Orang							70 Orang		
2	19	2	2			0.35 Persen	1,300,000,000						0.35 Persen	10,725,550,000	
2	19	2	2	2		1 Organisasi	1,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan yang berusia 16-30 Tahun	1 Organisasi	10,725,550,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan				800 Orang							800 Orang		
2	19	3				30 Persen	29,016,000,000						30 Persen	29,156,000,000	
2	19	3	2			3 Event	20,759,660,000						3 Event	20,759,660,000	
2	19	3	2	1		2 Event	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Balikpapan Yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kota	2 Event	3,000,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2	3		1200 orang	17,759,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Balikpapan Yang Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kota	1200 orang	17,759,660,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2			3 Lembaga	5,800,000,000						3 Lembaga	5,800,000,000	
2	19	3	2	2		3 Organisasi	5,800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Olahraga Di Kota Balikpapan	3 Organisasi	5,800,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
3	26	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan prasarana kawasan strategis pariwisata	10 Sarana/Prasarana	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Wisatawan	10 Sarana/Prasarana	3,850,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
						Jumlah Pengadaan sarana prasarana kawasan strategis pariwisata	10 Sarana/Prasarana						10 Sarana/Prasarana				
3	26	2	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan pada Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Balikpapan	16 Pokdarwis	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Wisatawan	16 Pokdarwis	330,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
						Jumlah Pokdarwis yang baru dibentuk	2 Pokdarwis						2 Pokdarwis				
3	26	2	2		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Presentase Destinasi yang dikelola dengan baik	Persen		Persen	5 Persen	<b>100,000,000</b>				5 Persen	<b>110,000,000</b>	
3	26	2	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdarwis yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Wisatawan	16 Pokdarwis	110,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
3	26	2	2		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Usaha Pariwisata Yang terdaftar TDUP	Usaha		Usaha	80 Usaha	<b>150,000,000</b>				80 Usaha	<b>535,000,000</b>	
3	26	2	2	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Investasi Pariwisata	5 Milyar Rupiah	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pelaku Usaha Pariwisata Di Kota Balikpapan	5 Milyar Rupiah	150,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
						Jumlah Usaha Pariwisata Baru	20 Usaha						20 Usaha				
3	26	3			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Presentase Pertumbuhan Wisatawan Yang datang ke Kota Balikpapan	Persen		Persen	2 Persen	<b>4,750,000,000</b>				2 Persen	<b>5,225,000,000</b>	
3	26	3	2		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lama Tinggal Wisatawan	Malam		Malam	1.7 Malam	<b>4,750,000,000</b>				1.7 Malam	<b>5,225,000,000</b>	
3	26	3	2	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Cetak Untuk Promosi	3 Jenis	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wisatawan	3 Jenis	550,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
						Jumlah Media Elektronik Untuk Promosi	2 jenis							2 jenis			
						Jumlah Media Lainnya Untuk Promosi	3 Jenis							3 Jenis			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
3 26 3 2 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi				1 event	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wisatawan	1 event	4,400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		Jumlah Industri Pariwisata Yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata Didalam Negeri				10 Industri Pariwisata							10 Industri Pariwisata		
		Jumlah Promosi event daerah yang dilaksanakan didalam negeri				10 event							10 event		
3 26 3 2 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan dengan insan pariwisata				3 mitra	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Wisatawan	3 mitra	275,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Presentase Pertumbuhan Produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	Persen		Persen	20 Persen	<b>300,000,000</b>						20 Persen	<b>475,000,000</b>	
3 26 4 2	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya sarana yang dikembangkan dan direvitalisasi	Sarana		Sarana	3 Sarana	<b>300,000,000</b>						3 Sarana	<b>310,000,000</b>	
3 26 4 2 1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana yang dikembangkan dan direvitalisasi (podcast, prasarana ruangan, fotografi)				3 Prasarana	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Prasarana	310,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Presentase pertumbuhan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi dan kompetensi	Persen		Persen	30 Persen	<b>800,000,000</b>						30 Persen	<b>2,375,000,000</b>	
3 26 5 2	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan	Orang		Orang	100 Orang	<b>700,000,000</b>						100 Orang	<b>1,315,000,000</b>	
3 26 5 2 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata				3 Kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan	3 Kegiatan	360,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
3	26	5	2	2		1 kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan	1 kegiatan	285,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2	4		100 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan	100 Orang	410,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2			100 Orang	100,000,000						100 Orang	1,060,000,000	
3	26	5	2	1		2 Kegiatan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Balikpapan	2 Kegiatan	260,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3	26						1,950,000,000							4,250,000,000	
3	26	2					1,950,000,000						11 Persen	4,250,000,000	
3	26	2	2			1 Destinasi	1,950,000,000						1 Destinasi	4,250,000,000	
3	26	2	2	4		1 Destinasi	1,950,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 Destinasi	4,250,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	23						9,550,000,000							13,681,000,000	
2	23	1				8.6 Nilai	8,495,000,000						8.6 Nilai	10,780,500,000	
2	23	1	2			72 Nilai	115,000,000						72 Nilai	126,500,000	
2	23	1	2	1		2 Dokumen	55,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Pegawai Dispusdikar	2 Dokumen	60,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 23 2 2 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina				30 Perpustakaan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30 Perpustakaan	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 2 2 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina				2 Perpustakaan khusus	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Perpustakaan khusus	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 2 2 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sumber Peningkatan layanan				1 SKM	500,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 SKM	550,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 2 2 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bahan pustaka				2 kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 kegiatan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 2 2 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan				1 laporan	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 laporan	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 2 2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Kota Balikpapan	Orang		Orang	4000 Orang	<b>200,000,000</b>						4000 Orang	<b>660,000,000</b>	
2 23 2 2 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan				3 kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3 kegiatan	220,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	24						520,000,000						672,000,000		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>															
2	24	2				55 %	320,000,000						55 %	352,000,000	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	%										
2	24	2	2			55 %	210,000,000						55 %	231,000,000	
		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	%										
2	24	2	2	1		55 %	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	55 %	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2	2		55 %	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	55 %	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2	3		15 objek	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	15 objek	165,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2			10 %	50,000,000						10 %	55,000,000	
		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	%										
2	24	2	2	2		10 %	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	10 %	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	2	2			30 %	60,000,000						30 %	66,000,000	
		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	%										
2	24	2	2	1		25 %	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	25 %	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		<b>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN</b>	Persentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN												



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 24 2 2 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN				10 %	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	10 %	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 24 3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	%		10 %	160,000,000					10 %	276,000,000		
2 24 3 2	<b>Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	%		10 %	40,000,000					10 %	44,000,000		
2 24 3 2 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK				1 Kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Kegiatan	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2 2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota				1 kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 kegiatan	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	%		10 %	20,000,000					10 %	22,000,000		
2 24 3 2 1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana				1 kegiatan	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 kegiatan	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2 2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana				1 kegiatan	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 kegiatan	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	%		10 %	50,000,000					10 %	55,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 24 3 2 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK				150 berkas	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	150 berkas	27,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK				50 Berkas	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	50 Berkas	27,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 3 2.1	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	%		%	10 %	<b>50,000,000</b>						10 %	<b>155,000,000</b>	
2 24 3 2.1 3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan				1 Daftar	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Daftar	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 4	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%		%	10 %	<b>40,000,000</b>						10 %	<b>44,000,000</b>	
2 24 4 2	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin		Izin	1 Izin	<b>40,000,000</b>						1 Izin	<b>44,000,000</b>	
2 24 4 2 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan				1 SOP	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 SOP	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 4 2 2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan				1 daftar	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 daftar	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 9	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							<b>18,470,000,000</b>						<b>22,691,225,000</b>	
2 9 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	%		%	70 %	<b>17,895,000,000</b>						70 %	<b>21,181,225,000</b>	
2 9 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>14,450,000,000</b>						2 Jenis	<b>15,950,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.9.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS/ASN yang dibayar gaji dan tunjangan selama setahun (OB)				1120 OB	13,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	1120 OB	15,000,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Pelaporan administrasi gaji dan tunjangan pegawai terkait adanya perubahan seperti jumlah tanggungan keluarga (KP4), mutasi, pensiun, KGB, kenaikan pangkat, CPNS (80% dan 100%) dalam satu tahun				25 dokumen	950,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	25 dokumen	950,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah tenaga honorer/naban yang dibayar gajinya				520 OB							520 OB		
2.9.1.2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	7 Jenis	<b>680,000,000</b>						7 Jenis	<b>1,445,200,000</b>	
2.9.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan				17 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	17 Jenis	450,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi				40 Jenis	255,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	40 Jenis	425,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah tersedianya nasi kotak/ snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta				4000 kotak							4000 kotak		
2.9.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun				20 Jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	20 Jenis	85,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan				3 Jenis	25,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	3 Jenis	30,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas				70 Kali	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DP3	70 Kali	375,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.9.1.2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>2,000,000,000</b>						3 Jenis	<b>2,645,200,000</b>	
2.9.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air yang dibayar				12 meteran air	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai/Masyarakat internal DP3	12 meteran air	1,234,200,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah rekening listrik yang dibayar				20 rekening							20 rekening		
		Jumlah rekening telpon yang dibayar				14 saluran							14 saluran		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2 9 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis pelayanan umum yang disediakan				3 Jenis	1,400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai/Masyarakat internal DP3	3 Jenis	1,400,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>765,000,000</b>						3 Jenis	<b>1,140,825,000</b>	
2 9 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar biaya KIR dan STNK				99 unit	550,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Aset DP3	99 unit	850,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				99 unit					99 unit				
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM				99 unit					99 unit				
2 9 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara				9 Jenis	90,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Aset DP3	9 Jenis	90,825,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan				3 Jenis	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh Aset DP3	3 Jenis	200,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	skor		skor	86 skor	<b>325,000,000</b>						86 skor	<b>710,000,000</b>	
2 9 3 2	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase CPPD	%		%	8 %	<b>250,000,000</b>						8 %	<b>550,000,000</b>	
2 9 3 2 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah				17 ton	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	17 ton	550,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Cadangan pangan pemerintah daerah yang dipelihara				17 ton							17 ton		
2 9 3 2	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Skor PPH	skor		skor	86 skor	<b>75,000,000</b>						86 skor	<b>160,000,000</b>	
2 9 3 2 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal				6 Kali	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	6 Kali	160,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 9 5	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Keamanan Pangan	%		%	88 %	<b>250,000,000</b>						88 %	<b>250,000,000</b>	
2 9 5 2	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlahsampil aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	5		5	88 5	<b>250,000,000</b>						88 5	<b>250,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	9	5	2	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel pangan						100 sampel	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 sampel	250,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota							2 rekomendasi								
					Sertifikasi/registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah kabupaten/kota							2 register/sertifikat								
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
3	25	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	4200 ton	<b>475,000,000</b>							4200 ton	<b>1,770,000,000</b>	
3	25	3	2		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	kelompok		kelompok	30 kelompok	<b>150,000,000</b>							30 kelompok	<b>450,000,000</b>	
3	25	3	2	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang disediakan				20 unit	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	kelompok nelayan	20 unit	250,000,000			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	3	2		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Nelayan yang diberdayakan	nelayan		nelayan	1120 nelayan	<b>75,000,000</b>							1120 nelayan	<b>550,000,000</b>	
3	25	3	2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)				12 Kali	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Nelayan Kecil	12 Kali	200,000,000			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	3	2		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%		%	100 %	<b>250,000,000</b>							100 %	<b>520,000,000</b>	
3	25	3	2	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi				2 TPI	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat/ Pengguna TPI	2 TPI	520,000,000			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	296 ton	<b>1,125,000,000</b>							296 ton	<b>6,775,000,000</b>	
3	25	4	2		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	Jumlah Pembudidaya yang diberdayakan	pembudidaya		pembudidaya	100 pembudidaya	<b>150,000,000</b>							100 pembudidaya	<b>525,000,000</b>	
3	25	4	2	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				2 Kali	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pembudidaya ikan	2 Kali	250,000,000			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	jenis		jenis	2 jenis	<b>975,000,000</b>							2 jenis	<b>6,000,000,000</b>	
3	25	4	2	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Sarana Prasarana BBI				4 unit	925,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis	masyarakat Pembudidayaan ikan	4 unit	5,500,000,000		DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah								
		Jumlah benih ikan di BBI yang tersedia				780000 ekor					Berkualitas dan Berkeadilan	Keunggulan Lokal		780000 ekor					
		Jumlah pembangunan/Rehab BBI				4 unit								4 unit					
3	25	4	2	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang dibina dan dipantau							masyarakat Pembudidayaan ikan	100 pembudidaya	250,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									<b>6,925,000,000</b>					
3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produksi pertanian per tahun	ton		ton	150619 ton	<b>700,000,000</b>			150619 ton	<b>1,550,000,000</b>				
3	27	2	2		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase Pemanfaatan/ penggunaan sarana pertanian	%		%	100 %	<b>550,000,000</b>			100 %	<b>1,250,000,000</b>				
3	27	2	2	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang diawasi				3 Jenis	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Petani Kota Balikpapan	3 Jenis	700,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	2	2	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang didampingi penggunaannya				3 Jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Petani Kota Balikpapan	3 Jenis	550,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	2	2		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	ekor		ekor	225 ekor	<b>150,000,000</b>						225 ekor	<b>300,000,000</b>	
3	27	2	2	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah hewan yang di IB				200 ekor	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Peternak di kota Balikpapan	200 ekor	300,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pelaksanaan sosialisasi Inseminasi Buatan (IB)				8 kali					Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		8 kali		
						Pelaksanaan pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam				2 kelompok							2 kelompok		
3	27	4			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		%	85 %	<b>570,000,000</b>						85 %	<b>1,000,000,000</b>	









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	30	1	2.1	2		25 rekening	1,170,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	25 rekening	1,200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.1	4		1415 m2	386,300,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	1415 m2	620,000,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>			<b>8 jenis</b>	<b>780,000,000</b>						<b>8 jenis</b>	<b>1,395,000,000</b>	
3	30	1	2.1	1		40 unit	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	40 unit	330,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.1	2		10 unit	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	10 unit	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.1	6		6 jenis	130,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	6 jenis	165,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.1	9		6 gedung	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	6 gedung	310,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.1	10		2 jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PNS dan Non PNS	2 jenis	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>				<b>10 %</b>	<b>355,000,000</b>						<b>10 %</b>	<b>473,200,000</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>5 %</b>	<b>185,000,000</b>						<b>5 %</b>	<b>200,000,000</b>	
3	30	2	2	1		5 dokumen	185,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	5 dokumen	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>5 %</b>	<b>170,000,000</b>						<b>5 %</b>	<b>200,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif												
										Nasional	Daerah																
		Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait kebutuhan pokok dan barang penting				1 dokumen					Keunggulan Lokal		1 dokumen														
3	30	4	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting							1 dokumen	65,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	175,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
3	30	4	2	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	penyusunan neraca pangan yang dihasilkan							1 dokumen	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	450,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
						Tersedianya dokumen hasil monitoring							45 dokumen														
3	30	4	2		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan HET	%		%				5 %	<b>230,000,000</b>											5 %	<b>1,675,000,000</b>	
3	30	4	2	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan							4 dokumen	130,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	4 dokumen	1,050,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
3	30	4	2	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pasar khusus							1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	375,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
						Jumlah Laporan hasil pemantauan dan monitoring harga dan stok operasi pasar reguler yang dilaksanakan							1 dokumen								1 dokumen						
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Nilai ekspor bersih komoditas non migas dan non batu bara	juta US\$		juta US\$				1956 juta US\$	<b>680,000,000</b>							1956 juta US\$	<b>1,965,000,000</b>					
3	30	5	2		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku usaha binaan yang potensial ekspor	%		%				7 %	<b>680,000,000</b>							7 %	<b>1,965,000,000</b>					
3	30	5	2	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk							4 orang	60,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha	4 orang	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
3	30	5	2	2	Pameran Dagang Nasional	Kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pameran dagang nasional							4 orang	620,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha	4 orang	620,000,000	DINAS PERDAGANGAN					
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%		%				9 %	<b>100,000,000</b>							9 %	<b>500,000,000</b>					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
3 30 6 2	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%		%	9 %	100,000,000						9 %	500,000,000	
3 30 6 2 2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan metrologi legal				70 hari	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha dan masyarakat	70 hari	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
		Persentase kesesuaian BDKT (Barang dalam keadaan terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				16 %						16 %			
3 30 7	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	%		%	20 %	120,000,000					20 %	3,800,000,000		
		Persentase penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat kota Balikpapan	%		%	60 %						60 %			
3 30 7 2	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri	kali		kali	4 kali	120,000,000					4 kali	3,800,000,000		
		Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	%		%	20 %						20 %			
3 30 7 2 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				4 kegiatan	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku usaha	4 kegiatan	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						174,339,500						525,000,000		
3 30 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI	%		%	18,18 %	174,339,500					18,18 %	525,000,000		
3 30 3 2	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	%		%	10 %	174,339,500					10 %	525,000,000		
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	%		%	10 %						10 %			
3 30 3 2 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola				5 sarana distribusi	174,339,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		5 sarana distribusi	525,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						172,030,900						525,000,000		
3 30 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI	%		%	18,18 %	172,030,900					18,18 %	525,000,000		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
3 30 3 2	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	%		%	10 %	172,030,900						10 %	525,000,000		
3 30 3 2 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola				1 sarana distribusi	172,030,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1 sarana distribusi	525,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						150,125,800							525,000,000		
3 30 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI	%		%	18,18 %	150,125,800							18,18 %	525,000,000	
3 30 3 2	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	%		%	10 %	150,125,800							10 %	525,000,000	
3 30 3 2 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola				4 sarana distribusi	150,125,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		4 sarana distribusi	525,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						93,043,700							525,000,000		
3 30 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase Pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai Kriteria SNI	%		%	18,18 %	93,043,700							18,18 %	525,000,000	
3 30 3 2	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (tepat waktu)	%		%	10 %	93,043,700							10 %	525,000,000	
3 30 3 2 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola				2 sarana distribusi	93,043,700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		2 sarana distribusi	525,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						420,000,000							991,000,000		
3 30 6	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		%	9 %	420,000,000							9 %	991,000,000	
3 30 6 2	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	%		%	9 %	420,000,000							9 %	991,000,000	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah									
4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12 Dokumen	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	12 Dokumen	252,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah pemeliharaan aplikasi perbendaharaan Sekretariat Daerah						1 Aplikasi						1 Aplikasi			
4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah					1 Laporan	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	1 Laporan	26,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan					84 Laporan	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	84 Laporan	48,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			Persen	100 Persen	<b>1,015,000,000</b>					100 Persen	<b>1,230,000,000</b>		
4	1	1	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai					10 Unit	15,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Sekretariat Daerah	10 Unit	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya					150 Orang	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Sekretariat Daerah	150 Orang	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Capaian kelancaran administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persen			Persen	100 Persen	<b>24,000,000,000</b>					100 Persen	<b>35,800,000,000</b>		
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					2 Jenis	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	2 Jenis	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
4	1	1	2.1	2			3 Jenis	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	3 Jenis	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	3			2 Jenis	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	2 Jenis	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	4			3 Jenis	7,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	3 Jenis	9,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	5			7 Jenis	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	7 Jenis	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	6			1 Jenis	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	1 Jenis	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	8			12 Kegiatan	7,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 Kegiatan	8,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	9			4 Kegiatan	7,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah	4 Kegiatan	12,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1				100 Persen	4,650,000,000						100 Persen	6,475,000,000	



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
4	1	1	2.1	1			4 Unit	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	4 Unit	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	5			3 Jenis	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	6			3 Jenis	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	10			3 Jenis	2,800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	2,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	11			1 Jenis	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	1 Jenis	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				<b>80 Persen</b>	<b>17,512,000,000</b>						<b>80 Persen</b>	<b>18,512,000,000</b>	
4	1	1	2.1	1			2 Jenis	12,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	2 Jenis	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	2			12 Dokumen	2,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	12 Dokumen	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis fasilitasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor				3 Jenis	15,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	15,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>11,015,000,000</b>						100 Persen	<b>13,840,000,000</b>	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				191 unit	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	191 unit	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara				191 unit	5,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	191 unit	5,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang dipelihara				3 Jenis	190,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	190,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara				12 Jenis	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	12 Jenis	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis Aset Tak Berwujud yang dipelihara				1 Jenis	25,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	1 Jenis	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara				3 Jenis	3,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	3 Jenis	3,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4	1	1	2.1	11			1 jenis	800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	1 jenis	800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1				100 Persen	1,849,813,000						100 Persen	1,983,560,000	
4	1	1	2.1	1			14 Dokumen	243,329,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Dokumen	249,413,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	2			9 Jenis	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9 Jenis	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	4			12 Dokumen	1,106,484,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Dokumen	1,134,147,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1				100 Persen	1,700,000,000						100 Persen	1,700,000,000	
4	1	1	2.1	1			2 jenis	920,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah	2 jenis	920,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.1	2			2 jenis	660,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah	2 jenis	660,000,000	SEKRETARIAT DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah												
4	1	1	2.1	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah						12 Kegiatan	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah	12 Kegiatan	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase Perangkat Daerah tepat fungsi	Persen			Persen	100 Persen	<b>812,605,100</b>							100 Persen	<b>958,000,000</b>			
4	1	1	2.1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan dan analisa jabatan						1 Dokumen	140,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	1	2.1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitasi partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik						1 Kegiatan	279,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	1 Kegiatan	283,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
						Jumlah fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang disusun PD						1 Kegiatan								1 Kegiatan			
						Jumlah fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan						1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Jumlah Pedoman ketatalaksanaan terselesaikan						1 Konsep									1 Konsep		
						Jumlah Pembinaan bidang ketatalaksanaan						2 Kegiatan									2 Kegiatan		
						Jumlah Pembinaan bidang Pelayanan Publik						2 Kegiatan									2 Kegiatan		
4	1	1	2.1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Road Map RB yang tersusun dan terevaluasi						1 Dokumen	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi						1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP						1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas						4 Kegiatan									4 Kegiatan		
4	1	1	2.1	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Perangkat Daerah						1 Kegiatan	182,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	1 Kegiatan	185,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah												
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI				1 Kegiatan																	
4	1	2	2	2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Paten					1 Dokumen	880,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	1,150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
		Jumlah Fasilitasi Tertib Toponimi dan Pemetaan Wilayah				1 Kegiatan																	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Melalui Lomba Camat Berprestasi				1 Kegiatan																	
		Jumlah Pembinaan Administrasi Kepada Kelurahan dan Kecamatan				4 Kegiatan																	
4	1	2	2	3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan					1 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	7,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	2	2			<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persen		Persen		100 Persen	<b>9,335,724,550</b>										
4	1	2	2	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen kegiatan keagamaan yang difasilitasi					1 dokumen	7,940,724,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	7,940,724,550	SEKRETARIAT DAERAH		
		Jumlah dokumen penerimaan Beasiswa Stimulan				1 dokumen																	
		Jumlah dokumen penerima bantuan hibah keagamaan				1 dokumen																	
4	1	2	2	2		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan					1 dokumen	1,295,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	1,295,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
		Jumlah dokumen pelaksanaan pemberian bantun Natura untuk santri Pondok Pesantren yang bermukim				1 dokumen																	
4	1	2	2	3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Jasmani					1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	2	2			<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen		Persen		100 Persen	<b>1,603,029,850</b>										







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
		perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.																				
4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD							12 Kegiatan	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD, BUMN dan BUMD	12 Kegiatan	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah penyusunan kajian kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD								2 Dokumen									
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian							5 Kegiatan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD, BUMN dan BUMD	5 Kegiatan	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan sumber daya alam							3 Kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD, BUMN dan BUMD	3 Kegiatan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	3	2		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase PD yang menyampaikan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan	Persen			Persen			80 Persen	<b>1,014,146,500</b>						80 Persen	<b>1,226,433,065</b>	
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pembangunan							3 Kegiatan	42,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	50,160,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan Pembangunan							1 Dokumen	676,466,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	818,500,265	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pembangunan							12 Dokumen	295,680,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	12 Dokumen	357,772,800	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di	Persen			Persen			85 Persen	<b>770,000,000</b>						85 Persen	<b>915,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah							
		Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.																
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pemilihan penyedia melalui tender dan non tender												
							100 %	245,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	100 %	290,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase layanan SIRUP kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan												
						Persentase layanan SPSE Kepada Penyedia dan Non Penyedia	100 %	340,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	100 %	375,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan Internal kepada Pokja Pemilihan/ Tenaga Jafung												
						Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	5 Kegiatan	185,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	5 Kegiatan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
							5 Kegiatan						5 Kegiatan					
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	2				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						96,211,000,000				139,604,319,300			
4	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai		Nilai	80.00 Nilai	78,219,880,000				80.00 Nilai	105,070,786,000		
4	2	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	5,300,286,000				20 Dokumen	5,300,286,000		
4	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				13 Dokumen	5,300,286,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	13 Dokumen	5,300,286,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan	Orang		Orang	70 Orang	352,000,000					70 Orang	352,000,000	
4	2	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya				10 Orang	25,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	10 Orang	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4	2	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat					36 orang	327,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	36 orang	327,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis		8 Jenis	<b>17,171,613,000</b>					8 Jenis	<b>30,150,000,000</b>	
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					23 Jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	23 Jenis	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor					5 Jenis	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	5 Jenis	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga					5 jenis	2,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	5 jenis	2,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor					5 jenis	2,300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	5 jenis	2,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan					2 jenis	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	2 jenis	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4 jenis	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	4 jenis	450,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
4	2	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan tamu						295 kegiatan	3,021,613,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	295 kegiatan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah						3 jenis	8,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	3 jenis	20,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan BMD	Jenis		Jenis			1 Jenis	<b>750,000,000</b>					1 Jenis	<b>750,000,000</b>	
4	2	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						5 unit	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	5 unit	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	Jenis		Jenis			5 Jenis	<b>4,920,500,000</b>					5 Jenis	<b>6,335,500,000</b>	
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat						3 Jenis	5,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan	3 Jenis	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						3 Jenis	800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan	3 Jenis	850,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5 Jenis	1,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan	5 Jenis	2,750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS						55 Orang	2,615,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	DPRD Kota Balikpapan	55 Orang	2,715,500,000	SEKRETARIAT DPRD
						Luasan Gedung Kantor yang dilayani keamanannya						3263 Meter Persegi							3263 Meter Persegi	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
		Luasan Gedung Kantor yang dilayani kebersihannya				3263 Meter Persegi						Pelayanan Publik		3263 Meter Persegi		
4	2	1	2.1													
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Jenis	Jenis	4 Jenis	<b>6,500,000,000</b>						4 Jenis	<b>11,350,000,000</b>	
4	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara								29 Unit	2,350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								4 Kegiatan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya								2 Jenis	5,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD pada layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%							90 %	<b>36,675,481,000</b>	
4	2	1	2.2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan DPRD yang telah ditandatangani dalam satu tahun								45 orang	36,295,481,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pakaian dinas dan atribut								45 orang	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical check Up								45 orang	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
4	2	1	2.2			100 %	6,550,000,000						100 %	7,160,000,000		
		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Layanan Administrasi DPRD	%	%											
4	2	1	2.2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen administrasi keanggotaan DPRD		10 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	10 dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah jenis sarana prasarana fraksi DPRD		6 jenis	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	6 jenis	660,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		270 kegiatan	3,800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	270 kegiatan	3,800,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.2	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga Ruang Komisi yang disediakan		4 jenis	2,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	4 jenis	2,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100 %	17,991,120,000					100 %	34,533,533,300	
4	2	2	2		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100 %	5,880,000,000					100 %	16,450,000,000	
4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah koordinasi Penyusunan & Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		5 Kegiatan	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan Bapemperda	5 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi pembahasan rancangan Perda		40 kegiatan	2,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan Bapemperda	40 kegiatan	8,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 2 2 2 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan yang diselenggarakan dalam satu tahun				4 dokumen	1,600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan Bapemperda	4 dokumen	3,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun dalam satu tahun				4 dokumen	1,600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan Bapemperda	4 dokumen	4,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun dalam satu tahun				1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan Bapemperda	1 dokumen	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 2 2 2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Prosentase Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		%	100 %	<b>900,000,000</b>						100 %	<b>1,842,413,300</b>	
4 2 2 2 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan KUA PPAS				1 kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan & Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan	1 kegiatan	496,034,350	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan				1 kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan & Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan	1 kegiatan	496,034,350	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2 3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Pembahasan APBD				1 kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan & Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan	1 kegiatan	248,017,175	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan				1 kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan & Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan	1 kegiatan	248,017,175	SEKRETARIAT DPRD





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4	2	2	2	7			48 Kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan	48 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2	8			1 kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	DPRD Kota Balikpapan	1 kegiatan	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>100 %</b>	<b>4,366,120,000</b>						<b>100 %</b>	<b>8,066,120,000</b>	
4	2	2	2	1			5 orang	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	5 orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2	2			90 kegiatan	800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	90 kegiatan	1,900,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2	3			12 Kegiatan	2,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	12 Kegiatan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
							23 Jenis							23 Jenis		
4	2	2	2	4			6 orang	906,120,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	6 orang	906,120,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2	5			6 orang	360,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	6 orang	360,000,000	SEKRETARIAT DPRD





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
4	2	2	2	7			1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	1 dokumen	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	2.1			100 %	<b>2,650,000,000</b>						100 %	<b>3,200,000,000</b>		
4	2	2	2.1	2			1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan	1 dokumen	700,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.1	3			3 kegiatan	2,500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan	3 kegiatan	2,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	2.1			100 %	<b>300,000,000</b>						100 %	<b>800,000,000</b>		
4	2	2	2.1	2			1 dokumen	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Balikpapan & Badan Kehormatan DPRD Kota Balikpapan	1 dokumen	800,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	2.1			100 %	<b>1,445,000,000</b>						100 %	<b>2,675,000,000</b>		
4	2	2	2.1	2			1 Dokumen	325,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	1 Dokumen	325,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.1	3			16 Dokumen	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	16 Dokumen	1,950,000,000	SEKRETARIAT DPRD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah										
4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat Pimpinan DPRD						12 Kegiatan	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	12 Kegiatan	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5	1				<b>PERENCANAAN</b>						13,318,114,000									17,122,141,120	
5	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	84.20 nilai	10,252,500,000								84.20 nilai	12,642,141,120	
5	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	8 jenis	8,000,000,000								8 jenis	9,904,641,120	
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN				28 dokumen	8,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	28 dokumen	9,904,641,120	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	1	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	11 jenis	1,417,500,000								11 jenis	1,422,500,000	
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	15 Jenis	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				10 Jenis	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	10 Jenis	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor				3 Jenis	360,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3 Jenis	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				3 Jenis	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3 Jenis	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	1	1	2.1	6		2 Jenis	2,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	2 Jenis	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	8		500 porsi	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	500 porsi	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	9		236 kali	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	236 kali	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>			<b>4 jenis</b>	<b>365,000,000</b>						<b>4 jenis</b>	<b>365,000,000</b>	
5	1	1	2.1	1		2 Jenis	3,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	2 Jenis	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	2		5 rekening	18,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	5 rekening	18,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	3		3 Jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3 Jenis	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	4		4 orang	314,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	4 orang	314,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						1 orang							1 orang		
						900 m2							900 m2		
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>			<b>4 jenis</b>	<b>470,000,000</b>						<b>4 jenis</b>	<b>470,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	1	1	2.1	1		10 unit	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	10 unit	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	2		12 unit	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	12 unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	5		3 Jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	3 Jenis	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	6		9 Jenis	70,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	9 Jenis	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.1	9		1 kali	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai di lingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan	1 kali	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2				100 %	3,065,614,000						100 %	4,480,000,000	
5	1	2	2			9 dokumen	800,000,000						9 dokumen	850,000,000	
5	1	2	2	5		1 dokumen	800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	850,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2			20 dokumen	1,250,000,000						20 dokumen	2,500,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	1	2	2	1		20 dokumen	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	20 dokumen	1,900,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2	2		3 kali	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	3 kali	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2	3		1 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>20 %</b>	<b>1,015,614,000</b>						<b>20 %</b>	<b>1,130,000,000</b>	
5	1	2	2	1		20 %	635,614,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan	20 %	750,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2	2		20 %	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan	20 %	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2	3		20 %	130,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Balikpapan	20 %	130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>5</b>	<b>5</b>						<b>2,900,000,000</b>							<b>1,775,000,000</b>	
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>100 %</b>	<b>2,900,000,000</b>						<b>100 %</b>	<b>1,775,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	5	2	2			10 penelitian	350,000,000						10 penelitian	375,000,000	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>			penelitian			penelitian							
5	5	2	2	4		1 kegiatan	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 kegiatan	275,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2	12		1 kegiatan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 kegiatan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						data base hasil penelitian dan peraturan							
5	5	2	2			3 dokumen	450,000,000						3 dokumen	625,000,000	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			dokumen			dokumen							
5	5	2	2	3		2 dokumen	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	2 dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							
5	5	2	2	6		1 dokumen	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	375,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						Dokumen penelitian dan Pengembangan Kesehatan							
5	5	2	2			3 dokumen	1,400,000,000						3 dokumen	300,000,000	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			dokumen			dokumen							
5	5	2	2	3		1 dokumen	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah							
5	5	2	2	9		1 dokumen	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum							





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				3 Dokumen	28,345,746,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	3 Dokumen	49,193,406,900	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
<b>5 2 1 2.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	101 Jenis	<b>1,370,487,950</b>						101 Jenis	<b>1,464,732,445</b>	
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				10 Jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	10 Jenis	165,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor				30 Jenis	428,043,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	30 Jenis	428,043,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				30 Jenis	471,819,950	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	30 Jenis	519,001,945	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman				660 Porsi	20,625,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	660 Porsi	22,687,500	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah				55 Kali	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	55 Kali	330,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5 2 1 2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis		Jenis	4 Jenis	100,000,000						4 Jenis	330,000,000	
5 2 1 2.1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya				4 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Jenis	330,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		Jenis	5 Jenis	993,675,360						5 Jenis	1,093,042,896	
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				7 Rekening	250,641,600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7 Rekening	275,705,760	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS				34 Orang	743,033,760	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	34 Orang	817,337,136	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
		Jumlah Tenaga Profesional				1 Orang							1 Orang		
		Luasan gedung kantor yang dilayani				1000 m2							1000 m2		
5 2 1 2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	11 Jenis	736,550,000						11 Jenis	863,500,000	
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan Roda 4 dan 2 yang terbayar jasa pemeliharannya dan pajak serta perizinanya				77 Unit	602,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	77 Unit	715,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara				10 Jenis	134,550,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	10 Jenis	148,500,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%		%	20 %	3,953,540,690						20 %	7,634,000,000	
5 2 4 2	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%		%	20 %	3,953,540,690						20 %	7,634,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5 2 4 2 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak daerah				2 Dokumen	230,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	2 Dokumen	253,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan sosialisasi				2 Kegiatan	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	2 Kegiatan	165,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah				2 Jenis	380,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	2 Jenis	418,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah				1 Dokumen	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	770,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah				1 Dokumen	1,400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	2,090,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				1 Dokumen	900,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	2,750,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 2 4 2 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah				1 Dokumen	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	440,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
5 2 4 2 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah				1 Dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen	165,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5 2 4 2 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPJT yang disampaikan kepada Wajib Pajak				225000 SPJT	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	225000 SPJT	110,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5 2 4 2 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya keberatan pajak daerah				1 Dokumen/Laporan	80,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	1 Dokumen/Laporan	88,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5 2 4 2 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah				2 Kegiatan	138,540,690	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	2 Kegiatan	385,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 2	<b>KEUANGAN</b>						<b>14,780,000,000</b>							<b>16,000,000,000</b>		
5 2 3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	IKM Internal Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>14,780,000,000</b>							100 persen	<b>16,000,000,000</b>	
5 2 3 2	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	<b>14,780,000,000</b>							100 persen	<b>16,000,000,000</b>	
5 2 3 2 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola				7 Gedung	14,780,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Gedung	16,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 2	<b>KEUANGAN</b>						<b>58,220,000,000</b>							<b>64,587,500,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
5	2	1				100 persen	33,275,000,000						100 persen	35,787,000,000						
						100 persen							100 persen							
5	2	1	2			100 persen	260,000,000						100 persen	282,500,000						
5	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					89 dokumen	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	89 dokumen	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA					89 dokumen	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	89 dokumen	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					89 dokumen	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	89 dokumen	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)					1 dokumen	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	1 dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					4 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	4 dokumen	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	persen			persen	100 persen	28,110,000,000						100 persen	30,110,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
5	2	1	2	1			55 orang	28,000,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	55 orang	30,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	2			60 Dokumen	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	60 Dokumen	25,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	3			12 dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	12 dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	5			1 dokumen	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	1 dokumen	15,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	7			36 laporan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	36 laporan	20,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
							2 laporan							2 laporan		
							4 laporan							4 laporan		
5	2	1	2				100 persen	50,000,000						100 persen	55,000,000	
5	2	1	2	5			245 Dokumen	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	245 Dokumen	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2	7			1 Dokumen	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	1 Dokumen	33,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
5 2 1 2.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>350,000,000</b>							100 persen	<b>385,000,000</b>	
5 2 1 2.1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				20 orang	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat Daerah BPKD	20 orang	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek				80 orang	250,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat Daerah BPKD	80 orang	275,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,010,000,000</b>							100 persen	<b>2,217,500,000</b>	
5 2 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10 jenis	45,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	10 jenis	49,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				28 jenis	800,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	28 jenis	880,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia				3 jenis	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	3 jenis	28,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor				6 jenis	360,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	6 jenis	400,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah										
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan					10 jenis	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	10 jenis	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia					3 jenis	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	3 jenis	44,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	2.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman					500 kotak	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	500 kotak	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi					80 paket	650,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	80 paket	715,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis penatausahaan arsip dinamis					1 jenis	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal Perangkat Daerah BPKD	1 jenis	44,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	persen		persen		100 persen	<b>860,000,000</b>							100 persen	<b>946,000,000</b>	
5	2	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan					6 unit	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 unit	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan					10 unit	460,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 unit	506,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	





Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 2 1 2.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 paket	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 paket	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 1 2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>730,000,000</b>					100 persen	<b>803,000,000</b>		
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				3 jenis	80,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	3 jenis	88,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 1 2.1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis jasa pelayanan kantor yang tersedia				3 jenis	650,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat daerah BPKD	3 jenis	715,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 1 2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>905,000,000</b>					100 persen	<b>988,000,000</b>		
5 2 1 2.1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara				30 unit	510,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat Daerah BPKD	30 unit	561,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 1 2.1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				5 jenis	140,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat Daerah BPKD	5 jenis	145,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 1 2.1 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara				2 jenis	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Internal perangkat Daerah BPKD	2 jenis	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5 2 2 2 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran Kas SPD				432 Dokumen	75,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	432 Dokumen	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang Tercetak				23000 lembar	450,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	23000 lembar	495,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya				2 Dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	2 Dokumen	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan Aliran Kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga				532 laporan	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	532 laporan	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				1 Dokumen	125,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	1 Dokumen	137,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				7 Dokumen	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	7 Dokumen	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah SKPD				36 OPD	300,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Utu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat kota Balikpapan	36 OPD	605,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 2 2 2	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,400,000,000</b>						100 persen	<b>2,998,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	2	2	2	1		2 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	193,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	2		36 berita acara	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	36 berita acara	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	3		36 laporan	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	36 laporan	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	4		7 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	5		2 Dokumen	500,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	6		1 Dokumen	75,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	83,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2	7		1 Dokumen	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5	2	3	2	2		1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	3		2 dokumen	220,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 dokumen	275,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	4		2 dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 dokumen	200,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	5		2 laporan	400,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 laporan	440,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	6		36 laporan	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	36 laporan	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	7		50 Bidang	1,500,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	50 Bidang	1,650,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	2	3	2	8		4 Dokumen	500,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Dokumen	650,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
5 2 3 2 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	15 Dokumen	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 3 2 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				36 Laporan	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	36 Laporan	175,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 3 2 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah oleh TIM dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim				1 dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 dokumen	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 2 3 2 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi regulasi pengelolaan barang milik daerah				1 Kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Kegiatan	200,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 3	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>16,784,906,391</b>							<b>20,472,158,766</b>		
5 3 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Layanan Intenal Perangkat Daerah	Skor		Skor	79 Skor	<b>9,700,780,586</b>							79 Skor	<b>11,172,414,786</b>	
5 3 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase Kualitas Layanan Administrasi Keuangan	Skor		Skor	79 Skor	<b>8,193,866,000</b>							79 Skor	<b>9,013,252,600</b>	
5 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 dokumen	8,193,866,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	14 dokumen	9,013,252,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 1 2.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Skor		Skor	79 Skor	<b>91,800,000</b>							79 Skor	<b>474,000,000</b>	
5 3 1 2.1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan				15 orang	91,800,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	15 orang	386,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
5	3	1	2.1			79 Persen	972,153,850						79 Persen	1,244,600,050	
5	3	1	2.1	2											
						12 paket	220,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	12 paket	403,204,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.1	4											
						5958 buah	288,714,850	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	5958 buah	369,609,300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Makanan/minuman harian pegawai									
						Jumlah makanan/minuman kegiatan/pelatihan	1200 kotak						1200 kotak		
						Jumlah makanan/minuman rapat pegawai	1200 kotak						1200 kotak		
						Jumlah makanan/minuman tamu	120 kotak						120 kotak		
						Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1252 buah						1252 buah		
						Jumlah penyediaan peralatan Kebersihan	1381 buah						1381 buah		
5	3	1	2.1	5											
						2356 buah	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	2356 buah	82,541,250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah penyediaan bahan cetakan									
						Jumlah penyediaan bahan dekorasi	1 paket						1 paket		
						Jumlah penyediaan pengadaan	44790 buah						44790 buah		
5	3	1	2.1	6											
						1235 Eksemplar	6,669,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	1235 Eksemplar	7,345,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah bahan bacaan yang disediakan									
5	3	1	2.1	9											
						88 kegiatan	381,770,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	88 kegiatan	381,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi									
5	3	1	2.1												
						79 Persen	160,532,536						79 Persen	161,132,536	
						Jumlah Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang									
5	3	1	2.1	1											
						200 buah	14,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM	200 buah	14,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah penyediaan materi untuk administrasi									
						Jumlah Surat dinas yang terkirim	12 paket						12 paket		









Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota				30 SK		Semua Kelurahan		Pelayanan Publik	Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		30 SK	SUMBER DAYA MANUSIA	
		Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan				20 SK							20 SK		
		Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS				200 SK							200 SK		
		Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL				1 SK							1 SK		
		Jumlah penerbitan surat KGB				10 Surat							10 Surat		
5	3	2	2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat						PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	700 SK	82,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas						PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 SK	603,932,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Pengisian JPT Pratama							4 JPT		
5	3	2	2		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase Capaian Unsur Pengembangan Karir	Persen						29.25 Persen	<b>3,297,423,300</b>	
5	3	2	2	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya						ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	95 orang	1,615,484,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar						ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	19 orang	1,638,145,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fasilitasi pengusulan dupak						ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	3 orang	43,793,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional							215 orang		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
5 3 2 2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian unsur manajemen kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Persen		Persen	29.25 Persen	865,040,700									
5 3 2 2 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan evaluasi Kinerja PNS				1 dokumen	315,540,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	1 dokumen	395,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Jumlah sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS				1 kegiatan										
		Jumlah Tim Penilaian Kinerja yang Mengikuti Pembelajaran Tentang Sistem Manajemen Kinerja				20 orang										
5 3 2 2 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan				36 orang	224,918,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	36 orang	272,110,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 2 2 5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya				323 orang	64,256,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	323 orang	67,056,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 3 2 2 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran ke perangkat daerah				12 dokumen	86,540,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	12 dokumen	99,521,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Jumlah pemeriksaan uji kesehatan dalam rangka pemberian cuti sakit pegawai				30 kegiatan										
		Jumlah penerbitan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS				175 kartu										
		Jumlah penerbitan Kartu Pegawai				175 kartu										
		Jumlah penerbitan surat cuti (cuti tahunan dan cuti besar JPT Pratama, cuti alasan penting PNS, cuti diluar tanggungan negara PNS, cuti sakit PNS)				125 surat										
		Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian				1 kegiatan										
5 3 2 2 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin				12 kasus	91,566,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	12 kasus	105,301,550	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6 1	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											<b>15,000,000,000</b>	<b>16,708,380,000</b>		
6 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Peningkatan Kualitas Layanan Internal	%		%	82 %	<b>13,533,520,000</b>					82 %	<b>15,058,872,000</b>		
6 1 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>9,860,344,000</b>					100 %	<b>10,846,378,400</b>		
6 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN yang telah ditandatangani dalam satu tahun				14 Dokumen	9,860,344,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	10,846,378,400	INSPEKTORAT
6 1 1 2.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>1,400,000,000</b>					100 %	<b>1,540,000,000</b>		
6 1 1 2.1 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Sertifikasi				10 Orang	640,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Orang	704,000,000	INSPEKTORAT
6 1 1 2.1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan				3 Kegiatan	760,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	836,000,000	INSPEKTORAT
6 1 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>607,512,140</b>					100 %	<b>840,263,354</b>		
6 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 Jenis	11,538,840	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	12,692,724	INSPEKTORAT
6 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor				2 Jenis	205,413,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Jenis	225,954,740	INSPEKTORAT
6 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				2 Jenis	106,203,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Jenis	116,823,960	INSPEKTORAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
6	1	1	2.1	6			1440 Eksemplar	9,355,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1440 Eksemplar	10,291,050	INSPEKTORAT
6	1	1	2.1	9			96 Kegiatan	275,000,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Kegiatan	302,500,880	INSPEKTORAT
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				<b>100 %</b>	<b>815,613,260</b>						<b>100 %</b>	<b>897,174,586</b>	
6	1	1	2.1	1			30 Paket	3,180,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	30 Paket	3,498,000	INSPEKTORAT
							500 Lembar							500 Lembar		
6	1	1	2.1	2			12 Kegiatan	162,412,021	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	12 Kegiatan	178,653,223	INSPEKTORAT
6	1	1	2.1	4			13 Kegiatan	650,021,239	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	13 Kegiatan	715,023,363	INSPEKTORAT
							12 Kegiatan							12 Kegiatan		
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1</b>				<b>100 %</b>	<b>850,050,600</b>						<b>100 %</b>	<b>935,055,660</b>	
6	1	1	2.1	2			31 Unit	580,050,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31 Unit	638,055,660	INSPEKTORAT
6	1	1	2.1	6			12 Kegiatan	110,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Kegiatan	121,000,000	INSPEKTORAT





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
6	1	3	2	1			3 Kegiatan	56,293,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	61,922,300	INSPEKTORAT
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			85 %	<b>722,810,000</b>							85 %	<b>795,091,000</b>	
6	1	3	2	1			3 Kegiatan	234,198,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	257,617,800	INSPEKTORAT
6	1	3	2	2			7 Kegiatan	72,698,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	7 Kegiatan	79,967,800	INSPEKTORAT
6	1	3	2	3			3 Kegiatan	37,215,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	40,936,500	INSPEKTORAT
6	1	3	2	4			2 Kegiatan	378,699,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	416,568,900	INSPEKTORAT
<b>7</b>																
<b>7</b>	<b>1</b>							<b>17,164,150,000</b>							<b>17,312,295,473</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					70 Nilai	<b>14,400,219,522</b>						70 Nilai	<b>14,479,216,774</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				2 Jenis	<b>10,823,604,350</b>						2 Jenis	<b>10,823,604,350</b>	
7	1	1	2	1			28 Dokumen	10,823,604,350	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non - ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	28 Dokumen	10,823,604,350	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	1	2.1			8 Jenis	1,207,802,588						8 Jenis	1,238,048,901	
7	1	1	2.1	1		13 Jenis	18,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	13 Jenis	18,450,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.1	2		20 Jenis	311,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	20 Jenis	318,980,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.1	3		2 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	2 Jenis	10,250,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.1	4		114 Jenis	430,796,874	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	114 Jenis	441,566,795	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
						2567 Kotak							2567 Kotak		
7	1	1	2.1	5		17 Jenis	74,975,714	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	17 Jenis	76,850,106	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.1	6		3080 Eksemplar	18,480,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	3080 Eksemplar	18,942,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	1	2.1	8		220 kotak	4,950,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	220 kotak	5,125,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
										Nasional					Daerah					
											Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik									
7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				45 Orang	339,400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	45 Orang	347,885,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	1	2.1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis		Jenis	1 Jenis	<b>68,800,000</b>						1 Jenis	<b>68,800,000</b>		
7	1	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 Unit	68,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	2 Unit	68,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	1	2.1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>1,629,471,944</b>						3 Jenis	<b>1,661,459,367</b>		
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen dalam satu tahun				12 Dokumen	1,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	12 Dokumen	1,236,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun				36 Rekening	350,215,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	36 Rekening	350,215,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen pembayaran honor tenagan non-PNS				13 Dokumen	1,278,056,944	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	13 Dokumen	1,310,008,367	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
						Jumlah gedung yang dilayani				17 Unit								17 Unit		
						Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional				10 OK								10 OK		
7	1	1	2.1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	5 Jenis	<b>670,540,640</b>							5 Jenis	<b>687,304,156</b>	
						Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis		Jenis	1 Jenis								1 Jenis		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara				35 unit	526,327,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	35 unit	539,485,175	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				1 Unit	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	1 Unit	10,250,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				10 Jenis	114,213,640	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	10 Jenis	117,068,981	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.1.2.1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 Unit	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN dan Non ASN se Kecamatan Balikpapan Barat	1 Unit	20,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	80.36 Nilai	<b>2,028,175,500</b>						80.36 Nilai	<b>2,078,579,887</b>	
7.1.2.2	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	<b>1,946,188,000</b>						100 %	<b>1,994,842,700</b>	
7.1.2.2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Kegiatan	1,946,188,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	9 Kegiatan	1,994,842,700	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Kegiatan					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Kegiatan		
7.1.2.2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah jenis urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Urusan		Urusan	1 Urusan	<b>17,000,000</b>						1 Urusan	<b>17,125,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	2	2	1		4 Kegiatan	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Publik Se Kecamatan Balikpapan Barat	4 Kegiatan	10,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2	2	3		3 Jenis	7,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Publik Se Kecamatan Balikpapan Barat	3 Jenis	7,125,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	2	2			1 Urusan	<b>64,987,500</b>						1 Urusan	<b>66,612,187</b>	
7	1	2	2	1		250 Izin	64,987,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	250 Izin	66,612,187	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3				20 %	<b>465,754,978</b>						20 %	<b>477,748,812</b>	
7	1	3	2			3 Jenis	<b>165,089,600</b>						3 Jenis	<b>169,566,800</b>	
7	1	3	2	3		14 Kegiatan	70,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	14 Kegiatan	72,100,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2	4		14 kegiatan	95,089,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	14 kegiatan	97,466,800	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2			2 Lembaga	<b>300,665,378</b>						2 Lembaga	<b>308,182,012</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	3	2	1		3 Lembaga	32,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha UMKM, Ketua RT	3 Lembaga	32,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2	2		1 kegiatan	67,665,378	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha UMKM, Ketua RT	1 kegiatan	69,357,012	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2	4		2 kegiatan	160,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha UMKM, Ketua RT	2 kegiatan	164,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	3	2	5		1 kegiatan	41,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Pelaku Usaha UMKM, Ketua RT	1 kegiatan	42,025,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	1	4				100 %	270,000,000						100 %	276,750,000	
7	1	4	2			5 Jenis	270,000,000						5 Jenis	276,750,000	
7	1	4	2	1		12 dokumen	270,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Bhabinsa, Bhabinkantimas	12 dokumen	276,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
						150 Orang							150 Orang		
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1						772,600,000							791,952,500	
7	1	3				100 %	772,600,000						100 %	791,952,500	
7	1	3	2			4 Kegiatan	162,100,000						4 Kegiatan	166,190,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan Baru Ilir				1 Kegiatan	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	7,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5 Usulan	134,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5 Usulan	137,965,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan Masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 Usulan	20,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
<b>7 1 3 2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	%		%	100 %	<b>610,500,000</b>						100 %	<b>625,762,500</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga	610,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Lembaga	625,762,500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
											Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
											Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>7 1</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>690,850,000</b>							<b>708,158,750</b>	
<b>7 1 3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	100 %	<b>690,850,000</b>						100 %	<b>708,158,750</b>	
<b>7 1 3 2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>162,100,000</b>						4 Kegiatan	<b>166,190,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 Kegiatan	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	7,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7 usulan	124,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 usulan	127,715,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Usulan	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 Usulan	30,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.1.3.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	<b>528,750,000</b>						2 Lembaga	<b>541,968,750</b>	
7.1.3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	528,750,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Lembaga	541,968,750	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7.1							<b>681,600,000</b>							<b>698,677,500</b>	
7.1.3						100 %	<b>681,600,000</b>						100 %	<b>698,677,500</b>	
7.1.3.2						4 Kegiatan	<b>162,100,000</b>						4 Kegiatan	<b>166,190,000</b>	
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 KEGIATAN	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 KEGIATAN	7,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah											
7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						5 usulam	139,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5 usulam	143,090,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1 usulan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 usulan	15,375,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	3	2		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan				Kegiatan	4 Kegiatan	<b>519,500,000</b>						4 Kegiatan	<b>532,487,500</b>		
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga				Lembaga	2 Lembaga								2 Lembaga		
7	1	3	2	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas lembaga kemasyarakatan						2 Lembaga	519,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Lembaga	532,487,500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7	1				<b>KECAMATAN</b>								<b>491,100,000</b>								<b>503,415,000</b>	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%			%		100 %	<b>491,100,000</b>							100 %	<b>503,415,000</b>	
7	1	3	2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan				Kegiatan	4 Kegiatan	<b>162,100,000</b>							4 Kegiatan	<b>166,190,000</b>	
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan						1 Kegiatan	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	7,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						8 usulan	129,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8 usulan	132,840,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5 usulan	25,625,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	<b>329,000,000</b>						2 Lembaga	<b>337,225,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	fasilitasi lembaga kemasyarakatan				3 lembaga	329,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 lembaga	337,225,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>														
7 1 3							<b>654,100,000</b>							<b>670,490,000</b>	
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Target	%		%	100 %	<b>654,100,000</b>						100 %	<b>670,490,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	<b>162,100,000</b>						4 kegiatan	<b>166,190,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 Kegiatan	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	7,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5 Usulan	119,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5 Usulan	122,590,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan Masyarakat Yang Dilaksanakan Terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Usulan	35,875,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	<b>492,000,000</b>						2 Lembaga	<b>504,300,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga	492,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Lembaga	504,300,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>345,600,000</b>						<b>354,240,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	100 %	<b>345,600,000</b>						100 %	<b>354,240,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>162,100,000</b>						4 Kegiatan	<b>166,152,500</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 KEGIATAN	7,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 KEGIATAN	7,687,500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Usulan	129,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 Usulan	132,840,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		6 usulan	25,625,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>183,500,000</b>						4 Kegiatan	<b>188,087,500</b>	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga							2 Lembaga		
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	183,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 Lembaga	188,087,500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>17,118,076,850</b>						<b>20,171,335,700</b>		
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>15,700,345,255</b>						70 Nilai	<b>18,130,933,400</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7 1 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>10,508,928,000</b>							2 Jenis	<b>11,559,820,800</b>	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				28 Dokumen	10,508,928,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai ASN di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Tengah	28 Dokumen	11,559,820,800	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	8 Jenis	<b>1,089,870,000</b>							8 Jenis	<b>1,418,187,500</b>	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor				8 Jenis	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	8 Jenis	38,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				5 Jenis	65,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	5 Jenis	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				55 Jenis	559,550,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	55 Jenis	615,505,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
		Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun				1631 Kotak							1631 Kotak			
7 1 1 2.1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				12 Jenis	179,245,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	12 Jenis	198,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 1 2.1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun				2015 Eksemplar	10,075,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	2015 Eksemplar	11,082,500	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.1.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu				150 Kotak	6,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	150 Kotak	6,600,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				55 Orang	235,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	55 Orang	258,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.1.1.2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	Jenis		Jenis	1 Jenis	<b>266,200,000</b>						1 Jenis	<b>680,000,000</b>	
7.1.1.2.1.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun				1 Unit	266,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.1.1.2.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		Jenis	4 Jenis	<b>2,847,783,255</b>						4 Jenis	<b>3,132,561,600</b>	
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun				35 Rekening	550,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	35 Rekening	605,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun				27 Dokumen	2,297,783,255	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Non PNS dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	27 Dokumen	2,527,561,600	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional				15 Dokumen							15 Dokumen		
		Jumlah gedung yang dilayani				7 Unit							7 Unit		
7.1.1.2.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	4 Jenis	<b>987,564,000</b>						4 Jenis	<b>1,264,766,000</b>	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara				30 Unit	345,570,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang milik daerah di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	30 Unit	380,127,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7	1	1	2.1	2			25 Unit	181,490,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang milik daerah di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	25 Unit	199,639,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.1	6			9 Jenis	247,544,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang milik daerah di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	9 Jenis	275,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	1	2.1	9			9 Unit	212,960,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang milik daerah di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	9 Unit	235,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	2					80.75 Nilai	<b>754,603,595</b>						80.75 Nilai	<b>898,822,300</b>	
7	1	2	2				2 Jenis	<b>634,973,595</b>						2 Jenis	<b>761,869,300</b>	
7	1	2	2	1			62 Kegiatan	634,973,595	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah	62 Kegiatan	761,869,300	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
							1 Kegiatan							1 Kegiatan		
7	1	2	2				2 Urusan	<b>39,630,000</b>						2 Urusan	<b>48,953,000</b>	
7	1	2	2	1			4 Kegiatan	2,400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah	4 Kegiatan	8,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7	1	2	2	3			2 Jenis	37,230,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah	2 Jenis	40,953,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			1 Urusan	<b>80,000,000</b>							1 Urusan	<b>88,000,000</b>	
7	1	2	2	1		500 Izin	80,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Tengah	500 Izin	88,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				20 %	<b>471,223,000</b>							20 %	<b>897,580,000</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			2 Kegiatan	<b>164,142,000</b>							2 Kegiatan	<b>343,000,000</b>	
7	1	3	2	3		2 Kegiatan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	2 Kegiatan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2	4		9 Dokumen	64,142,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	9 Dokumen	143,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			60 %	<b>307,081,000</b>							60 %	<b>554,580,000</b>	
7	1	3	2	1		1 Lembaga	57,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan	1 Lembaga	93,580,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2	2		1 Kegiatan	74,827,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan	1 Kegiatan	216,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2	4		2 Kegiatan	159,219,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan	2 Kegiatan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	1	3	2	5		2 Kegiatan	15,234,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan	2 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	4				100 %	191,905,000						100 %	244,000,000	
7	1	4	2			1 Jenis	191,905,000						1 Jenis	244,000,000	
7	1	4	2	1		12 Dokumen	191,905,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	12 Dokumen	244,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
						12 Kegiatan						12 Kegiatan			
7															
7	1						522,434,800							825,700,000	
7	1	3				20 %	522,434,800						20 %	825,700,000	
7	1	3	2			3 Kegiatan	105,325,000						3 Kegiatan	361,000,000	
7	1	3	2	1		1 Kegiatan	5,325,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu				1 Kegiatan	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	1	3	2	2		4 Usulan	70,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu				4 Usulan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	1	3	2	3		3 Usulan	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu				3 Usulan	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	1	3	2			35 %	417,109,800						35 %	464,700,000	
7	1	3	2	1		2 Lembaga	417,109,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu				2 Lembaga	464,700,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7															
7	1						782,260,750							1,094,520,000	
7	1	3				20 %	782,260,750						20 %	1,094,520,000	
7	1	3	2			3 Kegiatan	106,850,950						3 Kegiatan	364,500,000	
7	1	3	2	1		1 Kegiatan	6,850,950	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir				1 Kegiatan	14,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sari Ilir				4 Usulan	80,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir					4 Usulan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir					2 Usulan	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Gunung Sari Ilir	%		%	35 %	<b>675,409,800</b>						35 %	<b>730,020,000</b>		
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas lembaga kemasyarakatan di Kelurahan				2 lembaga	675,409,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir					2 lembaga	730,020,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>															
7 1 3							<b>949,466,800</b>							<b>1,270,720,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>949,466,800</b>							20 %	<b>1,270,720,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Rejo	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>108,776,000</b>							3 Kegiatan	<b>365,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 Kegiatan	8,776,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan				6 Usulan	68,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Usulan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	32,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Usulan	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Karang Rejo	%		%	100 %	<b>840,690,800</b>							100 %	<b>905,720,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	840,690,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo					2 Lembaga	905,720,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>															
7 1 3							<b>457,659,700</b>							<b>759,560,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>457,659,700</b>							20 %	<b>759,560,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Jati	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>106,000,000</b>							3 Kegiatan	<b>361,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan				1 Kegiatan	6,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati					1 Kegiatan	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sumber Rejo				5 Usulan	69,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Usulan	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Usulan	31,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Usulan	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Rejo	%		%	60 %	<b>579,467,300</b>						60 %	<b>631,660,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Rejo				2 Lembaga	579,467,300	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Lembaga	631,660,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>														
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai		Nilai	90 Nilai	<b>14,649,701,650</b>						90 Nilai	<b>21,930,494,572</b>	
7 1 1 2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>19,998,000</b>						70 Nilai	<b>21,997,800</b>	
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	19,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	21,997,800	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Adm Keuangan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	<b>9,874,964,800</b>						1 Jenis	<b>12,741,113,120</b>	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				26 Dokumen	9,874,964,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Dokumen	12,741,113,120	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Adm Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	7 Jenis	<b>1,410,699,000</b>						7 Jenis	<b>1,818,613,652</b>	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor				8 jenis	48,772,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 jenis	53,649,200	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7	1	1	2.1	2			30 jenis	400,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	30 jenis	483,395,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	4			77 jenis	600,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	77 jenis	715,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
							8566 kotak							8566 kotak		
7	1	1	2.1	5			21 jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 jenis	136,869,452	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	6			20805 eksemplar	26,927,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20805 eksemplar	156,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	9			88 Orang	235,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	88 Orang	258,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1				3 Jenis	200,000,000						3 Jenis	2,950,000,000	
7	1	1	2.1	9			1 unit	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 unit	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1				3 Jenis	2,303,501,250						3 Jenis	3,102,000,000	
7	1	1	2.1	1			12 bulan	12,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 bulan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	1	2.1	2			264 Rekening	518,736,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	264 Rekening	1,000,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	4			6 unit	1,772,765,250	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 unit	2,090,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
							44 orang						44 orang		
							168 OB						168 OB		
							26 jenis						26 jenis		
7	1	1	2.1				4 Jenis	840,538,600					4 Jenis	1,100,000,000	
7	1	1	2.1	2			49 unit	400,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	49 unit	550,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	6			8 jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 jenis	165,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	9			6 unit	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 unit	210,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	1	2.1	10			6 unit	90,538,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 unit	175,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	2					100 %	835,000,000					100 %	3,398,149,190	
7	1	2	2				97 %	720,000,000					97 %	2,242,749,190	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	2	2	1		50 Kegiatan	720,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Kegiatan	2,180,049,190	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
						1 Kegiatan						1 Kegiatan			
7	1	2	2			2 Urusan	25,000,000					2 Urusan	165,400,000		
7	1	2	2	1		3 kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	2	2	3		2 Jenis	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Jenis	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	2	2			1 Urusan	90,000,000					1 Urusan	990,000,000		
7	1	2	2	1		400 izin	90,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	400 izin	990,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	3				100 %	778,298,350					100 %	939,298,350		
7	1	3	2			4 Kegiatan	378,298,350					4 Kegiatan	487,298,350		
7	1	3	2	3		15 Kegiatan	265,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan	15 Kegiatan	374,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	3	2	4		7 Dokumen	113,298,350	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan	7 Dokumen	113,298,350	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3	2			96 %	400,000,000						96 %	452,000,000	
						96 %							96 %		
7	1	3	2	1		17 Kegiatan	160,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	17 Kegiatan	176,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	3	2	2		5 Kegiatan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Kegiatan	55,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	3	2	4		2 Kegiatan	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Kegiatan	155,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	3	2	5		3 Kegiatan	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Kegiatan	66,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	1	4				100 %	188,000,000					100 %	206,800,000		
7	1	4	2			2 Jenis	188,000,000					2 Jenis	206,800,000		
7	1	4	2	1		28 Kegiatan	188,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	28 Kegiatan	206,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1						569,000,000						897,500,800		
7	1	3				100 %	569,000,000					100 %	897,500,800		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	3	2			4 Kegiatan	145,000,000						4 Kegiatan	409,940,000	
7	1	3	2	1		1 kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	67,980,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2	2		9 Usulan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9 Usulan	238,960,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2	3		2 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 usulan	103,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2			96 %	424,000,000						96 %	487,560,800	
						96 %							96 %		
7	1	3	2	1		2 lembaga	424,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	487,560,800	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
											Mewujudka n Birokrasi Pemerintaha n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1						770,000,000							1,174,360,000	
7	1	3				100 %	770,000,000						100 %	1,174,360,000	
7	1	3	2			4 Kegiatan	145,000,000						4 Kegiatan	435,600,000	
7	1	3	2	1		1 Kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Iilir	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				1 Kegiatan	72,600,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yg dilaksanakan Pemb Sarana dan Prasarana Kelurahan				8 Usulan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Usulan	253,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan Masyarakat yg dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Usulan	110,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	%		%	96 %	625,000,000						96 %	738,760,000	
		Tingkat Keaktifan lomba Kemasyarakatan di Kecamatan	%		%	96 %		96 %							
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				2 lembaga	625,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir					2 lembaga	738,760,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>565,000,000</b>						<b>1,040,710,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	100 %	<b>565,000,000</b>						100 %	<b>1,040,710,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>145,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>540,100,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	musrenbang kelurahan				1 kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 kegiatan	72,600,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	usulan masy yg dilaksanakan pemb sarpras kelurahan				10 usulan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 usulan	357,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan masy yg dilaksanakan terkait Pemb Masy di kelurahan				2 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 usulan	110,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	%		%	96 %	420,000,000						96 %	500,610,000	
		Tingkat Keaktifan lomba Kemasyarakatan di Kecamatan	%		%	96 %		96 %							
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	420,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Lembaga	500,610,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>532,000,000</b>						<b>836,856,307</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	100 %	<b>532,000,000</b>						100 %	<b>836,856,307</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>145,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>355,056,670</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	3	2	1		1 kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	65,999,945	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2	2		6 usulan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		6 usulan	189,056,725	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2	3		3 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2			96 %	387,000,000						96 %	481,799,637	
						96 %							96 %		
7	1	3	2	1		4 lembaga	387,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 lembaga	481,799,637	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1						613,000,000							1,108,482,900	
7	1	3				100 %	613,000,000						100 %	1,108,482,900	
7	1	3	2			4 Kegiatan	145,000,000						4 Kegiatan	538,609,000	
7	1	3	2	1		1 kegiatan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 kegiatan	71,109,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	1	3	2	2		13 usulan	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		13 usulan	357,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	usulan masy yg dilaksanakan terkait pemb masy di kelurahan				5 usulan	25,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 usulan	110,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	%		%	96 %	<b>468,000,000</b>						96 %	<b>569,873,900</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	468,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Lembaga	569,873,900	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>														
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM (indeks Kepuasan Internal)	Nilai		Nilai	70 Nilai	<b>14,740,485,300</b>						70 Nilai	<b>17,691,759,400</b>	
7 1 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	<b>10,795,355,350</b>						1 Jenis	<b>11,582,259,400</b>	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				28 Dokumen	10,795,355,350	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh PNS di Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Utara	28 Dokumen	11,582,259,400	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	8 Jenis	<b>962,140,000</b>						8 Jenis	<b>1,702,000,000</b>	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 Jenis	30,100,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	8 Jenis	35,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				20 jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	20 jenis	630,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 1 2.1 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga				10 Jenis	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	10 Jenis	60,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 1 2.1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				80 Jenis	265,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	80 Jenis	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu Tahun				300 Kotak							300 Kotak		





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				15 jenis	65,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	15 jenis	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun				12000 Eksemplar	59,040,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	12000 Eksemplar	120,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.1.2.1.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu				200 Kotak	8,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	200 Kotak	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				77 Orang	335,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	77 Orang	470,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
<b>7.1.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>2,360,863,844</b>						3 Jenis	<b>2,920,500,000</b>	
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen dalam satu tahun				12 Dokumen	2,063,844	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Balikpapan Utara	12 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun				264 Rekening	600,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Balikpapan Utara	264 Rekening	710,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen pembayaran honor tenaga Non PNS dalam satu tahun				13 Dokumen	1,758,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Balikpapan Utara	13 Dokumen	2,205,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		Jumlah Gedung Kantor yang dilayani				7 Unit							7 Unit		
		Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional				22 OK							22 OK		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	1	2.1			4 Jenis	622,126,106						4 Jenis	905,000,000	
7	1	1	2.1	2		36 Unit	426,430,106	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	36 Unit	500,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.1	6		10 Jenis	15,696,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	10 Jenis	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.1	9		7 Unit	80,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	7 Unit	180,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	1	2.1	10		7 Jenis	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Balikpapan Utara	7 Jenis	180,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	1	2				80,46 Nilai	1,055,639,000						80,46 Nilai	1,487,000,000	
7	1	2	2			100 %	902,243,200						100 %	1,275,500,000	
7	1	2	2	1		61 Kegiatan	902,243,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Balikpapan Utara	61 Kegiatan	1,275,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
						1 Kegiatan							1 Kegiatan		
7	1	2	2			2 Urusan	55,625,000						2 Urusan	76,500,000	
7	1	2	2	1		3 Kegiatan	5,625,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	3 Kegiatan	6,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7	1	3	2	2			1 Kegiatan	71,312,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	1 Kegiatan	252,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	1	3	2	4			6 Kegiatan	135,920,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	6 Kegiatan	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	1	3	2	5			4 Kegiatan	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	4 Kegiatan	55,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	1	4					100 %	361,675,000					100 %	397,842,500		
7	1	4	2				1 Jenis	361,675,000					1 Jenis	397,842,500		
7	1	4	2	1			12 Dokumen	361,675,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	12 Dokumen	397,842,500	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
							15 Kegiatan						15 Kegiatan			
7							<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1							551,080,000						846,700,000		
7	1	3					20 %	551,080,000					20 %	846,700,000		
7	1	3	2				5 Kegiatan	197,000,000					5 Kegiatan	436,700,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Gn.Smd Baru				1 Kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	13,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Usulan	313,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan				1 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Usulan	110,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.3.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>354,080,000</b>						60 %	<b>410,000,000</b>	
7.1.3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	354,080,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	410,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7.1	<b>KECAMATAN</b>						<b>808,320,000</b>							<b>17,643,500,000</b>	
7.1.3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>808,320,000</b>						20 %	<b>17,643,500,000</b>	
7.1.3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>200,000,000</b>						5 Kegiatan	<b>16,923,500,000</b>	
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Karang Joang				1 Kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	16,500,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.1.3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana				7 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Usulan	357,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 usulan	66,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
<b>7 1 3 2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>608,320,000</b>						60 %	<b>720,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	608,320,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	720,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>7 1</b>	<b>KECAMATAN</b>														
							<b>880,960,000</b>							<b>1,281,236,000</b>	
<b>7 1 3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>880,960,000</b>						20 %	<b>1,281,236,000</b>	
<b>7 1 3 2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>200,000,000</b>						5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Gr. Indah				1 Kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Usulan	324,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Usulan	99,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
<b>7 1 3 2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>680,960,000</b>						60 %	<b>841,236,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	680,960,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	841,236,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>762,920,000</b>						<b>1,099,824,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>762,920,000</b>						20 %	<b>1,099,824,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>200,000,000</b>						5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Gunung Samarinda				1 Kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		6 Usulan	324,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Usulan	99,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>562,920,000</b>						60 %	<b>659,824,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	562,920,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	659,824,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,026,240,000</b>						<b>1,381,028,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>1,026,240,000</b>						20 %	<b>1,381,028,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>200,000,000</b>						5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Mr. Rapak				1 Kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		7 Usulan	368,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Usulan	55,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>826,240,000</b>						60 %	<b>941,028,000</b>		
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	826,240,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	941,028,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>															
7 1 3							<b>926,360,000</b>							<b>1,281,500,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>926,360,000</b>							20 %	<b>1,281,500,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>200,000,000</b>							5 Kegiatan	<b>481,500,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rakoor Perencanaan Pembangun Kelurahan Batu ampar				1 Kegiatan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 Kegiatan	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Ampar				7 Usulan	165,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi		7 Usulan	350,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Batu Ampar															
7	1	3	2		<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>726,360,000</b>					60 %	<b>800,000,000</b>				
7	1	3	2	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	726,360,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar						2 lembaga	800,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1				<b>KECAMATAN</b>						<b>19,526,616,115</b>							<b>20,834,613,000</b>			
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM internal perangkat daerah	Angka		Angka	80 Angka	<b>17,722,616,115</b>							80 Angka	<b>18,803,800,000</b>		
7	1	1	2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	nilai sakip perangkat daerah	angka		angka	64.42 angka	<b>10,000,000</b>							64.42 angka	<b>0</b>		
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan			2 dokumen	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	2 jenis	<b>12,300,000,000</b>							2 jenis	<b>13,100,000,000</b>		
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen pembayaran gaji, tunj, thr dan 13				28 dokumen	12,300,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh pegawai kantor kelurahan maupun kantor Kecamatan Balikpapan Selatan			28 dokumen	13,100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	jenis		jenis	8 jenis	<b>1,662,080,000</b>							8 jenis	<b>1,673,000,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	1	2.1	1		5 jenis	150,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	5 jenis	170,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1	2		7 jenis	376,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	7 jenis	390,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1	4		4 jenis	610,980,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	4 jenis	650,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
						21 jenis							21 jenis		
7	1	1	2.1	5		6 jenis	170,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	6 jenis	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1	6		2 jenis	134,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	2 jenis	143,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1	8		4 jenis	20,250,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	4 jenis	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1	9		60 orang	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	60 orang	265,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1			3 Jenis	240,000,000						3 Jenis	690,000,000	
7	1	1	2.1	9		1 gedung	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Seluruh kantor kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Selatan	1 gedung	250,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	1	2.1			4 jenis	2,452,036,115						4 jenis	2,708,000,000	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif												
										Nasional	Daerah															
		daerah dan instansi vertikal																								
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dgn instansi vertikal								35 kegiatan	824,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	35 kegiatan	851,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN			
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Urusan			Urusan	2 Urusan	<b>36,000,000</b>														
7	1	2	2	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat								12 Kegiatan	24,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Kegiatan	33,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat								3 jenis	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	3 jenis	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	urusan			urusan	1 urusan	<b>78,000,000</b>														
7	1	2	2	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah ijin yang diterbitkan								700 ijin	78,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	700 ijin	82,950,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%			%	75 %	<b>515,000,000</b>									75 %	<b>673,863,000</b>				
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan			kegiatan	21 kegiatan	<b>340,000,000</b>									21 kegiatan	<b>423,863,000</b>				
7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan								8 kegiatan	200,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	8 kegiatan	250,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 4	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan				2 laporan	140,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2 laporan	173,863,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	%		%	60 %	<b>175,000,000</b>						60 %	<b>250,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi				1 lembaga	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	1 lembaga	60,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan lembaga masyarakat				12 kegiatan	55,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	12 kegiatan	60,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kegiatan fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat				2 kegiatan	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2 kegiatan	55,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna				2 kegiatan	35,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2 kegiatan	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat	%		%	80 %	<b>351,000,000</b>						80 %	<b>375,000,000</b>	
7 1 4 2	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jenis Upaya penyelenggaraan trantibum	jenis		jenis	3 jenis	<b>351,000,000</b>						3 jenis	<b>375,000,000</b>	
7 1 4 2 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban				12 dokumen	351,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1. Unsur lintas vertikal bidang Trantibum 2. Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	12 dokumen	375,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		jumlah kegiatan sinergitas trantibum kecamatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun				18 kegiatan							18 kegiatan		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah									
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	1					<b>KECAMATAN</b>						<b>684,000,000</b>		<b>975,442,500</b>						
7	1	3				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>684,000,000</b>				20 %	<b>975,442,500</b>			
7	1	3	2			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>277,000,000</b>				15 kegiatan	<b>529,745,000</b>			
7	1	3	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	215,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		10 usulan	414,745,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>407,000,000</b>						60 %	<b>445,697,500</b>	
7	1	3	2	1		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	407,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	445,697,500	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	1					<b>KECAMATAN</b>						<b>642,500,000</b>		<b>918,395,000</b>						
7	1	3				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>642,500,000</b>						20 %	<b>918,395,000</b>	
7	1	3	2			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>299,000,000</b>						15 kegiatan	<b>536,795,000</b>	
7	1	3	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	1	3	2	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	237,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10 usulan	436,795,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>343,500,000</b>						60 %	<b>381,600,000</b>		
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	343,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	381,600,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>458,250,000</b>							<b>733,057,500</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>458,250,000</b>							20 %	<b>733,057,500</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>222,250,000</b>							15 kegiatan	<b>460,250,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				8 usulan	160,250,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		8 usulan	360,250,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>236,000,000</b>							60 %	<b>272,807,500</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	236,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	272,807,500	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>907,738,885</b>							<b>1,200,853,885</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>907,738,885</b>							20 %	<b>1,200,853,885</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>301,738,885</b>							15 kegiatan	<b>554,738,885</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	239,738,885	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10 usulan	439,738,885	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>606,000,000</b>						60 %	<b>646,115,000</b>		
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	606,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	646,115,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>836,895,000</b>							<b>1,097,010,000</b>		
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>836,895,000</b>							20 %	<b>1,097,010,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>258,895,000</b>							15 kegiatan	<b>496,895,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	196,895,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10 usulan	396,895,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>578,000,000</b>							60 %	<b>600,115,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	578,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	600,115,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>964,000,000</b>							<b>1,224,356,660</b>	
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>964,000,000</b>						20 %	<b>1,224,356,660</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>267,000,000</b>						15 kegiatan	<b>504,769,160</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	205,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10 usulan	404,769,160	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%		%	60 %	<b>697,000,000</b>						60 %	<b>719,587,500</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				2 lembaga	697,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	719,587,500	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>						<b>780,000,000</b>							<b>1,024,250,000</b>	
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>780,000,000</b>						20 %	<b>1,024,250,000</b>	
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	<b>292,000,000</b>						15 kegiatan	<b>512,000,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbang				1 kegiatan	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1 kegiatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah usulan sarana dan prasarana yang dilaksanakan				10 usulan	212,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10 usulan	412,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah usulan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan				8 usulan	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		8 usulan	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	%		%	60 %	<b>488,000,000</b>						60 %	<b>512,250,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi				2 lembaga	488,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2 lembaga	512,250,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>														
7 1 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	70 nilai	<b>12,209,368,950</b>						70 nilai	<b>13,141,874,800</b>	
7 1 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	jenis		jenis	2 jenis	<b>8,715,671,750</b>						2 jenis	<b>8,977,141,900</b>	
7 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				28 dokumen	8,715,671,750	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	28 dokumen	8,977,141,900	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 1 2.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	8 jenis	<b>1,040,645,000</b>						8 jenis	<b>1,126,864,200</b>	
7 1 1 2.1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13 jenis	20,996,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	13 jenis	21,626,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 1 2.1 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor				20 jenis	271,198,450	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	20 jenis	279,334,400	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah												
7	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor						94 jenis	437,460,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	94 jenis	450,583,800	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
						Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun						21971 kotak											
7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan						9 jenis	60,990,350	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	9 jenis	62,820,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
7	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun						2324 eksemplar	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	2324 eksemplar	15,450,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
7	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu						1000 kotak	22,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	1000 kotak	23,175,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah						62 orang	212,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	62 orang	218,875,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
7	1	1	2.1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	jenis				jenis	3 jenis	<b>1,726,100,000</b>								3 jenis	<b>1,779,113,000</b>	
7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Internet) yang dibayar dalam 1 tahun						84 rekening	459,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	84 rekening	472,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
						Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Telepon) yang dibayar dalam 1 tahun						12 rekening										12 rekening	
						Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Air yang dibayar dalam 1 tahun						60 rekening										60 rekening	
						Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Listrik yang dibayar dalam 1 tahun						60 rekening										60 rekening	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7	1	2	2	1		50 kegiatan	693,957,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	50 kegiatan	714,775,700	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	2	2			1 urusan	21,000,000						1 urusan	51,630,000	
7	1	2	2	1		4 kegiatan	21,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kecamatan dan kelurahan	4 kegiatan	21,630,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	2	2			1 urusan	110,000,000						1 urusan	113,300,000	
7	1	2	2	1		2000 izin	110,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	2000 izin	113,300,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3				20 %	676,236,600						20 %	716,523,650	
7	1	3	2			3 kegiatan	329,544,400						3 kegiatan	339,430,700	
7	1	3	2	3		20 kegiatan	228,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	20 kegiatan	234,840,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2	4		7 dokumen	101,544,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	7 dokumen	104,590,700	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2			60 %	346,692,200						60 %	377,092,950	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
7	1	3	2	1		2 lembaga	110,917,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan Timur	2 lembaga	114,244,700	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	1	3	2	2		1 kegiatan	21,775,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan Timur	1 kegiatan	22,428,250	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	1	3	2	4		5 kegiatan	160,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan Timur	5 kegiatan	164,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	1	3	2	5		5 kegiatan	54,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Balikpapan Timur	5 kegiatan	55,620,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	1	4				100 %	304,880,000						100 %	314,026,400		
7	1	4	2			5 jenis	304,880,000						5 jenis	314,026,400		
7	1	4	2	1		12 dokumen	304,880,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	12 dokumen	314,026,400	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
						20 kegiatan							20 kegiatan			
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	1											561,273,000			578,111,190	
7	1	3				20 %	561,273,000						20 %	578,111,190		
7	1	3	2			1 kegiatan	10,600,000						1 kegiatan	10,918,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Lamaru				1 kegiatan	10,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	10,918,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	usulan		usulan	5 usulan	<b>209,273,000</b>						5 usulan	<b>215,551,190</b>	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 usulan	169,273,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 usulan	174,351,190	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 usulan	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5 usulan	41,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	%		%	60 %	<b>341,400,000</b>						60 %	<b>351,642,000</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	341,400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	351,642,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>							<b>737,575,000</b>						<b>759,702,250</b>	
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>737,575,000</b>						20 %	<b>759,702,250</b>	
7 1 3 2	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Desa Manggar Baru	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>10,600,000</b>						1 kegiatan	<b>10,918,000</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Manggar Baru				1 kegiatan	10,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	10,918,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	usulan		usulan	2 usulan	<b>220,200,000</b>						2 usulan	<b>226,806,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				9 usulan	180,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9 usulan	185,606,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 usulan	40,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 usulan	41,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	%		%	60 %	<b>506,775,000</b>						60 %	<b>521,978,250</b>	
7 1 3 2 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	506,775,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	521,978,250	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 1	<b>KECAMATAN</b>														
7 1 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>694,356,900</b>							<b>726,105,610</b>	
7 1 3	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	20 %	<b>694,356,900</b>						20 %	<b>726,105,610</b>	
7 1 3 2	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah jenis Kegiatan Pemberdayaan Desa	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>10,599,900</b>						1 kegiatan	<b>10,917,900</b>	
7 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kel. Teritip				1 kegiatan	10,599,900	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	10,917,900	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	<b>214,737,000</b>						3 kegiatan	<b>232,097,110</b>	
7 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 usulan	214,737,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4 usulan	221,179,110	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 1 3 2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	%		%	60 %	<b>469,020,000</b>						60 %	<b>483,090,600</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	3	2	1		2 lembaga	469,020,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip			Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	483,090,600	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	1						<b>1,191,352,550</b>							<b>1,227,093,100</b>	
7	1	3					<b>1,191,352,550</b>						20 %	<b>1,227,093,100</b>	
7	1	3	2										1 kegiatan	<b>13,595,700</b>	
7	1	3	2	1		1 kegiatan	13,199,700	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar			Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 kegiatan	13,595,700	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2			3 kegiatan	<b>231,127,000</b>						3 kegiatan	<b>238,060,800</b>	
7	1	3	2	2		12 usulan	216,127,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar			Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12 usulan	222,610,800	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2	3		1 usulan	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar			Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1 usulan	15,450,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7	1	3	2			60 %	<b>947,025,850</b>						60 %	<b>975,436,600</b>	
7	1	3	2	1		2 lembaga	947,025,850	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar			Mewujudka n Birokrasi Pemerintah n yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2 lembaga	975,436,600	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
8						<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>									
8	1						<b>8,500,000,000</b>							<b>19,814,000,000</b>	
8	1	1				100 Persen	<b>3,380,002,040</b>						100 Persen	<b>8,654,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
8	1	1	2			1 Jenis	2,129,037,000						1 Jenis	5,100,000,000	
8	1	1	2	1		14 bulan	2,129,037,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	14 bulan	5,100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1			16 Orang	63,600,000						16 Orang	80,000,000	
						8 orang							8 orang		
						16 orang							16 orang		
8	1	1	2.1	2		16 orang	13,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	16 orang	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1	11		8 orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	8 orang	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1			6 Jenis	641,725,602						6 Jenis	1,036,000,000	
8	1	1	2.1	1		10 jenis	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	10 jenis	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1	2		15 jenis	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	15 jenis	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1	4		120 jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	120 jenis	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
8.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				12 jenis	76,725,602		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	12 jenis	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.1.1.2.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 jenis	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	3 jenis	26,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah				2 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	2 Jenis	350,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.1.1.2.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang	Jenis		Jenis	7 Jenis	<b>271,639,438</b>						7 Jenis	<b>350,000,000</b>	
8.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36 kwitansi	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	36 kwitansi	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja di Perangkat Daerah  Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan				6 orang  320 m2	171,639,438		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	6 orang  320 m2	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.1.1.2.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>274,000,000</b>						100 Persen	<b>420,000,000</b>	
8.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				8 unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	8 unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.1.1.2.1.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				12 unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	12 unit	120,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah												
8	1	1	2.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya								22 unit	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	22 unit	90,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	1 paket	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Terjalannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen			Persen	100 Persen	<b>745,000,000</b>									100 Persen	<b>870,000,000</b>	
8	1	2	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Tersusunnya Program Kerja, Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi serta Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	<b>745,000,000</b>									12 Dokumen	<b>870,000,000</b>	
8	1	2	2	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					5 dokumen	10,000,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota, K/L/D/I, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Forum Binaan Kesbangpol, dan Organisasi Kemasyarakatan Balikpapan	5 dokumen	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					5 kegiatan	20,000,000					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota, K/L/D/I, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Forum Binaan Kesbangpol, dan Organisasi Kemasyarakatan Balikpapan	5 kegiatan	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
8 1 2 2 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5 kegiatan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota, K/L/D/I, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Forum Binaan Kesbangpol, dan Organisasi Kemasyarakatan Balikpapan	5 kegiatan	350,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 2 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 kegiatan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota, K/L/D/I, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Forum Binaan Kesbangpol, dan Organisasi Kemasyarakatan Balikpapan	8 kegiatan	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 2 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 dokumen	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota, K/L/D/I, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa, Forum Binaan Kesbangpol, dan Organisasi Kemasyarakatan Balikpapan	12 dokumen	70,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,554,997,960</b>						100 Persen	<b>1,580,000,000</b>	
8 1 3 2	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen		Persen	100 Persen	<b>1,554,997,960</b>						100 Persen	<b>1,580,000,000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
8.1.3.2.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan realisasi Bantuan keuangan Partai politik				100 persen	1,454,997,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	100 persen	1,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.3.2.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi Bankeu Parpol Jumlah Monitoring Perkembangan Politik dan situasi lainnya				1 Dokumen 12 Kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen 12 Kegiatan	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>970,000,000</b>					100 Persen	<b>1,510,000,000</b>		
8.1.4.2	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	PELAKSANAAN PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS, DAN ORMAS ASING DI DAERAH Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>970,000,000</b>					100 Persen 100 Persen	<b>1,510,000,000</b>		
8.1.4.2.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen hibah dan bansos yang diverifikasi				4 Dokumen	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan	4 Dokumen	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.4.2.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan	10 Dokumen	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.1.4.2.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah				10 kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintah Kota dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan	10 kegiatan	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	







Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
8 1 6 2	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	1,250,000,000						100 Persen	2,700,000,000	
8 1 6 2 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				42 Kegiatan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Tim koordinasi	42 Kegiatan	500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				42 Kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Tim koordinasi	42 Kegiatan	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				23 Kegiatan	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Tim koordinasi	23 Kegiatan	1,800,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>TOTAL</b>								<b>2,445,988,110,400</b>						<b>3,837,010,862,503</b>	

### 5.3. Inovasi Pemerintah Kota Balikpapan

Perkembangan Pembangunan didaerah sangat berkaitan dengan kebijakan desentralisasi yang memberi ruang untuk terjadinya kompetisi dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga menjadi kompetitif dan unggul. Dalam mendukung peningkatan layanan Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan selalu mendorong proses pengembangan inovasi pada setiap sector pelayanan. Adapun beberapa inovasi Pemerintah Kota Balikpapan yang sedang berjalan dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

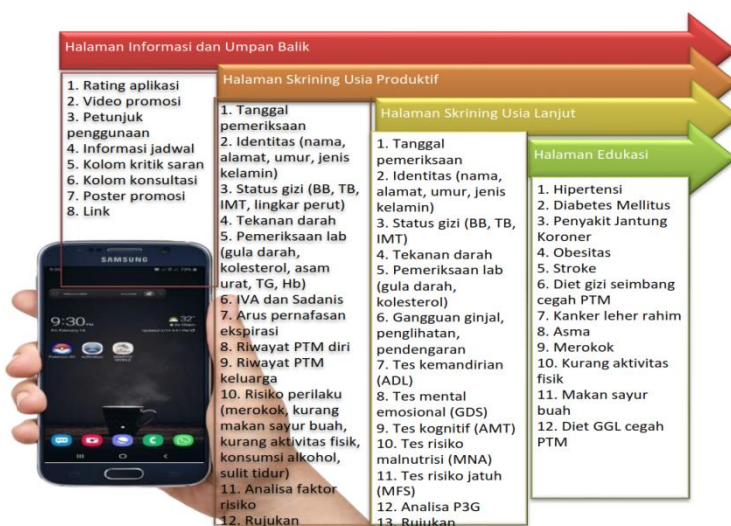
#### 1. Gempita Mobile

GEMPITA MOBILE (Gerakan Melawan Penyakit Tidak Menular Mobile) adalah gerakan untuk meningkatkan cakupan skrining PTM pada seluruh usia produktif dan usia lanjut melalui pendekatan sasaran dengan pemberdayaan masyarakat.



Gempita Mobile terdiri dari empat kegiatan utama yakni 4 S (Senam, Skrining, Sweeping, Sistem informasi aplikasi)

Gambar 5.1. Konsep Gempita Mobile



Gambar 5.2. Isi Konten Aplikasi

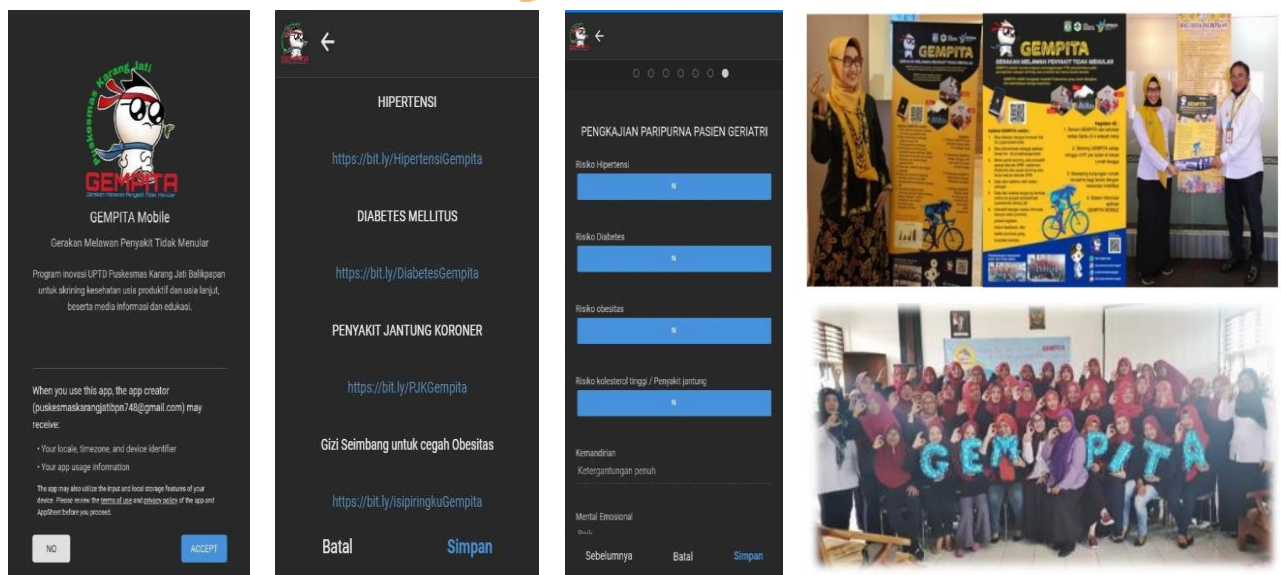
Aplikasi Gempita Mobile adalah aplikasi sederhana untuk penginputan data skrining yang akan terekap pada akun googlesheet UPTD Puskesmas Karang Jati, terdiri dari instrumen skrining usia produktif, instrumen skrining usia lanjut, halaman informasi dan umpan balik, dan halaman edukasi berisi materi penyuluhan / edukasi PTM.



Di akhir halaman instrumen skrining, hasil input akan terskoring dan teranalisa secara otomatis dan akan ditampilkan analisa faktor risiko seperti risiko hipertensi, diabetes, dislipidemia, tingkat kemandirian, gangguan mental, gangguan kognitif, malnutrisi, risiko jatuh, dan sebagainya. Aplikasi dapat diunduh di google playstore ([bit.ly/aplikasigempita](https://bit.ly/aplikasigempita)) maupun diakses melalui browser internet ([bit.ly/gempitamobile](https://bit.ly/gempitamobile)) dan dilengkapi panduan penggunaan dalam aplikasi.

Adapun manfaat Aplikasi Gempita Mobile ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 5.3. Manfaat Aplikasi Gempita Mobile**



**Gambar 5.4. Aplikasi Gempita Mobile dan Dukungan**

## 2. OK4U (Online KIR For You)

Covid 19 memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia. Hampir di semua lini terkena dampak covid 19, bahkan sektor pelayanan publik menjadi lumpuh. Terhitung mulai tanggal 24 Maret 2020 pelayanan pengujian dihentikan.



Namun kehidupan harus tetap berjalan, kita tidak boleh selamanya terpuruk dalam pandemi ini. “New Normal” jalan dan juga tantangan yang harus kita hadapi. Bergelut dengan virus adalah satu satunya pilihan yang bisa kita ambil saat ini. Menyongsong new normal memberikan PR baru bagi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pasca penutupan pelayanan selama 3 bulan, antrian layanan pengujian kendaraan bermotor mencapai 10 ribu unit kendaraan. Belajar dari pegalaman beberapa daerah yang telah memulai layanan



pasca penutupan, antrian menjadi masalah besar, terjadi antrian panjang yang menimbulkan kerumunan masyarakat. Dinas Perhubungan kota Balikpapan mencoba berinovasi untuk

**Gambar 5.5. Manfaat Inovasi**



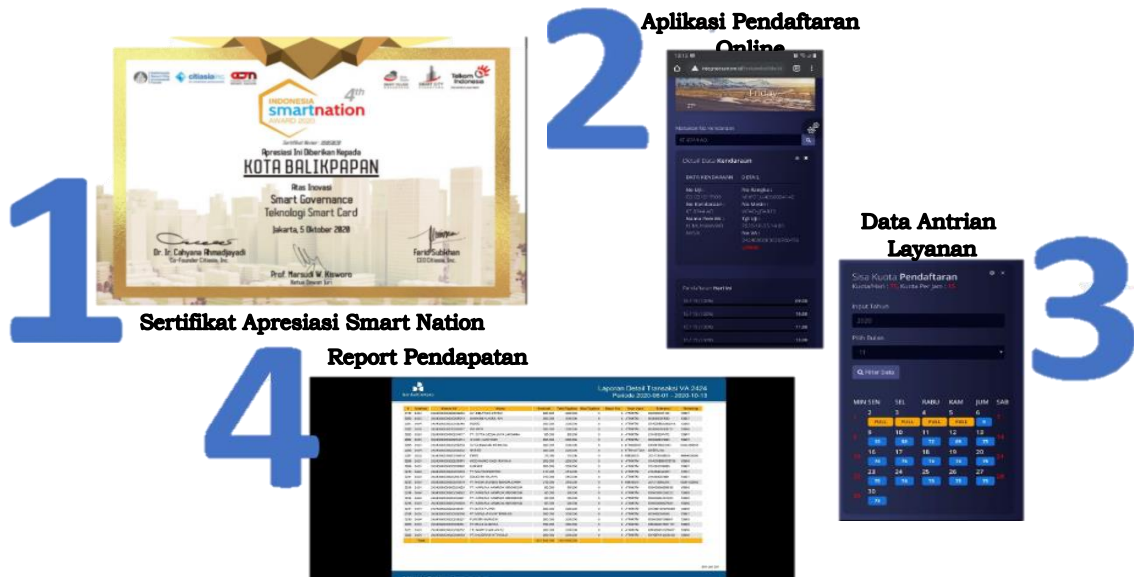
mengatasi permasalahan ini, kami harus dapat mengatur pergerakan manusia agar virus covid tidak menyebar lebih luas. Inovasi ini bertujuan untuk mereduksi penyebaran covid 19 setelah beroperasinya kembali pelayanan pengujian pasca penutupan. adapun Manfaatnya antara lain:

Hasil dari Inovasi ini adalah:

1. Aplikasi Booking Online: Bukti fisik dari inovasi diwujudkan dalam aplikasi booking online layanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Waktu layanan: Waktu yang dibutuhkan dari awal layanan sampai selesai berkurang cukup signifikan, hal ini disebabkan tidak adanya antrian dan system kerja yang baru menerapkan konsep drive thru (waktu layanan kurang dari 15 Menit).
3. Antrian: Tidak terdapat antrian yang berlebih di kantor pengujian dan karena data antrian terekam dengan baik, Dinas Perhubungan menjadi jauh lebih mudah dalam mengatur system kerja.
4. PAD : Sejak tanggal pertama non tunai diterapkan total pendapatan terekam pada server data di bank periode 17 Agustus 2020 s/d 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 847.945.000.



5. Penghargaan/Apresiasi dari citi asia smart nation: Pada tanggal 05 Oktober 2020 Citi Asia dalam ajang “Indonesia Smart Nation Award 2020” memberika apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Balikpapan terkait pelayanan public pada masa pandemic covid 19.

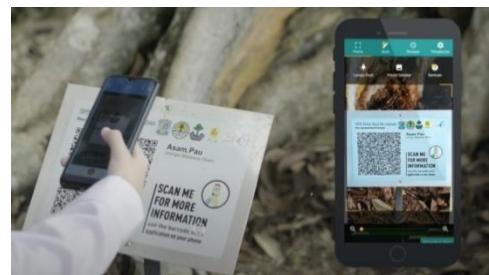


**3. DIGITASI (Data Informasi diGital TAnaman kolekSI) Kebun Raya Balikpapan**



DIGITASI (Data Informasi diGital TAnaman kolekSI) Kebun Raya Balikpapan merupakan suatu inovasi dimana menyampaikan semua informasi database tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Balikpapan secara digital melalui

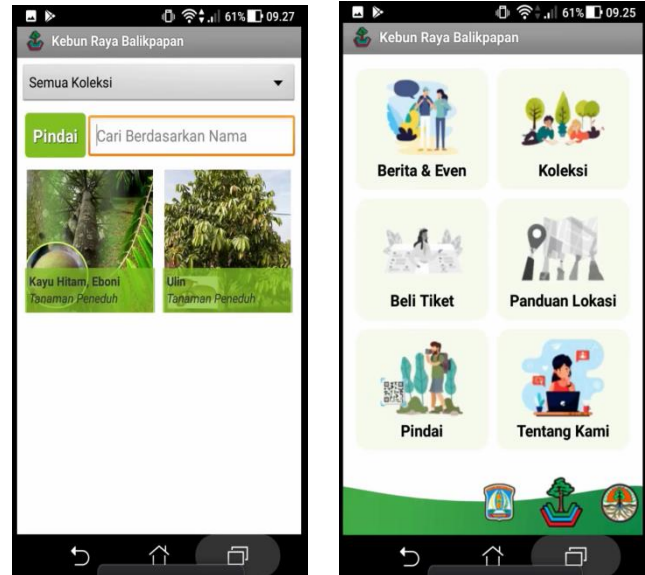
aplikasi Quick Response (QR) Code yang ada di tanaman koleksi serta dapat melalui website Kebun Raya Balikpapan ([kebunraya.balikpapan.go.id](http://kebunraya.balikpapan.go.id)) dengan menscan plang barcode yang terpasang ditiap tanaman koleksi dan spontan di area kunjungan dan area edukasi di Kebun Raya Balikpapan.



Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya website Kebun Raya Balikpapan yang memuat semua database tanaman koleksi agar dapat diakses oleh publik secara formal;
- b. Terbangunnya database tanaman koleksi secara lengkap, aktual dan dapat diakses melalui aplikasi Quick Response (QR) Code dan website Kebun Raya Balikpapan sehingga memudahkan peneliti, akademisi hingga pengunjung wisata untuk mengakses dan mengetahui tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Balikpapan;
- c. Pembuatan nama tag barcode pada seluruh tanaman koleksi di Kebun Raya Balikpapan terutama di area edukasi dan kunjungan;
- d. Peningkatan pemahaman nilai penting inovasi melalui sosialisasi, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kebun Raya Balikpapan melalui program Training of Trainer (ToT).

- e. Terbangunnya link antara database tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Balikpapan dengan database herbarium yang ada di Balitek KSDA Samboja KLHK secara menyeluruh;
- f. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan mitra potensial, baik berupa program maupun pendanaan;
- g. Terwujudnya salah satu kegiatan untuk mendukung program Smart City Kota Balikpapan di bidang lingkungan, melalui ekowisata di Kebun Raya Balikpapan;
- h. Terintegrasinya data tanaman yang ada di Kebun Raya Balikpapan dengan Kebun Raya yang dikelola LIPI dan Kebun Raya Daerah yang ada di seluruh Indonesia



manfaat dari hasil inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. Internal (UPTD Kebun Raya Balikpapan)
  - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kebun Raya Balikpapan dalam hal pengetahuan tentang tanaman koleksi serta memiliki jiwa inovasi untuk suatu perubahan kinerja yang lebih baik;
  - Pengelolaan database tanaman koleksi secara lengkap dan aktual serta telah berbasis sistem informasi teknologi yang memiliki back up data dalam bentuk digital sehingga resiko kehilangan data dan informasi spesimen tumbuhan dapat dihindari;
  - Terkoneksinya database koleksi tumbuhan ke dalam laman website Kebun Raya Balikpapan.
2. Eksternal (Pihak Lain)
  - Data tanaman koleksi dapat diakses secara mudah, lengkap, efektif dan efisien untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian oleh para pihak (baik nasional dan internasional) serta kunjungan wisata;
  - Para pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan, pelatihan serat penelitian akan mengetahui secara detail potensi termasuk bagaimana mekanisme jika ingin mendapatkan layanan untuk identifikasi jenis atau keperluan lainnya;
  - Membuka peluang para pihak untuk membangun kerja sama terutama di dalam mengintegrasikan database baik untuk tujuan pendidikan dan pelatihan serta penelitian untuk kegiatan konservasi sumber daya alam flora di Indonesia

Untuk memberikan gambaran implementasi inovasi DIGITASI Kebun Raya Balikpapan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Hasil dari Inovasi ini antara lain adalah:

- a. Telah tersedianya website Kebun Raya Balikpapan yang dapat diakses oleh semua orang sebagai media informasi berita kegiatan, semua tentang Kebun Raya Balikpapan,
- b. fasilitas yang ada, wisata yang disediakan dan data informasi tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Balikpapan; Adanya database tanaman koleksi secara lengkap, aktual dan dapat diakses melalui aplikasi Quick Response (QR) Code dan website Kebun Raya Balikpapan;
- c. Telah terpasangnya 350 plang barcode tanaman koleksi yang berada di area kunjungan dan area edukasi, tepatnya terletak berada di vak 1.A, 1.B, 1.C, VI, X.B, VII.B, Pengarah Gerbang, Pengarah Pembibitan dan Jalur embung 1;
- d. Pegawai di Kebun Raya Balikpapan memiliki ilmu baru tentang penggunaan website dan aplikasi sebagai dasar untuk menjelaskan ke pengunjung dari akademisi, peneliti hingga pengunjung wisata. Serta memahami arti nilai suatu inovasi untuk kemajuan Kebun Raya Balikpapan;
- e. Pengunjung telah dapat menggunakan dan mengakses barcode yang telah terpasang ditiap tanaman koleksi



#### 4. WACAT (WArgaku ke Capil Aku Tau)



pencatatan sipil di kantor Disdukcapil.

Melihat jumlah pelayanan yang dilakukan DISDUKCAPIL dalam 1 tahun mencapai 265.560 dokumen maka dapat dihitung bahwa dalam 1 bulan rata-rata jumlah penerbitan dokumen adalah 22.130 dokumen dan dalam 1 hari rata-rata sejumlah 1.106 dokumen. Artinya 1 hari ada 1.106 orang warga Kota Balikpapan yang mengurus dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa persyaratan Surat Pengantar Lurah dan Ketua RT tidak diberlakukan lagi. Maka Lurah dan Ketua RT tidak lagi mengetahui warganya yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Saat dilakukan pendataan untuk pembagian program-program jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai, Pendataan Keluarga Miskin, pemutahiran data untuk pemilihan umum atau Sensus Penduduk maka Ketua RT sangat kesulitan memperoleh data warganya yang lengkap dan akurat. Akhirnya keluhan para Lurah dan Ketua RT disampaikan ke Disdukcapil untuk dapat dicarikan mekanisme yang tepat agar para Lurah dan Ketua RT memiliki data penduduk yang akurat dan lengkap serta dapat mengetahui warganya yang melakukan pelayanan setiap hari secara cepat setiap saat.

Untuk membangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang adaptif, tujuan yang ingin dicapai dari inovasi ini sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam beberapa bulan ini adalah membangun pondasi perubahan berupa regulasi dan membuat tata kelola pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah adalah mengembangkan format laporan elektronik berbasis android/IOS.

3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang akan dilaksanakan adalah model pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil digunakan diseluruh Indonesia.

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Dapat disimpulkan bahwa perlu dimanfaatkan aturan yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar dalam penggunaan teknologi informasi dalam sebuah sistem pelayanan yang terintegrasi sehingga mampu menyajikan informasi dalam bentuk laporan pelayanan penduduk. Oleh sebab itu maka kegiatan inovatif yang diusulkan adalah dengan mengintegrasikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

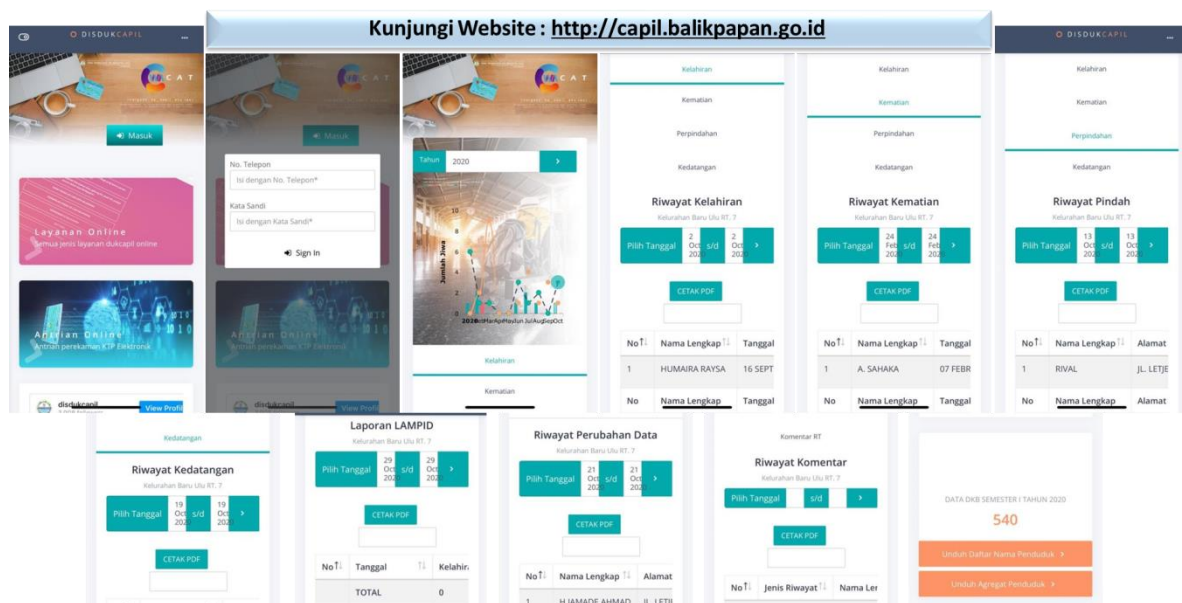




Integrasi pelayanan yang dimaksud adalah dengan menciptakan sebuah cabang pelayanan baru dalam alur pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dimana hasil akhir dari penerbitan dokumen tersebut adalah laporan pelayanan yang diterima oleh Lurah dan Ketua RT secara online system dengan dibantu oleh aplikasi LEP Dukcapil (Laporan Elektronik Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Kecepatan dan kelengkapan laporan pelayanan ini juga akan memudahkan para stakeholder yang membutuhkan data penduduk di tingkat RT dalam menjalankan kegiatan yang sudah di programkan. Diharapkan program-program pemerintahan, pembangunan dan social dapat berjalan dengan baik atas tersedianya data penduduk yang akurat dan akuntabel. Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa kondisi yang diharapkan:

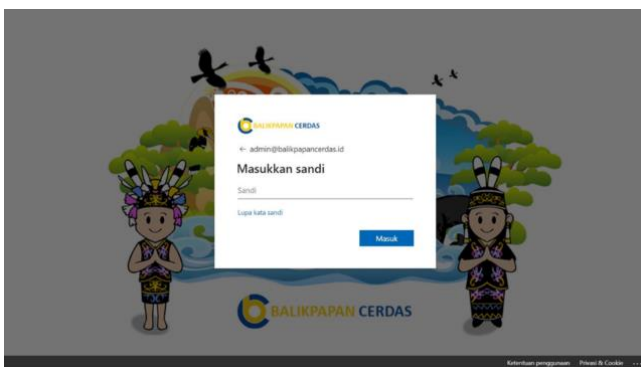
1. Tersedianya informasi warga yang melakukan pelayanan penerbitan dokumen di tingkat Kelurahan dan RT.
2. Terintegrasinya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan laporan pelayanan sampai ke tingkat RT
3. Tersedianya data penduduk di tingkat Kelurahan dan RT.
4. Tidak ada lagi beban kerja Disdukcapil dalam membuat laporan pelayanan.





## 5. BALIKPAPAN CERDAS

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menggalakkan program literasi. Literasi tidak dibatasi hanya pada aktivitas membaca dan menulis, tetapi meluas seperti literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Literasi TIK atau literasi digital ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif melalui pemanfaatan konten media massa. Balikpapan Cerdas sebagai sarana Sarana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Abad 21 bagi para pendidik dan peserta didik guna mendukung Kota Balikpapan sebagai Smart City. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan pelatihan Literasi



TIK untuk Guru SD & SMP bekerjasama dengan Microsoft. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill para guru dalam proses belajar baik offline maupun Online (Daring), sehingga proses pembelajaran kepada siswa bisa optimal dan menarik. Materi

pembelajaran Microsoft 365 yang diberikan yakni:

### MICROSOFT TEAMS

dapat digunakan Guru untuk mendistribusikan, memberi umpan balik, dan menilai tugas yang diberikan pada siswa melalui Teams dengan menggunakan kolom Tugas yang tersedia



### MICROSOFT FORMS

adalah aplikasi sederhana dan ringan yang memungkinkan Anda membuat survei, kuis, dan polling dengan mudah. Dalam pendidikan, kuis dapat digunakan untuk membuat kuis, mengumpulkan umpan balik dari guru dan orang tua, atau merencanakan aktivitas kelas dan staf



### ONEDRIVE

adalah penyimpanan dokumen pribadi online yang bisa Anda dapatkan dengan akun Microsoft atau Outlook.com dan bisa anda akses dari mana saja. OneDrive dapat digunakan untuk menyimpan dokumen, foto, dan file lain di cloud. Dimana File ini bisa anda bagikan dengan teman, dan bahkan kolaborasi konten



### SWAY

adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan Anda membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif, serta banyak hal lainnya



### OFFICE ONLINE

adalah aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, Forms (formulir), Outlook (email), OneNote (catatan), To Do (daftar tugas), Kalender, Orang (kontak), OneDrive (penyimpanan cloud), Skype, Sway (laporan interaktif), dan Flow (otomatisasi)



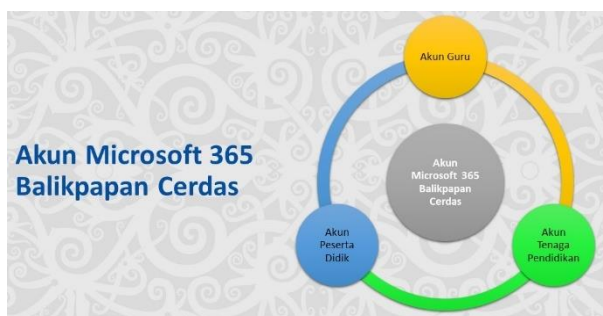
### ONENOTE CLASSNOTEBOOK

adalah Platform ini cocok dikombinasikan dengan metode belajar mengajar apapun baik secara langsung dalam ruangan atau yang bersifat interaktif. Dalam kondisi tertentu guru atau dosen dapat memberikan tanggapan tanpa harus hadir di kelas dan juga tanpa terbatas waktu sehingga proses belajar mengajar akan jauh lebih efisien



Tujuan yang ingin dicapai dari inovasi Balikpapan Cerdas antara lain:

1. Penerapan merdeka belajar
2. Balikpapan Cerdas mendukung Balikpapan Smart City
3. Memberikan pilihan platform pembelajaran bagi para guru dan peserta didik
4. Membantu para guru untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran
5. Berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang pemanfaatan Microsoft 365 di dalam proses pembelajaran
6. Menyiapkan semua elemen pendidikan agar dapat menghadapi kecakapan Abad 21 dan perkembangan zaman yang sangat pesat



Bentuk dari inovasi Balikpapan Cerdas adalah pembuatan portal situs web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Akun yang digunakan untuk mengakses website tersebut adalah Akun Microsoft 365 dengan

domain [balikpapancerdas.id](http://balikpapancerdas.id) bagi guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Selain itu, juga diadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru dan



peserta didik. Program yang akan dilaksanakan untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi tersebut.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya inovasi ini adalah meningkatkan skill para guru, terutama tingkat SD dan SMP

agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan optimal dan menarik perhatian bagi para siswa. Dengan meningkatnya skill para guru maka diharapkan kinerja guru juga meningkat sehingga dapat mencapai keberhasilan pendidikan untuk menghasilkan generasi cerdas di Kota Balikpapan.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 6.1 Target Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan, RSUD Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Dinas Ketenagakerjaan
		2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Dinas Ketenagakerjaan
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
		2.	Tingkat Kemiskinan (persen)	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.	Indeks Pembangunan Gender (indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i> (indeks)	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappedalitbang
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio (indeks)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		2.	PDRB perkapita (persen)	Bappeda Litbang
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB non migas (persen)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini laporan keuangan (Kategori)	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2.	Indeks Persepsi Korupsi (indeks)	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (indeks SKM)	Bappeda Litbang
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (skor Kinerja)	Bappeda Litbang
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6.	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

Sumber : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 kepada Menteri PAN dan RB disajikan pada tabel 6.2 di bawah ini.

**Tabel 6.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.51
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.85
		2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.5
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. IPM	79.53
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	2.31
		3. Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.14
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Livable City Index	74
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	78
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Indeks Gini Ratio	0.31
		2. PDRB perkapita (Rp. Juta)	124.63
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB non migas (Rp. Triliun)	37.48
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP
		2. Indeks Persepsi Korupsi	6.8
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	80.16
		4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	74
		5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	75
		6. Indeks Profesionalitas ASN	86

Sumber : Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

## 6.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2020 didasarkan atas minimal 4 pengukuran yaitu:

- a. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2020;
- b. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2017 dan realisasi capaian tahun 2020; dan
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.



d. Perbandingkan capaian kinerja tahun 2020 Kota Balikpapan dengan capaian kinerja Pemerintah Kab/Kota lain, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Nasional (jika ada).

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB, dan telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020.

Target yang diperjanjikan pada tahun 2020 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020 untuk 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 6.3. dibawah ini.

**Tabel 6.3 Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.51	10.68	101.62%
		2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.93	14.14	94.71%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1 Angka Harapan Hidup (tahun)	74	74.49	100.66%
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.85	9.00	53.89%
		2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.5	62.90	97.52%
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1 Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)	79.53	80.01	100.60%
		2 Tingkat Kemiskinan (%)	2.31	2.57	89.88%
		3 Indeks Pembangunan Gender (angka indeks)	92	89.65	97.45%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks)	60.14	63.52	105.62%
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1 <i>Livable City Index (indeks)</i>	74	81.69	110.39%
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks)	78	82.03	105.17%
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1 Indeks Gini Ratio (angka indeks)	0.31	0.33	106.45%
		2 PDRB perkapita (Rp. Juta)	124.63	155.977	125.15%
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1 PDRB non migas (Rp.Triliun)	37.48	N/A	-
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1 Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP	WTP	100.00%
		2 Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks)	6.8	6.92	101.76%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
		3 Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala)	80.16	80.37	100.26%
		4 Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	74	N/A	-
		5 Penilaian Kepatuhan (angka skala)	75	83.19	110.92%
		6 Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks)	86	93.30	108.49%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bappeda Litbang tahun 2020

Berdasarkan tabel 6.3. dari 20 Indikator Kinerja Utama yang diukur capaian kerjanya terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan tercapai/melebihi dari target, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya kurang dari target dan 2 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan tidak terdapat capaian dari target PK Wali Kota Balikpapan tahun 2020.

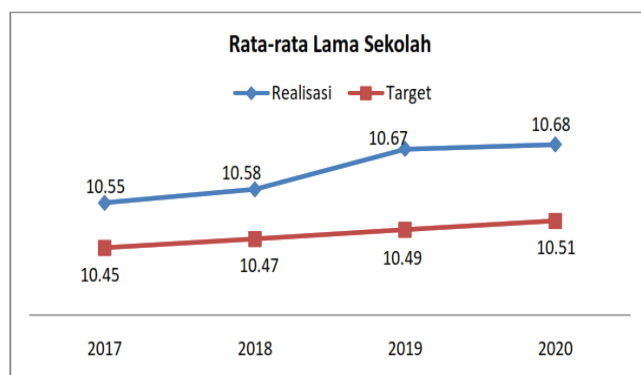
### 6.3 Perbandingan Realisasi Terhadap Target IKU Tahun 2020

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2020, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut:

#### 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,51 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 10,68 dengan capaian kinerja 101,62% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU RLS tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan



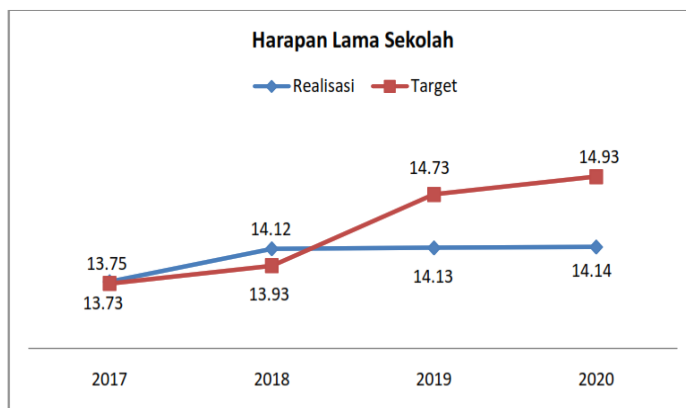
Gambar 6.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020

selama 10,68 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Capaian hasil akuntabilitas kinerja RLS pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 10,67 tahun.

#### 2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Target indikator kinerja utama angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,93 tahun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 14,14 dengan capaian kinerja 94,71% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU HLS tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

**Intepretasi Hasil**  
 Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun atau setara dengan Diploma III. Capaian hasil akuntabilitas



**Gambar 6.2 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020**

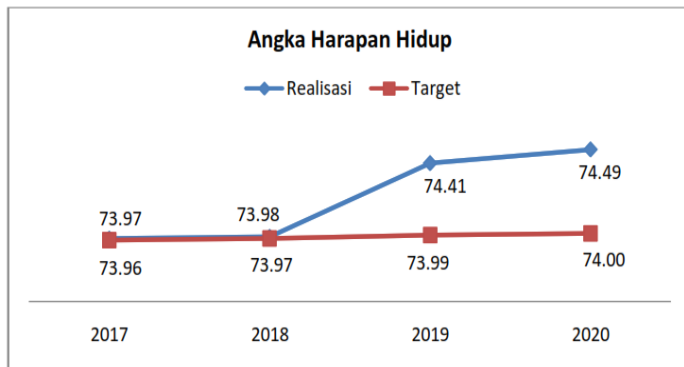
kinerja HLS pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 14,12 tahun.

Berdasarkan peningkatan capaian HLS tersebut, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian target HLS pada tahun 2020. Hal tidak tercapainya target HLS dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jumlah tenaga pengajar tidak berbanding terhadap jumlah siswa di Kota Balikpapan, sehingga hal tersebut menurunkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama. Terkait menurunnya Harapan Lama Sekolah tersebut Pemerintah Kota bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta instansi perlu melakukan pengangkatan tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan dalam rangka memenuhi rasio jumlah tenaga pengajar dan jumlah siswa serta memberdayakan tenaga bantu pengajar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Balikpapan.

### 3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Target indikator kinerja utama Angka usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 74,00 tahun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 74,49 tahun dengan capaian kinerja 100,66% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU UHH tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan di Kota Balikpapan menjelang tahun 2020 (periode 2015-2017) akan dapat hidup sampai 74,49 atau 75 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahn 2028 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 78 tahun, meningkat lagi menjadi 85 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2048, dan bayi yang dilahirkan tahun 2060 usia harapan hidupnya mencapai 90 tahun. Capaian hasil akuntabilitas kinerja AHH pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,08 tahun dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 74,41 tahun.



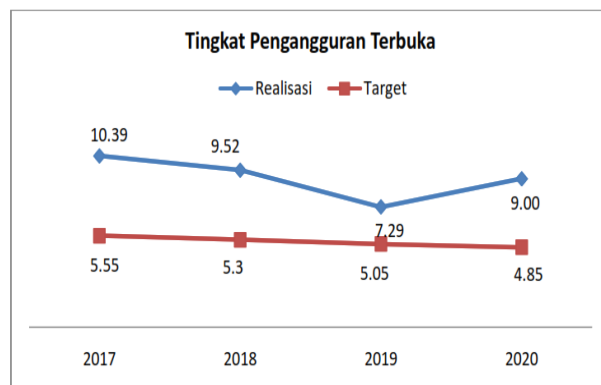
**Gambar 6.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup Tahun 2020**

Capaian IKU Angka Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2019, keberhasilan tersebut

ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik. Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota bersama perangkat daerah terkait perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal tersebut perlu meningkatkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 9% dengan capaian kinerja 53,89% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “KURANG TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TPT tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 - 2021.



**Gambar 6.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa TPT di kota Balikpapan masih tinggi,

hal ini menggambarkan kondisi banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPT pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,71% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 7,29%.

Berdasarkan capaian TPT tersebut menunjukkan penurunan tingkat pengangguran di Kota Balikpapan yang cukup signifikan. Meningkatnya TPT di Kota Balikpapan, disebabkan oleh sejumlah faktor permasalahan ketenagakerjaan di kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Pandemi covid 19 yang berpengaruh signifikan pada penurunan produksi baik barang/jasa diseluruh sektor lapangan usaha di Kota Balikpapan, hal ini

berdampak pada pengurangan pekerja dan PHK yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah perusahaan guna melakukan efisiensi pengeluaran di masa pandemi covid 19.

- b. Pendapatan UMKM yang menurun di masa pandemi covid 19 mengakibatkan tidak sedikit usaha rumah tangga yang tutup.
- c. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa jumlah pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja masih rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2020.
- d. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.
- e. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 4 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2020.
- f. Angkatan kerja yang tersedia kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan.
- g. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, maka pemerintah kota berupaya:

- a. Memberikan bantuan dana kepada UMKM dan usaha rumah tangga.
- b. Meningkatkan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan usaha di Kota Balikpapan.
- c. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sector-sektor lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah seperti UMKM.
- d. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
- e. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
- f. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.
- g. Melaksanakan review dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

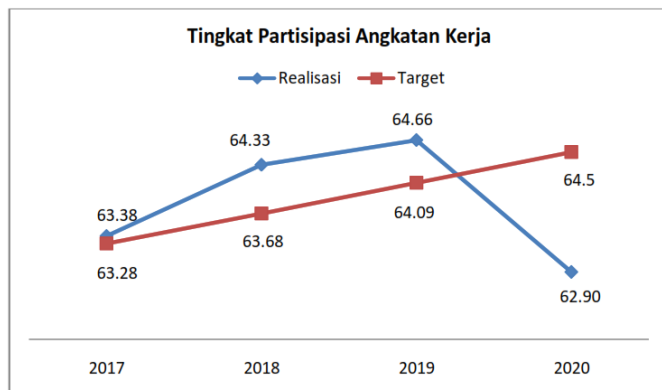
## **5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Target indikator kinerja utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,50% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 62,90%



dengan capaian kinerja 97,52% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TPAK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di kota Balikpapan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPAK pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,76% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 64,66%, hal ini disebabkan oleh *pandemi covid 19* yang memberikan pengaruh langsung terhadap daya tahan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan dan kelayakan hidup masyarakat di Kota Balikpapan.

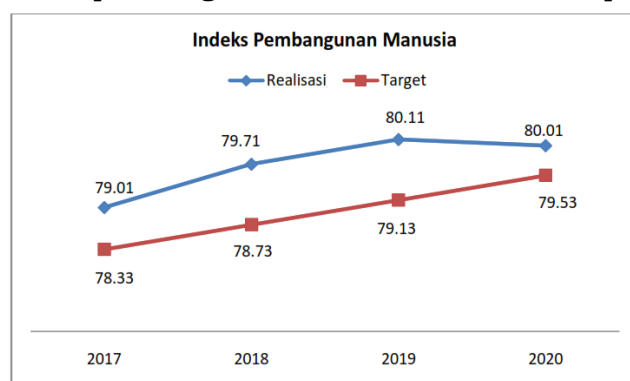


**Gambar 6.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020**

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada : a) Percepatan penanganan pandemic *covid 19* guna meningkatkan partisipasi tenaga kerja, b) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas, c) Meningkatkan Pendidikan, d) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, e) Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, f) Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan, g) Meningkatkan Produksi Pangan dan h) Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,53 sampai dengan akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 80,01% dengan capaian kinerja 100,60% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IPM tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



**Gambar 6.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM maka kualitas hidup manusia dan pembangunan di kota Balikpapan semakin baik. Pencapaian IPM dihasilkan atas nilai dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Capaian hasil akuntabilitas kinerja

IPM pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 80,01%.

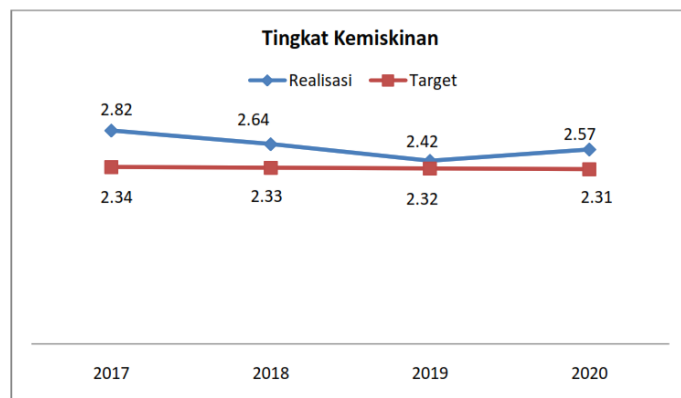
Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2019 adalah:

- Penerapan protokol covid 19, sosialisasi hidup sehat dimasa pandemic dan menekan jumlah kematian pasien yang terpapar covid 19.
- Memperbaiki perekonomian masyarakat yang menurun pendapatannya di masa pandemic covid 19.
- Percepatan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat di Kota Balikpapan.
- Mengoptimalkan dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.
- Meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
- Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kota Balikpapan.

## 7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target indikator kinerja utama Tingkat Kemiskinan (TKm) sebesar 2,31% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 2,57% dengan capaian kinerja 89,88% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TKm tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa masih terdapatnya sejumlah penduduk di kota Balikpapan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TKm pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 2,42%.



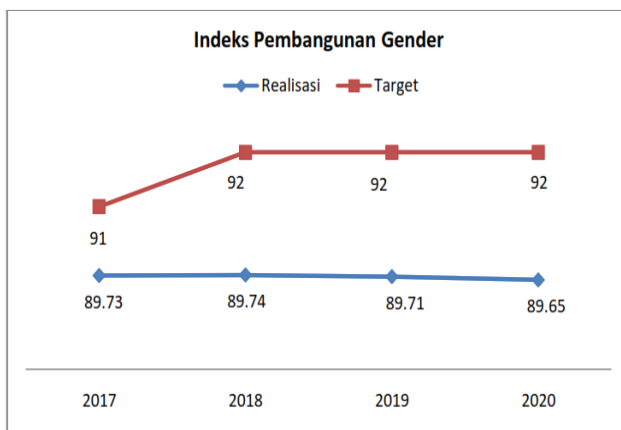
**Gambar 6.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Tahun 2020**

Garis kemiskinan ini didasarkan atas sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, dan sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan kembali meningkat dengan jumlah penduduk miskin menjadi sebanyak 17.020 jiwa atau sebesar 2,57 persen dibanding tahun sebelumnya dengan besaran

jumlah penduduk miskin sebanyak 15.780 jiwa atau 2,42 persen dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,38, Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12 dan Garis Kemiskinan Perkapita Perbulan sebesar Rp. 613.622,-. Berdasarkan data tersebut, faktor penyumbang kemiskinan di Kota Balikpapan didasarkan atas rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sejumlah penduduk kota Balikpapan masih terdapat di bawah Garis Kemiskinan (GK).

### 8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 92 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 89,65 dengan capaian kinerja 97,45% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut



**Gambar 6.8 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020**

perkembangan capaian IKU IPG tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

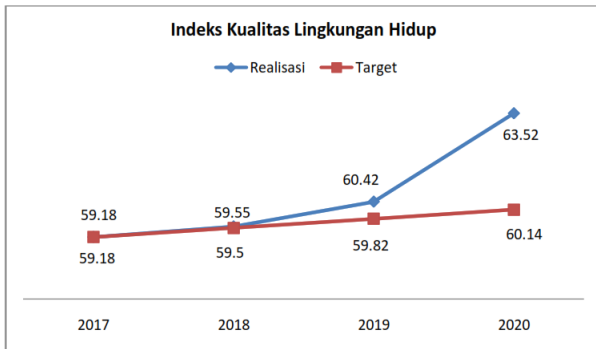
Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 89,65 arti mendekati angka 100, hal ini mengindikasikan semakin kecil

kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IPG pada tahun 2020 mengalami penurunan indeks sebesar 0,06 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 89,71%.

Berdasarkan interpretasi atas hasil akuntabilitas kinerja diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam menurunkan ketimpangan gender di kota Balikpapan berdasarkan capaian 4 tahun terakhir. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangua Gender tahun menunjukkan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Upaya yang telah pemerintah kota Balikpapan lakukan adalah meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi perempuan sebagai kepala Perangkat Daerah dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

### 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,14 sampai dengan



**Gambar 6.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020**

Peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2019 mengarah pada kondisi lingkungan hidup yang cukup baik. Upaya dan tindak lanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 63,52 dengan capaian kinerja 105,62% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IKLH tahun 2017 – 2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

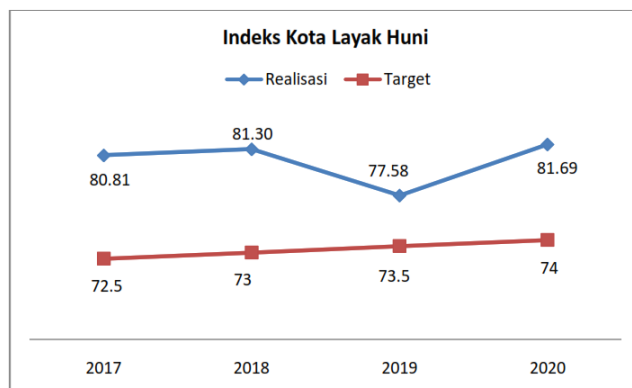
**Tabel 6.4 Tabel Predikat Penilaian IKLH**

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKLH > 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH > 40

Sumber: IKLH 2018, Kemeterian Lingkungan Hidup

### 10. Livable City Index (LCI)

Target IKU Livable City Index (LCI) atau disebut Indeks Kota Layak Huni sebesar 74,00 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 81,69 dengan capaian kinerja 110,39% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU LCI tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



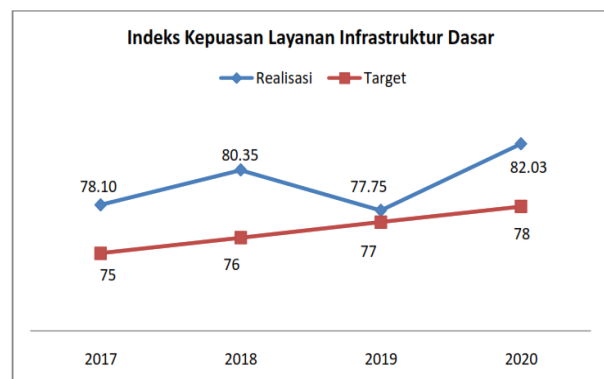
**Gambar 6.10 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Livable City Index Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey LCI pada tahun 2020 yang diukur dari pendapat warga kota tentang kota tempat mereka tinggal dari berbagai aspek seperti air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan pangan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai indeks LCI sebesar 81,69. Berdasarkan capaian LCI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari responden yang disurvei berkaitan atas layanan atas air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan ketersediaan pangan. Berkenaan atas kepuasan respoden tersebut memberikan kesimpulan bahwa kota Balikpapan merupakan “Kota Layak Huni”. Capaian hasil akuntabilitas kinerja LCI pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 3,72 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 4,11.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap penurunan capaian realisasi IKU Livable City Index pada tahun 2019 adalah melakukan peningkatan layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

### 11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID)

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLID) sebesar 78,00 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 82,03 dengan capaian kinerja 105,17% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IKLI tahun 2017 – 2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



**Gambar 6.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey IKLI pada tahun 2020 yang diukur dari pendapat warga kota tentang Kepuasan Layanan Infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai IKLI sebesar 82,03. Berdasarkan capaian IKLI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari sejumlah responden yang disurvei berkaitan layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kota Balikpapan. Terkait dengan kepuasan respoden terhadap layanan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan infrastuktur dinilai cukup baik. Capaian hasil akuntabilitas kinerja



IKLI pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 4,28 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 77,75.

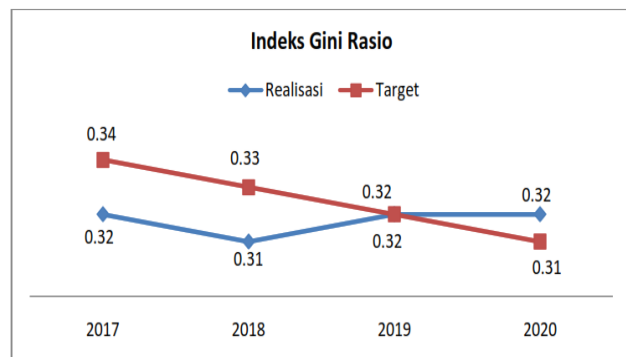
Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi:

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLI pada tahun 2020 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

## 12. Gini Ratio (GR)

Target IKU Gini Ratio (GR) sebesar 0,31 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja 96,88% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Gini Ratio (GR) tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



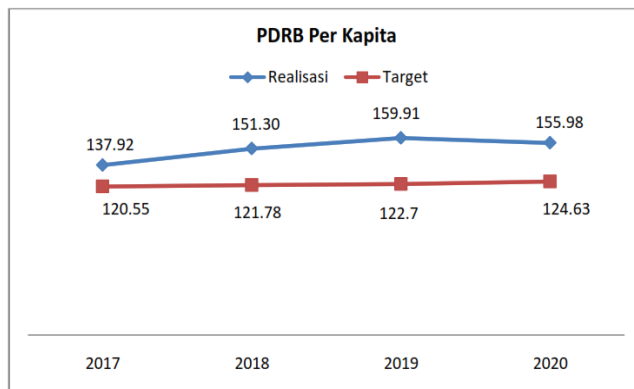
**Gambar 6.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini Ratio Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa Indeks Gini pada Kota Balikpapan bertaraf rendah, artinya pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini didasarkan atas capaian hasil akuntabilitas indikator terhadap kinerja dimana Nilai Gini Ratio berkisar antara  $0 < 0,32 \leq 1$ , Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Terkait dengan nilai capaian 0,32 tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah.

Capaian hasil akuntabilitas kinerja GR pada tahun 2020 sama dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 0,32. Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Gini Ratio pada tahun 2019 adalah a)

Meningkatkan pengendalian dan mengevaluasi tingkat kemiskinan; b) Efektifitas pendistribusian bantuan sosial; c) Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja; d) Menciptakan lapangan kerja baru; dan e) Menciptakan wirausaha secara massal.

### 13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita



**Gambar 6.13 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2020**

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebesar Rp.124,63 Juta sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar Rp. 155,98 Juta dengan capaian kinerja 125,15% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Perkapita tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

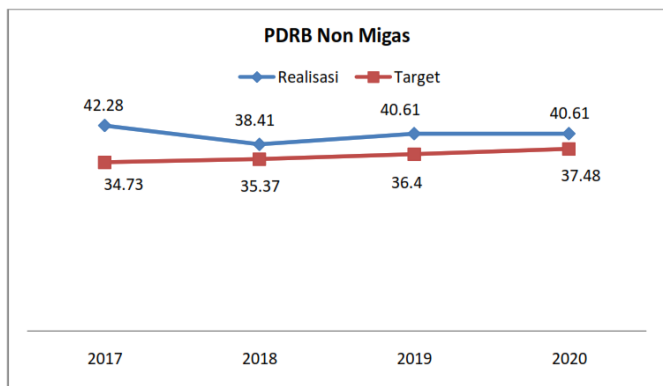
Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kota Balikpapan selama satu tahun sebesar Rp. 155,98 Juta, artinya tingkat kemakmuran di kota Balikpapan semakin meningkat. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2020 melampaui dari target IKU, dipengaruhi adanya sejumlah kegiatan yang berskala nasional seperti pembangunan perluasan kilang minyak dan akses IKN, dan kegiatan-kegiatan, dan event berskala nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Capaian hasil akuntabilitas kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp.3,93 juta dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 159,91 juta. Upaya dan tindaklanjut Pemerintah Kota Balikpapan yang berperan sebagai penyangga Ibu Kota Negara terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2020 adalah:

- Meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
- Menumbuhkan usaha sentra industri mikro, kecil dan menengah.
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal.
- Meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencari kerja lokal.

#### 14. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas sebesar Rp.37,48 Triliun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar Rp. 40,61 Triliun (data 2019 sebagai pembanding dikarenakan BPS secara nasional tidak menghitung lagi untuk PDRB Non Migas). Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas antara target dan realisasi sebesar 108,35%. Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU PDRB Non Migas pada tahun 2020 “TERCAPAI”.



**Gambar 6.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Tahun 2020**

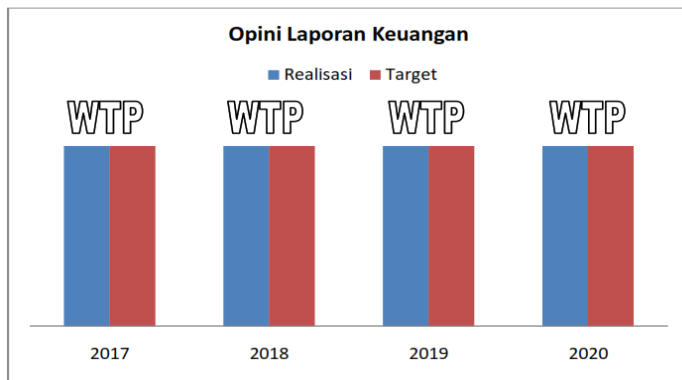
Adapun perkembangan realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas tergambar pada Gambar 6.14.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa terdapat penurunan PDRB non Migas yang dipengarui oleh sejumlah sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa dikarenakan adanya dampak wabah Corona Wuhan di sejumlah negara yang memiliki orientasi hubungan perdagangan barang dan jasa dengan Indonesia. Efek dari wabah corona tersebut berpengaruh besar pada perekonomian nasional terutama pelemahaan ekspor barang dan jasa, pelemahan aktivitas produksi di tiongkok mempengaruhi impor barang dalam negeri sehingga berdampak terhadap konsumsi dalam negeri, dan terbatasnya aktivitas bisnis.

Capaian hasil akuntabilitas kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp. 2,2 triliun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 38,41 triliun. Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah kota Balikpapan;
- b. Meningkatkan kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan;
- c. Mempercepat pengembangan kawasan industri kariatangau dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota Balikpapan;
- d. Pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

### 15. Opini Laporan Keuangan (OLK)



**Gambar 6.15 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Tahun 2020**

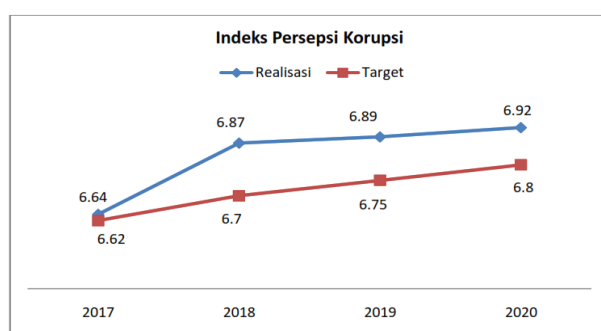
Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU OLK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan hal ini menjadi dasar BPK memberikan opini dengan kategori WTP. Capaian hasil akuntabilitas Opini Laporan Keuangan pada tahun 2020 sama dengan capaian 2019 yaitu WTP.

Upaya dan tidak lanjut mempertahankan opini tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan budaya kerja dengan berorientasi pada akuntabilitas hasil terhadap kinerja dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan.

### 16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 6,80 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 6,92 dengan capaian kinerja 100,29% artinya Kinerja Wali Kota



**Gambar 6.16 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2020**

Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IPK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

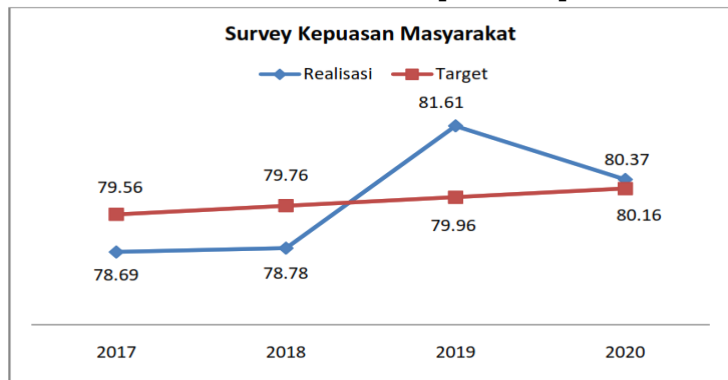
Capaian hasil akuntabilitas Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 0,03 dari capaian 2019 yaitu 6,89. Upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### 17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 80,16% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai hasil IKM sebesar 80,37% dengan capaian kinerja 101,76%

artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU SKM tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey terhadap layanan pada masyarakat Kota Balikpapan, tingkat kepuasan masyarakat

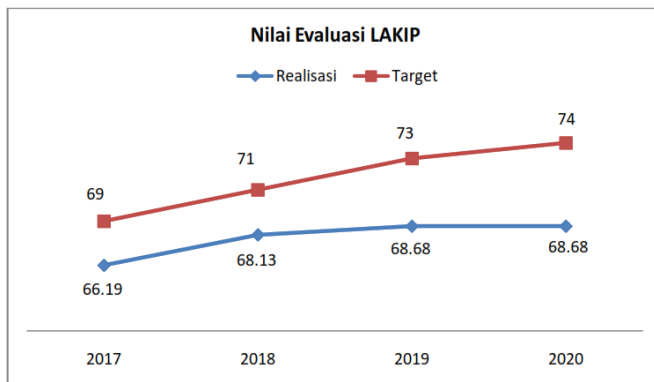


**Gambar 6.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020**

terhadap layanan mencapai 80,37. Capaian ini merupakan gambaran dari hasil konkrit Pemerintah Kota Balikpapan bersama jajaran perangkat daerah dalam memberikan layanan fasilitas umum yang prima bagi masyarakat sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian hasil akuntabilitas SKM pada tahun 2020 mengalami penurunan indeks sebesar 1,24 dari capaian 2019 yaitu 81,61. Penurunan SKM disebabkan adanya pandemi covid 19 yang melanda kota Balikpapan sehingga secara langsung memberikan pengaruh terhadap layanan publik. Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitas umum ditekankan pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang kurang tepat menempatkan dagangannya pada setiap kawasan pasar di Kota Balikpapan. Selain itu melakukan rehabilitas fasilitas lapak dagang dan meningkatkan tipe pasar tradisional serta pengelolaan lahan parkir pada pasar.

**18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**



**Gambar 6.18 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2020**

Pemerintah Kota Balikpapan) dengan capaian kinerja 92,81% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 74,00 dengan BB sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 68,68 dengan predikat B (data 2019 sebagai pembanding dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan nilai hasil evaluasi AKIP kepada

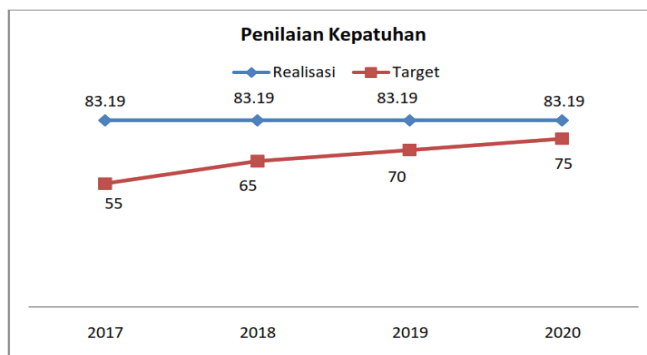


capaian IKU AKIP tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa tidak tercapainya target AKIP menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### 19. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 75 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 83,19 (zona hijau) dengan capaian kinerja 110,92% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Penilaian Kepatuhan tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



**Gambar 6.19 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Penilaian Kepatuhan Tahun 2020**

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan

Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah

Capaian hasil akuntabilitas Penilaian Kepatuhan pada tahun 2020 sama dengan capaian 2019 yaitu 83,19. Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

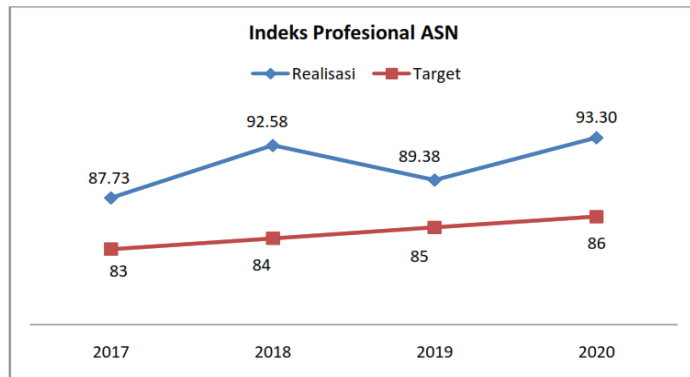
- Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan.
- Mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

### 20. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 86 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 93,30 dengan capaian kinerja 108,49% artinya Kinerja Wali Kota

Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa hal ini menggambarkan bahwa ASN telah terdistribusi berdasarkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu pada organisasi perangkat daerah serta terjaminnya



**Gambar 6.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020**

keselarasan job description dengan latar belakang pendidikan ASN per Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan meningkat sebesar 3,92 dari capaian kinerja tahun 2019 sebesar 89,39.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- a. Mengoptimalkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
- b. Memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan dokumen yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dokumen ini disusun setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, khususnya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2022 yang didahului dengan penjabaran RKPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda Litbang Kota Balikpapan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2022 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS dan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2022 guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seluruh *stakeholders* pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai



program/kegiatan pembangunan tahun 2022. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2022 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Balikpapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Balikpapan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YEMMIE HENDRAWAN PUTRA